

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Kabupaten Natuna mengawali penerapan pelaksanaan basis akrual pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan kebijakan akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Penyajian Laporan Keuangan disajikan dalam Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2024.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Natuna.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 357);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 68).

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 (tujuh) bab yaitu:

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2 Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

7.2.2 Kebijakan Keuangan

- 7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
- 7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
 - 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 7.4 Kebijakan Akuntansi**
 - 7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah
- 7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah.

 - 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 7.5.1.2 Belanja
 - 7.5.1.3 Transfer
 - 7.5.1.4 Surplus/Defisit-LRA
 - 7.5.1.5 Pembiayaan
 - 7.5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih awal
 - 7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
 - 7.5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 7.5.3 Neraca
 - 7.5.3.1 Aset Lancar
 - 7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 7.5.3.3 Aset Tetap
 - 7.5.3.4 Aset lainnya
 - 7.5.3.5 Kewajiban

- 7.5.3.6 Ekuitas
- 7.5.4 Laporan Operasional
 - 7.5.4.1 Pendapatan-LO
 - 7.5.4.2 Beban-LO
 - 7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi
- 7.5.5 Laporan Arus Kas
 - 7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 7.5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas
 - 7.5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
 - 7.5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
- 7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7.5.6.1 Ekuitas awal
 - 7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO
 - 7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 7.5.6.4 Ekuitas Akhir
- 7.5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya.
- 7.6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**
 - 7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas
 - 7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02
- 7.7 Penutup**

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

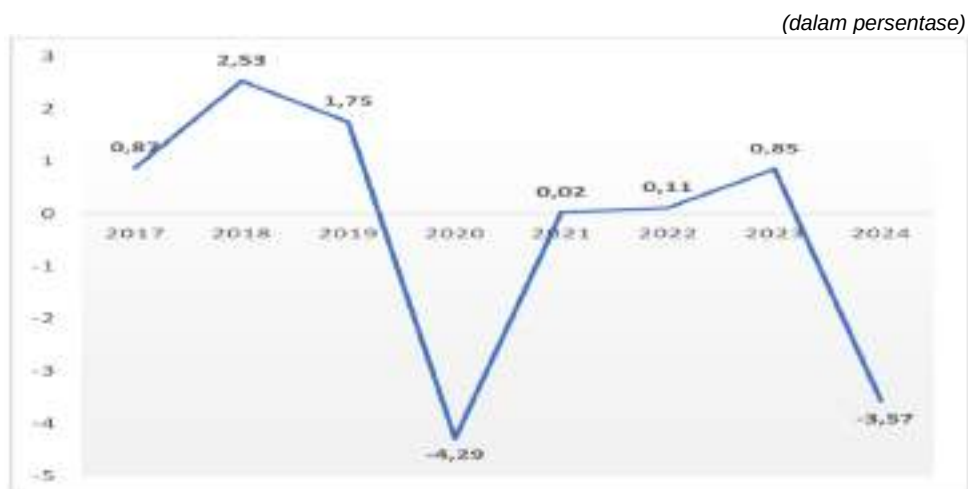
Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tenteram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya atau kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2024 mencapai 14,26 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 3,6 persen atau sekitar 0,53 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 14,79 triliun rupiah. Berdasarkan harga berlaku, angka PDRB juga mengalami penurunan yang cukup tinggi, yakni dari 23,51 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 22,69 triliun rupiah pada tahun 2024.

Selama lima tahun terakhir (2020–2024) struktur perekonomian Kabupaten Natuna didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kategori Konstruksi, sementara peranan kategori lainnya berkontribusi di bawah 5 persen. Sedangkan menurut pengeluaran, distribusi paling besar terdapat pada jenis pengeluaran Ekspor Neto barang dan jasa. Pengeluaran terbesar kedua adalah pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kabupaten natuna mengalami kontraksi sebesar -3,57 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis lapangan usaha, kontraksi tersebar terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar -6,12 persen dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 7.2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Natuna, 2017–2024



Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna , 2020–2024

(dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.455,46	2.571,67	2.789,30	3.013,40	3.094,54
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	12.287,84	14.613,86	17.578,94	16.352,30	15.232,60
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	166,70	171,80	178,45	184,39	195,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	17,27	17,37	18,02	19,16	21,06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,17	1,28	1,34	1,40	1,35
F	Konstruksi/Construction	1.664,05	1.624,56	1.685,34	1.824,59	1.849,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	716,83	747,51	813,64	890,22	992,28
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	126,28	128,16	155,40	167,46	161,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	101,04	105,92	111,92	117,97	130,13
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	147,41	157,75	165,13	168,97	170,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	30,75	30,20	31,92	33,16	34,59
L	Real Estat/Real Estate Activities	139,15	147,07	155,65	166,99	181,23
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	428,20	421,26	441,37	423,21	473,69
P	Jasa Pendidikan/Education	43,12	45,65	47,79	49,11	51,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	66,25	71,38	75,40	77,93	83,48
R,S,T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	14,35	14,68	15,76	16,91	18,26
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		18.405,91	20.870,16	24.265,43	23.507,24	22.692,67
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas/Gross Regional Domestic Product without Oil and Gas		6.145,66	6.285,25	6.716,39	7.187,08	7.494,09

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Tabel 7.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2020–2024

(dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.684,27	1.711,79	1.768,01	1.838,69	1.860,38
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	10.488,44	10.486,60	10.385,84	10.362,92	9.728,94
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	114,67	115,98	117,37	117,40	120,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	11,50	11,55	11,91	12,65	13,45
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,98	1,06	1,10	1,13	1,13
F	Konstruksi/Construction	1.115,27	1.064,91	1.070,33	1.113,38	1.122,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	448,48	456,69	478,21	496,47	525,96
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	78,48	79,36	88,67	92,86	90,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	69,12	72,09	74,78	77,37	79,69
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	130,68	140,38	146,32	146,44	146,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	20,98	21,08	21,43	22,04	22,55
L	Real Estat/Real Estate Activities	105,77	110,52	114,41	118,10	126,17
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	293,62	289,00	296,07	298,23	327,07
P	Jasa Pendidikan/Education	24,82	25,92	26,73	26,89	28,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	45,86	48,62	50,37	50,89	53,64

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Health and Social Work Activities					
R,S,T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	9,79	9,82	10,17	10,63	11,04
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		14.642,75	14.645,40	14.661,76	14.786,10	14.258,64
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas/Gross Regional Domestic Product without Oil and Gas		4.172,56	4.177,77	4.294,83	4.442,93	4.550,42

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Tabel 7.2.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2020–2024

(dalam persen)

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	13,34	12,32	11,49	12,82	13,64
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	66,76	70,02	72,44	69,56	67,13
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	0,91	0,82	0,74	0,78	0,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,09	0,08	0,07	0,08	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/Construction	9,04	7,78	6,95	7,76	8,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3,89	3,58	3,35	3,79	4,37
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	0,69	0,61	0,64	0,71	0,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,55	0,51	0,46	0,50	0,57
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0,80	0,76	0,68	0,72	0,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,17	0,14	0,13	0,14	0,15
L	Real Estat/Real Estate Activities	0,76	0,70	0,64	0,71	0,80
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	2,33	2,02	1,82	1,80	2,09
P	Jasa Pendidikan/Education	0,23	0,22	0,20	0,21	0,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,36	0,34	0,31	0,33	0,37
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,08	0,07	0,06	0,07	0,08
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas/Gross Regional Domestic Product without Oil and Gas		33,39	30,12	27,68	30,57	33,02

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Tabel 7.2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2020–2024

(dalam persen)

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	-2,38	1,63	3,28	4,00	1,18
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-4,82	-0,02	-0,96	-0,22	-6,12
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1,68	1,14	1,20	0,02	3,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	1,49	0,39	3,17	6,16	6,34
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	3,75	8,43	3,32	3,43	0,05
F	Konstruksi/Construction	-5,06	-4,52	0,51	4,02	0,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-4,75	1,83	4,71	3,82	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-22,09	1,12	11,74	4,72	-2,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-5,05	4,31	3,72	3,46	3,01
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	8,34	7,42	4,23	0,08	0,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3,31	0,48	1,67	2,82	2,33

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
L	Real Estat/Real Estate Activities	3,50	4,50	3,52	3,22	6,83
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-8,13	1,19	8,23	1,99	-1,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,49	-1,58	2,45	0,73	9,67
P	Jasa Pendidikan/Education	-0,36	4,46	3,11	0,61	4,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-0,95	6,01	3,61	1,02	5,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-0,40	0,31	3,60	4,46	3,86
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-4,29	0,02	0,11	0,85	-3,57
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas/Gross Regional Domestic Product without Oil and Gas		-2,93	0,12	2,80	3,45	2,42

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Tabel 7.2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2020–2024

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Type of Expenditure	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	3.976,34	4.071,54	4.383,31	4.861,29	5.306,18
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH Consumption Expenditure	12,88	12,82	13,11	14,82	16,14
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	1.998,92	1.949,05	1.969,88	2.065,63	2.088,02
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	3.524,37	3.421,21	3.722,58	4.036,86	4.466,71
Perubahan Inventori Changes in Inventories	8,53	36,58	211,42	16,84	17,24
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	8.884,87	11.378,96	13.965,12	12.511,79	10.798,38
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	18.405,91	20.870,16	24.265,43	23.507,24	22.692,67

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Tabel 7.2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2020–2024

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Type of Expenditure	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	2.636,34	2.671,24	2.790,76	2.897,64	3.011,79
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH Consumption Expenditure	7,83	7,76	7,86	8,56	9,12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	1.205,95	1.152,53	1.162,18	1.167,13	1.171,20
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	2.210,33	2.103,87	2.173,41	2.241,65	2.445,87
Perubahan Inventori Changes in Inventories	4,70	17,86	99,15	7,51	7,42
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	8.577,61	8.692,15	8.428,40	8.463,61	7.613,24
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	14.642,75	14.645,40	14.661,76	14.786,10	14.258,64

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

1. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam %. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Secara umum tingkat pengangguran dipengaruhi oleh:

a. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni), pertengahan tahun 2025 berjumlah 86,76 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,71 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 105 hingga 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2025), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 1,35 persen per tahun.

Sebagai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP2020, maka hanya terdapat data kependudukan untuk 15 kecamatan. Untuk Kecamatan Seluan masih tergabung dengan Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Pulau Panjang masih tergabung dengan Kecamatan Subi. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 29,98 ribu jiwa atau setara dengan 34,56 persen dari total penduduk. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2025 yaitu 0,04 ribu jiwa/km². Meskipun jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bunguran Timur, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 0,27 ribu jiwa/km². Di sisi lain, Kecamatan Bunguran Utara menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sebesar 0,01 ribu jiwa/km².

Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Natuna didominasi kelompok umur muda yaitu umur 0-4 tahun sebanyak 7,69 ribu jiwa, umur 5-9 tahun sebanyak 7,77 ribu jiwa, 10-14 sebanyak 7,85 ribu jiwa, umur 15-19 sebanyak 7,42 ribu jiwa, dan umur 20-24 tahun sebanyak 7,63 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk terendah berada dalam kelompok umur 75 tahun ke atas hanya sebesar 1,40 ribu jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Natuna lebih banyak daripada penduduk perempuan yaitu sebesar 44,58 ribu jiwa (51,38 persen).

Rasio Ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2025 adalah 48,70. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 48 sampai 49 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Usia non produktif terdiri atas usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia yang dianggap tidak produktif lagi (65+ tahun).

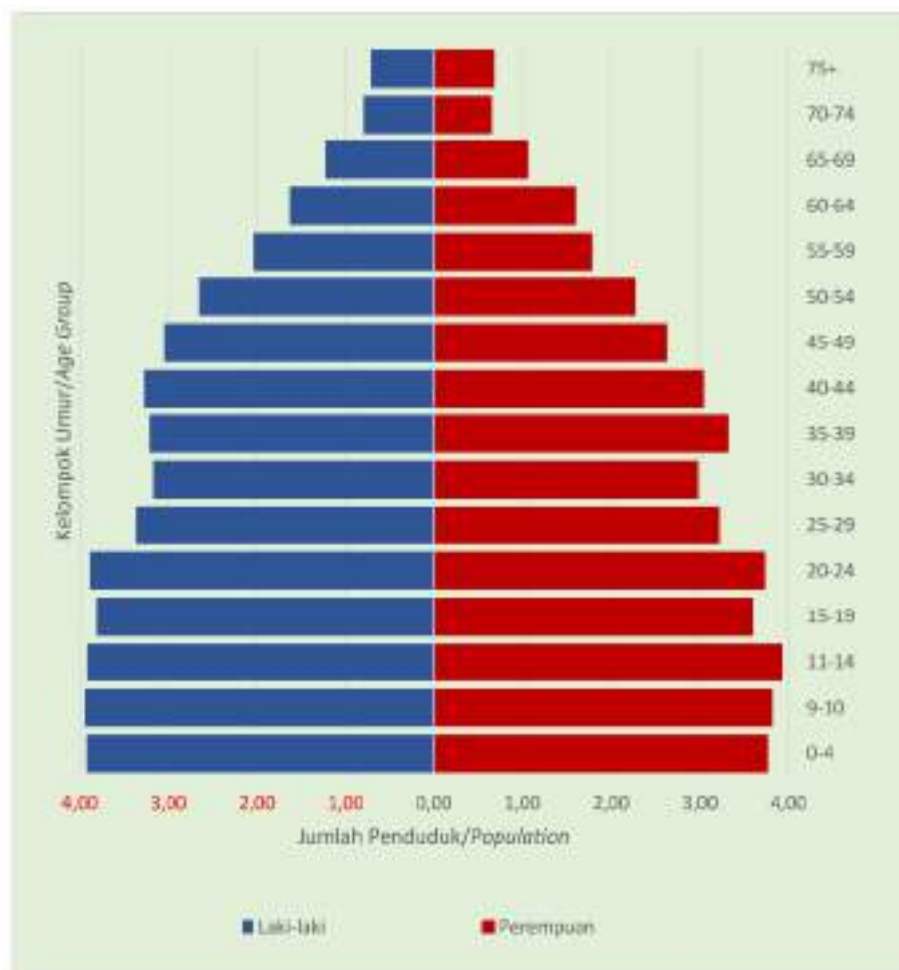
b. Ketenagakerjaan

Berbicara mengenai penduduk tidak akan terlepas dengan berbagai masalah kependudukan, salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang tersedia. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja.

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar 72,85 persen atau meningkat sebesar 0,42 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja.

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, TPT Kabupaten Natuna sebesar 3,89 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dibandingkan tahun 2023.

Gambar 7.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna Tahun 2024



Tabel 7.2.7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk, Menurut Kecamatan Tahun 2020-2025

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) <i>Population (thousand people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>
		2020-2025
(1)	(2)	(3)
Midai	3,68	0,53
Suak Midai	1,72	-0,15
Bunguran Barat	8,23	1,03
Bunguran Utara	4,81	1,33
Pulau Laut	2,35	0,33
Pulau Tiga	4,10	2,00
Bunguran Batubi	3,80	-0,32
Pulau Tiga Barat	2,18	0,74
Pulau Seluan	... ¹	... ¹
Bunguran Timur	29,98	1,61
Bunguran Timur Laut	5,86	1,83
Bunguran Tengah	4,09	2,22
Bunguran Selatan	3,75	2,39
Serasan	5,56	1,19
Subi	3,26	1,36
Serasan Timur	3,39	1,22
Pulau Panjang	... ²	... ²
Natuna	86,76	1,35

Tabel 7.2.8 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2025

Kecamatan <i>District</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk (ribu jiwa/km ²) <i>Population Density (thousand people)</i>
	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)
Midai	4,24	0,27
Suak Midai	1,98	0,14
Bunguran Barat	9,49	0,03
Bunguran Utara	5,54	0,01
Pulau Laut	2,71	0,06
Pulau Tiga	4,73	0,10
Bunguran Batubi	4,38	0,02
Pulau Tiga Barat	2,51	0,13
Pulau Seluan	... ¹	... ¹
Bunguran Timur	34,56	0,20
Bunguran Timur Laut	6,75	0,02
Bunguran Tengah	4,71	0,05
Bunguran Selatan	4,32	0,02
Serasan	6,41	0,12
Subi	3,76	0,02
Serasan Timur	3,91	0,12
Pulau Panjang	... ²	... ²
Natuna	100,00	0,04

Tabel 7.2.9 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2025

Kecamatan <i>District</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(2)
Midai	103,76
Suak Midai	104,77
Bunguran Barat	106,47
Bunguran Utara	109,44
Pulau Laut	100,51
Pulau Tiga	110,75
Bunguran Batubi	109,48
Pulau Tiga Barat	103,55
Pulau Seluan	... ¹
Bunguran Timur	102,68
Bunguran Timur Laut	106,78
Bunguran Tengah	106,00
Bunguran Selatan	122,41
Serasan	107,00
Subi	100,55
Serasan Timur	107,16
Pulau Panjang	... ²
Natuna	105,71

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)

Tabel 7.2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna Tahun 2025

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Amount</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	3,92	3,77	7,69
5-9	3,95	3,82	7,77
10-14	3,91	3,94	7,85
15-19	3,81	3,61	7,42
20-24	3,88	3,74	7,63
25-29	3,37	3,22	6,59
30-34	3,17	2,99	6,16
35-39	3,21	3,33	6,55
40-44	3,27	3,05	6,31
45-49	3,05	2,64	5,69
50-54	2,65	2,27	4,92
55-59	2,03	1,79	3,82
60-64	1,63	1,60	3,23
65-69	1,23	1,07	2,30
70-74	0,79	0,65	1,44
75+	0,71	0,68	1,40
Natuna	44,58	42,18	86,76

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran standar pembangunan manusia yang ditetapkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation Development Programme (UNDP). IPM sendiri bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ketiga dimensi dasar yang membentuk IPM terdiri atas Umur Panjang dan Hidup Sehat yang dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Pengetahuan yang dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Standar Hidup Layak yang dapat dilihat dari Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

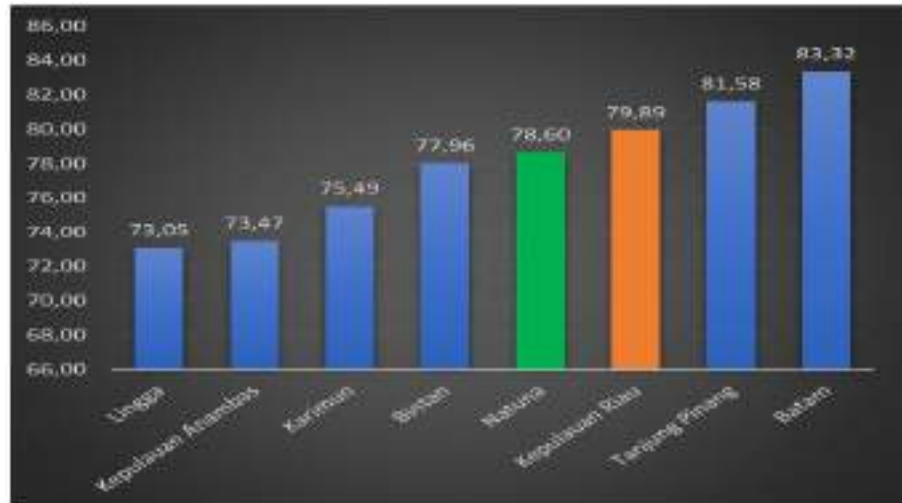
Pada tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau mencapai 2.213,46 ribu jiwa. Kota Batam menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 58,59 persen dari total penduduk. Di sisi lain, Kabupaten Natuna merupakan kabupaten dengan penduduk terendah kedua setelah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah penduduk sebanyak 86,76 ribu jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar 4,17 ribu jiwa atau setara dengan 5,04 persen dari jumlah penduduk. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Natuna mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,13 ribu orang. Secara umum, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 138,30 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin juga turut terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 2020-2024. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi kepulauan Riau. Pada tahun 2024, Kota Batam merupakan kabupaten/kota dengan IPM tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 83,32, sedangkan Kabupaten Lingga memiliki IPM terendah yaitu sebesar 73,05. Kabupaten Natuna berada di peringkat ketiga dari tujuh kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan IPM sebesar 78,60 atau berstatus “tinggi”. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,37 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Natuna senantiasa menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan bahkan menempati peringkat ketiga di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 7.2.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2024





Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia,

Tabel 7.2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021–2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
<i>Kabupaten/Regency</i>					
Karimun	254,96	257,80	260,60	263,34	266,01
Bintan	161,18	163,56	165,89	168,19	170,46
Natuna	82,28	83,43	84,56	85,66	86,76
Lingga	99,02	100,03	101,03	102,01	102,95
Kepulauan Anambas	47,78	48,44	49,09	49,73	50,36
<i>Kota/Municipality</i>					
Batam	1.215,14	1.236,01	1.256,61	1.276,93	1.296,96
Tanjung Pinang	229,54	232,20	234,84	237,43	239,96
Kepulauan Riau	2.089,89	2.121,48	2.152,63	2.183,29	2.213,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Penerimaan Daerah dalam struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1) dana perimbangan;
 - 2) dana otonomi khusus;
 - 3) dana keistimewaan; dan

- 4) dana Desa.
- b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
 - 1) pendapatan bagi hasil; dan
 - 2) bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan/atau
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan serangkaian langkah, strategi, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola serta meningkatkan sumber pendapatan yang tersedia bagi daerah tersebut. Kebijakan pendapatan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Kebijakan ini haruslah didasarkan pada analisis yang cermat terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik daerah, serta harus diimplementasikan secara transparan dan akuntabel. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah menjadi sumber keuangan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam peningkatan pendapatan daerah dari beberapa sumber bukan hanya dari Pendapatan Daerah (PAD) tetapi ditambah dari dana transfer pemerintah pusat seperti Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun non fisik, Dana Desa, Dana Insentif Daerah (DID) dan Hibah. Sedangkan dana transfer pemerintah provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Tanah serta Pajak Rokok. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan pendapatan yang realistis berdasarkan estimasi pendapatan dari berbagai sumber. Perencanaan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi potensi pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan untuk mendukung pembangunan serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat.

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan bagian integral dari manajemen keuangan pemerintah daerah yang baik. Dengan melakukan pengelolaan pendapatan secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan up dating data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam peningkatan pendapatan daerah dari beberapa sumber bukan hanya dari Pendapatan Daerah (PAD) tetapi ditambah dari dana transfer pemerintah pusat seperti Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun non fisik, Dana Desa, Dana Insentif Daerah (DID) dan Hibah. Sedangkan dana transfer pemerintah provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Tanah serta Pajak Rokok. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan pendapatan yang realistis berdasarkan estimasi pendapatan dari berbagai sumber. Perencanaan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi potensi pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan untuk mendukung pembangunan serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah merupakan bagian integral dari manajemen keuangan pemerintah daerah yang baik. Dengan melakukan pengelolaan pendapatan secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

1) Analisis Potensi Pendapatan:

Pemerintah daerah telah melakukan analisis terhadap potensi pendapatan pajak dan retribusi. Ini meliputi identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi tinggi untuk dikenakan pajak atau retribusi, serta penilaian terhadap tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Analisis Potensi Pendapatan juga dilakukan dengan cara memperbaiki data potensi perpajakan dengan melakukan *updating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)

2) Revisi Peraturan Perpajakan dan Retribusi.

Pemerintah daerah telah merevisi peraturan perpajakan dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan tarif retribusi. Hal ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan tarif pajak dengan inflasi atau perkembangan ekonomi, serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan.

3) Penyuluhan dan Sosialisasi

Telah melakukan kampanye penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi secara tepat waktu serta konsekuensinya bagi pembangunan daerah. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang manfaat yang mereka dapatkan dari pembayaran pajak dan retribusi dalam penyediaan layanan publik melalui berbagai chanel promosi seperti media online dan media offline seperti memasang baliho. Selain itu juga dilakukan peningkatan SDM pengelola pajak dengan memberi pengetahuan tentang pemeriksaan pajak.

4) Peningkatan Administrasi Pajak dan Retribusi

Dalam usaha meningkatkan efisiensi dalam administrasi pajak dan retribusi dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah. Ini meliputi penerapan teknologi informasi dalam pemungutan pajak, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pajak dan retribusi serta pembayaran pajak dengan mekanisme memperbanyak *channel* pembayaran secara non tunai.

5) Penegakan Hukum

Akan dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dan retribusi secara tegas dapat menjadi deteren bagi pelaku yang ingin menghindari kewajiban perpajakan bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja. Pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme yang efektif dalam mendeteksi, menindak, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dan retribusi.

6) Kemitraan dengan Pihak Swasta

Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Pemerintah daerah akan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan atau perusahaan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pembayaran pajak dan retribusi.

7) Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkat PAD adalah dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pajak. Adapun sarana yang telah disiapkan *taping box* yang diperoleh dari Bank Riau Kepri sebagai sarana untuk wajib pajak melakukan perekaman transaksi penjualan.

b. Kebijakan Eksternal

1) Perubahan Kebijakan Pusat.

Pemerintah pusat telah memberikan dukungan dalam bentuk perubahan kebijakan perpajakan yang menguntungkan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam peningkatan alokasi bagi hasil pajak, pemberian insentif fiskal, atau penyesuaian regulasi perpajakan yang mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.

2) Pengembangan Kerjasama Antar Daerah.

Pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan daerah lain untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi. Kerjasama antar daerah meliputi koordinasi dengan dilakukan pertukaran informasi.

3) Kemitraan dengan Sektor Swasta.

Pemerintah daerah telah melakukan kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi. Seperti bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem pembayaran pajak dan retribusi yang lebih efisien dan mudah diakses oleh Masyarakat berbasis elektronik.

4) Pendidikan dan Sosialisasi.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi telah dilakukan melalui program pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan media massa. Disamping itu juga dilakukan dengan Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang juga memberikan dukungan dalam bentuk kampanye nasional yang meningkatkan kesadaran pajak serta pertukaran data.

5) Peningkatan Literasi Keuangan.

Peningkatan literasi keuangan di masyarakat juga turut membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi. Pemerintah daerah telah menyelenggarakan program-program literasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan melalui sosialisasi kepada ASN maupun masyarakat.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah.
- b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak.
- c. Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat.
- d. Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- e. Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi.
- f. Percepatan penyerapan anggaran khusus kegiatan earmarked seperti DAK Fisik dan Non Fisik, DID dan DAU yang sudah ditentukan peruntukannya.

- g. Penandaan belanja daerah untuk kemiskinan ekstrem dan stunting dalam upaya untuk mendapatkan Dana Insentif Tahun Berjalan.
- h. Koordinasi penyaluran Kurang Bayar DBH dari secara TDF atau Non Tunai untuk disalurkan ke daerah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran belanja mengacu ke tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Misi ke 1: Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM

Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya pengamalan agama didalam masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/ Madrasah Yang Aktif (Persen)	62
Meningkatnya ketahanan budaya	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	17,33

Tujuan 2: Peningkatan SDM untuk menunjang peningkatan daya saing wilayah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan literasi (Indeks)	77
	Indeks Pendidikan (Persen)	18,35
Meningkatnya kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan (Indeks)	0,700
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	91,88

Misi ke 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Tujuan 3: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2,89
Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Indeks Pengeluaran (Juta/Rupiah)	15.641
Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dalam PDRB (Persen)	3,81
Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata	LPE Sektor Pariwisata Dalam PDRB (Persen)	3
Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	354
Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB (Persen)	3,62

Misi ke 3: Menciptakan Kawasan Perbatasan Yang Aman, Strategis dan Eksotis

Tujuan 4: Pengelolaan Kawasan Perbatasan Yang Aman

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminal (Persen)	4,27
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan (Persen)	19,98
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan (Persen)	45

Misi ke 4: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Yang Tertib dan Teratur

Tujuan 5: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur (Persen)	74,74
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan (Indeks)	76,02
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten (Persen)	80,40

Misi ke 5: Menciptakan Kualitas, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Tujuan 6: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air (Persen)	56,90
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Persen)	74,33
	Indeks Kualitas Udara (Persen)	86,16

Misi ke 6: Reformasi Birokrasi Yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)

Tujuan 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	63,00

Misi ke 7: Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan 8: Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi semua sektor

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan (Nilai)	69

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Tahun 2024 kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penganggaran Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) Pelampauan penerimaan PAD;
- b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) Pelampauan penerimaan pembiayaan;
- e) Penghematan belanja;
- f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan; dan / atau
- g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain.

7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagai tindaklanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan DPRD tentang Kebijakan umum Perubahan APBD Kabupaten Natuna tahun 2024 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2024.

1. Pendapatan

Target kinerja pendapatan pada tahun 2024 tergolong sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp1.309.442.057.434,61 dan terealisasi sebesar Rp972.909.236.075,86 atau 74,30% dibandingkan pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.275.091.033.815,11 dan terealisasi sebesar Rp1.333.507.226.175,09 atau 104,58%. Pada tahun 2024 terjadi penurunan Pendapatan sebesar Rp(360.597.990.099,23) atau sebesar 27.041% berbanding tahun sebelumnya.

2. Belanja

Belanja Tahun Anggaran 2024, dianggarkan sebesar Rp1.473.414.715.900,00 terealisasi sebesar Rp1.132.775.011.078,58 atau sebesar 76,88% dibandingkan dengan belanja pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.280.058.659.612,00 terealisasi sebesar Rp1.174.496.509.506,59 atau sebesar 91,751%. Pada tahun 2024 terjadi penurunan Belanja sebesar Rp(41.721.498.428,01) atau sebesar (3,68)% berbanding tahun sebelumnya. Rendahnya penyerapan realisasi belanja tahun 2024 diakibatkan tidak tercapainya target pendapatan sehingga banyak tagihan belanja tidak terbayarkan sampai 31 Desember 2024.

Rendahnya penyerapan tidak terlalu berpengaruh terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam lapaoran evaluasi RKPD Tahun 2024. Pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 tercermin dari indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan indikator sasaran Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif memiliki realisasi kinerja 47,91% pada akhir Tahun 2024 dan capaian kinerja sebesar 77,27%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan mendukung sasaran.
2. Indikator Tujuan Persentase Pelestarian Kebudayaan dengan sasaran meningkatnya ketahanan budaya berdasarkan indikator sasaran Persentase Aktualisasi Budaya Daerah diperoleh realisasi kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 17,2% dan capaian sebesar 99,25%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan untuk mendukung target indikator sasaran.
3. Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas Pendidikan berdasarkan indikator sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diperoleh realisasi kinerja sebesar 74,48 pada Triwulan IV Tahun 2024 dan capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki minat literasi.
4. Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas Pendidikan berdasarkan indikator sasaran berdasarkan indikator sasaran Indeks Pendidikan diperoleh realisasi kinerja sebesar 18,4% pada Triwulan IV Tahun 2024 dan sudah mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 18,4%.
5. Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan berdasarkan Indeks Kesehatan diperoleh capaian kinerja indikator sasaran indeks kesehatan sebesar 100,00% dengan nilai realisasi kinerja 0,7 sesuai dengan target kinerja sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Natuna sudah terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
6. Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan berdasarkan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender memperoleh realisasi kinerja 91,86 dengan capaian kinerja indikator sasaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 99,98% dari target kinerja indikator sasaran yang ditetapkan sebesar 91,88.

7. Indikator tujuan Angka Kemiskinan berdasarkan sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki realisasi sebesar 3,98 dengan capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa indikator sasaran sudah mendukung tercapainya tujuan dan sasaran.
8. Indikator Tujuan Angka Kemiskinan berdasarkan sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pengeluaran terealisasi sebesar 15410 dan capaian kinerja sebesar 98,52% menunjukkan bahwa belum sepenuhnya tercapai target indikator sasaran yang mendukung tujuan.
9. Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan sasaran meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan dengan indikator sasaran LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dalam PDRB diperoleh nilai realisasi sebesar 5,65% dengan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100,00% menunjukkan bahwa target indikator sasaran sudah tercapai dengan baik.
10. Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata dengan indikator sasaran LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB diperoleh realisasi sebesar 5,24 dan capaian kinerja adalah 100% menunjukkan bahwa target indikator sasaran telah tercapai dengan baik.
11. Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan sasaran Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat, Aman dan Kondusif dengan indikator sasaran Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) diperoleh realisasi kinerja yaitu 564,62 Milyar rupiah menunjukkan bahwa pemerintah Natuna berhasil mencapai target indikator sasaran.
12. Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan dengan indikator sasaran LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB diperoleh realisasi sebesar 0,78 dan capaian kinerja adalah sebesar 27,27%. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya target indikator sasaran.
13. Untuk capaian indikator sasaran LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB diperoleh nilai 3,82% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% menunjukkan telah tercapainya target indikator sasaran yang mendukung indikator tujuan.
14. Indikator Tujuan Angka Kriminalitas berdasarkan sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator sasaran Persentase Angka Kriminalitas diperoleh nilai 5,04 dan capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa angka kriminalitas di kabupaten Natuna dapat ditekan, sehingga terjadi penurunan angka kriminalitas pada Triwulan IV Tahun 2024.
15. Indikator tujuan Persentase Pembangunan Kawasan Strategis Perbatasan berdasarkan sasaran Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata dengan indikator sasaran Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan diperoleh realisasi kinerja sebesar 25,00 dan capaian realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa indikator sasaran mampu mendukung Indikator tujuan pada Triwulan IV Tahun 2024.

16. Indikator tujuan Persentase Pembangunan Kawasan Strategis Perbatasan berdasarkan sasaran Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan indikator sasaran Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan diperoleh realisasi sebesar 44,74 dan capaian kinerja sebesar 99,42 menunjukkan belum sepenuhnya indikator sasaran yang mendukung indikator tujuan.
17. Indikator tujuan Indeks Infrastruktur berdasarkan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur diperoleh realisasi 78,53 dan capaian kinerja sebesar 100% yang disebabkan oleh adanya upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pusat-pusat ekonomi.
18. Indikator tujuan Indeks Infrastruktur berdasarkan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah dengan indikator sasaran Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan diperoleh realisasi sebesar 78,91 dan capaian kinerja yaitu 100% yang menunjukkan bahwa target indikator sasaran telah tercapai untuk mendukung indikator tujuan.
19. Indikator tujuan Indeks Infrastruktur berdasarkan sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten dengan Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten diperoleh realisasi sebesar 90,98 dan capaian kinerja adalah 100% menunjukkan bahwa terdapat dukungan penuh indikator sasaran untuk mendukung tercapainya indikator tujuan.
20. Berdasarkan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Air diperoleh nilai 62 dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan untuk mendukung capaian target indikator sasaran sebesar 74,33%. Hal ini didukung oleh adanya pengolahan limbah yang baik dan pengendalian pencemaran pertanian yang tepat.
21. Berdasarkan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan diperoleh nilai 70,68% dengan capaian sebesar 95,09%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan untuk mendukung capaian target indikator sebesar 74,33%. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran masyarakat untuk mengelola lahan untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan.
22. Berdasarkan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Udara Lahan diperoleh realisasi kinerja sebesar 93,01 dan capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan telah tercapainya target indikator sasaran untuk mendukung indikator tujuan, yaitu adanya penataan ruang terbuka hijau (RTH) publik.
23. Indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh realisasi 72,55 dan capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa target indikator sasaran dapat tercapai dengan baik.

24. Indikator tujuan Nilai Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran diperoleh realisasi kinerja sebesar 118 dan capaian kinerja adalah 100% yang menunjukkan bahwa target indikator sasaran dapat tercapai dengan baik.

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan meliputi berbagai kegiatan seperti perencanaan anggaran, pemantauan arus kas, manajemen investasi, pengelolaan hutang, pengelolaan risiko, dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pengelolaan keuangan juga melibatkan pengambilan keputusan terkait alokasi dana antara berbagai kebutuhan dan peluang, serta evaluasi kinerja keuangan untuk memastikan kesehatan keuangan yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Kemudian dilakukan pertanggungjawaban dengan memperhatikan aspek-aspek yaitu pemerintah daerah memastikan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan penggunaan dana publik yang efisien, efektif, dan transparan demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas pada tahun 2020. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, namun juga mencakup pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah. Sebagai contoh, penganggaran pendapatan dan belanja dana Jaminan Kapitasi Nasional (JKN) pada FKTP dan Dak Non Fisik BOP Puskesmas yang langsung dikelola oleh Puskesmas serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing Sekolah Negeri di Kabupaten Natuna tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan Pendapatan sebesar Rp1.309.442.057.434,61 dengan realisasi sebesar Rp972.909.236.075,86 atau 74,30%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.333.507.226.175,09, artinya realisasi Pendapatan tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp(360.597.990.099,23) atau sebesar (27,04)% dari realisasi Pendapatan tahun lalu. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan anggaran pendapatan sebesar

Rp148.384.754.434,61 dari yang dianggarkan semula pada APBD murni sebesar Rp1.161.057.303.000,00 menjadi Rp1.309.442.057.434,61 pada Perubahan APBD. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan dana transfer Pemerintah Pusat Rp145.738.848.267,61 yang penganggarnya menggunakan estimasi rata-rata 3 tahun terakhir. Kebijakan menggunakan rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir ini disebabkan pada saat Perubahan APBD ditetapkan, Peraturan Menteri Keuangan terkait penetapan kurang bayar dan lebih bayar atas dana bagi hasil pemerintah pusat belum ditetapkan.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan sebesar Rp1.473.414.715.900,00 dengan realisasi sebesar Rp1.132.775.011.078,58 atau sebesar 76,88% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Belanja pada tahun 2023 sebesar Rp1.174.496.509.506,59 terjadi penurunan sebesar Rp(41.721.498.428,01) atau sebesar (3,68)% dari realisasi belanja tahun sebelumnya. Anggaran belanja pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp204.072.597.153,00 dari yang dianggarkan semula di APBD murni Rp1.269.342.118.747,00 menjadi Rp1.473.414.715.900,00 di Perubahan APBD. Kenaikan tersebut terjadi karena memenuhi kebutuhan belanja yang dibutuhkan oleh OPD dan juga pemenuhan belanja mengikat seperti kekurangan penganggaran gaji ASN dan kekurangan penganggaran Tambahan penghasilan ASN atas pemberian THR dan Gaji ke 13. Selain itu juga kenaikan belanja digunakan untuk pemenuhan *mandatory Spending* seperti belanja wajib bidang pendidikan, belanja wajib bidang kesehatan, belanja aloksi dana desa, dan belanja infrastruktur pelayanan publik. Rincian Realisasi belanja tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 7.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan	1.309.442.057.434,61	972.909.236.075,86	74,30	1.333.507.226.175,09
2	Belanja Daerah	1.473.414.715.900,00	1.132.775.011.078,58	76,88	1.174.496.509.506,59
	a. Belanja Operasi	1.028.431.171.858,00	834.092.842.507,02	81,10	788.943.176.676,47
	b. Belanja Modal	318.278.413.142,00	178.028.354.654,56	55,93	264.281.035.089,12
	c. Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	665.131.517,00	16,63	1.648.129.341,00
	d. Belanja Transfer	122.705.130.900,00	119.988.682.400,00	97,79	119.624.168.400,00

Anggaran dan realisasi Pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel 7.3.2 di bawah ini:

**Tabel 7.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.02.01.	Dinas Kesehatan	39.166.158.747,00	32.752.695.332,02	83,62	39.103.598.930,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.417.000,00	17.400.131,00	112,86	0,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000,00	126.439.500,00	105,37	192.582.500,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	65.333.000,00	33.264.000,00	50,91	36.000.000,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00	116.964.101,00	116,96	120.223.710,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	50.000.000,00	7.260.000,00	14,52	0,00
3.31.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	22.349.000,00	158.025.230,00	707,08	12.390.000,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.269.902.799.687,61	939.697.187.781,84	74,00	1.294.042.431.035,09
Jumlah		1.309.442.057.434,61	972.909.236.075,86	74,30	1.333.507.226.175,09

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel 7.3.3 di bawah ini:

**Tabel 7.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	277.030.250.521,00	208.039.509.282,00	75,10	205.256.187.798,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	261.647.137.393,00	215.513.951.923,75	82,37	212.344.634.152,05
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.816.185.969,00	78.107.210.218,73	51,11	135.984.379.148,46
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	62.173.605.174,00	43.507.353.436,00	69,98	50.451.200.446,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	20.953.092.841,00	18.240.013.921,00	87,05	17.183.836.711,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.349.779.299,00	8.760.024.285,00	84,64	6.694.839.474,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.469.878.222,00	7.122.914.649,00	84,10	6.930.688.224,00
1.06.01.	Dinas Sosial	8.779.132.190,00	7.089.175.066,00	80,75	5.044.823.568,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.104.937.632,00	5.879.327.587,00	82,75	6.182.134.536,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.709.033.934,00	9.355.767.750,00	79,90	10.012.641.593,00
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.205.503.113,00	13.053.308.407,00	80,55	12.077.045.502,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	16.508.907.601,00	11.998.380.212,00	72,68	10.175.750.272,00
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.439.790.855,00	4.692.118.382,00	72,86	4.520.574.181,00
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.208.994.674,00	8.439.841.952,00	69,13	8.782.525.285,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	26.333.064.896,00	16.585.431.544,52	62,98	23.577.412.852,00
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.979.221.914,00	16.484.019.960,00	71,73	12.506.686.498,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.981.214.541,00	9.670.339.146,00	80,71	7.315.687.621,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	14.919.045.718,00	11.035.413.325,18	73,97	13.491.248.920,84
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.196.875.916,00	9.605.853.477,00	85,79	5.649.014.649,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	17.089.994.096,00	15.196.580.794,65	88,92	9.514.675.856,00
3.26.01.	Dinas Pariwisata	16.718.169.738,00	11.572.188.559,99	69,22	10.064.405.077,39
3.31.01.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	13.504.985.010,00	10.330.538.011,00	76,49	30.285.603.838,61
4.01.03.	Sekretariat Daerah	76.962.812.857,00	60.993.912.028,00	79,25	58.852.786.214,00
4.02.04.	Sekretariat DPRD	54.509.841.328,00	37.871.105.639,00	69,48	39.447.475.265,18
5.01.01.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.128.049.162,00	11.083.445.402,00	73,26	10.245.280.127,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	155.775.978.877,00	144.209.176.750,00	92,57	142.873.711.007,00
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.099.357.640,00	9.049.681.784,00	81,53	9.066.825.767,00
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.941.437.861,00	6.080.264.053,00	87,59	5.487.335.128,00
6.01.05.	Inspektorat Daerah	20.220.530.596,00	15.740.619.335,00	77,84	12.416.170.156,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	13.293.001.318,00	11.362.913.235,00	85,48	9.616.562.348,00
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	7.688.803.119,00	6.200.620.506,76	80,64	6.029.944.903,00
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	5.994.836.420,00	5.145.910.024,00	85,84	5.319.676.241,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	5.521.086.309,00	4.894.445.683,00	88,65	4.521.519.435,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	7.065.982.374,00	6.136.131.889,00	86,84	6.158.164.718,31
7.01.12.	Kecamatan Serasan	6.851.289.058,00	6.330.940.869,00	92,41	5.604.611.746,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	5.831.479.266,00	5.238.624.636,00	89,83	5.447.788.797,90
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	3.483.576.768,00	2.899.383.951,00	83,23	3.269.488.048,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	3.156.663.843,00	2.670.532.056,00	84,60	2.492.004.583,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	5.880.833.000,00	4.802.186.016,00	81,66	4.547.947.429,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	3.701.015.200,00	3.055.784.519,00	82,57	2.813.880.251,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	4.905.296.305,00	4.346.300.952,00	88,60	5.084.054.362,33
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	4.912.741.461,00	4.135.006.003,00	84,17	3.575.486.755,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	4.766.851.950,00	3.842.930.291,00	80,62	3.705.785.892,52
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	4.079.911.267,00	3.226.564.218,00	79,08	3.684.636.484,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	4.236.027.316,00	2.659.526.533,00	62,78	1.840.667.350,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	3.896.537.537,00	3.011.942.491,00	77,30	2.011.327.792,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.391.973.821,00	27.507.800.325,00	90,51	16.337.382.503,00
Jumlah		1.473.414.715.900,00	1.132.775.011.078,58	76,88	1.174.496.509.506,59

Terhadap besaran anggaran dan realisasi Belanja per SKPD sesuai tabel 7.3.4 tersebut, rincian anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 yang dibagi dalam kelompok belanja langsung dan tidak langsung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	230.353.696.951,00	186.107.638.844,00	80,79	175.519.315.472,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	219.828.150.157,00	181.913.323.458,61	82,75	168.613.089.219,05
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.392.266.147,00	16.694.075.356,00	63,25	17.915.166.895,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	26.867.006.674,00	16.987.406.554,00	63,23	26.848.210.457,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	19.815.172.841,00	17.767.803.921,00	89,67	16.931.056.711,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.697.679.299,00	8.145.725.535,00	84,00	6.593.744.474,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.996.218.222,00	6.813.149.359,00	85,20	6.334.127.928,00
1.06.01.	Dinas Sosial	8.708.332.190,00	7.046.775.066,00	80,92	4.811.020.568,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.708.937.632,00	5.816.663.587,00	86,70	6.011.834.126,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.451.033.934,00	9.355.767.750,00	81,70	9.836.081.593,00
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.316.114.313,00	12.887.706.407,00	84,14	11.825.225.582,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	12.337.323.601,00	10.038.222.212,00	81,36	9.853.452.842,00
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.137.790.855,00	4.692.118.382,00	76,45	4.472.574.181,00
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.579.851.674,00	8.236.557.952,00	71,13	8.756.725.285,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	12.297.330.896,00	10.189.596.778,00	82,86	10.202.550.098,00
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.023.942.284,00	12.735.482.328,00	74,81	11.893.096.498,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.249.514.541,00	6.796.117.904,00	82,38	6.681.689.801,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.786.668.618,00	9.136.594.544,00	84,70	11.889.727.058,93
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.439.393.152,00	5.506.050.977,00	85,51	5.158.721.969,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	16.458.994.096,00	14.580.260.145,65	88,59	9.048.942.356,00
3.26.01.	Dinas Pariwisata	13.878.529.338,00	10.115.527.445,00	72,89	8.333.869.528,00
3.31.01.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	12.928.185.010,00	10.023.903.011,00	77,54	11.286.569.650,43
4.01.03.	Sekretariat Daerah	73.492.191.037,00	59.784.342.528,00	81,35	56.828.303.714,00
4.02.04.	Sekretariat DPRD	48.794.171.328,00	37.481.209.100,00	76,81	37.814.515.087,00
5.01.01.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.138.970.162,00	10.645.095.402,00	75,29	9.909.782.127,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	25.481.807.977,00	21.163.616.466,00	83,05	20.611.727.266,00
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.859.357.640,00	8.811.231.784,00	81,14	8.870.605.767,00
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.559.337.861,00	5.747.264.053,00	87,62	5.260.805.128,00
6.01.05.	Inspektorat Daerah	18.134.574.596,00	14.937.499.335,00	82,37	12.119.040.156,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	12.376.150.318,00	10.780.130.360,00	87,10	9.404.627.348,00
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	7.282.053.119,00	6.135.180.506,76	84,25	5.773.114.903,00
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	5.553.836.420,00	4.872.819.024,00	87,74	5.146.616.241,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	5.351.586.309,00	4.726.785.683,00	88,32	4.354.281.435,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	6.929.582.374,00	6.055.231.889,00	87,38	6.033.744.718,31

Kode	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
7.01.12.	Kecamatan Serasan	6.676.039.058,00	6.210.693.869,00	93,03	5.576.311.746,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	5.632.979.266,00	5.044.534.636,00	89,55	5.223.651.297,90
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	3.352.016.768,00	2.830.133.951,00	84,43	3.229.688.048,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	3.111.342.343,00	2.660.632.056,00	85,51	2.487.044.583,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	5.265.933.000,00	4.423.734.016,00	84,01	4.261.030.429,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	3.537.080.200,00	2.956.534.519,00	83,59	2.707.382.251,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	4.705.296.305,00	4.221.800.952,00	89,72	4.841.752.362,33
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	4.757.241.461,00	4.033.276.003,00	84,78	3.472.136.755,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	4.660.571.950,00	3.779.730.291,00	81,10	3.605.705.892,52
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	3.939.981.267,00	3.201.724.218,00	81,26	3.040.347.484,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	3.494.277.316,00	2.449.961.533,00	70,11	1.497.359.350,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	3.539.537.537,00	2.835.692.491,00	80,11	1.831.962.792,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.553.123.821,00	26.717.520.325,00	90,41	16.224.847.503,00
Jumlah		1.028.231.171.858,00	834.092.842.507,02	81,09	788.943.176.676,47

Tabel 7.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	46.676.553.570,00	21.931.870.438,00	46,99	29.736.872.326,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	41.818.987.236,00	33.600.628.465,14	80,35	43.731.544.933,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126.423.919.822,00	61.413.134.862,73	48,58	118.069.212.253,46
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	35.306.598.500,00	26.519.946.882,00	75,11	23.602.989.989,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	1.137.920.000,00	472.210.000,00	41,50	252.780.000,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	652.100.000,00	614.298.750,00	94,20	101.095.000,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	473.660.000,00	309.765.290,00	65,40	596.560.296,00
1.06.01.	Dinas Sosial	70.800.000,00	42.400.000,00	59,89	233.803.000,00
2.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	396.000.000,00	62.664.000,00	15,82	170.300.410,00
2.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	258.000.000,00	0,00	0,00	176.560.000,00
2.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	889.388.800,00	165.602.000,00	18,62	251.819.920,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	4.171.584.000,00	1.960.158.000,00	46,99	322.297.430,00
2.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	302.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
2.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	629.143.000,00	203.284.000,00	32,31	25.800.000,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	14.035.734.000,00	6.395.834.766,52	45,57	13.374.862.754,00
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.955.279.630,00	3.748.537.632,00	62,94	613.590.000,00
2.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.731.700.000,00	2.874.221.242,00	77,02	633.997.820,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.132.377.100,00	1.898.818.781,18	45,95	1.601.521.861,91
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.757.482.764,00	4.099.802.500,00	86,18	490.292.680,00
3.25.01.	Dinas Perikanan	631.000.000,00	616.320.649,00	97,67	465.733.500,00
3.26.01.	Dinas Pariwisata	2.839.640.400,00	1.456.661.114,99	51,30	1.730.535.549,39
3.31.01.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	576.800.000,00	306.635.000,00	53,16	18.999.034.188,18
4.01.03.	Sekretariat Daerah	3.470.621.820,00	1.209.569.500,00	34,85	2.024.482.500,00
4.02.04.	Sekretariat DPRD	5.715.670.000,00	389.896.539,00	6,82	1.632.960.178,18

Kode	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
5.01.01.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	989.079.000,00	438.350.000,00	44,32	335.498.000,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.589.040.000,00	2.391.746.367,00	66,64	989.686.000,00
5.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	240.000.000,00	238.450.000,00	99,35	196.220.000,00
5.06.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	382.100.000,00	333.000.000,00	87,15	226.530.000,00
6.01.05.	Inspektorat Daerah	2.085.956.000,00	803.120.000,00	38,50	297.130.000,00
7.01.07.	Kecamatan Bunguran Timur	916.851.000,00	582.782.875,00	63,56	211.935.000,00
7.01.08.	Kecamatan Bunguran Barat	406.750.000,00	65.440.000,00	16,09	256.830.000,00
7.01.09.	Kecamatan Bunguran Utara	441.000.000,00	273.091.000,00	61,93	173.060.000,00
7.01.10.	Kecamatan Pulau Laut	169.500.000,00	167.660.000,00	98,91	167.238.000,00
7.01.11.	Kecamatan Midai	136.400.000,00	80.900.000,00	59,31	124.420.000,00
7.01.12.	Kecamatan Serasan	175.250.000,00	120.247.000,00	68,61	28.300.000,00
7.01.13.	Kecamatan Subi	198.500.000,00	194.090.000,00	97,78	224.137.500,00
7.01.14.	Kecamatan Pulau Tiga	131.560.000,00	69.250.000,00	52,64	39.800.000,00
7.01.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	45.321.500,00	9.900.000,00	21,84	4.960.000,00
7.01.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	614.900.000,00	378.452.000,00	61,55	286.917.000,00
7.01.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	163.935.000,00	99.250.000,00	60,54	106.498.000,00
7.01.18.	Kecamatan Serasan Timur	200.000.000,00	124.500.000,00	62,25	242.302.000,00
7.01.19.	Kecamatan Suak Midai	155.500.000,00	101.730.000,00	65,42	103.350.000,00
7.01.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	106.280.000,00	63.200.000,00	59,47	100.080.000,00
7.01.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	139.930.000,00	24.840.000,00	17,75	644.289.000,00
7.01.22.	Kecamatan Pulau Panjang	741.750.000,00	209.565.000,00	28,25	343.308.000,00
7.01.23.	Kecamatan Pulau Seluan	357.000.000,00	176.250.000,00	49,37	179.365.000,00
8.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	838.850.000,00	790.280.000,00	94,21	112.535.000,00
Jumlah		318.278.413.142,00	178.028.354.654,56	55,97	264.281.035.089,12

**Tabel 7.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.000.000.000,00	665.131.517,00	16,63	1.648.129.341,00
Jumlah		4.000.000.000,00	665.131.517,00	16,63	1.648.129.341,00

**Tabel 7.3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	122.705.130.900,00	119.988.682.400,00	97,79	119.624.168.400,00
Jumlah		122.705.130.900,00	119.988.682.400,00	97,79	119.624.168.400,00

Dalam rangka pengelolaan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan pemenuhan Belanja wajib (*mandatory spending*) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan belanja *mandatory spending* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana

pada sejumlah program atau kegiatan tertentu yang diatur oleh undang-undang atau kebijakan yang mengikat. Pemenuhan Belanja wajib diuraikan sebagai berikut:

1. **Pemenuhan Belanja Wajib Bidang Pendidikan**
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah diwajibkan untuk menganggarkan belanja bidang pendidikan minimal 20% dari total APBD. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan Belanja bidang pendidikan sebesar Rp 293.547.628.006,00 atau sebesar 20,01% dari total APBD. Belanja bidang pendidikan dianggarkan pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta beberapa SKPD lainnya melaksanakan pekerjaan di Program kegiatan yang menunjang fungsi pendidikan .
2. **Pemenuhan Belanja Wajib Bidang Kesehatan**
Walaupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mewajibkan persentase alokasi tertentu untuk belanja kesehatan, Pemerintah Kabupaten Natuna tetap mengalokasikan penganggaran bidang kesehatan sebagai *mandatory spending* belanja kesehatan minimal 10% dari APBD. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan Belanja urusan Kesehatan sebesar Rp257.775.137.393,00, atau sebesar 21,86% dari total APBD.
3. **Pemenuhan Belanja Wajib Transfer ke Desa**
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penganggaran bagi hasil pendapatan ke desa minimal 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta 10% dari pendapatan Dana Transfer dan Dana Perimbangan di luar DAK. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp5.432.897.000,00 atau sebesar 10% dari anggaran pajak dan retribusi daerah dan telah direalisasikan 100%. Sedangkan untuk bagi hasil data transfer dana perimbangan di luar DAK telah dianggarkan Rp62.904.512.900,00 atau sebesar 10% dari alokasi pendapatan transfer di luar Dana DAK yang ditetapkan dalam rincian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
4. **Pemenuhan Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik**
Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan belanja infrastruktur sebesar Rp 385.166.226.604,00 atau sebesar 28,60% dari total APBD.
5. **Belanja Pengawasan**
Pemerintah Kabupaten Natuna telah menganggarkan belanja Pengawasan sebesar Rp20.220.530.596,00 atau sebesar 1,38% dari total APBD.
6. **Belanja Pengendalian Inflasi**
Pemerintah kabupaten Natuna telah menganggarkan belanja pengendalian inflasi sebesar Rp12.168.842.760,00.

7. Belanja Stunting
Pemerintah Kabupaten Natuna telah menggarakan belanja stunting sebesar Rp166.985.899.159,00.

7.3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target dan Telah Ditetapkan

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target pendapatan asli daerah, disebabkan beberapa permasalahan:
 - a. Masih terdapat potensi atas beberapa objek pajak pendapatan yang dapat ditingkatkan. Kondisi di lapangan banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dengan ketentuan pajak daerah, seperti tidak menyetorkan pajak yang dipungut seperti pajak restoran dan pajak hiburan, serta kurangnya pemahaman wajib pajak bahwa pajak restoran, hiburan dan hotel ditanggung oleh pembeli.
 - b. Tidak stabilnya harga jual pasir kuarsa sehingga Wajib Pajak pasir kuarsa tidak menjual pasir kuarsa hingga berdampak kepada realisasi pajak pasir kuarsa.
 - c. Belum optimalnya data wajib pajak PPBP2.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya terserap sebesar 89,33% dari yang dianggarkan dan ditetapkan Rp149.063.229.900,00 dengan realisasi sebesar Rp133.151.042.118,00. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan DAK Fisik adalah adanya selisih antara pagu dengan data kontrak yang disampaikan dengan batasan waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 21 Juli 2024, selain itu juga kendala penyerapan terkait lokasi pekerjaan dalam lingkup hutan lindung sehingga mengakibatkan pekerjaan yang sudah berkontrak tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk DAK Non Fisik penyaluran sesuai dengan ketentuan yaitu dari pagu yang ditetapkan dikurangi dengan SiLPA DAK Non Fisik di RKUD.
3. Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam 33,31% diakibatkan estimasi pendapatan memperhitungkan komposisi kurang bayar menggunakan data rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dan data rekonsiliasi *lifting* minyak bumi dan gas, sehingga mengakibatkan ketergantungan terlalu besar kepada keputusan pemerintah pusat untuk menyalurkan alokasi kurang bayarnya.

Realisasi Belanja hanya terserap 76,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.473.414.715.900,00 terserap sebesar Rp1.132.775.011.078,58. Belanja yang tidak terserap disebabkan oleh banyaknya tagihan belanja pemerintah daerah yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 dikarenakan keterbatasan likuiditas kas Pemerintah Daerah. Penyebab keterbatasan likuiditas kas akibat tidak tercapainya target pendapatan. Salah satunya adalah tidak disalurkannya kurang bayar sesuai PMK 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan pemantauan atas transaksi wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan dengan menempatkan beberapa orang petugas, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak.
2. Melakukan peningkatan terhadap SDM dibidang pendapatan khususnya pemeriksa atas pajak daerah.

3. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
4. Menetapkan prioritas yang jelas dalam alokasi anggaran dengan titik fokus pada program-program atau kegiatan yang dianggap paling penting dan strategis untuk mencapai tujuan organisasi, dan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan pelaksanaan anggaran serta mengidentifikasi perubahan atau masalah yang memerlukan tindakan perbaikan. Melakukan evaluasi secara berkala dan terstruktur terhadap pencapaian target dan kinerja anggaran.
6. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/ jasa yang gagal lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
7. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan memfasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

7.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah dilakukan perubahan terakhir yaitu Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggungjawab Laporan Keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas Laporan Keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintah Kabupaten Natuna yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Pertanggungjawaban, berupa Laporan Keuangan.

Dalam penetapan Entitas Pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban dan Pos-pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh pemerintah daerah dan Beban diakui pada saat Kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pemerintah daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum

Daerah atau oleh pemerintah daerah, serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

7.4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

1) Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan - LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

7.4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode Pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah

dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

7.4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

7.4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah bank (Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

7.4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Kas dan setara kas dapat diklasifikasikan atas 2 bagian yaitu:

- 1) Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah (Kasda)

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari Saldo Kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir

periode akuntansi, tetapi belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Apabila masih terdapat uang persediaan yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21, PPN dan Pajak lainnya, uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di Neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening Bendahara Penerimaan. Pencatatan pendapatan-LRA telah dapat dilakukan disaat uang telah berada di tangan Bendahara Penerimaan SKPD yang merupakan bagian dari BUD dalam entitas Pemerintah Kabupaten Natuna.

2) Kas Pemerintah Daerah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD)

a. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

b. Kas Dana BOS

Kas Dana Bos mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, kas dana bergulir.

7.4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan atau akibat

lainnya yang sah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak/Piutang Retribusi

Piutang Pajak/Piutang Retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau Retribusi Daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada Pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada Tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan Neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan Neraca dihitung berapa Bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain Aset yang berupat Aset Lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah TGR yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan Neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan,

bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset berupa piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- 2) Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya presentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak baik Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) maupun Pajak yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dapat dipilah dalam beberapa kualifikasi terdiri dari:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b) Piutang Retribusi

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - c. Jika umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara.

c) Piutang Lainnya

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Lainnya....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang lainnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan Piutang Negara.
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.

- (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku. Pengambilan Keputusan Penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.

c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan Keputusan Hapus Tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan dapat menjadi harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Natuna ketika pelaksanaannya dapat menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya, wajib pajak dan retribusi yang telah bangkrut, meninggal sedangkan ahli waris tidak mampu membayar hutangnya dan sebagainya.
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
- (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

d) Penerimaan Tunai Atas Piutang yang telah dihapus bukukan

Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

7.4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. harga pembelian;
 - b. biaya pengangkutan;
 - c. biaya penanganan;
 - d. biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan adalah potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa sedangkan bonus pembelian berupa barang yang serupa diperlakukan sebagai perolehan lainnya. Sehingga biaya perolehan yang disajikan merupakan harga pembelian ditambah biaya-biaya (pengangkutan penanganan, biaya lain-lain) dikurangi potongan-potongan (harga, rabat, dan lainnya yang serupa).

2. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.
3. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan, dan lainnya Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Dalam mencatat persediaan, Pemerintah Daerah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Untuk mendapatkan nilai persediaan yang lebih wajar, mulai tahun 2024, secara prospektif penilaian persediaan menggunakan metode FIFO, dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dikecualikan dari beban persediaan adalah:

1. Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai beban pemeliharaan;
2. Penyerahan barang persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak lainnya yang dicatat sebagai beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak lainnya;
3. Penyerahan barang persediaan dalam rangka pemberian hibah yang dicatat sebagai beban hibah;
4. Penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan sosial yang dicatat sebagai beban bantuan sosial; dan
5. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.

7.4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan *royalty* atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat sebesar nilai perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk Surat Berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya ditambah penambahan dan pengurangan nilai akibat keuntungan dan kerugian perusahaan tahun berjalan yang dibebankan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat sebesar nilai wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan apabila:

- 1) kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
- 2) kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang

tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

7.4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (material) dan perlengkapan (suplesi).

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penilaian dan pengukuran aset tetap adalah:

1) Biaya Perolehan/Nilai Wajar Pada Saat Perolehan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun disajikan sebagai beban dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Nilai satuan minimum kapitalisasi berlaku untuk pengadaan baru maupun biaya pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar. Nilai satuan minimum untuk peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk bangunan gedung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk jenis aset tetap yang lain nilai minimumnya Rp1,00 (satu rupiah) artinya berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai aset tetap.

3) Pengeluaran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. bertambah umur ekonomis, dan/atau

- c. bertambah volume, dan/atau
 - d. bertambah kapasitas produksi.
- 2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi dapat berupa penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- 4) **Biaya Perolehan Aset Tetap Gabungan**
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.
- 5) **Biaya Perolehan Aset Tetap Swakelola**
Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi antara lain:
 - a) biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
 - b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
 - c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut

7.4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Langkah dan prosedur penyusutan adalah sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi aset tetap yang dapat disusutkan dalam daftar rincian barang;
- 2) mengelompokkan aset tetap dalam artian aset individual atau berkelompok;
- 3) menetapkan nilai wajar aset tetap, dalam hal ini dapat digunakan harga perolehan;
- 4) menetapkan nilai yang dapat disusutkan;
- 5) menghitung penyusutan, secara umum menggunakan metode garis lurus karena unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau walaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan ingin dilakukan semudah mungkin sehingga penyusutan lebih logis dan proporsional;
- 6) mencatat penyusutan ke dalam jurnal;
- 7) menyajikan penyusutan pada akun akumulasi penyusutan (neraca) dan beban penyusutan-LO;
- 8) mengungkapkan penyusutan dalam CaLK.

Tujuan dilakukannya penyusutan aset tetap adalah untuk:

- 1) menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;

- 2) mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- 3) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) peralatan dan mesin;
- 2) gedung dan bangunan;
- 3) jalan, irigasi, dan jaringan;
- 4) aset tetap renovasi; dan
- 5) aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) aset tetap berupa tanah, baik yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah maupun yang dimanfaatkan oleh pihak lain;
- 2) aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut siap untuk dioperasikan dan direklasifikasi ke jenis aset tetap yang bersangkutan;
- 3) aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan;
- 4) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan diusulkan untuk dilakukan penghapusannya;
- 5) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, dan
- 6) aset lain-lain yang berasal dari aset tetap yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan diusulkan untuk dilakukan penghapusannya direklasifikasi ke aset lainnya pada Neraca, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka aset tetap tersebut dapat dihapusbukukan. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan untuk dihapuskan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya pada Neraca, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya, di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tetap tersebut direklasifikasi kembali ke aset tetap, dan disusutkan sesuai sisa umur manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan, dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset

tetap tanpa ada nilai residu, yaitu nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor:

- 1) daya pakai; dan
- 2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.

Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap.

Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali:

- 1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; dan atau
- 2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; dan atau
- 3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap tercantum dalam tabel berikut:

Tabel.....Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	02			Peralatan dan Mesin	
1	3	02	01		Alat Besar	
1	3	02	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	02	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	02	01	03	Alat Bantu	7
1	3	02	02		Alat Angkutan	
1	3	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	02	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	02	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	02	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	02	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	02	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5
1	3	02	04		Alat Pertanian	
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	02	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	02	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	02	06		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1	3	02	06	01	Alat Studio	5
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	02	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	02	08		Alat Laboratorium	
1	3	02	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	02	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	02	08	03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	02	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	02	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	02	08	06	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya	10
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	02	09		Alat Persenjataan	
1	3	02	09	01	Senjata Api	10
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	02	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	02	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	02	10		Komputer	
1	3	02	10	01	Komputer Unit	4
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	02	11		Alat Eksplorasi	
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	02	12		Alat Pengeboran	
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	02	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	02	13	01	Sumur	10
1	3	02	13	02	Produksi	10
1	3	02	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	02	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	02	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	02	15		Alat Keselamatan Kerja	

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	02	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	02	15	03	Alat sar	2
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	02	16		Alat Peraga	
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	02	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	02	18		Rambu-rambu	
1	3	02	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	02	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	02	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	02	19		Peralatan Olahraga	
1	3	02	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	03			Gedung dan Bangunan	
1	3	03	01		Bangunan Gedung	
1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	03	02		Monumen	
1	3	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	03	03		Bangunan Menara	
1	3	03	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	03	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	03	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	04			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	04	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	04	01	01	Jalan	10
1	3	04	01	02	Jembatan	50
1	3	04	02		Bangunan Air	
1	3	04	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	04	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	04	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	04	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	04	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	04	03		Instalasi	
1	3	04	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	04	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	04	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	04	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek		
1	3	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	04	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	04	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	04	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	04	03	10	Instalasi Lain	5
1	3	04	04		Jaringan	
1	3	04	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	04	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	04	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	04	04	04	Jaringan Gas	30

Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas meliputi:

- 1) renovasi,
- 2) restorasi atau *overhaul*.

Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagai dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak dapat melebihi tabel masa manfaat. Masa manfaat aset tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh pengguna barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap. Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa masa manfaat aset tetap tidak sesuai dengan kondisi aset tetap. Perubahan masa manfaat aset tetap ditetapkan oleh Bupati Natuna atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati Natuna.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh Pengurus Barang pada tingkat Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Pengurus Barang disahkan oleh Pengguna Barang, dan selanjutnya menjadi dasar pencatatan akuntansi oleh PPK SKPD. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penyusutan aset tetap disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan pengurang pos aset tetap di Neraca.

Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nilai penyusutan;
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap sebagai dasar penyusunan Neraca Restatement Pemerintah Kabupaten Natuna per 1 Januari 2015. Koreksi penyusutan aset tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan aset tetap dan pengurang nilai ekuitas pada neraca, serta diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan. Dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada periode sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.

Perhitungan penyusutan atas aset tetap yang dinilai ulang pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat adalah selisih antara masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat untuk Aset Tetap yang bersangkutan dikurangi dengan masa manfaat yang telah terpakai sampai dengan tahun 31 Desember 2006.
- 2) Nilai penyusutan dihitung dengan masa manfaat sejak tahun 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 dibagi dengan sisa masa manfaat dikalikan dengan nilai aset.

7.4.3.11 Pengukuran Konstruksi/Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:
 - (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;

- (e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - (a) asuransi;
 - (b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan
 - (d) biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- 4. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

7.4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam:

- 1) Tagihan Jangka Panjang.
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak berita acara penjualan Aset yang bersangkutan.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a) Sewa, dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan dengan aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*), dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud (ATB)

a. Pengukuran Pada Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

1) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal

(a) Pembelian

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

(b) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

(c) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

(d) Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

2) Pengukuran ATB Yang Diperoleh dari Pengembangan Secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam aspek pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud maka kapitalisasi dinilai sebesar pengeluarannya.

3) Pengukuran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Sementara, pengeluaran atau biaya yang telah dibebankan sebagai beban operasional tidak dapat diakui kembali sebagai aset.

4) Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Asset*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

5) Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat.

Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

a) Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

b) Amortisasi untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dan lain-lain) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- a. Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- b. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut, dan
 - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

c) Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

- 6) Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai buku.

7.4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal Neraca.
 - b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban:

1. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 2. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 4. Pengukuran Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara Pendapatan Diterima di Muka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan.
 5. Pengukuran Utang Belanja
Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 6. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- 4) Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
 - b. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

7.4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

2) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup rekening koran PPKD/SKPD.

7.4.4 Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

7.4.4.1 Koreksi Kesalahan

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan;
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan:

- Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, dan pengembalian secara kas dilakukan pada periode sebelumnya, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- Apabila pengembalian kas terjadi pada tahun penyusunan Laporan Keuangan, maka koreksi tidak dilakukan pada akun periode sebelumnya melainkan dilakukan pada akun pendapatan tahun berjalan.

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disahkan), maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA, dan akun ekuitas di neraca.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan tambahan pengeluaran belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disahkan), maka dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja, dan akun ekuitas di neraca.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

7.4.4.2 Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan Nilai Buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi.
- 2) Menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara Laporan Keuangan baru dibandingkan dengan Laporan Keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.

- 3) Bagan Akun Standar yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang mencabut lampiran III dan IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penyajian Laporan Keuangan menggunakan konsep pemetaan/*Mapping* dari akun basis kas ke akun basis akrual. *Mapping* akun yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana tabel berikut ini:

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1.	2.1.01.01.01.001.	Utang Taspen	2.1.01.01.01.001.	Utang Taspen		
2.	2.1.01.02.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2.1.01.02.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		
3.	2.1.01.03.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.1.01.03.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		
4.	2.1.01.04.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.1.01.04.01.001.	Utang Iuran Jaminan Kematian		
5.	2.1.01.05.01.001.	Utang PPh 21	2.1.01.05.01.001.	Utang PPh 21		
6.	2.1.01.05.02.001.	Utang PPh 22	2.1.01.05.02.001.	Utang PPh 22		
7.	2.1.01.05.03.001.	Utang PPh 23	2.1.01.05.03.001.	Utang PPh 23		
8.	2.1.01.05.04.001.	Utang PPh 25	2.1.01.05.04.001.	Utang PPh 25		
9.	2.1.01.05.05.0001.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	2.1.01.05.05.0001.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		
10.	2.1.01.05.06.0001.	Utang PPh Pasal 15	2.1.01.05.06.0001.	Utang PPh Pasal 15		
11.	2.1.01.05.07.0001.	Utang PPh Pasal 26	2.1.01.05.07.0001.	Utang PPh Pasal 26		
12.	2.1.01.06.01.001.	Utang PPN Pusat	2.1.01.06.01.001.	Utang PPN Pusat		
13.	2.1.01.07.01.001.	Utang Taperum	2.1.01.07.01.001.	Utang Taperum		
14.	2.1.01.08.01.001.	Utang Iuran Wajib Pegawai	2.1.01.08.01.001.	Utang Iuran Wajib Pegawai		
15.	2.1.03.01.01.0001.	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	2.1.03.01.01.0001.	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek		
16.	4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	1.1.03.06.01.0001.	Piutang Pajak Hotel	7.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel-LO
17.	4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.1.03.07.01.0001.	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
18.	4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.1.03.08.05.0001.	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	7.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
19.	4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.1.03.08.07.0001.	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	7.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
20.	4.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.1.03.08.09.0001.	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	7.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
21.	4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.1.03.09.01.0001.	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	7.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO
22.	4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	1.1.03.09.02.0001.	Piutang Pajak Reklame Kain	7.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain-LO
23.	4.1.01.09.03.0001.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.1.03.09.03.0001.	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker	7.1.01.09.03.0001.	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
24.	4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan	1.1.03.09.05.0001.	Piutang Pajak Reklame Berjalan	7.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan-LO
25.	4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.1.03.10.01.0001.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
26.	4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.1.03.10.02.0001.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
27.	4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	1.1.03.11.01.0001.	Piutang Pajak Parkir	7.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir-LO
28.	4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	1.1.03.12.01.0001.	Piutang Pajak Air Tanah	7.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah-LO
29.	4.1.01.14.05.0001.	Pajak Batu Apung	1.1.03.14.05.0001.	Piutang Pajak Batu Apung	7.1.01.14.05.0001.	Pajak Batu Apung-LO
30.	4.1.01.14.12.0001.	Pajak Granit/Andesit	1.1.03.14.12.0001.	Piutang Pajak Granit/Andesit	7.1.01.14.12.0001.	Pajak Granit/Andesit-LO
31.	4.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil	1.1.03.14.23.0001.	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	7.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
32.	4.1.01.14.24.0001.	Pajak Pasir Kuarsa	1.1.03.14.24.0001.	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	7.1.01.14.24.0001.	Pajak Pasir Kuarsa-LO
33.	4.1.01.14.28.0001.	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	1.1.03.14.28.0001.	Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)	7.1.01.14.28.0001.	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
34.	4.1.01.14.29.0001.	Pajak Tanah Diatome	1.1.03.14.29.0001.	Piutang Pajak Tanah Diatome	7.1.01.14.29.0001.	Pajak Tanah Diatome-LO
35.	4.1.01.14.30.0001.	Pajak Tanah Liat	1.1.03.14.30.0001.	Piutang Pajak Tanah Liat	7.1.01.14.30.0001.	Pajak Tanah Liat-LO
36.	4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.1.03.14.37.0001.	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
37.	4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	1.1.03.15.01.0001.	Piutang PBBP2	7.1.01.15.01.0001.	PBBP2-LO
38.	4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.1.03.16.01.0001.	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	7.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
39.	4.1.01.16.02.0001.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.1.03.16.02.0001.	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	7.1.01.16.02.0001.	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
40.	4.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.1.04.01.01.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
41.	4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.1.04.01.02.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
42.	4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	1.1.06.13.01.0026.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan pasar-Kios	7.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios-LO
43.	4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.1.04.01.09.0001.	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	7.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
44.	4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1.1.04.01.11.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	7.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
45.	4.1.02.02.03.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.1.04.02.03.0001.	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	7.1.02.02.03.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
46.	4.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.1.04.02.05.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	7.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
47.	4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
48.	4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	1.1.04.02.10.0001.	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	7.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
49.	4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.1.04.03.07.0001.	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO
50.	4.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.1.05.01.01.0001.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	7.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
51.	4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.1.05.02.01.0001.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
52.	4.1.04.01.02.0054.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.1.06.01.02.0054.	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.1.04.01.02.0054.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO
53.	4.1.04.01.02.0055.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.1.06.01.02.0055.	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.1.04.01.02.0055.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO
54.	4.1.04.01.08.0001.	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	1.1.06.01.08.0001.	Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	7.1.04.01.08.0001.	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
55.	4.1.04.03.01.0001.	Hasil Sewa BMD	1.1.06.03.01.0001.	Piutang Hasil Sewa BMD	7.1.04.03.01.0001.	Hasil Sewa BMD-LO
56.	4.1.04.03.02.0001.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.1.06.03.02.0001.	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	7.1.04.03.02.0001.	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO
57.	4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.1.06.05.01.0001.	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	7.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
58.	4.1.04.05.02.0001.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.1.06.05.02.0001.	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	7.1.04.05.02.0001.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
59.	4.1.04.05.04.0001.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	1.1.06.05.04.0001.	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	7.1.04.05.04.0001.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
60.	4.1.04.05.05.0001.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.1.06.05.05.0001.	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	7.1.04.05.05.0001.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
61.	4.1.04.05.06.0001.	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	1.1.06.05.06.0001.	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	7.1.04.05.06.0001.	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO
62.	4.1.04.05.06.0002.	Remunerasi Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF)			7.1.04.05.06.0002.	Remunerasi Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF)-LO
63.	4.1.04.05.07.0001.	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas			7.1.04.05.07.0001.	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO
64.	4.1.04.06.01.0001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.1.06.06.01.0001.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.1.04.06.01.0001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
65.	4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.1.06.07.01.0001.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
66.	4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.1.06.08.01.0001.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	7.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
67.	4.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.1.06.08.02.0001.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	7.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
68.	4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.1.06.11.01.0001.	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
69.	4.1.04.12.06.0001.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.1.06.12.06.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	7.1.04.12.06.0001.	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
70.	4.1.04.12.07.0001.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.1.06.12.07.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.1.04.12.07.0001.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
71.	4.1.04.12.08.0005.	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.1.06.12.08.0005.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.1.04.12.08.0005.	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
72.	4.1.04.12.08.0007.	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling			7.1.04.12.08.0007.	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
73.	4.1.04.12.08.0009.	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.1.06.12.08.0009.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (fitness center)	7.1.04.12.08.0009.	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
74.	4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.1.06.12.09.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	7.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO
75.	4.1.04.12.09.0002.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain			7.1.04.12.09.0002.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO
76.	4.1.04.12.11.0001.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.1.06.12.11.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	7.1.04.12.11.0001.	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
77.	4.1.04.12.12.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.1.06.12.12.0001.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	7.1.04.12.12.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
78.	4.1.04.12.14.0023.	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil			7.1.04.12.14.0023.	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO
79.	4.1.04.12.14.0037.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.1.06.12.14.0037.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.1.04.12.14.0037.	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
80.	4.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2	1.1.06.12.15.0001.	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	7.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2-LO
81.	4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.1.06.12.16.0001.	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak	7.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO
82.	4.1.04.12.16.0002.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.1.06.12.16.0002.	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru	7.1.04.12.16.0002.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
83.	4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.1.06.15.04.0001.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	7.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO
84.	4.1.04.15.04.0002.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	1.1.06.15.04.0002.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	7.1.04.15.04.0002.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap-LO
85.	4.1.04.15.04.0003.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.1.06.15.04.0003.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota		
86.	4.1.04.15.04.0004.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.1.06.15.04.0004.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.1.04.15.04.0004.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota-LO
87.	4.1.04.15.04.0005.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.1.06.15.04.0005.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.1.04.15.04.0005.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-LO
88.	4.1.04.15.08.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS			7.1.04.15.08.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO
89.	4.1.04.15.15.0004.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			7.1.04.15.15.0004.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO
90.	4.1.04.15.15.0052.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat			7.1.04.15.15.0052.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat-LO
91.	4.1.04.15.16.0004.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.1.06.15.16.0004.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.1.04.15.16.0004.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO
92.	4.1.04.15.16.0060.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air			7.1.04.15.16.0060.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air-LO
93.	4.1.04.15.16.0063.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			7.1.04.15.16.0063.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-LO
94.	4.1.04.15.16.0986.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2			7.1.04.15.16.0986.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2-LO
95.	4.1.04.15.34.0005.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.1.06.15.34.0005.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.1.04.15.34.0005.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar-LO
96.	4.1.04.15.37.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu			7.1.04.15.37.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu-LO
97.	4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan			7.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO
98.	4.1.04.17.01.0001.	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD			7.1.04.17.01.0001.	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
99.	4.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.1.06.19.01.0001.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	7.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
100.	4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.1.07.01.01.0001.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	7.2.01.01.01.0001.	DBH PBB-LO
101.	4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	1.1.07.01.01.0002.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	7.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21-LO
102.	4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.1.07.01.01.0003.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
103.	4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	1.1.07.01.01.0004.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	7.2.01.01.01.0004.	DBH CHT-LO
104.	4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.1.07.01.01.0005.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	7.2.01.01.01.0005.	DBH SDA Minyak Bumi-LO
105.	4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.1.07.01.01.0006.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	7.2.01.01.01.0006.	DBH SDA Gas Bumi-LO
106.	4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.1.07.01.01.0008.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	7.2.01.01.01.0008.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO
107.	4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.1.07.01.01.0009.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	7.2.01.01.01.0009.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO
108.	4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.1.07.01.01.0010.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	7.2.01.01.01.0010.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
109.	4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.1.07.01.01.0013.	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	7.2.01.01.01.0013.	DBH SDA Perikanan-LO
110.	4.2.01.01.02.0001.	DAU	1.1.07.01.02.0001.	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU	7.2.01.01.02.0001.	DAU-LO
111.	4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			7.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO
112.	4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.1.07.01.03.0002.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
113.	4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.1.07.01.03.0003.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
114.	4.2.01.01.03.0006.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.1.07.01.03.0006.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	7.2.01.01.03.0006.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
115.	4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.1.07.01.03.0011.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	7.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO
116.	4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.1.07.01.03.0013.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
117.	4.2.01.01.03.0014.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.1.07.01.03.0014.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	7.2.01.01.03.0014.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO
118.	4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.1.07.01.03.0015.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	7.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO
119.	4.2.01.01.03.0018.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.1.07.01.03.0018.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	7.2.01.01.03.0018.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO
120.	4.2.01.01.03.0024.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	1.1.07.01.03.0024.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	7.2.01.01.03.0024.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO
121.	4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.1.07.01.03.0025.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	7.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO
122.	4.2.01.01.03.0027.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.1.07.01.03.0027.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.2.01.01.03.0028.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
123.	4.2.01.01.03.0030.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Pengawasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.1.07.01.03.0030.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Pengawasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	7.2.01.01.03.0030.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Pengawasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
124.	4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.1.07.01.03.0031.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO
125.	4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengawasan	1.1.07.01.03.0032.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengawasan	7.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengawasan-LO
126.	4.2.01.01.03.0033.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengawasan	1.1.07.01.03.0033.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Pengawasan	7.2.01.01.03.0033.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengawasan-LO
127.	4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1.1.07.01.03.0034.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO
128.	4.2.01.01.03.0035.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengawasan-Jalan	1.1.07.01.03.0035.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Pengawasan-Jalan	7.2.01.01.03.0035.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengawasan-Jalan-LO
129.	4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1.1.07.01.03.0037.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
130.	4.2.01.01.03.0039.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pengawasan	1.1.07.01.03.0039.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Pengawasan	7.2.01.01.03.0039.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pengawasan-LO
131.	4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.1.07.01.03.0040.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
132.	4.2.01.01.03.0042.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengawasan	1.1.07.01.03.0042.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Pengawasan	7.2.01.01.03.0042.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengawasan-LO
133.	4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengawasan	1.1.07.01.03.0043.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Pengawasan	7.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengawasan-LO
134.	4.2.01.01.03.0045.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Pengawasan-Lingkungan Hidup			7.2.01.01.03.0045.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Pengawasan-Lingkungan Hidup-LO
135.	4.2.01.01.03.0047.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	1.1.07.01.03.0047.	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	7.2.01.01.03.0047.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO
136.	4.2.01.01.03.0049.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Pengawasan			7.2.01.01.03.0049.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Pengawasan-LO
137.	4.2.01.01.03.0054.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler			7.2.01.01.03.0054.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler-LO
138.	4.2.01.01.03.0058.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting			7.2.01.01.03.0058.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO
139.	4.2.01.01.03.0060.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan			7.2.01.01.03.0060.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO
140.	4.2.01.01.03.0063.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Pengawasan			7.2.01.01.03.0063.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Pengawasan-LO
141.	4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler			7.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
142.	4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja			7.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
143.	4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.1.07.01.04.0004.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD	7.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
144.	4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.1.07.01.04.0005.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	7.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
145.	4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.1.07.01.04.0006.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD	7.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
146.	4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.1.07.01.04.0007.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD	7.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
147.	4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.1.07.01.04.0008.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	7.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO
148.	4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.1.07.01.04.0011.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK	7.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
149.	4.2.01.01.04.0012.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1.1.07.01.04.0012.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		
150.	4.2.01.01.04.0013.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.1.07.01.04.0013.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.2.01.01.04.0013.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO
151.	4.2.01.01.04.0014.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.1.07.01.04.0014.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	7.2.01.01.04.0014.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO
152.	4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.1.07.01.04.0015.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO
153.	4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.1.07.01.04.0016.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-PK2UKM	7.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO
154.	4.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.1.07.01.04.0017.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	7.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO
155.	4.2.01.01.04.0018.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.1.07.01.04.0018.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	7.2.01.01.04.0018.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan-LO
156.	4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.1.07.01.04.0019.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	7.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO
157.	4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.1.07.01.04.0020.	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	7.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO
158.	4.2.01.01.04.0022.	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			7.2.01.01.04.0022.	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
159.	4.2.01.01.04.0023.	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian			7.2.01.01.04.0023.	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
160.	4.2.01.01.04.0024.	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM			7.2.01.01.04.0024.	DAK Non Fisik Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO
161.	4.2.01.01.04.0025.	DAK Non Fisik-PK2UMK			7.2.01.01.04.0025.	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO
162.	4.2.01.01.04.0033.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			7.2.01.01.04.0033.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO
163.	4.2.01.01.04.0035.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas			7.2.01.01.04.0035.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO
164.	4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	1.1.07.05.01.0001.	Piutang Dana Desa	7.2.01.05.01.0001.	Dana Desa-LO
165.	4.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal			7.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal-LO
166.	4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0001.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
167.	4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0002.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
168.	4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0003.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
169.	4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.1.08.01.01.0004.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO
170.	4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1.1.08.01.01.0005.	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
171.	4.2.02.02.01.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi			7.2.02.02.01.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
172.	4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.1.08.02.02.0001.	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	7.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
173.	4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			7.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
174.	4.3.01.02.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah			7.3.01.02.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO
175.	4.3.01.04.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri			7.3.01.04.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
176.	4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis			7.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
177.	4.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS			7.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
178.	4.3.03.01.02.0005.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	1.1.06.15.34.0001.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.3.03.01.02.0005.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO
179.	4.3.03.02.01.0002.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	1.1.06.18.01.0001.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.3.03.02.01.0002.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO
180.	5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS			8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS
181.	5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK			8.1.01.01.01.0002.	Beban Gaji Pokok PPPK
182.	5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS
183.	5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			8.1.01.01.02.0002.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK
184.	5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS
185.	5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS
186.	5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			8.1.01.01.04.0002.	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
187.	5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
188.	5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			8.1.01.01.05.0002.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK
189.	5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS			8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS
190.	5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK			8.1.01.01.06.0002.	Beban Tunjangan Beras PPPK
191.	5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			8.1.01.01.07.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
192.	5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			8.1.01.01.07.0002.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
193.	5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS			8.1.01.01.08.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS
194.	5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			8.1.01.01.08.0002.	Beban Pembulatan Gaji PPPK
195.	5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			8.1.01.01.09.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
196.	5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			8.1.01.01.09.0002.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
197.	5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			8.1.01.01.10.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
198.	5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			8.1.01.01.10.0002.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
199.	5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			8.1.01.01.11.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
200.	5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			8.1.01.01.11.0002.	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK
201.	5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			8.1.01.01.12.0001.	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
202.	5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			8.1.01.02.01.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
203.	5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			8.1.01.02.01.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
204.	5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS			8.1.01.02.02.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
205.	5.1.01.02.02.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK			8.1.01.02.02.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
206.	5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			8.1.01.02.03.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
207.	5.1.01.02.03.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK			8.1.01.02.03.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
208.	5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS			8.1.01.02.04.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
209.	5.1.01.02.04.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK			8.1.01.02.04.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
210.	5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			8.1.01.02.05.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
211.	5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK			8.1.01.02.05.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
212.	5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan			8.1.01.03.02.0001.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
213.	5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD			8.1.01.03.03.0001.	Beban TPG PNSD
214.	5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD			8.1.01.03.04.0001.	Beban TKG PNSD
215.	5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD			8.1.01.03.05.0001.	Beban Tamsil Guru PNSD
216.	5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN			8.1.01.03.06.0001.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
217.	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
218.	5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			8.1.01.03.07.0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
219.	5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			8.1.01.03.07.0003.	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
220.	5.1.01.03.08.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan			8.1.01.03.08.0001.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
221.	5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			8.1.01.03.08.0002.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
222.	5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD			8.1.01.04.01.0001.	Beban Uang Representasi DPRD
223.	5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD			8.1.01.04.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
224.	5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD			8.1.01.04.03.0001.	Beban Tunjangan Beras DPRD
225.	5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD			8.1.01.04.04.0001.	Beban Uang Paket DPRD
226.	5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD			8.1.01.04.05.0001.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
227.	5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD			8.1.01.04.06.0001.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
228.	5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD			8.1.01.04.07.0001.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
229.	5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD			8.1.01.04.08.0001.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
230.	5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD			8.1.01.04.09.0001.	Beban Tunjangan Reses DPRD
231.	5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD			8.1.01.04.10.0001.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
232.	5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD			8.1.01.04.12.0001.	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
233.	5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD			8.1.01.04.12.0002.	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
234.	5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD			8.1.01.04.12.0003.	Beban Jaminan Kematian DPRD
235.	5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD			8.1.01.04.12.0004.	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
236.	5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD			8.1.01.04.13.0001.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
237.	5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD			8.1.01.04.14.0001.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
238.	5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH			8.1.01.05.01.0001.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
239.	5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH			8.1.01.05.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
240.	5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH			8.1.01.05.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
241.	5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH			8.1.01.05.04.0001.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
242.	5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH			8.1.01.05.05.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
243.	5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH			8.1.01.05.06.0001.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
244.	5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH			8.1.01.05.07.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
245.	5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH			8.1.01.05.08.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
246.	5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH			8.1.01.05.09.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
247.	5.1.01.05.10.0006.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel			8.1.01.05.10.0006.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
248.	5.1.01.05.10.0007.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran			8.1.01.05.10.0007.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
249.	5.1.01.05.10.0008.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan			8.1.01.05.10.0008.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
250.	5.1.01.05.10.0009.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame			8.1.01.05.10.0009.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
251.	5.1.01.05.10.0010.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan			8.1.01.05.10.0010.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
252.	5.1.01.05.10.0011.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir			8.1.01.05.10.0011.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
253.	5.1.01.05.10.0012.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah			8.1.01.05.10.0012.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
254.	5.1.01.05.10.0014.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			8.1.01.05.10.0014.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan-Logam dan Batuan
255.	5.1.01.05.10.0015.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			8.1.01.05.10.0015.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
256.	5.1.01.05.10.0016.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			8.1.01.05.10.0016.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
257.	5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD			8.1.01.06.01.0001.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
258.	5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH			8.1.01.06.02.0001.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
259.	5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS			8.1.01.88.88.8888.	Beban Pegawai BOS
260.	5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD			8.1.01.99.99.9999.	Beban Pegawai BLUD
261.	5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.1.02.01.01.0001.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
262.	5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia	8.1.02.01.01.0002.	Beban Bahan-Bahan Kimia
263.	5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.1.12.01.01.0004.	Bahan Bakar dan Pelumas	8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
264.	5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.1.12.01.01.0005.	Bahan Baku	8.1.02.01.01.0005.	Beban Bahan-Bahan Baku
265.	5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.1.12.01.01.0008.	Bahan/Bibit Tanaman	8.1.02.01.01.0008.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
266.	5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.1.12.01.01.0009.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.1.02.01.01.0009.	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
267.	5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.1.12.01.01.0010.	Isi Tabung Gas	8.1.02.01.01.0010.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas
268.	5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.1.12.01.01.0011.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	8.1.02.01.01.0011.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
269.	5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.1.12.01.01.0012.	Bahan Lainnya	8.1.02.01.01.0012.	Beban Bahan-Bahan Lainnya
270.	5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.1.12.01.02.0001.	Suku Cadang Alat Angkutan	8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
271.	5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	1.1.12.01.02.0006.	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	8.1.02.01.01.0018.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
272.	5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.1.12.01.02.0007.	Suku Cadang Alat Pertanian	8.1.02.01.01.0019.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
273.	5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.1.12.01.02.0011.	Suku Cadang Lainnya	8.1.02.01.01.0023.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
274.	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
275.	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.1.12.01.03.0002.	Kertas dan Cover	8.1.02.01.01.0025.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
276.	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak	8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
277.	5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos	8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
278.	5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.1.12.01.03.0005.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	8.1.02.01.01.0028.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
279.	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006.	Bahan Komputer	8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
280.	5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.1.12.01.03.0007.	Perabot Kantor	8.1.02.01.01.0030.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
281.	5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.1.12.01.03.0008.	Alat Listrik	8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
282.	5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.1.12.01.03.0009.	Perlengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0032.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
283.	5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.1.12.01.03.0011.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.1.02.01.01.0034.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga
284.	5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.1.12.01.03.0012.	Suvenir/Cendera Mata	8.1.02.01.01.0035.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
285.	5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
286.	5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.1.12.01.04.0001.	Obat	8.1.02.01.01.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat
287.	5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.1.12.01.04.0002.	Obat-obatan Lainnya	8.1.02.01.01.0038.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
288.	5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	8.1.02.01.01.0039.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
289.	5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8.1.02.01.01.0040.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
290.	5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.1.12.01.06.0001.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	8.1.02.01.01.0041.	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
291.	5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	1.1.12.01.06.0002.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	8.1.02.01.01.0042.	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
292.	5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.1.12.01.07.0001.	Natura	8.1.02.01.01.0043.	Beban Natura dan Pakan-Natura
293.	5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.1.12.01.07.0002.	Pakan	8.1.02.01.01.0044.	Beban Natura dan Pakan-Pakan
294.	5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.1.12.01.07.0003.	Natura dan Pakan Lainnya	8.1.02.01.01.0045.	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
295.	5.1.02.01.01.0049.	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	1.1.12.01.08.0004.	Persediaan Penelitian Lainnya	8.1.02.01.01.0049.	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
296.	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat
297.	5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			8.1.02.01.01.0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
298.	5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			8.1.02.01.01.0054.	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
299.	5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan			8.1.02.01.01.0055.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
300.	5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			8.1.02.01.01.0056.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
301.	5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial			8.1.02.01.01.0057.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
302.	5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			8.1.02.01.01.0058.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
303.	5.1.02.01.01.0060.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD			8.1.02.01.01.0060.	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
304.	5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)			8.1.02.01.01.0061.	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
305.	5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			8.1.02.01.01.0062.	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
306.	5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			8.1.02.01.01.0063.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
307.	5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			8.1.02.01.01.0064.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
308.	5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)			8.1.02.01.01.0065.	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
309.	5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)			8.1.02.01.01.0066.	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
310.	5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan			8.1.02.01.01.0067.	Beban Pakaian Penyelamatan
311.	5.1.02.01.01.0068.	Belanja Pakaian Siaga			8.1.02.01.01.0068.	Beban Pakaian Siaga
312.	5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja			8.1.02.01.01.0070.	Beban Pakaian Pelatihan Kerja
313.	5.1.02.01.01.0072.	Belanja Pakaian Kerja Bengkel			8.1.02.01.01.0072.	Beban Pakaian Kerja Bengkel
314.	5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah			8.1.02.01.01.0074.	Beban Pakaian Adat Daerah
315.	5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional			8.1.02.01.01.0075.	Beban Pakaian Batik Tradisional
316.	5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga			8.1.02.01.01.0076.	Beban Pakaian Olahraga
317.	5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka			8.1.02.01.01.0077.	Beban Pakaian Paskibraka

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
318.	5.1.02.01.01.0078.	Belanja Pakaian Jas/Safari			8.1.02.01.01.0078.	Beban Pakaian Jas/Safari
319.	5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan			8.1.02.01.02.0003.	Beban Komponen-Komponen Peralatan
320.	5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya			8.1.02.01.02.0006.	Beban Komponen-Komponen Lainnya
321.	5.1.02.01.04.0123.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			8.1.02.01.04.0123.	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
322.	5.1.02.01.04.0204.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum			8.1.02.01.04.0204.	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
323.	5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			8.1.02.02.01.0001.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
324.	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
325.	5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
326.	5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara			8.1.02.02.01.0005.	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
327.	5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			8.1.02.02.01.0006.	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
328.	5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan			8.1.02.02.01.0007.	Beban Honorarium Rohaniwan
329.	5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			8.1.02.02.01.0008.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
330.	5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian			8.1.02.02.01.0009.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian
331.	5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			8.1.02.02.01.0011.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
332.	5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			8.1.02.02.01.0012.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
333.	5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan			8.1.02.02.01.0013.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
334.	5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			8.1.02.02.01.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
335.	5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium			8.1.02.02.01.0015.	Beban Jasa Tenaga Laboratorium
336.	5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			8.1.02.02.01.0016.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
337.	5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			8.1.02.02.01.0018.	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
338.	5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana			8.1.02.02.01.0019.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana
339.	5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan			8.1.02.02.01.0022.	Beban Jasa Tenaga Perhubungan
340.	5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan			8.1.02.02.01.0023.	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
341.	5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			8.1.02.02.01.0025.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
342.	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi
343.	5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer
344.	5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			8.1.02.02.01.0028.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum
345.	5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli			8.1.02.02.01.0029.	Beban Jasa Tenaga Ahli
346.	5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
347.	5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			8.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan
348.	5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir			8.1.02.02.01.0033.	Beban Jasa Tenaga Supir
349.	5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak			8.1.02.02.01.0034.	Beban Jasa Tenaga Juru Masak
350.	5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik			8.1.02.02.01.0035.	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
351.	5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			8.1.02.02.01.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
352.	5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			8.1.02.02.01.0039.	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
353.	5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik			8.1.02.02.01.0041.	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
354.	5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			8.1.02.02.01.0042.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
355.	5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan			8.1.02.02.01.0043.	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan
356.	5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			8.1.02.02.01.0046.	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
357.	5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
358.	5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi			8.1.02.02.01.0048.	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi
359.	5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga			8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
360.	5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi			8.1.02.02.01.0050.	Beban Jasa Kalibrasi
361.	5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah			8.1.02.02.01.0051.	Beban Jasa Pengolahan Sampah

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
362.	5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi			8.1.02.02.01.0052.	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
363.	5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah			8.1.02.02.01.0053.	Beban Jasa Pengukuran Tanah
364.	5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
365.	5.1.02.02.01.0057.	Belanja Jasa Operator Kapal			8.1.02.02.01.0057.	Beban Jasa Operator Kapal
366.	5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon			8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon
367.	5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air			8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air
368.	5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik			8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik
369.	5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
370.	5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
371.	5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman			8.1.02.02.01.0064.	Beban Paket/Pengiriman
372.	5.1.02.02.01.0065.	Belanja Penambahan Daya			8.1.02.02.01.0065.	Beban Penambahan Daya
373.	5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan			8.1.02.02.01.0066.	Beban Registrasi/Keanggotaan
374.	5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
375.	5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up			8.1.02.02.01.0073.	Beban Medical Check Up
376.	5.1.02.02.01.0077.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN			8.1.02.02.01.0077.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN
377.	5.1.02.02.02.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			8.1.02.02.02.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
378.	5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3			8.1.02.02.02.0003.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3
379.	5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3			8.1.02.02.02.0004.	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3
380.	5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
381.	5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
382.	5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			8.1.02.02.02.0007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
383.	5.1.02.02.02.0009.	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS			8.1.02.02.02.0009.	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS
384.	5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal			8.1.02.02.03.0001.	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
385.	5.1.02.02.04.0003.	Belanja Sewa Excavator			8.1.02.02.04.0003.	Beban Sewa Excavator
386.	5.1.02.02.04.0011.	Belanja Sewa Mesin Proses			8.1.02.02.04.0011.	Beban Sewa Mesin Proses
387.	5.1.02.02.04.0012.	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya			8.1.02.02.04.0012.	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya
388.	5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya			8.1.02.02.04.0034.	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya
389.	5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			8.1.02.02.04.0035.	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
390.	5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			8.1.02.02.04.0036.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
391.	5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			8.1.02.02.04.0037.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
392.	5.1.02.02.04.0038.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua			8.1.02.02.04.0038.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
393.	5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			8.1.02.02.04.0043.	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
394.	5.1.02.02.04.0044.	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang			8.1.02.02.04.0044.	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
395.	5.1.02.02.04.0045.	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang			8.1.02.02.04.0045.	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
396.	5.1.02.02.04.0048.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang			8.1.02.02.04.0048.	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
397.	5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			8.1.02.02.04.0049.	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
398.	5.1.02.02.04.0052.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya			8.1.02.02.04.0052.	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
399.	5.1.02.02.04.0090.	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain			8.1.02.02.04.0090.	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain
400.	5.1.02.02.04.0102.	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya			8.1.02.02.04.0102.	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya
401.	5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)			8.1.02.02.04.0115.	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
402.	5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			8.1.02.02.04.0117.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
403.	5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel			8.1.02.02.04.0118.	Beban Sewa Mebel
404.	5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			8.1.02.02.04.0123.	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
405.	5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			8.1.02.02.04.0132.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio
406.	5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film			8.1.02.02.04.0133.	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film
407.	5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya			8.1.02.02.04.0137.	Beban Sewa Alat Studio Lainnya
408.	5.1.02.02.04.0145.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus			8.1.02.02.04.0145.	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus
409.	5.1.02.02.04.0202.	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi			8.1.02.02.04.0202.	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
410.	5.1.02.02.04.0244.	Belanja Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia			8.1.02.02.04.0244.	Beban Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
411.	5.1.02.02.04.0309.	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika			8.1.02.02.04.0309.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
412.	5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum			8.1.02.02.04.0355.	Beban Sewa Peralatan Umum
413.	5.1.02.02.04.0406.	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya			8.1.02.02.04.0406.	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya
414.	5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya			8.1.02.02.04.0411.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya
415.	5.1.02.02.04.0416.	Belanja Sewa Elektronik/Electric			8.1.02.02.04.0416.	Beban Sewa Elektronik/Electric
416.	5.1.02.02.04.0444.	Belanja Sewa Suara			8.1.02.02.04.0444.	Beban Sewa Suara
417.	5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor			8.1.02.02.05.0001.	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
418.	5.1.02.02.05.0002.	Belanja Sewa Bangunan Gudang			8.1.02.02.05.0002.	Beban Sewa Bangunan Gudang
419.	5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			8.1.02.02.05.0009.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
420.	5.1.02.02.05.0011.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga			8.1.02.02.05.0011.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
421.	5.1.02.02.05.0014.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool			8.1.02.02.05.0014.	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
422.	5.1.02.02.05.0025.	Belanja Sewa Bangunan Terbuka			8.1.02.02.05.0025.	Beban Sewa Bangunan Terbuka
423.	5.1.02.02.05.0030.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			8.1.02.02.05.0030.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
424.	5.1.02.02.05.0033.	Belanja Sewa Bangunan Parkir			8.1.02.02.05.0033.	Beban Sewa Bangunan Parkir
425.	5.1.02.02.05.0037.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			8.1.02.02.05.0037.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
426.	5.1.02.02.05.0038.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I			8.1.02.02.05.0038.	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I
427.	5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama			8.1.02.02.05.0042.	Beban Sewa Asrama
428.	5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel			8.1.02.02.05.0043.	Beban Sewa Hotel
429.	5.1.02.02.05.0049.	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun			8.1.02.02.05.0049.	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun
430.	5.1.02.02.05.0050.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			8.1.02.02.05.0050.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
431.	5.1.02.02.06.0131.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya			8.1.02.02.06.0131.	Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya
432.	5.1.02.02.07.0013.	Belanja Sewa Audio Visual			8.1.02.02.07.0013.	Beban Sewa Audio Visual
433.	5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik			8.1.02.02.07.0028.	Beban Sewa Alat Musik
434.	5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian			8.1.02.02.07.0030.	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian
435.	5.1.02.02.08.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural			8.1.02.02.09.0001.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
436.	5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural			8.1.02.02.09.0002.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
437.	5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung			8.1.02.02.09.0003.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
438.	5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior			8.1.02.02.09.0004.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
439.	5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			8.1.02.02.09.0005.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
440.	5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan			8.1.02.02.09.0007.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
441.	5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air			8.1.02.02.09.0008.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
442.	5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi			8.1.02.02.09.0009.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
443.	5.1.02.02.08.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi			8.1.02.02.09.0011.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
444.	5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi			8.1.02.02.09.0012.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
445.	5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya			8.1.02.02.09.0013.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
446.	5.1.02.02.08.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah			8.1.02.02.09.0015.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
447.	5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape			8.1.02.02.09.0016.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
448.	5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang			8.1.02.02.09.0017.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
449.	5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			8.1.02.02.09.0018.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
450.	5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			8.1.02.02.09.0019.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
451.	5.1.02.02.08.0028.	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian			8.1.02.02.09.0028.	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
452.	5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan			8.1.02.02.09.0032.	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
453.	5.1.02.02.08.0033.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan			8.1.02.02.09.0033.	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
454.	5.1.02.02.08.0037.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya			8.1.02.02.09.0037.	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
455.	5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan			8.1.02.02.10.0001.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
456.	5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika			8.1.02.02.10.0003.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
457.	5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei			8.1.02.02.10.0011.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
458.	5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			8.1.02.02.10.0012.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
459.	5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen			8.1.02.02.09.0013.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
460.	5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			8.1.02.02.10.0014.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
461.	5.1.02.02.09.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata			8.1.02.02.10.0015.	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
462.	5.1.02.02.09.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an			8.1.02.02.10.0019.	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an
463.	5.1.02.02.09.0022.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataa-an			8.1.02.02.09.0022.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
464.	5.1.02.02.11.0001.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1			8.1.02.02.12.0001.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
465.	5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2			8.1.02.02.12.0002.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
466.	5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			8.1.02.02.13.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
467.	5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi			8.1.02.02.13.0002.	Beban Sosialisasi
468.	5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis			8.1.02.02.13.0003.	Beban Bimbingan Teknis
469.	5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan			8.1.02.02.13.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan
470.	5.1.02.02.14.0018.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir			8.1.02.02.15.0018.	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
471.	5.1.02.03.01.0001.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal			8.1.02.03.01.0001.	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
472.	5.1.02.03.01.0005.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga			8.1.02.03.01.0005.	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
473.	5.1.02.03.01.0018.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir			8.1.02.03.01.0018.	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
474.	5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman			8.1.02.03.01.0029.	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
475.	5.1.02.03.01.0035.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya			8.1.02.03.01.0035.	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
476.	5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set			8.1.02.03.02.0022.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set
477.	5.1.02.03.02.0034.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya			8.1.02.03.02.0034.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
478.	5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			8.1.02.03.02.0035.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
479.	5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			8.1.02.03.02.0036.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
480.	5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan			8.1.02.03.02.0037.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
		Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
481.	5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			8.1.02.03.02.0038.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
482.	5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			8.1.02.03.02.0039.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
483.	5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus			8.1.02.03.02.0040.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
484.	5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya			8.1.02.03.02.0043.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
485.	5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			8.1.02.03.02.0049.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
486.	5.1.02.03.02.0050.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus			8.1.02.03.02.0050.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
487.	5.1.02.03.02.0052.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya			8.1.02.03.02.0052.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
488.	5.1.02.03.02.0086.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi			8.1.02.03.02.0086.	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
489.	5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman			8.1.02.03.02.0103.	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
490.	5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik			8.1.02.03.02.0113.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
491.	5.1.02.03.02.0114.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah			8.1.02.03.02.0114.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
492.	5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Pengandaan)			8.1.02.03.02.0115.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Pengandaan)
493.	5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			8.1.02.03.02.0116.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
494.	5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			8.1.02.03.02.0117.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
495.	5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel			8.1.02.03.02.0118.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
496.	5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih			8.1.02.03.02.0120.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
497.	5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
498.	5.1.02.03.02.0122.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur			8.1.02.03.02.0122.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
499.	5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			8.1.02.03.02.0123.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
500.	5.1.02.03.02.0126.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat			8.1.02.03.02.0126.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
501.	5.1.02.03.02.0130.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat			8.1.02.03.02.0130.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
502.	5.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio			8.1.02.03.02.0132.	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
503.	5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film			8.1.02.03.02.0133.	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
504.	5.1.02.03.02.0204.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum			8.1.02.03.02.0204.	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
505.	5.1.02.03.02.0218.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic			8.1.02.03.02.0218.	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
506.	5.1.02.03.02.0232.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya			8.1.02.03.02.0232.	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
507.	5.1.02.03.02.0237.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya			8.1.02.03.02.0237.	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
508.	5.1.02.03.02.0293.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lain			8.1.02.03.02.0293.	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
509.	5.1.02.03.02.0318.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga			8.1.02.03.02.0318.	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
510.	5.1.02.03.02.0335.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja			8.1.02.03.02.0335.	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
511.	5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan			8.1.02.03.02.0404.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
512.	5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
513.	5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya			8.1.02.03.02.0406.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
514.	5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			8.1.02.03.02.0409.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
515.	5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan			8.1.02.03.02.0410.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
516.	5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			8.1.02.03.02.0411.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
517.	5.1.02.03.02.0446.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman			8.1.02.03.02.0446.	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
518.	5.1.02.03.02.0472.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment			8.1.02.03.02.0472.	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
519.	5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			8.1.02.03.02.0494.	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
520.	5.1.02.03.02.0502.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut			8.1.02.03.02.0502.	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
521.	5.1.02.03.02.0505.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan			8.1.02.03.02.0505.	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
522.	5.1.02.03.02.0509.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya			8.1.02.03.02.0509.	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
523.	5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Kerja-Bangunan Gedung Kantor			8.1.02.03.03.0001.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Kerja-Bangunan Gedung Kantor
524.	5.1.02.03.03.0002.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang			8.1.02.03.03.0002.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
525.	5.1.02.03.03.0003.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar			8.1.02.03.03.0003.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
526.	5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi			8.1.02.03.03.0004.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
527.	5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan			8.1.02.03.03.0006.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
528.	5.1.02.03.03.0007.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium			8.1.02.03.03.0007.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
529.	5.1.02.03.03.0008.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah			8.1.02.03.03.0008.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
530.	5.1.02.03.03.0009.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			8.1.02.03.03.0009.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
531.	5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			8.1.02.03.03.0010.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
532.	5.1.02.03.03.0011.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat			8.1.02.03.03.0011.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
		Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga				Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
533.	5.1.02.03.03.0012.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar			8.1.02.03.03.0012.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
534.	5.1.02.03.03.0016.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan			8.1.02.03.03.0016.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
535.	5.1.02.03.03.0017.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum			8.1.02.03.03.0017.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
536.	5.1.02.03.03.0018.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara			8.1.02.03.03.0018.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
537.	5.1.02.03.03.0020.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan			8.1.02.03.03.0020.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
538.	5.1.02.03.03.0021.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan			8.1.02.03.03.0021.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
539.	5.1.02.03.03.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam			8.1.02.03.03.0026.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
540.	5.1.02.03.03.0030.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			8.1.02.03.03.0030.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
541.	5.1.02.03.03.0033.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			8.1.02.03.03.0033.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
542.	5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman			8.1.02.03.03.0036.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
543.	5.1.02.03.03.0037.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			8.1.02.03.03.0037.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
544.	5.1.02.03.03.0041.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan			8.1.02.03.03.0041.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
545.	5.1.02.03.03.0042.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama			8.1.02.03.03.0042.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
546.	5.1.02.03.03.0050.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			8.1.02.03.03.0050.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
547.	5.1.02.03.03.0052.	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu			8.1.02.03.03.0052.	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
548.	5.1.02.03.03.0054.	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya			8.1.02.03.03.0054.	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
549.	5.1.02.03.03.0055.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai			8.1.02.03.03.0055.	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
550.	5.1.02.03.03.0057.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi			8.1.02.03.03.0057.	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
551.	5.1.02.03.03.0063.	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar			8.1.02.03.03.0063.	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
552.	5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten			8.1.02.03.04.0003.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
553.	5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya			8.1.02.03.04.0010.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
554.	5.1.02.03.04.0015.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa			8.1.02.03.04.0015.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
555.	5.1.02.03.04.0029.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi			8.1.02.03.04.0029.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
556.	5.1.02.03.04.0031.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya			8.1.02.03.04.0031.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
557.	5.1.02.03.04.0035.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut			8.1.02.03.04.0035.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
558.	5.1.02.03.04.0048.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			8.1.02.03.04.0048.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
559.	5.1.02.03.04.0076.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air			8.1.02.03.04.0076.	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
560.	5.1.02.03.04.0103.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya			8.1.02.03.04.0103.	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
561.	5.1.02.03.04.0118.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain			8.1.02.03.04.0118.	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
562.	5.1.02.03.04.0123.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya			8.1.02.03.04.0123.	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
563.	5.1.02.03.04.0125.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi			8.1.02.03.04.0125.	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
564.	5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya			8.1.02.03.04.0126.	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
565.	5.1.02.03.05.0001.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum			8.1.02.03.05.0001.	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
566.	5.1.02.03.05.0012.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya			8.1.02.03.05.0012.	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
567.	5.1.02.03.05.0030.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian			8.1.02.03.05.0030.	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
568.	5.1.02.03.05.0064.	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya			8.1.02.03.05.0064.	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
569.	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa
570.	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
571.	5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			8.1.02.04.01.0004.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
572.	5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			8.1.02.04.01.0005.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
573.	5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa di Luar Negeri			8.1.02.04.02.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa di Luar Negeri
574.	5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			8.1.02.05.01.0001.	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan
575.	5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi			8.1.02.05.01.0002.	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi
576.	5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa			8.1.02.05.01.0003.	Beban Beasiswa
577.	5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)			8.1.02.05.01.0005.	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
578.	5.1.02.05.01.0008.	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain			8.1.02.05.01.0008.	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain
579.	5.1.02.05.01.0009.	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain			8.1.02.05.01.0009.	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain
580.	5.1.02.05.01.0011.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat			8.1.02.05.01.0011.	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
581.	5.1.02.05.01.0012.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu			8.1.02.05.01.0012.	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu
582.	5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			8.1.02.05.02.0001.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
583.	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat			8.1.02.05.02.0002.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
584.	5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS			8.1.02.88.88.8888.	Beban Barang dan Jasa BOS
585.	5.1.02.89.02.0002.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja			8.1.02.89.02.0002.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja
586.	5.1.02.89.03.0002.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja			8.1.02.89.03.0002.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
587.	5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD			8.1.02.99.99.9999.	Beban Barang dan Jasa BLUD
588.	5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			8.1.05.01.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
589.	5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			8.1.05.01.02.0001.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
590.	5.1.05.01.03.0001.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat			8.1.05.01.03.0001.	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
591.	5.1.05.04.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada BUMD			8.1.05.04.02.0001.	Beban Hibah Barang kepada BUMD
592.	5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
593.	5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			8.1.05.05.01.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
594.	5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			8.1.05.05.02.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
595.	5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			8.1.05.05.02.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
596.	5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			8.1.05.05.03.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
597.	5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			8.1.05.05.03.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
598.	5.1.05.06.02.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta			8.1.05.06.02.0001.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
599.	5.1.05.06.03.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta			8.1.05.06.03.0001.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
600.	5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			8.1.05.07.01.0001.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
601.	5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu			8.1.06.01.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
602.	5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu			8.1.06.01.02.0001.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
603.	5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga			8.1.06.02.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
604.	5.1.06.02.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga			8.1.06.02.02.0001.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
605.	5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat			8.1.06.03.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
606.	5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat			8.1.06.03.02.0001.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
607.	5.2.01.01.01.0002.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.3.01.01.01.0002.	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan		
608.	5.2.01.01.01.0004.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.3.01.01.01.0004.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		
609.	5.2.01.01.01.0005.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	1.3.01.01.01.0005.	Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga		
610.	5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.3.01.01.01.0007.	Tanah Persil Lainnya		
611.	5.2.01.01.02.0009.	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	1.3.01.01.02.0009.	Tanah Non Persil Lainnya		
612.	5.2.01.01.03.0001.	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	1.3.01.01.03.0001.	Tanah Lapangan Olahraga		
613.	5.2.01.01.03.0007.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1.3.01.01.03.0007.	Tanah untuk Jalan		
614.	5.2.01.01.03.0008.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	1.3.01.01.03.0008.	Tanah untuk Bangunan Air		
615.	5.2.01.01.03.0012.	Belanja Modal Tanah untuk Makam	1.3.01.01.03.0012.	Tanah untuk Makam		
616.	5.2.01.01.03.0019.	Belanja Modal Lapangan Lainnya	1.3.01.01.03.0019.	Lapangan Lainnya		
617.	5.2.02.01.01.0003.	Belanja Modal Excavator	1.3.02.01.01.0003.	Excavator		
618.	5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	1.3.02.01.01.0011.	Mesin Proses		
619.	5.2.02.01.02.0006.	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	1.3.02.01.02.0006.	Alat Besar Apung Lainnya		
620.	5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	1.3.02.01.03.0004.	Electric Generating Set		
621.	5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	1.3.02.01.03.0005.	Pompa		
622.	5.2.02.01.03.0008.	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	1.3.02.01.03.0008.	Alat Pengolahan Air Kotor		
623.	5.2.02.01.03.0012.	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	1.3.02.01.03.0012.	Perlengkapan Kebakaran Hutan		
624.	5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.3.02.01.03.0016.	Alat Bantu Lainnya		
625.	5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.3.02.02.01.0001.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
626.	5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.3.02.02.01.0002.	Kendaraan Bermotor Penumpang		
627.	5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.3.02.02.01.0003.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
628.	5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.3.02.02.01.0004.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
629.	5.2.02.02.01.0005.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.3.02.02.01.0005.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
630.	5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.3.02.02.01.0006.	Kendaraan Bermotor Khusus		
631.	5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.3.02.02.01.0009.	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		
632.	5.2.02.02.02.0001.	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.3.02.02.02.0001.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
633.	5.2.02.02.03.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.3.02.02.03.0002.	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		
634.	5.2.02.03.01.0002.	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.3.02.03.01.0002.	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)		
635.	5.2.02.03.01.0006.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	1.3.02.03.01.0006.	Perkakas Bengkel Kayu		
636.	5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.3.02.03.01.0010.	Alat Bengkel Bermesin Lainnya		
637.	5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.3.02.03.02.0005.	Perkakas Standard (Standard Tools)		
638.	5.2.02.03.02.0007.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.3.02.03.02.0007.	Perkakas Bengkel Kerja		
639.	5.2.02.03.02.0011.	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	1.3.02.03.02.0011.	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting		
640.	5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	1.3.02.03.02.0013.	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya		
641.	5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	1.3.02.03.03.0001.	Alat Ukur Universal		
642.	5.2.02.03.03.0008.	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	1.3.02.03.03.0008.	Alat Ukur/Pembanding		
643.	5.2.02.03.03.0010.	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.3.02.03.03.0010.	Alat Timbangan/Biara		
644.	5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.3.02.03.03.0021.	Alat Ukur Lainnya		
645.	5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.3.02.04.01.0001.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
646.	5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.3.02.04.01.0002.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak		
647.	5.2.02.04.01.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.3.02.08.01.0041.	Alat Laboratorium Pertanian		
648.	5.2.02.04.01.0008.	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	1.3.02.04.01.0008.	Alat Produksi Perikanan		
649.	5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.3.02.04.01.0010.	Alat Pengolahan Lainnya		
650.	5.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.3.02.05.01.0002.	Mesin Hitung/Mesin Jumlah		
651.	5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.3.02.05.01.0003.	Alat Reproduksi (Penggandaan)		
652.	5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.3.02.05.01.0004.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		
653.	5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.3.02.05.01.0005.	Alat Kantor Lainnya		
654.	5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	1.3.02.05.02.0001.	Mebel		
655.	5.2.02.05.02.0002.	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.3.02.05.02.0002.	Alat Pengukur Waktu		
656.	5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	1.3.02.05.02.0003.	Alat Pembersih		
657.	5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	1.3.02.05.02.0004.	Alat Pendingin		
658.	5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	1.3.02.05.02.0005.	Alat Dapur		
659.	5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.3.02.05.02.0006.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
660.	5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.3.02.05.02.0007.	Alat Pemadam Kebakaran		
661.	5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0001.	Meja Kerja Pejabat		
662.	5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	1.3.02.05.03.0002.	Meja Rapat Pejabat		
663.	5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0003.	Kursi Kerja Pejabat		
664.	5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	1.3.02.05.03.0004.	Kursi Rapat Pejabat		
665.	5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0005.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		
666.	5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	1.3.02.05.03.0006.	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat		
667.	5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	1.3.02.05.03.0007.	Lemari dan Arsip Pejabat		
668.	5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.3.02.06.01.0001.	Peralatan Studio Audio		
669.	5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.3.02.06.01.0002.	Peralatan Studio Video dan Film		
670.	5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	1.3.02.06.01.0003.	Peralatan Studio Gambar		
671.	5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.3.02.06.01.0004.	Peralatan Cetak		
672.	5.2.02.06.01.0005.	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1.3.02.06.01.0005.	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah		
673.	5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.3.02.06.01.0006.	Alat Studio Lainnya		
674.	5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.3.02.06.02.0001.	Alat Komunikasi Telephone		
675.	5.2.02.06.02.0003.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.3.02.06.02.0003.	Alat Komunikasi Radio HF/FM		
676.	5.2.02.06.02.0004.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	1.3.02.06.02.0004.	Alat Komunikasi Radio VHF		
677.	5.2.02.06.02.0005.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	1.3.02.06.02.0005.	Alat Komunikasi Radio UHF		
678.	5.2.02.06.02.0010.	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	1.3.02.06.02.0010.	Alat Komunikasi Satelit		
679.	5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	1.3.02.06.02.0011.	Alat Komunikasi Lainnya		
680.	5.2.02.06.03.0010.	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola	1.3.02.06.03.0010.	Peralatan Antena SHF/Parabola		
681.	5.2.02.06.03.0024.	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF	1.3.02.06.03.0024.	Peralatan Antena Penerima VHF		
682.	5.2.02.06.03.0047.	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.3.02.06.03.0047.	Sumber Tenaga		
683.	5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.3.02.07.01.0001.	Alat Kedokteran Umum		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
684.	5.2.02.07.01.0002.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.3.02.07.01.0002.	Alat Kedokteran Gigi		
685.	5.2.02.07.01.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.3.02.07.01.0005.	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
686.	5.2.02.07.01.0011.	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	1.3.02.07.01.0011.	Alat Kedokteran Poliklinik		
687.	5.2.02.07.01.0014.	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.3.02.07.01.0014.	Alat Kedokteran Jantung		
688.	5.2.02.07.01.0017.	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.3.02.07.01.0017.	Alat Kedokteran Transfusi Darah		
689.	5.2.02.07.01.0021.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.3.02.07.01.0021.	Alat Kedokteran Gawat Darurat		
690.	5.2.02.07.01.0024.	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.3.02.07.01.0024.	Alat Kedokteran ICU		
691.	5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.3.02.07.01.0029.	Alat Kedokteran Lainnya		
692.	5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.3.02.07.02.0005.	Alat Kesehatan Umum Lainnya		
693.	5.2.02.08.01.0002.	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	1.3.02.08.01.0002.	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan		
694.	5.2.02.08.01.0007.	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	1.3.02.08.01.0007.	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia		
695.	5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.3.02.08.01.0011.	Alat Laboratorium Umum		
696.	5.2.02.08.01.0017.	Belanja Modal Alat Laboratorium Film	1.3.02.08.01.0017.	Alat Laboratorium Film		
697.	5.2.02.08.01.0019.	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	1.3.02.08.01.0019.	Alat Laboratorium Farmasi		
698.	5.2.02.08.01.0020.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	1.3.02.08.01.0020.	Alat Laboratorium Fisika		
699.	5.2.02.08.01.0031.	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	1.3.02.08.01.0031.	Alat Laboratorium Metrologi		
700.	5.2.02.08.01.0033.	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	1.3.02.08.01.0033.	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas		
701.	5.2.02.08.01.0034.	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	1.3.02.08.01.0034.	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil		
702.	5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.3.02.08.01.0056.	Alat Laboratorium Lain		
703.	5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.3.02.08.01.0064.	Unit Alat Laboratorium Lainnya		
704.	5.2.02.08.02.0003.	Belanja Modal General Laboratory Tool	1.3.02.08.02.0003.	General Laboratory Tool		
705.	5.2.02.08.02.0005.	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	1.3.02.08.02.0005.	Laboratory Safety Equipment		
706.	5.2.02.08.03.0002.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	1.3.02.08.03.0002.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika		
707.	5.2.02.08.03.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.3.02.08.03.0003.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar		
708.	5.2.02.08.03.0004.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	1.3.02.08.03.0004.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan		
709.	5.2.02.08.03.0005.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	1.3.02.08.03.0005.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah		
710.	5.2.02.08.03.0006.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	1.3.02.08.03.0006.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas		
711.	5.2.02.08.03.0007.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	1.3.02.08.03.0007.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS		
712.	5.2.02.08.03.0009.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.3.02.08.03.0009.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan		
713.	5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.3.02.08.03.0010.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian		
714.	5.2.02.08.03.0011.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	1.3.02.08.03.0011.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga		
715.	5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.3.02.08.03.0015.	Alat Peraga PAUD/TK		
716.	5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.3.02.08.03.0016.	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya		
717.	5.2.02.08.05.0003.	Belanja Modal Proteksi Lingkungan	1.3.02.08.05.0003.	Proteksi Lingkungan		
718.	5.2.02.08.05.0004.	Belanja Modal Meteorological Equipment	1.3.02.08.05.0004.	Meteorological Equipment		
719.	5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	1.3.02.08.08.0006.	Peralatan Umum		
720.	5.2.02.08.09.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	1.3.02.08.09.0005.	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu		
721.	5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.3.02.10.01.0001.	Komputer Jaringan		
722.	5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	1.3.02.10.01.0002.	Personal Computer		
723.	5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.3.02.10.01.0003.	Komputer Unit Lainnya		
724.	5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	1.3.02.10.02.0001.	Peralatan Mainframe		
725.	5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1.3.02.10.02.0002.	Peralatan Mini Computer		
726.	5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.3.02.10.02.0003.	Peralatan Personal Computer		
727.	5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.3.02.10.02.0004.	Peralatan Jaringan		
728.	5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.3.02.10.02.0005.	Peralatan Komputer Lainnya		
729.	5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	1.3.02.11.02.0002.	Elektronik/Electric		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
730.	5.2.02.13.01.0002.	Belanja Modal Sumur Pemboran	1.3.02.13.01.0002.	Sumur Pemboran		
731.	5.2.02.14.01.0002.	Belanja Modal Listrik	1.3.02.14.01.0002.	Listrik		
732.	5.2.02.15.01.0002.	Belanja Modal Suara	1.3.02.15.01.0002.	Suara		
733.	5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	1.3.02.15.02.0001.	Baju Pengaman		
734.	5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	1.3.02.15.02.0005.	Sepatu Lapangan		
735.	5.2.02.17.01.0022.	Belanja Modal Heat Generating Equipment	1.3.02.17.01.0022.	Heat Generating Equipment		
736.	5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.3.02.18.01.0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		
737.	5.2.02.18.03.0001.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	1.3.02.18.03.0001.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut		
738.	5.2.02.18.03.0002.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	1.3.02.18.03.0002.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya		
739.	5.2.02.19.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	1.3.02.19.01.0001.	Peralatan Olahraga Atletik		
740.	5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	1.3.02.19.01.0002.	Peralatan Permainan		
741.	5.2.02.19.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Senam	1.3.02.19.01.0003.	Peralatan Senam		
742.	5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	1.3.02.19.01.0006.	Peralatan Olahraga Lainnya		
743.	5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.3.02.08.03.0001.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Bahasa Indonesia		
744.	5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.3.02.07.01.0001.	Alat Kedokteran Umum		
745.	5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001.	Bangunan Gedung Kantor		
746.	5.2.03.01.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.3.03.01.01.0002.	Bangunan Gudang		
747.	5.2.03.01.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.3.03.01.01.0004.	Bangunan Gedung Instalasi		
748.	5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.3.03.01.01.0005.	Bangunan Gedung Laboratorium		
749.	5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.3.03.01.01.0006.	Bangunan Kesehatan		
750.	5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.3.03.01.01.0008.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		
751.	5.2.03.01.01.0009.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.3.03.01.01.0009.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
752.	5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.3.03.01.01.0010.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
753.	5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.3.03.01.01.0011.	Bangunan Gedung Tempat Olahraga		
754.	5.2.03.01.01.0016.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.3.03.01.01.0016.	Bangunan Gedung Perpustakaan		
755.	5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.3.03.01.01.0018.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara		
756.	5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.03.01.01.0037.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
757.	5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.3.03.01.01.0032.	Bangunan Fasilitas Umum		
758.	5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		
759.	5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	1.3.03.01.01.0036.	Taman		
760.	5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.03.01.01.0037.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
761.	5.2.03.01.02.0002.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.3.03.01.02.0002.	Rumah Negara Golongan II		
762.	5.2.03.01.02.0003.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.3.03.01.02.0003.	Rumah Negara Golongan III		
763.	5.2.03.01.02.0008.	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	1.3.03.01.02.0008.	Flat/Rumah Susun		
764.	5.2.03.01.02.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.3.03.01.02.0013.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya		
765.	5.2.03.03.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	1.3.03.03.01.0002.	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai		
766.	5.2.03.03.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	1.3.03.03.01.0005.	Bangunan Menara Perambuan Lainnya		
767.	5.2.03.04.01.0001.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.3.03.04.01.0001.	Tugu/Tanda Batas Administrasi		
768.	5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	1.3.03.04.01.0004.	Pagar		
769.	5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	1.3.03.04.01.0005.	Tugu/Tanda Batas Lainnya		
770.	5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.	Jalan Kabupaten		
771.	5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	1.3.04.01.01.0005.	Jalan Desa		
772.	5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.3.04.01.01.0010.	Jalan Lainnya		
773.	5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.3.04.01.02.0003.	Jembatan pada Jalan Kabupaten		
774.	5.2.04.01.02.0005.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.3.04.01.02.0005.	Jembatan pada Jalan Desa		
775.	5.2.04.01.02.0013.	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.3.04.01.02.0013.	Jembatan Lainnya		
776.	5.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	1.3.04.02.01.0004.	Bangunan Pembuang Irigasi		
777.	5.2.04.02.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	1.3.04.02.01.0005.	Bangunan Pengaman Irigasi		
778.	5.2.04.02.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.3.04.02.01.0006.	Bangunan Pelengkap Irigasi		
779.	5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.3.04.02.01.0008.	Bangunan Air Irigasi Lainnya		
780.	5.2.04.02.02.0004.	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	1.3.04.02.02.0004.	Saluran Pembuang Pasang Surut		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
781.	5.2.04.02.02.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	1.3.04.02.02.0005.	Bangunan Pengaman Pasang Surut		
782.	5.2.04.02.04.0001.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.3.04.02.04.0001.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		
783.	5.2.04.02.04.0002.	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	1.3.04.02.04.0002.	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai		
784.	5.2.04.02.04.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	1.3.04.02.04.0003.	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai		
785.	5.2.04.02.04.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.3.04.02.04.0004.	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		
786.	5.2.04.02.04.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.3.04.02.04.0005.	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai		
787.	5.2.04.02.04.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	1.3.04.02.04.0006.	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai		
788.	5.2.04.02.04.0007.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.3.04.02.04.0007.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya		
789.	5.2.04.02.05.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	1.3.04.02.05.0004.	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air		
790.	5.2.04.02.06.0005.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.3.04.02.06.0005.	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku		
791.	5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.3.04.02.06.0006.	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya		
792.	5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.3.04.02.07.0003.	Bangunan Pembuang Air Kotor		
793.	5.2.04.02.07.0004.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	1.3.04.02.07.0004.	Bangunan Pengaman Air Kotor		
794.	5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.3.04.02.07.0006.	Bangunan Air Kotor Lainnya		
795.	5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.3.04.03.01.0005.	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		
796.	5.2.04.03.02.0001.	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.3.04.03.02.0001.	Instalasi Air Buangan Domestik		
797.	5.2.04.03.03.0002.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	1.3.04.03.03.0002.	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		
798.	5.2.04.03.03.0003.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.3.04.03.03.0003.	Bangunan Penampung Sampah		
799.	5.2.04.03.03.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.3.04.03.03.0004.	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya		
800.	5.2.04.03.04.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	1.3.04.03.04.0004.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya		
801.	5.2.04.03.05.0002.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.3.04.03.05.0002.	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		
802.	5.2.04.03.05.0009.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.3.04.03.05.0009.	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		
803.	5.2.04.03.05.0012.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1.3.04.03.05.0012.	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya		
804.	5.2.04.03.09.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	1.3.04.03.09.0004.	Instalasi Pengaman Lainnya		
805.	5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.3.04.04.01.0005.	Jaringan Air Minum Lainnya		
806.	5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.3.04.04.02.0003.	Jaringan Listrik Lainnya		
807.	5.2.04.04.04.0002.	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	1.3.04.04.04.0002.	Jaringan Pipa Distribusi		
808.	5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	1.3.05.01.01.0001.	Buku Umum		
809.	5.2.05.01.01.0003.	Belanja Modal Buku Agama	1.3.05.01.01.0003.	Buku Agama		
810.	5.2.05.01.01.0004.	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	1.3.05.01.01.0004.	Buku Ilmu Sosial		
811.	5.2.05.01.01.0005.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	1.3.05.01.01.0005.	Buku Ilmu Bahasa		
812.	5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.3.05.01.01.0006.	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		
813.	5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.3.05.01.01.0007.	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		
814.	5.2.05.01.01.0008.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.3.05.01.01.0008.	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga		
815.	5.2.05.01.01.0009.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.3.05.01.01.0009.	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah		
816.	5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.3.05.01.01.0012.	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya		
817.	5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	1.3.05.01.02.0001.	Audio Visual		
818.	5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	1.3.05.02.01.0001.	Alat Musik		
819.	5.2.05.02.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	1.3.05.02.01.0003.	Alat Peraga Kesenian		
820.	5.2.05.02.01.0004.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.3.05.02.01.0004.	Barang Bercorak Kesenian Lainnya		
821.	5.2.05.04.01.0001.	Belanja Modal Ikan Budidaya	1.3.05.04.01.0001.	Ikan Budidaya		
822.	5.2.05.04.02.0001.	Belanja Modal Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)	1.3.05.04.02.0001.	Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)		
823.	5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	1.5.03.01.01.0005.	Software		
824.	5.2.05.08.01.0006.	Belanja Modal Kajian	1.5.03.01.01.0006.	Kajian		
825.	5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.3.05.01.01.0005.	Buku Ilmu Bahasa		

No.	LRA		NERACA		LO	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
826.	5.2.06.01.01.0002.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1.5.03.01.01.0002.	Lisensi dan Franchise		
827.	5.2.06.01.01.0005.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.5.03.01.01.0005.	Software		
828.	5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga			8.4.01.01.01.0001.	Beban Tidak Terduga
829.	5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa			8.2.01.01.03.0001.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
830.	5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			8.2.01.02.01.0001.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
831.	5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			8.2.02.05.01.0001.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
832.	5.4.02.05.01.0003.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa			8.2.02.05.01.0003.	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa
833.	5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			8.2.02.05.02.0001.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
834.	5.4.02.05.02.0002.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa			8.2.02.05.02.0002.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa
835.	6.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD			3.1.02.04.01.0001.	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

7.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pada satu tahun anggaran yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

7.5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Sisa Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	972.909.236.075,86	1.333.507.226.175,09

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2024. Anggaran pendapatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.309.442.057.434,61 dengan realisasi sebesar Rp972.909.236.075,86 atau sebesar 74,30% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp(360.597.990.099,23) atau sebesar (27,04)%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	97.559.677.331,00	67.726.908.953,86	69,42	97.981.165.498,09	(30.254.256.544,23)	(30,88)
2	Pendapatan Transfer	1.203.510.452.267,61	897.655.424.883,00	74,59	1.234.205.370.323,00	(336.549.945.440,00)	(27,27)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.371.927.836,00	7.526.902.239,00	89,91	1.320.690.354,00	6.206.211.885,00	469,92
Jumlah		1.309.442.057.434,61	972.909.236.075,86	74,30	1.333.507.226.175,09	(360.597.990.099,23)	(27,04)

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp67.726.908.953,86 Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp(30.254.256.544,23) atau (30,88)%. Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Daerah	50.637.881.253,00	27.007.756.522,38	53,34	54.850.557.254,00	(27.842.800.731,62)	(50,76)
2	Retribusi Daerah	1.373.099.000,00	1.657.755.749,00	120,73	1.049.361.910,00	608.393.839,00	57,98
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.387.416.960,00	5.387.416.960,00	100,00	6.927.016.847,00	(1.539.599.887,00)	(22,23)
4	Lain-lain PAD yang Sah	40.161.280.118,00	33.673.979.722,48	83,85	35.154.229.487,09	(1.480.249.764,61)	(4,21)
Jumlah		97.559.677.331,00	67.726.908.953,86	69,42	97.981.165.498,09	(30.254.256.544,23)	(30,88)

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna masih menggunakan Bagan Akun Standar Pajak Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga untuk penyajian pajak daerah belum mengikuti nomenklatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana sebagian besar pajak daerah diklasifikasikan ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah mulai menggunakan nomenklatur Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) efektif pada tahun anggaran 2025.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah sebesar Rp27.007.756.522,38 atau sebesar 53,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.637.881.253,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023, realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(27.842.800.731,62) atau sebesar (50,76)%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	600.000.000,00	812.018.382,00	135,34	722.504.512,00	89.513.870,00	12,39
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	2.690.423.509,00	107,62	2.766.215.705,00	(75.792.196,00)	(2,74)
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	18.000.000,00	41.784.700,00	232,14	15.870.200,00	25.914.500,00	163,29
4	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	1.500.000,00	200,00	645.000,00	855.000,00	132,56
5	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.300.000,00	1.155.000,00	88,85	1.051.000,00	104.000,00	9,90
6	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	84.000.000,00	102.607.000,00	122,15	113.504.000,00	(10.897.000,00)	(9,60)
7	Pajak Reklame Kain	21.000.000,00	31.884.250,00	151,83	25.626.000,00	6.258.250,00	24,42
8	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	1.277.500,00	0,00	1.916.250,00	(638.750,00)	(33,33)
9	Pajak Reklame Berjalan	3.000.000,00	1.883.000,00	62,77	2.300.000,00	(417.000,00)	(18,13)
10	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.000.000.000,00	6.887.728.615,00	114,80	6.308.949.822,00	578.778.793,00	9,17
12	Pajak Parkir	6.800.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(100,00)
13	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	200.000,00	8,00	3.000.000,00	(2.800.000,00)	(93,33)
14	Pajak Pasir dan Kerikil	175.000.000,00	40.750.580,00	23,29	31.199.440,00	9.551.140,00	30,61
15	Pajak Pasir Kuarsa	37.160.281.253,00	14.280.175.000,00	38,43	38.729.347.500,00	(24.449.172.500,00)	(63,13)
16	Pajak Tanah Liat	5.250.000,00	38.375.538,00	730,96	22.684.200,00	15.691.338,00	69,17
17	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	210.000.000,00	378.331.866,00	180,16	344.866.666,00	33.465.200,00	9,70
18	PBBP2	1.350.000.000,00	1.302.445.231,38	96,48	1.374.432.700,00	(71.987.468,62)	(5,24)
19	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000,00	317.925.875,00	79,48	446.970.100,00	(129.044.225,00)	(28,87)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
20	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.100.000.000,00	77.290.476,00	7,03	3.936.924.159,00	(3.859.633.683,00)	(98,04)
Jumlah		50.637.881.253,00	27.007.756.522,38	53,34	54.850.557.254,00	(27.842.800.731,62)	(50,76)

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Anggaran pendapatan pajak hotel pada tahun 2024 adalah sebesar Rp600.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp812.018.382,00 atau sebesar 135,34% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak hotel mengalami kenaikan sebesar Rp89.513.870,00 dibandingkan tahun 2023 atau sebesar 12,39%. Salah satu faktor penyebab meningkatnya pendapatan pajak hotel karena meningkatnya kunjungan dari luar daerah ke Kabupaten Natuna, adanya kegiatan Operasional Perangkat Daerah serta *event* pariwisata tahun 2024.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Anggaran pendapatan pajak restoran pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp2.690.423.509,00 atau sebesar 107,62% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak restoran mengalami penurunan sebesar Rp(75.792.196,00) dibandingkan tahun 2023 atau sebesar (2,74)%. Salah satu faktor penyebab menurunnya pendapatan pajak restoran karena rendahnya kesadaran Wajib Pajak Restoran untuk menerapkan pajak terhadap konsumsi makan minum di restoran.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya, Pajak Permainan Biliar dan Bowling, dan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*). Anggaran Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp18.000.000,00, dengan realisasi Rp41.784.700,00 atau sebesar 232,14%. Anggaran Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp750.000,00, dengan realisasi Rp1.500.000,00 atau sebesar 200%. Sedangkan anggaran Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) Rp1.300.000,00, dengan realisasi Rp1.155.000,00. Secara keseluruhan Pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp26.873.500,00 dibandingkan tahun 2023 atau sebesar 152,98%. Salah satu faktor penyebab meningkatnya pendapatan pajak hiburan karena intensifikasi penagihan dan pengawasan pajak hiburan, serta mengedukasi wajib pajak untuk membayar pajak.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna adalah Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron, Pajak Reklame Kain, Pajak Reklame Melekat/Stiker, dan Pajak Reklame Berjalan. Anggaran Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp84.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp102.607.000,00 atau sebesar 122,15%. Anggaran Pajak Reklame Kain Rp21.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp31.884.250,00, atau sebesar 151,83%. Pemerintah Daerah tidak menganggarkan Pajak Reklame Melekat/Stiker pada tahun 2024, tetapi karena adanya potensi pendapatan, pemerintah tetap melakukan pemungutan pajak sebesar Rp1.277.500,00 atau dengan realisasi 100%. Sedangkan

Pajak Reklame Berjalan dianggarkan Rp3.000.000,00, dengan realisasi Rp1.883.000,00, atau sebesar 62,77%.

Secara keseluruhan Anggaran pendapatan pajak reklame pada tahun 2024 adalah sebesar Rp108.000.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp137.651.750,00 atau sebesar 127,46% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak reklame dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(5.694.500,00) atau sebesar (3,97)%. Faktor penyebab menurunnya pendapatan pajak reklame kurangnya promosi usaha yang dilakukan oleh pemilik usaha dan kurang insentifnya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri, dan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri dianggarkan Rp1.000.000.000,00, dengan realisasi Rp0,00. Sedangkan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dianggarkan Rp6.000.000.000,00, dengan realisasi Rp6.887.728.615,00 atau sebesar 114,80%.

Secara keseluruhan Anggaran pendapatan pajak penerangan jalan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp7.000.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp6.887.728.615,00 atau sebesar 98,40% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi pajak penerangan jalan dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp578.778.793,00 atau sebesar 9,17%. Faktor penyebab meningkatnya pendapatan pajak penerangan jalan karena meningkatnya konsumsi energi listrik oleh masyarakat dan sektor usaha dan non usaha di Kabupaten Natuna.

f) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Anggaran pendapatan pajak parkir pada tahun 2024 adalah sebesar Rp6.800.000,00, dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak parkir mengalami penurunan sebesar Rp(2.550.000,00) dibandingkan tahun 2023 atau sebesar (100,00)%. Salah satu faktor penyebab tidak terealisasinya Pajak Parkir, dikarenakan objek parkir yang berlokasi di pasar rakyat Ranai yang sebelumnya dimiliki oleh orang/pribadi, sejak bulan Oktober tahun 2023 pasar rakyat Ranai tersebut direlokasikan ke tempat yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, tepatnya di Jalan Datuk Kaya Wan Mohammad Benteng (Belakang Kantor BRKS), sehingga potensinya beralih ke Retribusi Daerah menjadi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Perda Nomor 15 Tahun 2023).

g) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Anggaran pendapatan pajak air tanah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.500.000,00, dengan realisasi adalah sebesar Rp200.000,00 atau sebesar 8,00% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak air tanah mengalami penurunan sebesar Rp(2.800.000,00) dibandingkan tahun 2023 atau sebesar (93,33)%. Salah satu faktor penyebab

menurunnya pajak air tanah dikarenakan potensi pajak yang relatif kecil, serta masih bersifat konsumsi pribadi maupun rumah tangga.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut Pemerintah Daerah adalah Pajak Pasir dan Kerikil, Pajak Pasir Kuarsa, Pajak Tanah Liat, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya. Pajak Pasir dan Kerikil dianggarkan Rp175.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp40.750.580,00 atau 23,29%. Pajak Pasir Kuarsa dianggarkan Rp37.160.281.253,00, dengan realisasi Rp14.280.175.000,00, atau 38,43%. Pajak Tanah Liat dianggarkan Rp5.250.000,00, dengan realisasi sebesar Rp38.375.538,00 atau 730,96%. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya dianggarkan Rp210.000.000,00, dengan realisasi Rp378.331.866,00 atau sebesar 180,16%.

Secara keseluruhan anggaran pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp37.550.531.253,00, dengan realisasi sebesar Rp14.737.632.984,00 atau sebesar 39,25% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(24.390.464.822,00) atau sebesar (62,33)%. Faktor penyebab menurunnya pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu karena ketidakstabilan harga pasir kuarsa, serta faktor alam (cuaca) yang mempengaruhi proses penjualan pasir kuarsa sehingga berdampak terhadap penerimaan Pajak Daerah.

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Anggaran Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.350.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.302.445.231,38 atau sebesar 96,48% dari anggaran yang ditetapkan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami penurunan sebesar Rp(71.987.468,62) dibandingkan tahun 2023 atau sebesar (5,24)%. Faktor penyebab menurunnya pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena belum optimalnya penagihan pajak daerah disebabkan letak geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau dan jarak tempuh relatif lama dan jauh.

j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri dari BPHTB-Pemindahan Hak, dan BPHTB-Pemberian Hak Baru. BPHTB-Pemindahan Hak dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp317.925.875,00 atau sebesar 79,48%. BPHTB-Pemberian Hak Baru dianggarkan Rp1.100.000.000,00, dengan realisasi Rp77.290.476,00, atau sebesar 7,03%.

Secara keseluruhan Anggaran Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00, dengan realisasi

sebesar Rp395.216.351,00 atau sebesar 26,35% dari anggaran yang ditetapkan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(3.988.677.908,00) atau sebesar (90,98)%. Faktor penyebab menurunnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena masih rendahnya tingkat transaksi properti di kalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat relatif rendah dalam mengurus legalitas atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

Pendapatan pajak di Pemerintah Kabupaten Natuna dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Berdasarkan pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, dimana pajak-pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang ditetapkan.

Sedangkan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut dengan sistem *official assessment* yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Secara umum menurunnya Pajak Daerah disebabkan kurangnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah.

7.5.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Realisasi Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.657.755.749,00 atau sebesar 120,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.373.099.000,00. Dibandingkan dengan pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023, pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp608.393.839,00 atau sebesar 57,98%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Daerah per SKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00	1.198.448.148,00	119,84	667.300.700,00	531.147.448,00	79,60
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.417.000,00	17.400.000,00	112,86	0,00	17.400.000,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000,00	126.439.500,00	105,37	192.582.500,00	(66.143.000,00)	(34,35)
4	Dinas Perhubungan	65.333.000,00	33.264.000,00	50,91	36.000.000,00	(2.736.000,00)	(7,60)
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00	116.964.101,00	116,96	120.223.710,00	(3.259.609,00)	(2,71)
6	Dinas Perikanan	50.000.000,00	7.260.000,00	14,52	0,00	7.260.000,00	100,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	22.349.000,00	157.980.000,00	706,88	12.390.000,00	145.590.000,00	1.175,06
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	20.865.000,00	(20.865.000,00)	(100,00)
Jumlah		1.373.099.000,00	1.657.755.749,00	120,73	1.049.361.910,00	608.393.839,00	57,98

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.198.448.148,00	119,84	667.300.700,00	531.147.448,00	79,60
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	120.000.000,00	126.439.500,00	105,37	192.582.500,00	(66.143.000,00)	(34,35)
3	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	137.030.000,00	0,00	0,00	137.030.000,00	100,00
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.417.000,00	17.400.000,00	112,86	17.600.000,00	(200.000,00)	(1,14)
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.349.000,00	0,00	0,00	12.390.000,00	(12.390.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Tempat Pelelangan	50.000.000,00	7.260.000,00	14,52	3.265.000,00	3.995.000,00	122,36
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	20.950.000,00	0,00	0,00	20.950.000,00	100,00
8	Retribusi Penyeberangan di Air	65.333.000,00	33.264.000,00	50,91	36.000.000,00	(2.736.000,00)	(7,60)
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00	116.964.101,00	116,96	120.223.710,00	(3.259.609,00)	(2,71)
Jumlah		1.373.099.000,00	1.657.755.749,00	120,73	1.049.361.910,00	608.393.839,00	57,98

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.198.448.148,00 atau sebesar 119,84% dari anggaran yang ditetapkan. Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp531.147.448,00 dibandingkan tahun 2023 atau sebesar 79,60%. Retribusi Pelayanan Kesehatan didapatkan dari pelayanan kesehatan di Puskesmas dan dicatat realisasi tersebut pada Dinas Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dikarenakan meningkatnya objek retribusi berupa pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas yang dikenakan biaya/tarif, dikelompokkan ke dalam pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat inap.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Anggaran Pendapatan Retribusi Persampahan/Kebersihan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp120.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp126.439.500,00 atau sebesar 105,37% dari anggaran yang ditetapkan. Retribusi Persampahan/Kebersihan mengalami penurunan sebesar Rp(66.143.000,00), dibandingkan tahun 2023 atau sebesar (34,35)%. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu faktor menurunnya pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikarenakan berkurangnya masyarakat yang menggunakan jasa pengambilan sampah yang dikenakan retribusi, masyarakat lebih memilih membuang sampah rumah tangga langsung ke tempat penampungan sampah sementara yang telah disiapkan.

c) Retribusi Pelayanan Pasar

Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2024 Rp0,00 atau tidak dianggarkan, sedangkan realisasi retribusi pelayanan pasar di tahun 2024 sebesar Rp137.030.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Retribusi pelayanan pasar mengalami kenaikan sebesar Rp137.030.000,00 atau sebesar 100,00%. Retribusi Pelayanan Pasar secara teknis dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan Usaha Mikro. Tidak dianggarkan pendapatan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2024 dikarenakan pada saat proses penyusunan APBD tahun 2024 objek retribusi pasar yaitu pasar rakyat ranai belum beroperasi. Pasar rakyat ranai baru beroperasi di bulan Januari 2024 setelah tahapan APBD Tahun 2024 selesai. Selain itu juga OPD teknis belum bisa menghitung potensi pendapatan retribusi pelayanan pasar selama tahun 2024 pada saat penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun 2024.

d) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Anggaran Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada tahun 2024 adalah sebesar Rp15.417.000,00. Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp17.400.000,00 atau sebesar 112,86% dari anggaran. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(200.000,00) atau sebesar 1,14%. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus secara teknis dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

e) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp22.349.000,00, dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar (100,00)% dari anggaran yang ditetapkan. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(12.390.000,00) atau sebesar (100,00)%. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan tera ulang bukan lagi merupakan objek retribusi daerah, sehingga pada tahun 2024 retribusi tera ulang tidak lagi dipungut. Walaupun retribusi tera ulang tidak dipungut, pelayanan tera ulang tetap dilakukan sebagai upaya peningkatan kemudahan berusaha dan perizinan untuk masyarakat.

f) Retribusi Tempat Pelelangan

Anggaran Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp50.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp7.260.000,00 atau sebesar 14,52% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.995.000,00 atau sebesar 122,36%. Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.

g) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Anggaran Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2024 Rp0,00 atau tidak dianggarkan, sedangkan realisasi retribusi Tempat Khusus Parkir di tahun 2024 sebesar Rp20.950.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Retribusi tempat Khusus Parkir mengalami kenaikan sebesar Rp20.950.000,00 atau sebesar 100,00%. Retribusi Pelayanan Pasar secara teknis dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Tidak dianggarkan pendapatan retribusi tempat khusus parkir pada tahun 2024 dikarenakan retribusi tempat khusus parkir baru dilaksanakan pemungutan retribusinya pada bulan september 2024, dan OPD teknis belum bisa melakukan perhitungan potensi pendapatan retribusi tempat khusus parkir tersebut.

h) Retribusi Penyeberangan di Air

Anggaran Pendapatan Retribusi Penyeberangan di air pada tahun 2024 adalah sebesar Rp65.333.000,00. Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp33.264.000,00 atau sebesar 50,91% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Retribusi Penyeberangan Air dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(2.736.000,00) atau sebesar (7,60)%. Pendapatan Retribusi Penyeberangan Air dikelola oleh Dinas Perhubungan. Tidak tercapainya target Pendapatan Retribusi Penyeberangan Air dari target yang ditetapkan dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana di lapangan yang kurang memadai dan tidak merata di setiap jalur penyeberangan air. Selain itu juga penurunan realisasi retribusi penyeberangan air disebabkan karena beberapa bulan retribusi penyeberangan air tidak dipungut karena adanya penyesuaian SOP terkait dengan retribusi penyeberangan di air pada pelabuhan binjai.

i) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Anggaran Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2024 adalah sebesar Rp100.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp116.964.101,00 atau sebesar 116,96% dari anggaran yang ditetapkan. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(3.259.609,00) atau sebesar (2,71)%. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah sebesar Rp5.387.416.960,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut merupakan deviden bagian Pemerintah Kabupaten Natuna atas penyertaan modal ke Bank Riau Kepri Syariah. Deviden tersebut merupakan hasil dari investasi jangka panjang pemerintah daerah pada Bank Riau Kepri Syariah sejumlah Rp36.038.100.000,00 atau sebesar 2.98% yang dicatat dengan metode biaya.

Rincian anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	5.387.416.960,00	5.387.416.960,00	100,00	6.927.016.847,00	(1.539.599.887,00)	(22,23)
Jumlah		5.387.416.960,00	5.387.416.960,00	100,00	6.927.016.847,00	(1.539.599.887,00)	(22,23)

7.5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah sebesar

Rp33.673.979.722,48 atau sebesar 83,85% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dibanding tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(1.480.249.764,61) atau sebesar (4,21)%. Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.7 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.079.316.280,00	100,00	0,00	1.079.316.280,00	100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	187.679.500,00	375,36	44.950.000,00	142.729.500,00	317,53
3	Jasa Giro	2.715.000.000,00	1.431.168.107,26	52,71	877.434.099,73	553.734.007,53	63,11
4	Pendapatan Bunga	3.273.560.000,00	1.306.195.871,41	39,90	60.092.972,00	1.246.102.899,41	2.073,63
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00	2.919.120.832,79	97,30	2.153.836.455,59	765.284.377,20	35,53
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00	1.668.043.384,00	556,01	68.899.701,31	1.599.143.682,69	2.320,97
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	84.585.761,00	52.648.954,00	62,24	74.142.763,00	(21.493.809,00)	(28,99)
8	Pendapatan dari Pengembalian	188.004.851,00	159.538.290,00	84,86	70.061.217,46	89.477.072,54	127,71
9	Pendapatan BLUD	30.439.718.747,00	24.663.344.945,02	81,02	25.007.928.655,00	(344.583.709,98)	(1,38)
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	6.671.064.675,00	(6.671.064.675,00)	(100,00)
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	110.410.759,00	206.923.558,00	187,41	125.818.948,00	81.104.610,00	64,46
Jumlah		40.161.280.118,00	33.673.979.722,48	83,85	35.154.229.487,09	(1.480.249.764,61)	(4,21)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun 2024 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.079.316.280,00. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.079.316.280,00 atau sebesar 100,00%. Tidak dianggarkan pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dikarenakan Pemerintah Daerah tidak bisa menghitung berapa hasil *appraisal*/penilaian dari aset tetap dalam kondisi rusak berat yang akan dilakukan lelang oleh Kantor KPKNL. Penilaian atas aset tetap rusak berat yang akan dijual dilakukan pada tahun berjalan. Selain itu juga belum ada kepastian apakah aset tersebut akan terjual saat dilakukan pelelangan. Ada pun rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 7.5.8 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	900.680.000,00	100,00	0,00	900.680.000,00	100,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	61.009.180,00	100,00	0,00	61.009.180,00	100,00
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	117.627.100,00	100,00	0,00	117.627.100,00	100,00
Jumlah		0,00	1.079.316.280,00	100,00	0,00	1.079.316.280,00	100,00

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp187.679.500,00 atau sebesar 375,36% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp142.729.500,00 atau sebesar 317,53%. Adapun rincian pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 7.5.9 Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Sewa BMD	0,00	81.680.000,00	100,00	0,00	81.680.000,00	100,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	50.000.000,00	105.999.500,00	212	44.950.000,00	61.049.500,00	135,82
Jumlah		50.000.000,00	187.679.500,00	375,36	44.950.000,00	142.729.500,00	317,53

c) Penerimaan Jasa Giro

Anggaran Penerimaan Jasa Giro pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.715.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.431.168.107,26 atau sebesar 52,71% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Penerimaan Jasa Giro mengalami kenaikan sebesar Rp553.734.007,53 atau sebesar 63,11%. Adapun rincian Penerimaan Jasa Giro sebagai berikut:

Tabel 7.5.10 Penerimaan Jasa Giro

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.265.000.000,00	988.144.586,00	43,63	443.499.768,73	544.644.817,27	122,81
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	67.892.950,67	135,79	58.378.313,00	9.514.637,67	16,30
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	400.000.000,00	357.662.472,59	89,42	375.556.018,00	(17.893.545,41)	(4,76)
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	17.468.098,00	100,00	0,00	17.468.098,00	100,00
Jumlah		2.715.000.000,00	1.431.168.107,26	52,71	877.434.099,73	553.734.007,53	63,11

d) Pendapatan Bunga

Anggaran Pendapatan Bunga pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3.273.560.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.306.195.871,41 atau sebesar 39,90% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Bunga dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.246.102.899,41 atau sebesar 2.073,63%. Pendapatan Bunga merupakan hasil dari pemanfaatan kas pemerintah daerah dalam bentuk deposito berjangka 1(satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis Bank Riau Kepri Syariah dan Bank Mandiri KCP Natuna sebesar Rp1.135.248.964,41 dan Pendapatan Bunga dari TDF (Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp170.946.907,00.

e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3.000.0000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.919.120.832,79 atau sebesar 97,30% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp765.284.377,20 atau sebesar 35,53%.

Adapun rincian penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.11 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.000.000.000,00	0,00	0,00	3.287.000,00	(3.287.000)	100,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.000.000.000,00	2.919.120.832,79	145,96	2.150.549.455,59	768.571.377,20	35,74
Jumlah		3.000.000.000,00	2.919.120.832,79	97,30	2.153.836.455,59	765.284.377,20	35,53

f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp300.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.668.043.384,00 atau sebesar 556,01% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan tahun 2023 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami peningkatan sebesar Rp1.599.143.682,69 atau sebesar 2.320,97%. Kenaikan ini disebabkan banyak pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh rekanan tidak diselesaikan sesuai kontrak perjanjian.

g) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp84.585.761,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp52.648.954,00 atau sebesar 62,24% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(21.493.809,00) atau sebesar (28,99)%. Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	462.607,00	46,26	1.107.863,00	(645.256,00)	(58,24)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	5.000.000,00	5.334.636,00	106,69	5.312.385,00	22.251,00	0,42
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	24.801,00	76.731,00	309,39	229.540,00	(152.809,00)	(66,57)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00	109.535,00	5,48	562.960,00	(453.425,00)	(80,54)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)	(100,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)	(100,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	56.635,00	100,00	103.786,00	(47.151,00)	(45,43)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000,00	45.934.395,00	61,25	65.494.641,00	(19.560.246,00)	(29,87)
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.560.960,00	674.415,00	43,21	1.140.588,00	(466.173,00)	(40,87)
Jumlah		84.585.761,00	52.648.954,00	62,24	74.142.763,00	(21.493.809,00)	(28,99)

1) Pendapatan Denda Pajak Hotel

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hotel pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp462.607,00 atau sebesar 46,26% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar Rp(645.256,00) atau sebesar (58,24)%.

2) Pendapatan Denda Pajak Restoran

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Restoran pada tahun 2024 adalah sebesar Rp5.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp5.334.636,00 atau sebesar 106,69% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar Rp22.251,00 atau sebesar 0,42%.

3) Pendapatan Denda Pajak Hiburan

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hiburan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp24.801,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp76.731,00 atau sebesar 309,39%. Dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi pendapatan denda pajak hiburan mengalami penurunan sebesar Rp(152.809,00) atau sebesar (66,57)%. Rincian Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel 7.5.13 Pendapatan Denda Pajak Hiburan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	21.201,00	69.131,00	326,07	228.040,00	(158.909,00)	(69,68)
2	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.600,00	7.200,00	200,00	0,00	7.200,00	100,00
3	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	400,00	100,00	1.500,00	(1.100,00)	(73,33)
Jumlah		24.801,00	76.731,00	309,39	229.540,00	(152.809,00)	(66,57)

4) Pendapatan Denda Pajak Reklame

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Reklame pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp109.535,00 atau sebesar 5,48% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar Rp(453.425,00) atau sebesar (413,95)%. Rincian Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagai berikut:

Tabel 7.5.14 Pendapatan Denda Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	2.000.000,00	83.210,00	4,16	562.960,00	(479.750,00)	85,22
2	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00	26.325,00	100,00	0,00	26.325,00	100,00
		2.000.000,00	109.535,00	5,48	562.960,00	(453.425,00)	(413,95)

5) Pendapatan Denda Pajak Parkir

Pendapatan Denda Pajak Parkir pada tahun 2024 tidak dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir mengalami penurunan sebesar Rp(81.000,00) atau sebesar (100,00)%.

6) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah pada tahun 2024 tidak dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Pendapatan Denda Pajak Air Tanah mengalami penurunan sebesar Rp110.000,00 atau sebesar (100,00)%.

7) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2024 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp56.635,00, terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil sebesar Rp6.700,00 dan Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp49.935,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan sebesar Rp(47.151,00) atau sebesar (45,43)%.

8) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2024 adalah sebesar Rp75.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp45.934.395,00 atau sebesar 61,25% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan sebesar Rp(19.560.246,00) atau sebesar 29,87%.

9) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Anggaran Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.560.960,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp674.415,00 atau sebesar 43,21% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp(466.173,00) atau sebesar (40,87)%. Rincian Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai berikut.

Tabel 7.5.15 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000,00	0,00	0,00	43.523,00	(43.523,00)	(100,00)
2	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	560.960,00	674.415,00	120,23	1.097.065,00	(422.650,00)	(38,53)
Jumlah		1.560.960,00	674.415,00	43,21	1.140.588,00	(466.173,00)	(40,87)

h) Pendapatan dari Pengembalian

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian pada tahun 2024 adalah sebesar Rp188.004.851,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp159.538.290,00 atau sebesar 84,86% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan tahun 2023, Pendapatan dari Pengembalian mengalami kenaikan sebesar Rp79.989.236,54 atau sebesar 114,17%. Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian sebagai berikut:

Tabel 7.5.16 Pendapatan dari Pengembalian

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	6.113.200,00	(6.113.200,00)	(100,00)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	14,00	100,00	200.000,00	(199.986,00)	(99,99)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	526.000,00	(526.000,00)	(100,00)
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	50.000.000,00	11.236.777,00	22,47	53.497.162,00	(42.260.385,00)	(79,00)
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	7.990.000,00	(7.990.000,00)	(100,00)
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	2.500,00	100,00	0,00	2.500,00	100,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	806.312,00	100,00	0,00	806.312,00	100,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	0,00	138.000.000,00	100,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.851,00	4.851,00	100,00	1.484.345,00	(1.479.494,00)	(99,67)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	9.487.836,00	100,00	0,00	9.487.836,00	100,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	250.510,46	(250.510,46)	(100,00)
Jumlah		188.004.851,00	159.538.290,00	84,86	70.061.217,46	89.477.072,54	127,71

i) Pendapatan BLUD

Anggaran Pendapatan BLUD pada tahun 2024 adalah sebesar Rp30.439.718.747,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp24.663.344.945,02 atau sebesar 81,02% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding tahun 2023 Pendapatan BLUD mengalami penurunan sebesar Rp(344.583.709,98) atau sebesar (1,38)%. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Rumah Sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari objek retribusi daerah. Pada tahun 2024 masih dianggarkan pada lain-lain PAD yang sah, dan pada tahun 2025 telah dianggarkan pada retribusi daerah.

RSUD Kabupaten Natuna juga memperoleh Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah berupa jasa giro dan pendapatan bunga, namun seluruh pendapatan RSUD pada Tahun 2024 masih dianggarkan pada Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.

j) Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Pendapatan JKN pada tahun 2024 dianggarkan pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan nomenklatur penganggaran Bagan Akun Standar. Pendapatan Dana Kapitasi JKN tahun 2024 tidak dianggarkan di Lain-lain PAD yang sah, tetapi dianggarkan di Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dibandingkan tahun 2023 Pendapatan Dana Kapitasi JKN mengalami penurunan sebesar Rp(6.671.064.675,00) atau sebesar (100,00)%. Pendapatan Dana Kapitasi JKN merupakan pendapatan dana kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang belum menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

k) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun 2024 sebesar Rp110.410.759,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp206.923.558,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir mengalami kenaikan sebesar Rp81.104.610,00 atau 64,46%. Realisasi sebesar Rp206.923.558,00 terdiri dari penyetoran dana Bergulir UMKM yang telah dialihkan penagihan ke KPKNL Rp15.174.880,00, penyetoran Dana Bergulir UMKM yang dikelola Bank Riau Kepri Syariah Ranai Rp180.748.678,00, dan penyetoran Dana Bergulir Perikanan yang dikelola oleh Bank Riau Kepri Syariah Ranai Rp11.000.000,00.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 adalah sebesar Rp897.655.424.883,00 atau sebesar 74,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.203.510.452.267,61. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp(336.549.945.440,00) atau sebesar (27,27)%. Penurunan Pendapatan Transfer terjadi karena adanya tunda salur tahun anggaran 2024 yang akan direalisasikan penyalurannya di tahun 2025. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.5.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Perimbangan	1.047.904.187.057,61	772.847.670.239,00	73,75	1.045.714.855.167,00	(272.867.184.928,00)	(26,09)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	60.067.570.000,00	60.067.570.000,00	100,00	84.524.748.000,00	(24.457.178.000,00)	(28,93)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.538.695.210,00	64.740.184.644,00	67,76	103.965.767.156,00	(39.225.582.512,00)	(37,73)
Jumlah		1.203.510.452.267,61	897.655.424.883,00	74,59	1.234.205.370.323,00	(336.549.945.440,00)	(27,27)

7.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Dana Perimbangan tahun 2024 adalah sebesar Rp772.847.670.239,00 atau sebesar 73,75% dari yang dianggarkan Rp1.047.904.187.057,61. Dibandingkan tahun 2023, Dana Perimbangan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp(272.867.184.928,00) atau sebesar (26,09)%. Penurunan pendapatan transfer terjadi karena adanya kurang bayar Tahun 2023, yang belum disalurkan pada Tahun 2024. Kurang bayar tersebut belum disalurkan oleh pemerintah pusat dikarenakan belum adanya penetapan tata cara penyaluran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.18 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	94.400.708.000,00	88.080.772.910,00	93,31	132.068.098.913,00	(43.987.326.003,00)	(33,31)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	372.371.243.157,61	124.038.209.000,00	33,31	332.799.575.408,00	(208.761.366.408,00)	(62,73)
3	Dana Alokasi Umum	432.069.006.000,00	427.577.646.211,00	98,96	407.458.406.092,00	20.119.240.119,00	4,94
4	Dana Alokasi Khusus	149.063.229.900,00	133.151.042.118,00	89,33	173.388.774.754,00	(40.237.732.636,00)	(23,21)
Jumlah		1.047.904.187.057,61	772.847.670.239,00	73,75	1.045.714.855.167,00	(272.867.184.928,00)	(26,09)

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp94.400.708.000,00 dengan realisasi sebesar Rp88.080.772.910,00 atau sebesar 93,31% dari anggaran. Adanya penurunan realisasi dari Dana Bagi Hasil Pajak disebabkan tidak disalurkannya kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.19 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	80.000.000.000,00	73.689.516.000,00	92,11	117.679.129.192,00	(43.989.613.192,00)	(37,38)
2	DBH PPh Pasal 21	13.664.344.000,00	13.664.344.000,00	100,00	13.264.040.745,00	400.303.255,00	3,02
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	716.590.000,00	716.590.000,00	100,00	1.116.358.510,00	(399.768.510,00)	(35,81)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	19.774.000,00	10.322.910,00	52,20	8.570.466,00	1.752.444,00	20,45
Jumlah		94.400.708.000,00	88.080.772.910,00	93,31	132.068.098.913,00	(43.987.326.003,00)	(33,31)

7.5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) tahun 2024 adalah sebesar Rp372.371.243.157,61, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp124.038.209.000,00 atau sebesar 33,31% dari anggaran. Adanya penurunan realisasi dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dikarenakan penganggarannya memperhitungkan kurang bayar pemerintah pusat, sedangkan kurang bayar tersebut yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat, belum adanya penetapan tata cara penyaluran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.20 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	142.286.894.480,00	31.039.101.000,00	21,81	167.763.830.370,00	(136.724.729.370,00)	(81,50)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	220.976.660.677,61	85.076.816.000,00	38,50	155.393.281.310,00	(70.316.465.310,00)	(45,25)
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	14.578.000,00	100,00	0,00	14.578.000,00	100,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	867.920.000,00	635.047.000,00	73,17	1.185.029.832,00	(549.982.832,00)	(46,41)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	19.774.000,00	12.219.000,00	61,79	25.686.685,00	(13.467.685,00)	(52,43)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	8.219.994.000,00	7.260.448.000,00	88,33	8.431.747.211,00	(1.171.299.211,00)	(13,89)
Jumlah		372.371.243.157,61	124.038.209.000,00	33,31	332.799.575.408,00	(208.761.366.408,00)	(62,73)

7.5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum tahun 2024 sebesar Rp432.069.006.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp427.577.646.211,00 atau sebesar 98,96%. Dibandingkan dengan tahun 2023, Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan sebesar Rp20.119.240.119,00 atau sebesar 4,94%, dimana penerimaan Dana

Alokasi Umum tahun 2023 adalah sebesar Rp407.458.406.092,00. Realisasi Dana Alokasi Umum dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.21 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Dana Alokasi Umum – Block Grant	328.763.204.000,00	328.763.204.000,00	0,00	100,00%
2	Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	10.757.169.000,00	6.265.809.211,00	4.491.359.789,00	58,25%
3	Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	100,00%
4	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	28.514.202.000,00	28.514.202.000,00	0,00	100,00%
5	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	26.444.493.000,00	26.444.493.000,00	0,00	100,00%
6	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	36.189.938.000,00	36.189.938.000,00	0,00	100,00%
Jumlah		432.069.006.000,00	427.577.646.211,00	4.491.359.789,00	98,96%

7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus tahun 2024 sebesar Rp149.063.229.900,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp133.151.042.118,00 atau sebesar 89,33%. Dibandingkan dengan tahun 2023, Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp(40.237.732.636,00) atau sebesar (23,21)%, dimana penerimaan Dana Alokasi Khusus tahun 2023 adalah sebesar Rp173.388.774.754,00. Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.22 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Alokasi Khusus – Fisik	83.292.763.000,00	73.848.309.559,00	88,66	115.479.222.997,00	(41.630.913.438,00)	(36,05)
2	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	65.770.466.900,00	59.302.732.559,00	90,17	57.909.551.757,00	1.393.180.802,00	2,41
Jumlah		149.063.229.900,00	133.151.042.118,00	89,33	173.388.774.754,00	(40.237.732.636,00)	(23,21)

1. Dana Alokasi Khusus - Fisik

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024 adalah sebesar Rp83.292.763.000,00, sedangkan realisasinya adalah Rp73.848.309.559,00 atau sebesar 88,66% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2023, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan Rp(41.630.913.438,00) atau sebesar (36,05)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.23 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	564.525.000,00	563.797.250,00	99,87	658.914.850,00	(95.117.600,00)	(14,44)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.152.652.000,00	3.143.237.709,00	99,70	3.911.575.277,00	(768.337.568,00)	(19,64)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.345.526.000,00	2.344.098.943,00	99,94	8.926.183.112,00	(6.582.084.169,00)	(73,74)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	4.498.820.000,00	3.956.418.000,00	87,94	0,00	3.956.418.000,00	100,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	33.477.108.239,00	(33.477.108.239,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	18.058.916.261,00	(18.058.916.261,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.774.520.000,00	4.733.322.465,00	99,14	0,00	4.733.322.465,00	100,00
9	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.262.000.000,00	1.047.276.321,00	82,99	849.786.122,00	197.490.199,00	23,24
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	31.271.824.000,00	30.202.110.858,00	96,58	41.259.806.211,00	(11.057.695.353,00)	(26,80)
11	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.619.021.000,00	1.477.790.000,00	91,28	0,00	1.477.790.000,00	100,00
12	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	7.681.341.000,00	2.243.749.999,00	29,21	7.540.430.050,00	(5.296.680.051,00)	(70,24)
13	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	0,00	0,00	0,00	796.502.875,00	(796.502.875,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	1.673.386.000,00	1.657.542.093,00	99,05	0,00	1.657.542.093,00	100,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	21.685.534.000,00	20.108.717.354,00	92,73	0,00	20.108.717.354,00	100,00
16	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	2.763.614.000,00	2.370.248.567,00	85,77	0,00	2.370.248.567,00	100,00
Jumlah		83.292.763.000,00	73.848.309.559,00	88,66	115.479.222.997,00	(41.630.913.438,00)	(36,05)

Realisasi DAK Fisik sebesar Rp73.848.309.559,00 atau sebesar 88,66% dari target anggaran disebabkan karena persyaratan penyaluran DAK Fisik berdasarkan data kontrak dan progres pekerjaan di lapangan, dimana terdapat paket pekerjaan yang gagal dilaksanakan karena terganjal masalah administrasi seperti pelaksanaan DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi terganjal masalah pekerjaan berada dikawasan hutan lindung.

2. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Anggaran Dana Alokasi Khusus-Non Fisik tahun 2024 adalah sebesar Rp65.770.466.900,00 dengan realisasi sebesar Rp59.302.732.559,00 atau sebesar 90,17% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2023, Dana Alokasi Khusus-Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp1.393.180.802,00 atau sebesar 2,41%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.24 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	15.325.180.000,00	15.188.441.810,00	99,11	15.390.204.810,00	(201.763.000,00)	(1,31)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	685.000.000,00	685.000.000,00	100,00	955.000.000,00	(270.000.000,00)	(28,27)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	21.710.118.700,00	20.685.055.000,00	95,28	20.579.997.200,00	105.057.800,00	0,51
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.752.000.000,00	1.717.500.000,00	98,03	1.171.750.000,00	545.750.000,00	46,58
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.587.969.200,00	1.558.896.000,00	98,17	1.387.495.000,00	171.401.000,00	12,35
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.353.020.000,00	2.264.801.090,00	96,25	2.276.470.400,00	(11.669.310,00)	(0,51)
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	328.910.000,00	310.110.000,00	94,28	344.590.000,00	(34.480.000,00)	(10,01)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	6.757.304.900,00	(6.757.304.900,00)	(100,00)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	306.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.031.860.000,00	2.642.453.189,00	87,16	2.489.993.800,00	152.459.389,00	6,12
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	4.270.152.492,00	(4.270.152.492,00)	(100,00)
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.123.000.000,00	996.911.300,00	88,77	997.034.200,00	(122.900,00)	(0,01)
13	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	1.289.558.955,00	(1.289.558.955,00)	(100,00)
14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	618.006.000,00	459.438.750,00	74,34	0,00	459.438.750,00	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
15	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	413.866.900,00	79,59	0,00	413.866.900,00	100,00
16	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	1.305.722.481,00	66,19	0,00	1.305.722.481,00	100,00
17	DAK Non Fisik-PK2UMK	358.740.000,00	314.365.080,00	87,63	0,00	314.365.080,00	100,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.111.545.000,00	2.373.230.890,00	57,72	0,00	2.373.230.890,00	100,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.985.757.000,00	8.386.940.069,00	83,99	0,00	8.386.940.069,00	100,00
Jumlah		65.770.466.900,00	59.302.732.559,00	90,17	57.909.551.757,00	1.393.180.802,00	2,41

7.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Anggaran Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp60.067.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.067.570.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2023, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp(24.457.178.000,00) atau sebesar 28,93%. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.25 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Insentif Fiskal	5.699.849.000,00	5.699.849.000,00	100,00	30.674.314.000,00	(24.974.465.000,00)	(81,42)
2	Dana Desa	54.367.721.000,00	54.367.721.000,00	100,00	53.850.434.000,00	517.287.000,00	0,96
Jumlah		60.067.570.000,00	60.067.570.000,00	100,00	84.524.748.000,00	(24.457.178.000,00)	28,93

7.5.1.1.2.2.1 Insentif Fiskal

Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Kinerja tersebut bisa berupa perbaikan atau pencapaian di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, pelayanan dasar, atau dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Insentif fiskal Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp5.699.849.000,00 ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Anggaran Insentif Fiskal tahun 2024 adalah sebesar Rp5.699.849.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.699.849.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan. Dibandingkan tahun 2023 Insentif Fiskal mengalami penurunan sebesar Rp(24.974.465.000,00) atau sebesar (81,42)%.

7.5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Anggaran Dana Desa tahun 2024 adalah sebesar Rp54.367.721.000,00 dengan realisasi sebesar Rp54.367.721.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan. Dibandingkan tahun 2023 Dana Desa mengalami kenaikan sebesar Rp517.287.000,00 atau sebesar 0,96%.

7.5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp95.538.695.210,00 dengan realisasi sebesar Rp64.740.184.644,00 atau sebesar 67,76% dari yang dianggarkan. Dibandingkan tahun 2023 Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(39.225.582.512,00) sebesar (37,73)%.

Tabel 7.5.26 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94.978.695.210,00	64.180.184.644,00	67,57	102.965.767.156,00	(38.785.582.512,00)	(37,67)
2	Bantuan Keuangan	560.000.000,00	560.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	(440.000.000,00)	(44,00)
Jumlah		95.538.695.210,00	64.740.184.644,00	67,76	103.965.767.156,00	(39.225.582.512,00)	(37,73)

7.5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp94.978.695.210,00 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp64.180.184.644,00 atau sebesar 67,57% dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, Pendapatan Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan sebesar Rp(38.785.582.512,00) atau sebesar (37,67)%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.27 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.425.307.976,00	12.289.648.220,00	85,20	11.552.852.149,00	736.796.071,00	6,38
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.018.236.344,00	9.315.715.032,00	84,55	9.695.196.256,00	(379.481.224,00)	(3,91)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55.399.358.000,00	31.861.163.376,00	57,51	71.516.596.241,00	(39.655.432.865,00)	(55,45)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.411.538.060,00	47.960.592,00	3,40	36.803.568,00	11.157.024,00	30,32
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.724.254.830,00	10.665.697.424,00	83,82	10.164.318.942,00	501.378.482,00	4,93
Jumlah		94.978.695.210,00	64.180.184.644,00	67,57	102.965.767.156,00	(38.785.582.512,00)	(37,67)

Turunnya realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 disebabkan tidak disalurkan Penyaluran Triwulan IV oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

7.5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2024 adalah sebesar Rp560.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp(440.000.000,00) atau sebesar (44,00)%. Bantuan Keuangan ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka bantuan operasional untuk Posyandu dan RT/RW yang ada di wilayah kelurahan sebagaimana petunjuk teknis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 760 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan Dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 adalah sebesar Rp7.526.902.239,00 atau sebesar 89,91% dari yang dianggarkan Rp8.371.927.836,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp6.206.211.885,00 atau sebesar 469,92%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.28 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	636.000.000,00	636.000.000,00	100,00	1.254.000.000,00	(618.000.000,00)	(49,28)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.735.927.836,00	6.890.902.239,00	89,08	66.690.354,00	6.824.211.885,00	10.232,68
Jumlah		8.371.927.836,00	7.526.902.239,00	89,91	1.320.690.354,00	6.206.211.885,00	469,92

7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2024 adalah sebesar Rp636.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan Rp636.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Pendapatan Hibah mengalami penurunan (49,28)%. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat untuk bidang sanitasi.

7.5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 adalah sebesar Rp6.890.902.239,00 atau sebesar 89,08% dari yang dianggarkan Rp7.735.927.836,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD yang pada tahun 2023 masuk ke lain-lain PAD yang sah. Rincian Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD per Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 7.5.29 Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2024*(dalam rupiah)*

No	Nama FKTP	Pendapatan
1	Puskesmas Ranai	1.868.299.885,00
2	Puskesmas Tanjung	405.800.829,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	354.106.358,00
4	Puskesmas Bunguran Selatan	271.990.906,00
5	Puskesmas Kelarik	443.532.007,00
6	Puskesmas Sedanau	680.937.814,00
7	Puskesmas Pulau Tiga	385.667.948,00
8	Puskesmas Pulau Laut	253.981.120,00
9	Puskesmas Midai	540.290.657,00
10	Puskesmas Serasan	588.170.260,00
11	Puskesmas Serasan Timur	365.254.215,00
12	Puskesmas Subi	330.503.163,00
13	Puskesmas Batubi Jaya	251.159.889,00
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	127.696.536,00
15	Puskesmas Suak Midai	23.510.652,00
Total		6.890.902.239,00

7.5.1.2 Belanja

Belanja	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.012.786.328.678,58	1.054.872.341.106,59

Realisasi Belanja tahun 2024 sebesar Rp1.012.786.328.678,58 atau 74,98% dari anggaran Belanja sebesar Rp1.350.709.585.000,00. Dibandingkan tahun 2023 realisasi Belanja mengalami penurunan sebesar Rp(42.086.012.428,01) atau sebesar (3,99)%. Rincian Realisasi Belanja per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	277.030.250.521,00	208.039.509.282,00	75,10	205.256.187.798,00	2.783.321.484,00	1,36
2	Dinas Kesehatan	261.647.137.393,00	215.513.951.923,75	82,37	212.344.634.152,05	3.169.317.771,70	1,49
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.816.185.969,00	78.107.210.218,73	51,11	135.984.379.148,46	(57.877.168.929,73)	(42,56)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	62.173.605.174,00	43.507.353.436,00	69,98	50.451.200.446,00	(6.943.847.010,00)	(13,76)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	20.953.092.841,00	18.240.013.921,00	87,05	17.183.836.711,00	1.056.177.210,00	6,15
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.349.779.299,00	8.760.024.285,00	84,64	6.694.839.474,00	2.065.184.811,00	30,85
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.469.878.222,00	7.122.914.649,00	84,10	6.930.688.224,00	192.226.425,00	2,77
8	Dinas Sosial	8.779.132.190,00	7.089.175.066,00	80,75	5.044.823.568,00	2.044.351.498,00	40,52
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.104.937.632,00	5.879.327.587,00	82,75	6.182.134.536,00	(302.806.949,00)	(4,90)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.709.033.934,00	9.355.767.750,00	79,90	10.012.641.593,00	(656.873.843,00)	(6,56)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.205.503.113,00	13.053.308.407,00	80,55	12.077.045.502,00	976.262.905,00	8,08
12	Dinas Lingkungan Hidup	16.508.907.601,00	11.998.380.212,00	72,68	10.175.750.272,00	1.822.629.940,00	17,91
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.439.790.855,00	4.692.118.382,00	72,86	4.520.574.181,00	171.544.201,00	3,79
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.208.994.674,00	8.439.841.952,00	69,13	8.782.525.285,00	(342.683.333,00)	(3,90)
15	Dinas Perhubungan	26.333.064.896,00	16.585.431.544,52	62,98	23.577.412.852,00	(6.991.981.307,48)	(29,66)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.979.221.914,00	16.484.019.960,00	71,73	12.506.686.498,00	3.977.333.462,00	31,80
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.981.214.541,00	9.670.339.146,00	80,71	7.315.687.621,00	2.354.651.525,00	32,19
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	14.919.045.718,00	11.035.413.325,18	73,97	13.491.248.920,84	(2.455.835.595,66)	(18,20)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.196.875.916,00	9.605.853.477,00	85,79	5.649.014.649,00	3.956.838.828,00	70,04
20	Dinas Perikanan	17.089.994.096,00	15.196.580.794,65	88,92	9.514.675.856,00	5.681.904.938,65	59,72
21	Dinas Pariwisata	16.718.169.738,00	11.572.188.559,99	69,22	10.064.405.077,39	1.507.783.482,60	14,98
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	13.504.985.010,00	10.330.538.011,00	76,49	30.285.603.838,61	(19.955.065.827,61)	(65,89)
23	Sekretariat Daerah	76.962.812.857,00	60.993.912.028,00	79,25	58.852.786.214,00	2.141.125.814,00	3,64
24	Sekretariat DPRD	54.509.841.328,00	37.871.105.639,00	69,48	39.447.475.265,18	(1.576.369.626,18)	(4,00)
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.128.049.162,00	11.083.445.402,00	73,26	10.245.280.127,00	838.165.275,00	8,18
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	33.070.847.977,00	24.220.494.350,00	73,24	23.249.542.607,00	970.951.743,00	4,18
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.099.357.640,00	9.049.681.784,00	81,53	9.066.825.767,00	(17.143.983,00)	(0,19)
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.941.437.861,00	6.080.264.053,00	87,59	5.487.335.128,00	592.928.925,00	10,81
29	Inspektorat Daerah	20.220.530.596,00	15.740.619.335,00	77,84	12.416.170.156,00	3.324.449.179,00	26,78
30	Kecamatan Bunguran Timur	13.293.001.318,00	11.362.913.235,00	85,48	9.616.562.348,00	1.746.350.887,00	18,16
31	Kecamatan Bunguran Barat	7.688.803.119,00	6.200.620.506,76	80,64	6.029.944.903,00	170.675.603,76	2,83
32	Kecamatan Bunguran Utara	5.994.836.420,00	5.145.910.024,00	85,84	5.319.676.241,00	(173.766.217,00)	(3,27)
33	Kecamatan Pulau Laut	5.521.086.309,00	4.894.445.683,00	88,65	4.521.519.435,00	372.926.248,00	8,25
34	Kecamatan Midai	7.065.982.374,00	6.136.131.889,00	86,84	6.158.164.718,31	(22.032.829,31)	(0,36)
35	Kecamatan Serasan	6.851.289.058,00	6.330.940.869,00	92,41	5.604.611.746,00	726.329.123,00	12,96
36	Kecamatan Subi	5.831.479.266,00	5.238.624.636,00	89,83	5.447.788.797,90	(209.164.161,90)	(3,84)
37	Kecamatan Pulau Tiga	3.483.576.768,00	2.899.383.951,00	83,23	3.269.488.048,00	(370.104.097,00)	(11,32)
38	Kecamatan Bunguran Tengah	3.156.663.843,00	2.670.532.056,00	84,60	2.492.004.583,00	178.527.473,00	7,16
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	5.880.833.000,00	4.802.186.016,00	81,66	4.547.947.429,00	254.238.587,00	5,59
40	Kecamatan Bunguran Selatan	3.701.015.200,00	3.055.784.519,00	82,57	2.813.880.251,00	241.904.268,00	8,60
41	Kecamatan Serasan Timur	4.905.296.305,00	4.346.300.952,00	88,60	5.084.054.362,33	(737.753.410,33)	(14,51)
42	Kecamatan Suak Midai	4.912.741.461,00	4.135.006.003,00	84,17	3.575.486.755,00	559.519.248,00	15,65
43	Kecamatan Bunguran Batubi	4.766.851.950,00	3.842.930.291,00	80,62	3.705.785.892,52	137.144.398,48	3,70
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	4.079.911.267,00	3.226.564.218,00	79,08	3.684.636.484,00	(458.072.266,00)	(12,43)
45	Kecamatan Pulau Panjang	4.236.027.316,00	2.659.526.533,00	62,78	1.840.667.350,00	818.859.183,00	44,49
46	Kecamatan Pulau Seluan	3.896.537.537,00	3.011.942.491,00	77,30	2.011.327.792,00	1.000.614.699,00	49,75
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.391.973.821,00	27.507.800.325,00	90,51	16.337.382.503,00	11.170.417.822,00	68,37

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan / Penurunan	%
JUMLAH		1.350.709.585.000,00	1.012.786.328.678,58	74,98	1.054.872.341.106,59	(42.086.012.428,01)	(3,99)

Rincian Realisasi Belanja sebesar Rp1.012.786.328.678,58 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Operasi	1.028.431.171.858,00	834.092.842.507,02	81,10	788.943.176.676,47	45.149.665.830,55	5,72
2.	Belanja Modal	318.278.413.142,00	178.028.354.654,56	55,93	264.281.035.089,12	(86.252.680.434,56)	(32,64)
3.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	665.131.517,00	16,63	1.648.129.341,00	(982.997.824,00)	(59,64)
Jumlah		1.350.709.585.000,00	1.012.786.328.678,58	74,98	1.054.872.341.106,59	(42.086.012.428,01)	(3,99)

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun 2024 sebesar Rp834.092.842.507,02 atau sebesar 81,10% dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp1.028.431.171.858,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp45.149.665.830,55 atau sebesar 5,72%. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Pegawai	545.753.351.348,00	480.835.325.471,00	88,10	418.913.978.804,00	61.921.346.667,00	14,78
2.	Belanja Barang dan Jasa	424.652.545.310,00	308.495.704.962,37	72,65	330.784.746.050,54	(22.289.041.088,17)	(7,23)
3.	Belanja Hibah	49.906.867.200,00	37.206.697.484,00	74,55	37.301.653.821,93	(94.956.337,93)	(0,25)
4.	Belanja Bantuan Sosial	8.118.408.000,00	7.555.114.589,65	93,06	1.942.798.000,00	5.612.316.589,65	288,88
Jumlah		1.028.431.171.858,00	834.092.842.507,02	81,10	788.943.176.676,47	45.149.665.830,55	5,72

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp480.835.325.471,00 atau sebesar 88,10% dari anggaran yang sudah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp61.921.346.667,00 atau sebesar 14,78%. Rincian Realisasi Belanja Pegawai per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	181.224.108.736,00	150.048.698.079,00	82,80	132.115.053.999,00	17.933.644.080,00	13,57
2	Dinas Kesehatan	106.672.559.390,00	99.487.207.233,00	93,26	74.808.216.032,00	24.678.991.201,00	32,99
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.961.272.787,00	9.616.210.375,00	87,73	8.491.491.099,00	1.124.719.276,00	13,25
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.091.521.895,00	3.434.896.802,00	56,39	3.361.720.393,00	73.176.409,00	2,18
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	12.070.326.211,00	11.265.990.132,00	93,34	10.463.770.483,00	802.219.649,00	7,67
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.704.141.673,00	5.377.656.997,00	94,28	3.586.633.042,00	1.791.023.955,00	49,94
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.112.352.514,00	4.682.311.776,00	91,59	4.132.451.208,00	549.860.568,00	13,31
8	Dinas Sosial	3.679.933.162,00	3.419.418.591,00	92,92	3.158.451.765,00	260.966.826,00	8,26
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.079.109.102,00	4.685.156.273,00	92,24	4.445.037.797,00	240.118.476,00	5,40
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.275.957.041,00	3.944.376.897,00	92,25	3.703.157.358,00	241.219.539,00	6,51
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.724.999.843,00	10.801.282.253,00	92,12	9.428.468.577,00	1.372.813.676,00	14,56
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.250.181.574,00	3.884.662.550,00	91,40	3.551.847.355,00	332.815.195,00	9,37
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.752.205.379,00	3.376.269.129,00	89,98	3.124.462.307,00	251.806.822,00	8,06
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.374.916.084,00	4.743.103.430,00	88,25	4.301.733.666,00	441.369.764,00	10,26

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
15	Dinas Perhubungan	4.637.421.721,00	4.137.352.871,00	89,22	4.086.996.391,00	50.356.480,00	1,23
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.878.422.056,00	3.591.407.192,00	92,60	3.168.221.534,00	423.185.658,00	13,36
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.063.848.857,00	5.287.666.789,00	87,20	4.866.870.034,00	420.796.755,00	8,65
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.185.803.684,00	4.778.112.807,00	92,14	4.192.725.728,00	585.387.079,00	13,96
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.277.619.565,00	3.937.882.660,00	92,06	3.425.189.562,00	512.693.098,00	14,97
20	Dinas Perikanan	6.888.125.208,00	6.414.775.681,00	93,13	5.633.833.372,00	780.942.309,00	13,86
21	Dinas Pariwisata	5.463.439.738,00	4.984.065.134,00	91,23	4.504.696.144,00	479.368.990,00	10,64
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	6.081.606.010,00	5.541.485.259,00	91,12	4.962.270.285,00	579.214.974,00	11,67
23	Sekretariat Daerah	24.817.113.536,00	22.106.000.679,00	89,08	21.482.698.574,00	623.302.105,00	2,90
24	Sekretariat DPRD	15.113.395.238,00	14.563.776.561,00	96,36	12.577.169.907,00	1.986.606.654,00	15,80
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.328.717.204,00	6.753.497.567,00	92,15	6.318.111.783,00	435.385.784,00	6,89
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11.952.100.681,00	10.997.412.220,00	92,01	10.567.809.834,00	429.602.386,00	4,07
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.928.220.050,00	6.384.125.929,00	92,15	5.693.029.602,00	691.096.327,00	12,14
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.697.399.478,00	4.227.233.158,00	89,99	4.087.688.357,00	139.544.801,00	3,41
29	Inspektorat Daerah	11.867.026.956,00	10.961.464.244,00	92,37	9.600.486.358,00	1.360.977.886,00	14,18
30	Kecamatan Bunguran Timur	7.115.394.738,00	6.534.339.107,00	91,83	6.536.080.438,00	(1.741.331,00)	(0,03)
31	Kecamatan Bunguran Barat	4.453.980.322,00	3.981.184.450,00	89,38	3.828.114.394,00	153.070.056,00	4,00
32	Kecamatan Bunguran Utara	2.931.100.240,00	2.433.106.064,00	83,01	2.535.789.003,00	(102.682.939,00)	(4,05)
33	Kecamatan Pulau Laut	2.739.656.969,00	2.280.665.399,00	83,25	2.191.466.718,00	89.198.681,00	4,07
34	Kecamatan Midai	3.498.396.574,00	3.035.680.367,00	86,77	2.717.993.903,00	317.686.464,00	11,69
35	Kecamatan Serasan	3.632.956.058,00	3.341.675.286,00	91,98	3.361.602.291,00	(19.927.005,00)	(0,59)
36	Kecamatan Subi	2.976.433.516,00	2.663.122.841,00	89,47	2.563.143.125,00	99.979.716,00	3,90
37	Kecamatan Pulau Tiga	2.105.010.518,00	1.860.891.948,00	88,40	1.771.291.368,00	89.600.580,00	5,06
38	Kecamatan Bunguran Tengah	2.187.087.193,00	2.005.653.041,00	91,70	1.773.646.966,00	232.006.075,00	13,08
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	2.806.141.000,00	2.418.467.508,00	86,18	2.602.756.468,00	(184.288.960,00)	(7,08)
40	Kecamatan Bunguran Selatan	2.084.154.218,00	1.800.405.504,00	86,39	1.774.216.861,00	26.188.643,00	1,48
41	Kecamatan Serasan Timur	2.094.484.175,00	1.746.287.048,00	83,38	2.098.043.786,00	(351.756.738,00)	(16,77)
42	Kecamatan Suak Midai	2.464.538.555,00	2.067.522.396,00	83,89	1.543.639.269,00	523.883.127,00	33,94
43	Kecamatan Bunguran Batubi	2.409.680.390,00	2.037.008.741,00	84,53	1.955.098.221,00	81.910.520,00	4,19
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2.310.361.158,00	2.035.381.688,00	88,10	1.969.743.870,00	65.637.818,00	3,33
45	Kecamatan Pulau Panjang	2.036.883.066,00	1.568.049.533,00	76,98	1.121.431.913,00	446.617.620,00	39,83
46	Kecamatan Pulau Seluan	2.116.921.307,00	1.595.937.684,00	75,39	1.263.703.592,00	332.234.092,00	26,29
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.636.325.978,00	3.996.447.598,00	86,20	3.465.924.072,00	530.523.526,00	15,31
Jumlah		545.753.351.348,00	480.835.325.471,00	88,10	418.913.978.804,00	61.921.346.667,00	14,78

Rincian Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp480.835.325.471,00 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	284.958.342.387,00	247.770.005.724,00	86,95	202.269.277.372,00	45.500.728.352,00	22,50
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	202.036.109.559,00	181.344.273.792,00	89,76	168.392.953.248,00	12.951.320.544,00	7,69
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.911.962.402,00	42.879.354.599,00	87,67	40.253.821.666,00	2.625.532.933,00	6,52
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.544.640.000,00	7.509.937.692,00	99,54	6.248.915.722,00	1.261.021.970,00	20,18
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.217.002.000,00	402.771.664,00	33,10	890.238.796,00	(487.467.132,00)	(54,76)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	585.295.000,00	554.000.000,00	94,65	510.480.000,00	43.520.000,00	8,53
7	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000,00	374.982.000,00	75,00	348.292.000,00	26.690.000,00	7,66
Jumlah		545.753.351.348,00	480.835.325.471,00	88,10	418.913.978.804,00	61.921.346.667,00	14,78

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah kompensasi terhadap pegawai dalam bentuk uang yang harus dibayarkan kepada Pegawai Pemerintah baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2024 Rp247.770.005.724,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp284.958.342.387,00, atau sebesar 86,95%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan sebesar Rp45.500.728.352,00 atau sebesar 22,50%. Kenaikan ini terjadi karena adanya penerimaan pegawai ASN yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagai berikut:

Tabel 7.5.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	169.282.156.858,00	143.870.771.838,00	84,99	133.143.065.380,00	10.727.706.458,00	8,06
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	36.459.263.945,00	36.036.813.400,00	98,84	15.486.825.100,00	20.549.988.300,00	132,69
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.943.464.000,00	13.721.123.708,00	98,41	12.654.306.809,00	1.066.816.899,00	8,43
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.198.790.220,00	2.796.597.356,00	87,43	1.083.190.736,00	1.713.406.620,00	158,18
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.410.227.560,00	5.239.283.000,00	96,84	5.219.371.000,00	19.912.000,00	0,38
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.464.654.240,00	9.222.693.000,00	97,44	8.190.491.000,00	1.032.202.000,00	12,60
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	866.259.000,00	1.095.000,00	0,13	634.700.000,00	(633.605.000,00)	(99,83)
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.484.261.000,00	2.171.565.000,00	87,41	3.045.312.000,00	(873.747.000,00)	(28,69)
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.153.500.000,00	2.126.595.000,00	98,75	346.240.000,00	1.780.355.000,00	514,20
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.506.771.000,00	8.337.714.600,00	98,01	8.498.977.818,00	(161.263.218,00)	(1,90)
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.542.818.700,00	2.112.645.839,00	83,08	927.627.780,00	1.185.018.059,00	127,75
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.715.227.000,00	6.520.572.587,00	60,85	48.143.343,00	6.472.429.244,00	13.444,08
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	250.373.224,00	30.501.665,00	12,18	0,00	30.501.665,00	100,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.093.680,00	1.988.470,00	16,44	1.994.033,00	(5.563,00)	100,00
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.737.000,00	769.077,00	8,80	279.529,00	489.548,00	175,13
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.971.435.960,00	12.212.748.293,00	76,47	10.882.407.733,00	1.330.340.560,00	12,22
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.064.549.000,00	1.885.664.515,00	91,34	875.704.341,00	1.009.960.174,00	115,33
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	357.502.000,00	295.665.272,00	82,70	272.955.144,00	22.710.128,00	8,32
19	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	95.845.000,00	74.550.911,00	77,78	34.240.466,00	40.310.445,00	117,73
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	934.467.000,00	887.023.906,00	94,92	819.436.154,00	67.587.752,00	8,25
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	235.946.000,00	223.623.287,00	94,78	102.614.690,00	121.008.597,00	117,93
22	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00	0,00	1.394.316,00	(1.394.316,00)	(100,00)
Jumlah		284.958.342.387,00	247.770.005.724,00	86,95	202.269.277.372,00	45.500.728.352,00	22,50

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN adalah anggaran yang dialokasikan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2024 Rp181.344.273.792,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp202.036.109.559,00 atau sebesar 89,76%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Tambahan Penghasilan ASN mengalami kenaikan sebesar Rp12.951.320.544,00 atau sebesar 7,69%. Kenaikan ini terjadi karena adanya penerimaan pegawai ASN yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kenaikan kelas jabatan PNS. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagai berikut:

**Tabel 7.5.36 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tambahan Penghasilan ASN**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	59.971.591.677,00	53.880.077.360,00	89,84	51.559.074.089,00	2.321.003.271,00	4,50
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.567.635.850,00	2.921.270.542,00	81,88	1.027.696.039,00	1.893.574.503,00	184,25
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	4.396.263.505,00	3.998.398.416,00	90,95	4.097.637.755,00	(99.239.339,00)	(2,42)
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	934.265.595,00	814.609.052,00	87,19	476.461.410,00	338.147.642,00	70,97
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.011.531.608,00	5.340.783.668,00	88,84	4.882.099.223,00	458.684.445,00	9,40
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	948.096.905,00	799.677.889,00	84,35	308.925.509,00	490.752.380,00	158,86
7	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.201.349.450,00	2.890.792.269,00	90,30	2.663.820.372,00	226.971.897,00	8,52
8	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	41.828.000,00	37.015.522,00	88,49	7.350.203,00	29.665.319,00	403,60
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	113.363.371.700,00	102.511.830.677,00	90,43	99.345.658.955,00	3.166.171.722,00	3,19
10	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9.600.175.269,00	8.149.818.397,00	84,89	4.024.229.693,00	4.125.588.704,00	102,52
Jumlah		202.036.109.559,00	181.344.273.792,00	89,76	168.392.953.248,00	12.951.320.544,00	7,69

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah anggaran yang dialokasikan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengemban tugas tambahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2024 Rp42.879.354.599,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp48.911.962.402,00, atau sebesar 87,67%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami kenaikan sebesar Rp2.625.532.933,00 atau sebesar 6,52%. Kenaikan ini terjadi karena banyaknya tenaga pendidik yang mendapat tunjangan sertifikasi guru, dan tambahan penghasilan guru lainnya. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagai berikut:

**Tabel 7.5.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja TPG PNSD	21.710.118.700,00	21.625.233.036,00	99,61	19.740.229.600,00	1.885.003.436,00	9,55
3	Belanja TKG PNSD	1.587.969.200,00	1.568.127.600,00	98,75	1.417.151.000,00	150.976.600,00	10,65
4	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.752.000.000,00	1.711.000.000,00	97,66	1.199.500.000,00	511.500.000,00	42,64
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.983.938.158,00	4.135.073.121,00	82,97	2.293.148.238,00	1.841.924.883,00	80,32
6	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.507.581.344,00	12.872.123.842,00	73,52	14.295.691.185,00	(1.423.567.343,00)	(9,96)
7	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	192.305.000,00	50.252.000,00	26,13	187.896.643,00	(137.644.643,00)	(73,26)
8	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	120.000.000,00	108.500.000,00	90,42	105.000.000,00	3.500.000,00	3,33
9	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang	167.405.000,00	117.600.000,00	70,25	24.500.000,00	93.100.000,00	380,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Menghasilkan Pendapatan						
10	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	870.145.000,00	691.445.000,00	79,46	990.705.000,00	(299.260.000,00)	(30,21)
Jumlah		48.911.962.402,00	42.879.354.599,00	87,67	40.253.821.666,00	2.625.532.933,00	6,52

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD adalah Kompensasi terhadap Pimpinan dan anggota DPRD dalam bentuk uang yang harus dibayarkan. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2024 Rp7.509.937.692,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.544.640.000,00, atau sebesar 99,54%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami kenaikan sebesar Rp1.261.021.970,00 atau sebesar 20,18%. Kenaikan ini terjadi karena naiknya kemampuan fiskal kemampuan keuangan daerah tahun 2024, sehingga berdampak kepada kenaikan belanja komunikasi intensif dan belanja transportasi. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagai berikut:

Tabel 7.5.38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Uang Representasi DPRD	449.920.000,00	449.820.000,00	99,98	451.290.000,00	(1.470.000,00)	(0,33)
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.638.000,00	58.514.000,00	96,50	60.039.700,00	(1.525.700,00)	(2,54)
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.808.000,00	75.475.800,00	99,56	64.221.840,00	11.253.960,00	17,52
4	Belanja Uang Paket DPRD	39.165.000,00	38.535.000,00	98,39	38.682.000,00	(147.000,00)	(0,38)
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	652.338.998,00	652.238.998,00	99,98	654.370.500,00	(2.131.502,00)	(0,33)
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	52.341.000,00	51.734.550,00	98,84	62.026.650,00	(10.292.100,00)	(16,59)
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.337.000,00	5.572.350,00	53,91	5.481.000,00	91.350,00	1,67
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.521.000.000,00	2.520.000.000,00	99,96	1.524.600.000,00	995.400.000,00	65,29
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00	378.000.000,00	42.000.000,00	11,11
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	59.002.000,00	57.464.526,00	97,39	66.599.596,00	(9.135.070,00)	(13,72)
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	40.458.000,00	39.748.108,00	98,25	39.965.964,00	(217.856,00)	(0,55)
12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	942.000,00	924.840,00	98,18	928.368,00	(3.528,00)	(0,38)
13	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.820.000,00	2.774.520,00	98,39	2.785.104,00	(10.584,00)	(0,38)
14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	91.950.000,00	91.850.000,00	99,89	100.200.000,00	(8.350.000,00)	(8,33)
15	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.897.593.002,00	2.875.500.000,00	99,24	2.781.000.000,00	94.500.000,00	3,40
16	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	170.327.000,00	169.785.000,00	99,68	18.725.000,00	151.060.000,00	806,73
Jumlah		7.544.640.000,00	7.509.937.692,00	99,54	6.248.915.722,00	1.261.021.970,00	20,18

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah Kompensasi terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bentuk uang yang harus dibayarkan. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2024 Rp402.771.664,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.217.002.000,00, atau sebesar 33,10%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami penurunan sebesar Rp(487.467.132,00) atau sebesar (54,76)%. Penurunan ini terjadi karena tidak tercapainya target Pajak Daerah, sehingga berdampak turunnya insentif pemungutan

pajak untuk Kepala Daerah. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagai berikut:

Tabel 7.5.39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	71.370.000,00	54.600.000,00	76,50	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.993.000,00	7.644.000,00	76,49	7.644.000,00	0,00	0,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	128.465.000,00	98.280.000,00	76,50	98.280.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.021.000,00	7.531.680,00	75,16	7.531.680,00	0,00	0,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	278.000,00	210.149,00	75,59	213.034,00	(2.885,00)	(1,35)
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	0,00	0,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.570.000,00	5.503.680,00	98,81	5.503.680,00	0,00	0,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.000,00	112.320,00	96,83	112.320,00	0,00	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	342.000,00	336.960,00	98,53	336.960,00	0,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	990.842.000,00	228.551.875,00	23,07	716.016.122,00	(487.464.247,00)	(68,08)
Jumlah		1.217.002.000,00	402.771.664,00	33,10	890.238.796,00	(487.467.132,00)	(54,76)

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah uang yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang jabatan sebagai Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2024 Rp554.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp585.295.000,00, atau sebesar 94,65%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengalami kenaikan sebesar Rp43.520.000,00 atau sebesar 8,53%. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagai berikut:

Tabel 7.5.40 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	180.700.000,00	180.600.000,00	99,94	110.880.000,00	69.720.000,00	62,88
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	404.595.000,00	373.400.000,00	92,29	399.600.000,00	(26.200.000,00)	(6,56)
Jumlah		585.295.000,00	554.000.000,00	94,65	510.480.000,00	43.520.000,00	8,53

7. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD adalah belanja pegawai yang berasal dari SKPD/unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Untuk tahun 2024 hanya ada 1 (satu) BLUD yaitu RSUD Kabupaten Natuna. Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2024 Rp374.982.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00, atau sebesar 75,00%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Belanja Pegawai BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp26.690.000,00 atau sebesar 7,66%.

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp308.495.704.962,37 atau sebesar 72,65% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp424.652.545.310,00.

Dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp(22.289.041.088,17) atau sebesar (6,74)%. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD
(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.756.395.940,00	32.975.723.342,00	75,36	40.068.700.913,00	(7.092.977.571,00)	(17,70)
2	Dinas Kesehatan	113.155.590.767,00	82.426.116.225,61	72,84	93.579.873.187,05	(11.153.756.961,44)	(13,53)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.100.993.360,00	4.829.671.445,00	43,51	5.631.924.896,00	(802.253.451,00)	(14,24)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.572.933.279,00	4.748.134.120,00	85,20	7.798.218.717,00	(3.050.084.597,00)	(39,11)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	7.744.846.630,00	6.501.813.789,00	83,95	6.467.286.228,00	34.527.561,00	0,53
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.993.537.626,00	2.768.068.538,00	69,31	3.007.111.432,00	(239.042.894,00)	(7,95)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.883.865.708,00	2.130.837.583,00	73,89	2.201.676.720,00	(70.839.137,00)	(3,22)
8	Dinas Sosial	2.809.442.028,00	1.916.856.475,00	68,23	1.532.180.803,00	384.675.672,00	25,11
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.629.828.530,00	1.131.507.314,00	69,42	1.566.796.329,00	(435.289.015,00)	(27,78)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.175.076.893,00	5.411.390.853,00	75,42	6.100.289.235,00	(688.898.382,00)	(11,29)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.591.114.470,00	2.086.424.154,00	58,10	2.396.757.005,00	(310.332.851,00)	(12,95)
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.087.142.027,00	6.153.559.662,00	76,09	6.301.605.487,00	(148.045.825,00)	(2,35)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.385.585.476,00	1.315.849.253,00	55,16	1.348.111.874,00	(32.262.621,00)	(2,39)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.204.935.590,00	3.493.454.522,00	56,30	4.454.991.619,00	(961.537.097,00)	(21,58)
15	Dinas Perhubungan	7.223.568.175,00	5.619.743.907,00	77,80	5.839.953.707,00	(220.209.800,00)	(3,77)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.735.520.228,00	9.144.075.136,00	71,80	8.724.874.964,00	419.200.172,00	4,80
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.185.665.684,00	1.508.451.115,00	69,02	1.814.819.767,00	(306.368.652,00)	(16,88)
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.233.864.934,00	4.358.481.737,00	83,27	4.271.864.159,00	86.617.578,00	2,03
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.161.773.587,00	1.568.168.317,00	72,54	1.733.532.407,00	(165.364.090,00)	(9,54)
20	Dinas Perikanan	4.127.069.388,00	2.776.458.875,00	67,27	2.327.182.984,00	449.275.891,00	19,31
21	Dinas Pariwisata	8.415.089.600,00	5.131.462.311,00	60,98	3.829.173.384,00	1.302.288.927,00	34,01
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	6.846.579.000,00	4.482.417.752,00	65,47	6.324.299.365,43	(1.841.881.613,43)	(29,12)
23	Sekretariat Daerah	44.210.411.765,00	33.683.110.145,00	76,19	34.006.855.140,00	(323.744.995,00)	(0,95)
24	Sekretariat DPRD	33.680.776.090,00	22.917.432.539,00	68,04	25.237.345.180,00	(2.319.912.641,00)	(9,19)
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.810.252.958,00	3.891.597.835,00	57,14	3.591.670.344,00	299.927.491,00	8,35
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	13.529.707.296,00	10.166.204.246,00	75,14	10.043.917.432,00	122.286.814,00	1,22
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.931.137.590,00	2.427.105.855,00	61,74	3.177.576.165,00	(750.470.310,00)	(23,62)
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.861.938.383,00	1.520.030.895,00	81,64	1.173.116.771,00	346.914.124,00	29,57
29	Inspektorat Daerah	6.267.547.640,00	3.976.035.091,00	63,44	2.518.553.798,00	1.457.481.293,00	57,87
30	Kecamatan Bunguran Timur	5.260.755.580,00	4.245.791.253,00	80,71	2.868.546.910,00	1.377.244.343,00	48,01
31	Kecamatan Bunguran Barat	2.828.072.797,00	2.153.996.056,76	76,16	1.945.000.509,00	208.995.547,76	10,75
32	Kecamatan Bunguran Utara	2.622.736.180,00	2.439.712.960,00	93,02	2.610.827.238,00	(171.114.278,00)	(6,55)
33	Kecamatan Pulau Laut	2.611.929.340,00	2.446.120.284,00	93,65	2.162.814.717,00	283.305.567,00	13,10
34	Kecamatan Midai	3.431.185.800,00	3.019.551.522,00	88,00	3.315.750.815,31	(296.199.293,31)	(8,93)
35	Kecamatan Serasan	3.043.083.000,00	2.869.018.583,00	94,28	2.214.709.455,00	654.309.128,00	29,54
36	Kecamatan Subi	2.656.545.750,00	2.381.411.795,00	89,64	2.660.508.172,90	(279.096.377,90)	(10,49)
37	Kecamatan Pulau Tiga	1.247.006.250,00	969.242.003,00	77,73	1.458.396.680,00	(489.154.677,00)	(33,54)
38	Kecamatan Bunguran Tengah	924.255.150,00	654.979.015,00	70,87	713.397.617,00	(58.418.602,00)	(8,19)
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	2.459.792.000,00	2.005.266.508,00	81,52	1.658.273.961,00	346.992.547,00	20,92
40	Kecamatan Bunguran Selatan	1.452.925.982,00	1.156.129.015,00	79,57	933.165.390,00	222.963.625,00	23,89
41	Kecamatan Serasan Timur	2.610.812.130,00	2.475.513.904,00	94,82	2.743.708.576,33	(268.194.672,33)	(9,77)
42	Kecamatan Suak Midai	2.292.702.906,00	1.965.753.607,00	85,74	1.928.497.486,00	37.256.121,00	1,93
43	Kecamatan Bunguran Batubi	2.250.891.560,00	1.742.721.550,00	77,42	1.650.607.671,52	92.113.878,48	5,58
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1.629.620.109,00	1.166.342.530,00	71,57	1.070.603.614,00	95.738.916,00	8,94
45	Kecamatan Pulau Panjang	1.457.394.250,00	881.912.000,00	60,51	375.927.437,00	505.984.563,00	134,60
46	Kecamatan Pulau Seluan	1.422.616.230,00	1.239.754.807,00	87,15	568.259.200,00	671.495.607,00	118,17

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.138.029.654,00	3.622.304.538,00	70,50	2.835.490.588,00	786.813.950,00	27,75
JUMLAH		424.652.545.310,00	308.495.704.962,37	72,65	330.784.746.050,54	(22.289.041.088,17)	(6,74)

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp308.495.704.962,37,00 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Barang	89.232.087.016,00	61.597.470.790,00	69,03	63.558.997.436,53	(1.961.526.646,53)	(3,09)
2	Belanja Jasa	163.289.795.213,00	129.608.413.532,00	79,37	152.044.463.102,00	(22.450.543.767,00)	(14,77)
3	Belanja Pemeliharaan	20.403.077.091,00	10.603.214.368,76	51,97	20.392.510.488,49	(9.789.296.119,73)	(48,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas	103.830.493.893,00	64.347.111.233,00	61,97	56.560.916.456,00	7.786.194.777,00	13,77
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.570.214.000,00	5.743.142.292,00	87,41	2.904.253.807,00	2.838.888.485,00	97,75
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.307.559.350,00	11.086.786.363,00	90,08	11.690.436.790,00	(603.650.427,00)	(5,16)
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	79.600.000,00	79.600.000,00	100,00	0,00	79.600.000,00	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.939.718.747,00	25.429.966.383,61	87,87	23.633.167.970,52	1.811.292.610,09	7,66
Jumlah		424.652.545.310,00	308.495.704.962,37	72,65	330.784.746.050,54	(22.289.041.088,17)	(6,74)

1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang tahun 2024 sebesar Rp61.597.470.790,00 atau sebesar 69,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp89.196.387.016,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp(1.961.526.646,53) atau sebesar (3,09)%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut:

Tabel 7.5.43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	754.266.539,00	546.764.213,00	72,49	192.502.000,00	354.262.213,00	184,03
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	298.525.700,00	96.425.800,00	32,30	43.150.000,00	53.275.800,00	123,47
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.180.457.612,00	6.613.602.143,00	80,85	6.319.129.151,00	294.472.992,00	4,66
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	23.778.000,00	11.663.100,00	49,05	6.975.075,00	4.688.025,00	67,21
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	50.000.000,00	49.865.800,00	99,73	169.427.900,00	(119.562.100,00)	(70,57)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	80.835.000,00	50.425.000,00	62,38	37.110.000,00	13.315.000,00	35,88
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.142.247.392,00	2.457.794.146,00	59,33	5.837.841.156,10	(3.380.047.010,10)	(57,90)
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.542.735.925,00	1.625.535.535,00	63,93	1.898.324.756,00	(272.789.221,00)	(14,37)
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	90.000.000,00	0,00	0,00	62.800.000,00	(62.800.000,00)	(100,00)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	420.320.000,00	290.419.500,00	69,09	253.763.253,00	36.656.247,00	14,45
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.293.731.370,00	3.221.535.848,00	75,03	4.916.877.752,00	(1.695.341.904,00)	(34,48)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.659.996.365,00	1.299.129.458,00	78,26	572.795.200,00	726.334.258,00	126,81
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.443.750.675,00	5.637.659.025,00	59,70	6.480.631.890,00	(842.972.865,00)	(13,01)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.229.775.236,00	993.857.900,00	80,82	891.969.100,00	101.888.800,00	11,42
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	21.390.000,00	15.892.000,00	74,30	13.990.045,00	1.901.955,00	13,60
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	530.990.430,00	405.514.014,00	76,37	11.000.000,00	394.514.014,00	3.586,49
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	661.941.957,00	537.197.700,00	81,15	11.900.000,00	525.297.700,00	4.414,27

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.151.437.800,00	703.260.910,00	61,08	751.038.644,00	(47.777.734,00)	(6,36)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	752.509.880,00	614.342.500,00	81,64	734.462.850,00	(120.120.350,00)	(16,35)
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	438.656.000,00	331.078.308,00	75,48	168.400.000,00	162.678.308,00	96,60
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	451.625.000,00	284.635.000,00	63,02	75.075.000,00	209.560.000,00	279,13
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.035.978.000,00	881.237.150,00	85,06	1.198.672.570,00	(317.435.420,00)	(26,48)
23	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.761.977.140,00	1.855.337.247,00	49,32	3.230.228.800,43	(1.374.891.553,43)	(42,56)
24	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.517.648.036,00	5.136.664.997,00	53,97	2.978.119.327,00	2.158.545.670,00	72,48
25	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	904.826.485,00	419.532.625,00	46,37	158.528.400,00	261.004.225,00	164,64
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	375.010.000,00	312.810.000,00	83,41	0,00	312.810.000,00	100,00
27	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	144.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura	26.995.000,00	9.745.500,00	36,10	0,00	9.745.500,00	100,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	75.500.000,00	52.116.000,00	69,03	0,00	52.116.000,00	100,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.400.000,00	1.873.000,00	42,57	44.301.000,00	(42.428.000,00)	(95,77)
31	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.078.227.600,00	4.842.483.300,00	68,41	5.414.612.708,00	(572.129.408,00)	(10,57)
32	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.553.586.600,00	10.758.312.130,00	79,38	12.378.929.110,00	(1.620.616.980,00)	(13,09)
33	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	185.020.000,00	183.520.000,00	99,19	0,00	183.520.000,00	100,00
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	400.958.000,00	374.262.873,00	93,34	43.469.000,00	330.793.873,00	760,99
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.362.094.272,00	1.211.987.425,00	88,98	1.240.047.409,00	(28.059.984,00)	(2,26)
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	156.550.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	(4.100.000,00)	(100,00)
37	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.918.367.978,00	5.897.079.378,00	74,47	4.657.266.300,00	1.239.813.078,00	26,62
38	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	23.500.000,00	22.461.405,00	95,58	0,00	22.461.405,00	100,00
39	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	86.650.000,00	85.950.000,00	99,19	65.850.000,00	20.100.000,00	30,52
40	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	99.000.000,00	94.000.000,00	94,95	14.250.000,00	79.750.000,00	559,65
41	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	227.260.000,00	217.606.000,00	95,75	205.150.000,00	12.456.000,00	6,07
42	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.297.510.024,00	435.805.000,00	33,59	819.458.500,00	(383.653.500,00)	(46,82)
43	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	57.000.000,00	56.800.000,00	99,65	49.400.000,00	7.400.000,00	14,98
44	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	(9.600.000,00)	(100,00)
45	Belanja Pakaian Penyelamatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Pakaian Teknik	32.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	278.830.000,00	229.456.000,00	82,29	208.815.740,00	20.640.260,00	9,88
48	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	0,00	0,00	0,00	32.890.000,00	(32.890.000,00)	(100,00)
49	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.382.761.000,00	1.165.589.000,00	84,29	368.704.800,00	796.884.200,00	216,13
50	Belanja Pakaian Batik Tradisional	101.500.000,00	70.605.860,00	69,56	191.788.000,00	(121.182.140,00)	(63,19)
51	Belanja Pakaian Olahraga	987.350.000,00	603.890.000,00	61,16	348.420.000,00	255.470.000,00	73,32
52	Belanja Pakaian Paskibraka	831.600.000,00	821.728.000,00	98,81	421.352.000,00	400.376.000,00	95,02
53	Belanja Pakaian Jas/Safari	10.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
54	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	82.245.000,00	61.745.000,00	75,07	15.000.000,00	46.745.000,00	311,63
55	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	(1.880.000,00)	(100,00)
56	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.496.000,00	1.150.000,00	32,89	0,00	1.150.000,00	100,00
57	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran	7.125.000,00	7.125.000,00	100,00	0,00	7.125.000,00	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum						
	Jumlah	89.232.087.016,00	61.597.470.790,00	69,06	63.558.997.436,53	(1.961.526.646,53)	(3,09)

Secara garis besar belanja barang mengalami penurunan disebabkan banyak tagihan atas belanja tersebut belum terbayarkan sampai per 31 Desember 2024. Atas belanja yang belum terbayar tersebut dicatat sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam akun utang belanja yang akan dilakukan pembayaran pada tahun 2025.

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa tahun 2024 sebesar Rp129.608.413.532,00 atau sebesar 79,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp163.271.795.213,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Jasa mengalami penurunan sebesar Rp(22.436.049.570,00) atau sebesar (14,76)%. Rincian Belanja Jasa sebagai berikut:

Tabel 7.5.44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	(8.400.000,00)	(100,00)
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.135.570.000,00	3.750.955.000,00	61,13	4.550.690.000,00	(799.735.000,00)	(17,57)
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.421.875.000,00	3.069.820.000,00	69,42	3.421.451.000,00	(351.631.000,00)	(10,28)
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.800.000,00	1.800.000,00	16,67	0,00	1.800.000,00	100,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.792.550.000,00	1.336.220.000,00	74,54	1.787.900.000,00	(451.680.000,00)	(25,26)
6	Honorarium Rohaniwan	13.600.000,00	3.000.000,00	22,06	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)
7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.920.000,00	9.950.000,00	38,39	7.800.000,00	2.150.000,00	27,56
8	Honorarium Penyelenggara Ujian	16.400.000,00	16.400.000,00	100,00	6.100.000,00	10.300.000,00	168,85
9	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	119.400.000,00	109.800.000,00	91,96	157.400.000,00	(47.600.000,00)	(30,24)
10	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	624.000.000,00	298.200.000,00	47,79	816.000.000,00	(517.800.000,00)	(63,46)
11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.442.300.000,00	3.974.783.000,00	89,48	7.279.150.000,00	(3.304.367.000,00)	(45,39)
12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.561.865.062,00	11.927.403.152,00	81,91	19.354.817.427,00	(7.427.414.275,00)	(38,38)
13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	83.460.000,00	0,00	0,00	43.945.000,00	(43.945.000,00)	(100,00)
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.176.100.000,00	1.080.900.000,00	91,91	1.122.000.000,00	(41.100.000,00)	(3,66)
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	494.500.000,00	453.900.000,00	91,79	424.800.000,00	29.100.000,00	6,85
17	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.795.000,00	(1.795.000,00)	(100,00)
18	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	96.750.000,00	25.100.000,00	25,94	0,00	25.100.000,00	100,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	550.400.000,00	366.380.000,00	66,57	182.450.000,00	183.930.000,00	100,81
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.628.564.322,00	28.394.832.269,00	95,84	36.683.072.328,00	(8.288.240.059,00)	(22,59)
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000,00	10.000.000,00	83,33	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.941.731.988,00	17.628.600.000,00	88,40	13.560.700.000,00	4.067.900.000,00	30,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.535.881.690,00	1.127.576.250,00	73,42	1.406.512.600,00	(278.936.350,00)	(19,83)
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.080.999.910,00	2.476.757.500,00	80,39	2.599.573.960,00	(122.816.460,00)	(4,72)
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	680.000.000,00	595.150.000,00	87,52	497.700.000,00	97.450.000,00	19,58
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	926.100.000,00	849.200.000,00	91,70	865.300.000,00	(16.100.000,00)	(1,86)
27	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	108.000.000,00	99.000.000,00	91,67	184.853.100,00	(85.853.100,00)	(46,44)
28	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	138.800.000,00	127.400.000,00	91,79	97.500.000,00	29.900.000,00	30,67
29	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	168.372.000,00	125.220.000,00	74,37	13.300.000,00	111.920.000,00	841,50
30	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.532.200.000,00	1.237.300.000,00	80,75	1.357.950.000,00	(120.650.000,00)	(8,88)
31	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	268.800.000,00	1.500.000,00	0,56	139.990.880,00	(138.490.880,00)	(98,93)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
32	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	53.360.000,00	38.825.800,00	72,76	837.464.000,00	(798.638.200,00)	(95,36)
33	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	16.000.000,00	(3.000.000,00)	(18,75)
34	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	739.831.042,00	465.782.000,00	62,96	304.918.945,00	160.863.055,00	52,76
35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.977.610.000,00	1.785.305.000,00	90,28	1.430.825.000,00	354.480.000,00	24,77
36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	(17.600.000,00)	(100,00)
37	Belanja Jasa Pencucianakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	62.300.000,00	37.951.000,00	60,92	44.626.000,00	(6.675.000,00)	(14,96)
38	Belanja Jasa Kalibrasi	165.390.000,00	49.656.500,00	30,02	172.683.000,00	(123.026.500,00)	(71,24)
39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.121.100.000,00	1.025.900.000,00	91,51	1.089.900.000,00	(64.000.000,00)	(5,87)
40	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	33.685.000,00	13.089.112,00	38,86	22.000.000,00	(8.910.888,00)	(40,50)
41	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	11.614.400.000,00	9.443.075.000,00	81,30	9.917.492.000,00	(474.417.000,00)	(4,78)
42	Belanja Jasa Operator Kapal	874.800.000,00	813.500.000,00	92,99	899.600.000,00	(86.100.000,00)	(9,57)
43	Belanja Tagihan Telepon	468.977.300,00	139.101.504,00	29,66	129.237.645,00	9.863.859,00	7,63
44	Belanja Tagihan Air	1.283.242.450,00	720.084.850,00	56,11	696.292.996,00	23.791.854,00	3,42
45	Belanja Tagihan Listrik	8.039.987.189,00	6.944.622.422,00	86,38	5.763.181.694,00	1.181.440.728,00	20,50
46	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	311.600.000,00	166.105.000,00	53,31	301.665.000,00	(135.560.000,00)	(44,94)
47	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.020.616.440,00	1.429.777.094,00	35,56	3.278.950.079,00	(1.849.172.985,00)	(56,40)
48	Belanja Paket/Pengiriman	2.701.687.900,00	456.256.015,00	16,89	439.282.800,00	16.973.215,00	3,86
49	Belanja Penambahan Daya	15.000.000,00	0,00	0,00	6.455.400,00	(6.455.400,00)	(100,00)
50	Belanja Registrasi/Keanggotaan	95.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(100,00)
51	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.034.069.518,00	477.033.025,00	46,13	434.738.991,00	42.294.034,00	9,73
52	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.024.236.850,00	1.447.051.533,00	71,49	0,00	1.447.051.533,00	100,00
53	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.277.887.840,00	1.168.027.536,00	91,40	0,00	1.168.027.536,00	100,00
54	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.312.930.000,00	11.211.428.500,00	91,05	11.754.966.000,00	(543.537.500,00)	(4,62)
55	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.019.348.400,00	916.291.600,00	89,89	967.050.000,00	(50.758.400,00)	(5,25)
56	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.558.745.323,00	2.127.123.793,00	83,13	3.490.604.304,00	(1.363.480.511,00)	(39,06)
57	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	296.636.779,00	128.862.063,00	43,44	207.822.092,00	(78.960.029,00)	(37,99)
58	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	340.039.784,00	142.768.344,00	41,99	217.944.513,00	(75.176.169,00)	(34,49)
59	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	100.000.000,00	49.460.000,00	49,46	0,00	49.460.000,00	100,00
60	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	0,00	104.000.000,00	100,00
61	Belanja Sewa Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
62	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	49.400.000,00	49.400.000,00	100,00	48.220.000,00	1.180.000,00	2,45
63	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
64	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	195.000.000,00	179.355.000,00	91,98	0,00	179.355.000,00	100,00
65	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	400.252.000,00	293.880.000,00	73,42	219.706.000,00	74.174.000,00	33,76
66	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.750.000,00	21.300.000,00	76,76	4.550.000,00	16.750.000,00	368,13
67	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.940.000,00	2.100.000,00	71,43	11.320.000,00	(9.220.000,00)	(81,45)
68	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	255.048.000,00	175.625.000,00	68,86	140.440.000,00	35.185.000,00	25,05
69	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	6.550.000,00	2.000.000,00	30,53	2.000.000,00	0,00	0,00
70	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	59.000.000,00	36.000.000,00	61,02	76.500.000,00	(40.500.000,00)	(52,94)
71	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.413.395.000,00	969.494.000,00	68,59	1.352.390.264,00	(382.896.264,00)	(28,31)
72	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	16.400.000,00	(14.900.000,00)	(90,85)
73	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	30.000.000,00	0,00	0,00	18.150.000,00	(18.150.000,00)	(100,00)
74	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	8.000.000,00	2.260.000,00	28,25	0,00	2.260.000,00	100,00
75	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.002.871.739,00	1.480.573.434,00	73,92	950.623.070,00	529.950.364,00	55,75
76	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	319.000.000,00	168.750.000,00	52,90	214.280.000,00	(45.530.000,00)	(21,25)
78	Belanja Sewa Mebel	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	92.600.000,00	85.140.000,00	91,94	72.100.000,00	13.040.000,00	18,09

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
80	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	159.000.000,00	144.000.000,00	90,57	15.500.000,00	128.500.000,00	829,03
81	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	68.200.000,00	8.703.411,00	12,76	9.207.075,00	(503.664,00)	(5,47)
82	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	173.050.000,00	(173.050.000,00)	(100,00)
83	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	9.293.771,00	(9.293.771,00)	(100,00)
84	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00	(1.975.000,00)	(100,00)
85	Belanja Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	0,00	0,00	16.879.000,00	(16.879.000,00)	(100,00)
86	Belanja Sewa Peralatan Umum	12.000.000,00	4.500.000,00	37,50	0,00	4.500.000,00	100,00
87	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	41.870.500,00	(41.870.500,00)	(100,00)
88	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.292.376,00	(1.292.376,00)	(100,00)
89	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	688.976.430,00	654.180.000,00	94,95	455.520.000,00	198.660.000,00	43,61
90	Belanja Sewa Bangunan Gudang	277.000.000,00	276.000.000,00	99,64	273.500.000,00	2.500.000,00	0,91
91	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	445.340.000,00	254.020.000,00	57,04	247.035.500,00	6.984.500,00	2,83
92	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
93	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
94	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43	7.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)
95	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	93.300.000,00	(93.300.000,00)	(100,00)
96	Belanja Sewa Bangunan Parkir	22.504.000,00	7.500.000,00	33,33	0,00	7.500.000,00	100,00
97	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	(3.168.000,00)	(100,00)
98	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	203.300.000,00	(203.300.000,00)	(100,00)
99	Belanja Sewa Asrama	532.386.000,00	532.240.000,00	99,97	516.950.000,00	15.290.000,00	2,96
100	Belanja Sewa Hotel	719.967.056,00	324.027.000,00	45,01	402.832.409,00	(78.805.409,00)	(19,56)
101	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	13.000.000,00	(10.000.000,00)	(76,92)
102	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	436.331.000,00	342.021.000,00	78,39	270.800.000,00	71.221.000,00	26,30
103	Belanja Sewa Audio Visual	52.500.000,00	44.500.000,00	84,76	0,00	44.500.000,00	100,00
104	Belanja Sewa Alat Musik	120.300.000,00	64.300.000,00	53,45	25.000.000,00	39.300.000,00	157,20
105	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	(100,00)
106	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	69.907.800,00	(69.907.800,00)	(100,00)
107	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	58.341.390,00	34.706.370,00	59,49	294.853.296,00	(260.146.926,00)	(88,23)
108	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	151.500.000,00	50.000.000,00	33,00	0,00	50.000.000,00	100,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	410.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	244.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00	(99.900.000,00)	(100,00)
112	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	13.762.000,00	13.697.400,00	99,53	20.000.000,00	(6.302.600,00)	(31,51)
113	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	345.987.000,00	(345.987.000,00)	(100,00)
114	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	44.637.900,00	0,00	0,00	99.935.200,00	(99.935.200,00)	(100,00)
115	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	1.828.256.487,00	(1.828.256.487,00)	(100,00)
116	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	31.040.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	221.204.260,00	114.638.940,00	51,82	352.561.530,00	(237.922.590,00)	(67,48)
118	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	115.000.000,00	114.492.750,00	99,56	0,00	114.492.750,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
119	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.226.499.650,00	(1.226.499.650,00)	(100,00)
120	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	150.000.000,00	0,00	0,00	228.081.000,00	(228.081.000,00)	(100,00)
121	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	0,00	0,00	0,00	335.302.650,00	(335.302.650,00)	(100,00)
123	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	150.000.000,00	100,00
124	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	210.000.000,00	140.000.000,00	66,67	0,00	140.000.000,00	100,00
125	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	200.000.000,00	199.403.000,00	99,70	169.957.650,00	29.445.350,00	17,33
126	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	200.000.000,00	0,00	0,00	288.000.000,00	(288.000.000,00)	(100,00)
127	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	89.665.800,00	(89.665.800,00)	(100,00)
128	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	23.587.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	(135.000.000,00)	(100,00)
130	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.945.686.530,00	1.267.103.000,00	65,12	728.507.820,00	538.595.180,00	73,93
131	Belanja Sosialisasi	304.101.390,00	111.144.000,00	36,55	140.245.000,00	(29.101.000,00)	(20,75)
132	Belanja Bimbingan Teknis	1.059.663.221,00	857.634.365,00	80,18	149.450.000,00	708.184.365,00	473,86
133	Belanja Diklat Kepemimpinan	11.000.000,00	5.500.000,00	50,00	357.747.500,00	(352.247.500,00)	(98,46)
134	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	7.500.000,00	50,00	0,00	7.500.000,00	100,00
Jumlah		163.289.795.213,00	129.608.413.532,00	79,38	152.044.463.102,00	(22.436.049.570,00)	(14,76)

Secara garis besar Belanja Jasa mengalami penurunan disebabkan banyak tagihan atas belanja tersebut belum terbayarkan sampai per 31 Desember 2024. Atas belanja yang belum terbayar tersebut dicatat sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam akun utang belanja yang akan dilakukan pembayaran pada tahun 2025.

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp10.603.214.368,76 atau sebesar 51,46% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.603.077.091,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp(9.789.296.119,73) atau sebesar (48,00)%. Rincian Belanja pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	0,00	0,00	0,00	38.300.000,00	(38.300.000,00)	(100,00)
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	30.000.000,00	10.500.000,00	35,00	0,00	10.500.000,00	100,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	30.000.000,00	29.889.042,00	99,63	57.048.185,00	(27.159.143,00)	(47,61)
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.500.000,00	35.300.000,00	99,44	0,00	35.300.000,00	100,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	13.500.000,00	13.496.000,00	99,97	0,00	13.496.000,00	100,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.662.661.090,00	923.554.101,00	55,55	1.214.151.862,00	(290.597.761,00)	(23,93)
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	834.965.900,00	505.516.600,00	60,54	316.494.000,00	189.022.600,00	59,72
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	59.500.000,00	22.862.342,00	38,42	11.075.000,00	11.787.342,00	106,43

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang						
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	54.862.860,00	20.415.000,00	37,21	0,00	20.415.000,00	100,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	22.000.000,00	13.430.000,00	61,05	0,00	13.430.000,00	100,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00	(24.900.000,00)	(100,00)
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.545.000,00	(12.545.000,00)	(100,00)
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.068.962.760,00	437.495.500,00	40,93	636.485.300,00	(198.989.800,00)	(31,26)
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	20.000.000,00	10.140.000,00	50,70	0,00	10.140.000,00	100,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	(2.130.000,00)	(100,00)
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	45.000.000,00	6.000.000,00	13,33	10.090.000,00	(4.090.000,00)	(40,54)
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	30.000.000,00	18.665.000,00	62,22	23.965.000,00	(5.300.000,00)	(22,12)
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	202.174.000,00	128.332.000,00	63,48	353.062.000,00	(224.730.000,00)	(63,65)
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.972.011.495,00	1.469.790.420,00	74,53	1.231.876.406,00	237.914.014,00	19,31
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	199.630.000,00	103.789.000,00	51,99	29.774.050,00	74.014.950,00	248,59
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	405.715.040,00	301.308.450,00	74,27	356.784.500,00	(55.476.050,00)	(15,55)
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	11.648.000,00	(11.648.000,00)	(100,00)
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	131.450.000,00	104.703.206,00	79,65	47.186.100,00	57.517.106,00	121,89
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	0,00	0,00	0,00	35.800.614,00	(35.800.614,00)	(100,00)
26	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00	100,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	730.000.000,00	107.073.375,00	14,67	1.952.310.510,00	(1.845.237.135,00)	(94,52)
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	137.500.000,00	77.018.030,00	56,01	23.945.000,00	53.073.030,00	221,65
30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	103.910.000,00	71.665.000,00	68,97	94.603.000,00	(22.938.000,00)	(24,25)
31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	250.000.000,00	199.916.000,00	79,97	32.705.124,00	167.210.876,00	511,27
32	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	81.106.936,00	28.327.000,00	34,93	62.110.000,00	(33.783.000,00)	(54,39)
33	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	60.000.000,00	36.735.450,00	61,23	46.000.000,00	(9.264.550,00)	(20,14)
34	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	4.500.000,00	100,00
35	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.021.000.000,00	539.340.470,00	52,82	656.662.843,00	(117.322.373,00)	(17,87)
36	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	50.004.000,00	0,00	0,00	111.866.355,00	(111.866.355,00)	(100,00)
37	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.725.000,00	(6.725.000,00)	(100,00)
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.117.977.100,00	2.292.211.711,76	44,79	3.376.781.161,06	(1.084.569.449,30)	(32,12)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	485.000.000,00	188.885.000,00	38,95	0,00	188.885.000,00	100,00
40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.013.380.000,00	257.249.695,00	25,39	2.541.021.570,00	(2.283.771.875,00)	(89,88)
41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	950.000.000,00	824.589.475,00	86,80	2.205.646.593,00	(1.381.057.118,00)	(62,61)
42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	785.240.791,00	(785.240.791,00)	(100,00)
43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	266.181.600,00	11.048.600,00	4,15	361.173.283,00	(350.124.683,00)	(96,94)
44	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	49.906.647,00	(49.906.647,00)	(100,00)
45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	92.600.000,00	0,00	0,00	248.455.600,43	(248.455.600,43)	(100,00)
46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	15.000.000,00	14.850.000,00	99,00	0,00	14.850.000,00	100,00
48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	45.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	129.980.000,00	49.948.600,00	38,43	15.850.000,00	34.098.600,00	215,13
50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	48.020.000,00	(48.020.000,00)	(100,00)
51	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	(7.100.000,00)	(100,00)
52	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	378.800.000,00	12.468.630,00	3,29	0,00	12.468.630,00	100,00
53	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	524.926.000,00	290.846.000,00	55,41	855.668.032,00	(564.822.032,00)	(66,01)
54	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	0,00	0,00	0,00	962.745.000,00	(962.745.000,00)	(100,00)
55	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	213.500.000,00	121.212.444,00	56,77	239.367.726,00	(118.155.282,00)	(49,36)
56	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	29.000.000,00	28.980.000,00	99,93	9.918.520,00	19.061.480,00	192,18
57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	65.000.000,00	64.992.000,00	99,99	39.840.000,00	25.152.000,00	63,13
58	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	30.000.000,00	28.800.000,00	96,00	16.050.000,00	12.750.000,00	79,44
59	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	681.329.310,00	470.989.557,00	69,13	0,00	470.989.557,00	100,00
60	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	550.289.661,00	(550.289.661,00)	(100,00)
61	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	287.107.105,00	(287.107.105,00)	(100,00)
62	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	171.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	440.000.000,00	439.490.000,00	99,88	197.932.400,00	241.557.600,00	122,04
64	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	(2.625.000,00)	(100,00)
65	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	0,00	38.000.000,00	100,00
66	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	345.112.000,00	225.392.570,00	65,31	178.240.550,00	47.152.020,00	26,45
68	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	0,00	0,00	7.367.000,00	(7.367.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
69	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	10.500.000,00	3.498.100,00	33,32	0,00	3.498.100,00	100,00
70	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	(5.920.000,00)	(100,00)
Jumlah		20.403.077.091,00	10.603.214.368,76	51,97	20.392.510.488,49	(9.789.296.119,73)	(48,00)

Secara garis besar Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan disebabkan banyak tagihan atas belanja tersebut belum terbayarkan sampai per 31 Desember 2024. Atas belanja yang belum terbayar tersebut dicatat sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam akun utang belanja yang akan dilakukan pembayaran pada tahun 2025.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp64.347.111.233,00 atau sebesar 61,94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp103.884.193.893,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Perjalanan Dinas mengalami kenaikan sebesar Rp7.786.194.777,00 atau sebesar 13,77%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Tabel 7.5.46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.074.024.769,00	40.895.578.410,00	63,83	43.019.639.039,00	(2.124.060.629,00)	(4,94)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.175.256.124,00	22.185.102.823,00	58,11	12.776.097.417,00	9.409.005.406,00	73,65
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.512.463.000,00	1.197.680.000,00	79,19	706.560.000,00	491.120.000,00	69,51
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68.750.000,00	68.750.000,00	100,00	58.620.000,00	10.130.000,00	17,28
Jumlah		103.830.493.893,00	64.347.111.233,00	61,97	56.560.916.456,00	7.786.194.777,00	13,77

Belanja Perjalanan Dinas mengalami kenaikan disebabkan banyak intensitas perjalanan dinas yang dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan pekerjaan. Selain hal tersebut masih terdapat tagihan atas Belanja Perjalanan Dinas yang belum terbayar sampai 31 Desember 2024 yang dicatat sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam akun utang belanja yang akan dilakukan pembayaran pada tahun 2025.

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp5.743.142.292,00 atau sebesar 87,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.570.214.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami kenaikan sebesar Rp2.838.888.485,00 atau sebesar 97,75%. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 7.5.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.565.689.000,00	1.215.113.018,00	77,61	711.486.187,00	503.626.831,00	70,79
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Beasiswa	500.000.000,00	220.200.000,00	44,04	440.400.000,00	(220.200.000,00)	(50,00)
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.679.100.000,00	1.661.400.000,00	98,95	0,00	1.661.400.000,00	100,00
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	783.300.000,00	774.300.000,00	98,85	0,00	774.300.000,00	100,00
7	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	35.000.000,00	100,00
8	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	0,00	135.000.000,00	100,00
9	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.294.125.000,00	1.189.429.148,00	91,91	1.396.367.620,00	(206.938.472,00)	(14,82)
10	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	575.000.000,00	512.700.126,00	89,17	56.000.000,00	456.700.126,00	815,54
Jumlah		6.570.214.000,00	5.743.142.292,00	87,41	2.904.253.807,00	2.838.888.485,00	97,75

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah tingkat SD dan SMP yang langsung ditransfer oleh Pemerintah Pusat langsung ke rekening sekolah. Selain itu juga realisasi belanja BOS juga diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD untuk belanja BOS yang jumlah siswanya dibawah 60 (enam puluh) orang berdasarkan data dapodik. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2024 sebesar Rp11.086.786.363,00 atau sebesar 90,08% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp12.307.559.350,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Barang dan Jasa BOS mengalami penurunan sebesar Rp(603.650.427,00) atau sebesar (5,16)%. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS sebagai berikut:

**Tabel 7.5.48 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah**

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS		Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS
				BOS DAK NF	Bos Daerah	
1	11002363	SD NEGERI 001 SABANG BARAT	Midai	145.380.000,00	0,00	145.380.000,00
2	11001175	SD NEGERI 002 AIR PUTIH	Midai	34.201.500,00	18.000.000,00	52.201.500,00
3	11001185	SD NEGERI 003 SABANG BARAT	Midai	91.880.000,00	0,00	91.880.000,00
4	11001196	SD NEGERI 004 GUNUNG SEBELAT	Midai	34.920.000,00	25.000.000,00	59.920.000,00
5	11001161	SD NEGERI 001 SEDANAU	Bunguran Barat	93.900.000,00	0,00	93.900.000,00
6	11001173	SD NEGERI 002 SEDANAU	Bunguran Barat	80.711.000,00	0,00	80.711.000,00
7	11001314	SD NEGERI 003 SEDANAU	Bunguran Barat	150.873.000,00	0,00	150.873.000,00
8	11001332	SD NEGERI 004 PIAN TENGAH	Bunguran Barat	40.170.000,00	9.000.000,00	49.170.000,00
9	11001341	SD NEGERI 005 SEDANAU	Bunguran Barat	59.187.000,00	0,00	59.187.000,00
10	11001347	SD NEGERI 006 SEDANAU	Bunguran Barat	48.776.000,00	12.000.000,00	60.776.000,00
11	11001353	SD NEGERI 007 SELAUT	Bunguran Barat	52.450.000,00	0,00	52.450.000,00
12	11001359	SD NEGERI 008 BINJAI	Bunguran Barat	95.423.000,00	0,00	95.423.000,00
13	11001375	SD NEGERI 009 MEKAR JAYA	Bunguran Barat	87.840.000,00	0,00	87.840.000,00
14	11001380	SD NEGERI 010 SEDANAU	Bunguran Barat	17.113.800,00	48.000.000,00	65.113.800,00
15	11001160	SD NEGERI 001 RANAI	Bunguran Timur	256.286.400,00	0,00	256.286.400,00
16	11001172	SD NEGERI 002 RANAI	Bunguran Timur	297.182.000,00	0,00	297.182.000,00
17	11001190	SD NEGERI 003 SUNGAI ULU	Bunguran Timur	80.576.600,00	0,00	80.576.600,00
18	11001308	SD NEGERI 004 RANAI	Bunguran Timur	211.406.950,00	0,00	211.406.950,00
19	11001326	SD NEGERI 005 SEPEMPANG	Bunguran Timur	153.399.550,00	0,00	153.399.550,00
20	11001350	SD NEGERI 006 BANDARSYAH	Bunguran Timur	176.044.110,00	0,00	176.044.110,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS		Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS
				BOS DAK NF	Bos Daerah	
21	11001357	SD NEGERI 007 RANAI DARAT	Bunguran Timur	302.167.450,00	0,00	302.167.450,00
22	11001368	SD NEGERI 008 BATU GAJAH	Bunguran Timur	46.069.000,00	19.000.000,00	65.069.000,00
23	11001378	SD NEGERI 009 BANDARSYAH	Bunguran Timur	76.175.000,00	0,00	76.175.000,00
24	11001383	SD NEGERI 010 BATU GAJAH	Bunguran Timur	32.780.000,00	0,00	32.780.000,00
25	11002764	SD NEGERI 011 RANAI	Bunguran Timur	91.511.300,00	0,00	91.511.300,00
26	69964075	SD NEGERI 012 RANAI	Bunguran Timur	263.664.500,00	0,00	263.664.500,00
27	70041098	SD NEGERI 013 RANAI	Bunguran Timur	64.838.000,00	25.000.000,00	89.838.000,00
28	11002364	SD NEGERI 001 SERASAN	Serasan	74.371.000,00	0,00	74.371.000,00
29	11001165	SD NEGERI 002 SERASAN	Serasan	67.234.500,00	0,00	67.234.500,00
30	11001191	SD NEGERI 003 TANJUNG BALAU	Serasan	46.989.000,00	11.000.000,00	57.989.000,00
31	11001197	SD NEGERI 004 JERMALIK	Serasan	29.707.300,00	20.000.000,00	49.707.300,00
32	11001311	SD NEGERI 005 PANGKALAN	Serasan	49.473.500,00	11.000.000,00	60.473.500,00
33	11001316	SD NEGERI 006 BATU BERIAN	Serasan	73.386.000,00	0,00	73.386.000,00
34	11001328	SD NEGERI 007 HILIR	Serasan	95.141.000,00	0,00	95.141.000,00
35	11001162	SD NEGERI 001 SUBI	Subi	95.132.000,00	0,00	95.132.000,00
36	11002509	SD NEGERI 002 MELIAH	Subi	21.530.420,00	4.000.000,00	25.530.420,00
37	11001181	SD NEGERI 003 SUBI BESAR	Subi	48.966.200,00	0,00	48.966.200,00
38	11001186	SD NEGERI 001 PULAU PANJANG	Pulau Panjang	67.467.400,00	0,00	67.467.400,00
39	11001198	SD NEGERI 002 KERDAU	Pulau Panjang	54.680.000,00	0,00	54.680.000,00
40	11002358	SD NEGERI 001 KELARIK AIR MALI	Bunguran Utara	55.434.300,00	0,00	55.434.300,00
41	11001168	SD NEGERI 002 KELARIK	Bunguran Utara	130.404.000,00	0,00	130.404.000,00
42	11001178	SD NEGERI 003 KELARIK UTARA	Bunguran Utara	167.774.000,00	0,00	167.774.000,00
43	11001302	SD NEGERI 004 TELUK BUTON	Bunguran Utara	28.954.000,00	5.000.000,00	33.954.000,00
44	11001189	SD NEGERI 001 KELARIK BARAT / SELUAN	Pulau Seluan	34.329.000,00	0,00	34.329.000,00
45	11002448	SD NEGERI 001 AIR PAYANG	Pulau Laut	106.902.000,00	0,00	106.902.000,00
46	11001174	SD NEGERI 002 TANJUNG PALA	Pulau Laut	56.392.600,00	0,00	56.392.600,00
47	11001177	SD NEGERI 003 KADUR	Pulau Laut	46.046.600,00	14.000.000,00	60.046.600,00
48	11001192	SD NEGERI 001 TANJUNG BATANG	Pulau Tiga	112.587.000,00	0,00	112.587.000,00
49	11001300	SD NEGERI 002 SEDEDAP	Pulau Tiga	80.981.000,00	0,00	80.981.000,00
50	11001304	SD NEGERI 003 SABANG MAWANG	Pulau Tiga	128.723.500,00	0,00	128.723.500,00
51	11001327	SD NEGERI 004 SERANTAS	Pulau Tiga	82.432.500,00	0,00	82.432.500,00
52	11001182	SD NEGERI 001 TANJUNG	Bunguran Timur Laut	100.682.400,00	0,00	100.682.400,00
53	11001312	SD NEGERI 002 KELANGA	Bunguran Timur Laut	81.028.500,00	0,00	81.028.500,00
54	11001319	SD NEGERI 003 PENGADAH	Bunguran Timur Laut	59.610.000,00	0,00	59.610.000,00
55	11001335	SD NEGERI 004 CERUK	Bunguran Timur Laut	126.420.000,00	0,00	126.420.000,00
56	11001372	SD NEGERI 005 LIMAU MANIS	Bunguran Timur Laut	95.619.000,00	0,00	95.619.000,00
57	11001381	SD NEGERI 006 SELEMAM	Bunguran Timur Laut	42.160.000,00	23.000.000,00	65.160.000,00
58	11001382	SD NEGERI 007 SEBADAI HULU	Bunguran Timur Laut	56.160.000,00	13.000.000,00	69.160.000,00
59	11001360	SD NEGERI 001 HARAPAN JAYA	Bunguran Tengah	157.470.000,00	0,00	157.470.000,00
60	11001365	SD NEGERI 002 TAPAU	Bunguran Tengah	99.109.600,00	0,00	99.109.600,00
61	11001370	SD NEGERI 003 AIR LENGIT	Bunguran Tengah	85.091.900,00	0,00	85.091.900,00
62	11001195	SD NEGERI 001 CEMAGA	Bunguran Selatan	95.338.000,00	0,00	95.338.000,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS		Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS
				BOS DAK NF	Bos Daerah	
63	11001330	SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH	Bunguran Selatan	54.190.000,00	9.000.000,00	63.190.000,00
64	11001345	SD NEGERI 003 CEMAGA UTARA	Bunguran Selatan	90.014.900,00	0,00	90.014.900,00
65	11001346	SD NEGERI 004 CEMAGA SELATAN	Bunguran Selatan	45.284.000,00	23.000.000,00	68.284.000,00
66	11001376	SD NEGERI 005 CEMAGA SELATAN	Bunguran Selatan	54.910.000,00	0,00	54.910.000,00
67	11001384	SD NEGERI 006 CEMAGA SELATAN	Bunguran Selatan	37.070.000,00	36.000.000,00	73.070.000,00
68	11001176	SD NEGERI 001 ARUNG AYAM	Serasan Timur	103.018.300,00	0,00	103.018.300,00
69	11001303	SD NEGERI 002 AIR NUSA	Serasan Timur	128.120.000,00	0,00	128.120.000,00
70	11001325	SD NEGERI 003 PAYAK	Serasan Timur	38.760.000,00	13.000.000,00	51.760.000,00
71	69893603	SD NEGERI 004 AIR RINGAU	Serasan Timur	76.516.000,00	0,00	76.516.000,00
72	11001338	SD NEGERI 001 SEDANAU TIMUR	Bunguran Batubi	68.690.000,00	0,00	68.690.000,00
73	11001366	SD NEGERI 002 BATUBI JAYA	Bunguran Batubi	47.332.000,00	10.000.000,00	57.332.000,00
74	11001369	SD NEGERI 003 GUNUNG PUTRI	Bunguran Batubi	83.685.100,00	0,00	83.685.100,00
75	11001371	SD NEGERI 004 SEDARAT BARU	Bunguran Batubi	30.270.700,00	13.000.000,00	43.270.700,00
76	11001374	SD NEGERI 005 BATUBI JAYA	Bunguran Batubi	63.168.000,00	0,00	63.168.000,00
77	11001183	SD NEGERI 001 PULAU TIGA	Pulau Tiga Barat	104.106.650,00	0,00	104.106.650,00
78	11001321	SD NEGERI 002 SELADING	Pulau Tiga Barat	52.075.000,00	0,00	52.075.000,00
79	11001358	SD NEGERI 003 SETUMUK	Pulau Tiga Barat	37.094.000,00	19.000.000,00	56.094.000,00
80	11001167	SD NEGERI 001 BATU BELANAK	Suak Midai	31.620.000,00	31.000.000,00	62.620.000,00
81	11001305	SD NEGERI 002 GUNUNG JAMBAT	Suak Midai	51.960.000,00	16.000.000,00	67.960.000,00
82	11000324	SMP NEGERI 1 MIDAI	Midai	117.250.000,00	0,00	117.250.000,00
83	11000318	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	192.793.488,00	0,00	192.793.488,00
84	11002503	SMP NEGERI 2 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	41.500.000,00	31.000.000,00	72.500.000,00
85	69980325	SMP NEGERI 3 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	9.060.000,00	54.000.000,00	63.060.000,00
86	11000317	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	779.143.800,00	0,00	779.143.800,00
87	11002054	SMP NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	223.472.000,00	0,00	223.472.000,00
88	11002498	SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	84.059.000,00	0,00	84.059.000,00
89	11000325	SMP NEGERI 1 SERASAN	Serasan	193.326.000,00	0,00	193.326.000,00
90	69978814	SMP NEGERI 2 SERASAN	Serasan	32.708.000,00	38.000.000,00	70.708.000,00
91	69978813	SMP NEGERI 3 SERASAN	Serasan	57.201.000,00	20.000.000,00	77.201.000,00
92	11002057	SMP NEGERI 1 PULAU PANJANG	Subi	82.300.000,00	0,00	82.300.000,00
93	11001399	SMP NEGERI 1 SUBI	Subi	111.059.945,00	0,00	111.059.945,00
94	11001396	SMP NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	Bunguran Utara	143.770.000,00	0,00	143.770.000,00
95	69978868	SMP NEGERI 2 BUNGURAN UTARA	Bunguran Utara	36.150.000,00	35.000.000,00	71.150.000,00
96	11002508	SMP NEGERI 1 PULAU SELUAN	Bunguran Utara	50.300.000,00	23.000.000,00	73.300.000,00
97	11001398	SMP NEGERI 1 PULAU LAUT	Pulau Laut	62.212.000,00	0,00	62.212.000,00
98	11001405	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA	Pulau Tiga	163.620.000,00	0,00	163.620.000,00
99	11001403	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Bunguran Timur Laut	240.147.900,00	0,00	240.147.900,00
100	11002055	SMP NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR LAUT	Bunguran Timur Laut	67.349.000,00	34.000.000,00	101.349.000,00
101	11000329	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TENGAH	Bunguran Tengah	168.527.700,00	0,00	168.527.700,00
102	11001404	SMP NEGERI 1 BUNGURAN SELATAN	Bunguran Selatan	80.494.500,00	0,00	80.494.500,00
103	69978815	SMP NEGERI 2 BUNGURAN SELATAN	Bunguran Selatan	84.905.000,00	0,00	84.905.000,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS		Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS
				BOS DAK NF	Bos Daerah	
104	11002053	SMP NEGERI 1 SERASAN TIMUR	Serasan Timur	180.687.000,00	0,00	180.687.000,00
105	11000328	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BATUBI	Bunguran Batubi	109.750.000,00	0,00	109.750.000,00
106	11001402	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA BARAT	Pulau Tiga Barat	76.461.000,00	0,00	76.461.000,00
Jumlah				10.424.786.363,00	662.000.000,00	11.086.786.363,00

7. Belanja Barang dan Jasa BOSP

Belanja Barang dan Jasa BOSP merupakan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana bantuan operasional satuan pendidikan tingkat PAUD dan TK yang langsung ditransfer oleh Pemerintah Pusat langsung ke rekening sekolah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP tahun 2024 sebesar Rp79.600.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp79.600.000,00. Belanja Barang dan Jasa BOSP merupakan belanja yang bersumber dari BOP PAUD Kinerja dan BOP Kesetaraan Kinerja yang diterima selama tahun 2024. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagai berikut:

Tabel 7.5.49 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Per Sekolah
(dalam rupiah)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah
1	69934196	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	15.000.000,00
2	69870173	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR LAUT	Bunguran Timur Laut	30.000.000,00
3	P9970341	SKB NATUNA	Bunguran Timur	34.600.000,00
Jumlah				79.600.000,00

8. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD adalah belanja barang dan jasa yang berasal dari SKPD/unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Untuk tahun 2024 hanya ada 1 (satu) BLUD yaitu RSUD Kabupaten Natuna. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp25.429.966.383,61 dari yang dianggarkan sebesar Rp28.939.718.747,00, atau sebesar 87,87%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Belanja Barang dan Jasa BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp1.796.798.413,09 atau sebesar 7,60%.

7.5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun 2024 sebesar Rp37.206.697.484,00 atau sebesar 74,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.906.867.200,00. Dibandingkan dengan tahun 2023 Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp(94.956.337,93) atau sebesar (2,55)%. Penurunan belanja hibah disebabkan karena banyak tagihan dari belanja hibah tidak terbayarkan sampai 31 Desember 2024, dan telah dicatat sebagai utang belanja dalam akun neraca Pemerintah Daerah. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 7.5.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	19.322.000.000,00	18.570.000.000,00	96,11	9.400.000.000,00	9.170.000.000,00	975,53
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.221.000.000,00	1.309.943.273,00	58,98	2.137.497.129,00	(827.553.856,00)	(387,16)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	5.619.593.275,00	1.562.637.693,00	27,81	5.109.948.010,00	(3.547.310.317,00)	(694,20)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan						
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.031.385.736,00	11.664.061.753,00	64,69	15.164.685.484,00	(3.500.623.731,00)	(230,84)
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.234.000.000,00	2.623.154.500,00	81,11	4.057.514.371,93	(1.434.359.871,93)	(353,51)
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	494.100.000,00	494.100.000,00	100,00	412.360.000,00	81.740.000,00	198,22
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	456.020.000,00	454.032.076,00	99,56	496.215.984,00	(42.183.908,00)	(85,01)
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	528.768.189,00	528.768.189,00	100,00	523.432.843,00	5.335.346,00	10,19
Jumlah		49.906.867.200,00	37.206.697.484,00	74,55	37.301.653.821,93	(94.956.337,93)	(2,55)

Selama tahun 2024 terdapat belanja hibah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah Negeri Swasta dalam bentuk Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp494,100,000.00, dan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sejumlah Rp456.020.000,00 dengan rincian:

Tabel 7.5.51 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH PENERIMAAN/BELANJA
1	SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BUNGURAN BARAT	91.500.000,00
2	SD ISLAM TERPADU NIQ BUNGURAN TIMUR	196.420.000,00
3	SD ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH RANAI	206.180.000,00
JUMLAH		494.100.000,00

Tabel 7.5.52 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH PENERIMAAN/BELANJA
1	SMPIT NATUNA INSAN QURANI	51.340.000,00
2	SMP NURUL JANNAH	402.692.076,00
JUMLAH		454.032.076,00

Adapun realisasi belanja hibah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.53 Rincian Realisasi Belanja Hibah per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.373.192.275,00	3.083.217.423,00	57,38	3.335.560.560,00	(252.343.137,00)	(7,57)
2	Dinas kesehatan	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	(225.000.000,00)	(100,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.330.000.000,00	2.248.193.536,00	51,92	3.791.750.900,00	(1.543.557.364,00)	(40,71)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.746.900.000,00	8.348.786.632,00	56,61	14.953.787.347,00	(6.605.000.715,00)	(44,17)
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	32.635.000,00	(32.635.000,00)	(100,00)
6	Dinas Perhubungan	436.341.000,00	432.500.000,00	99,12	275.600.000,00	156.900.000,00	56,93
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	410.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	367.000.000,00	0,00	0,00	3.425.137.171,93	(3.425.137.171,93)	(100,00)
9	Sekretariat Daerah	4.464.665.736,00	3.995.231.704,00	89,49	1.338.750.000,00	2.656.481.704,00	198,43
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.778.768.189,00	19.098.768.189,00	96,56	9.923.432.843,00	9.175.335.346,00	92,46
JUMLAH		49.906.867.200,00	37.206.697.484,00	74,55	37.301.653.821,93	(94.956.337,93)	(0,25)

7.5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp7.555.114.589,65 atau sebesar 93,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.118.408.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp5.612.316.589,65 atau sebesar 288,88% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	455.651.500,00	455.589.000,00	99,99	634.488.000,00	(178.899.000,00)	(28,20)
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	618.000.000,00	556.100.000,00	89,98	80.388.000,00	475.712.000,00	591,77
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.600.957.000,00	1.154.400.000,00	72,11	40.000.000,00	1.114.400.000,00	2.786,00
4.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.443.799.500,00	5.389.025.589,65	98,99	1.187.922.000,00	4.201.103.589,65	353,65
Jumlah		8.118.408.000,00	7.555.114.589,65	93,06	1.942.798.000,00	5.612.316.589,65	288,88

Adapun realisasi belanja bantuan sosial per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	455.651.500,00	455.589.000,00	99,99	734.484.000,00	(278.895.000,00)	(37,97)
2	Dinas Sosial	2.218.957.000,00	1.710.500.000,00	77,09	120.388.000,00	1.590.112.000,00	1.320,82
3	Dinas Perikanan	5.443.799.500,00	5.389.025.589,65	98,99	1.087.926.000,00	4.301.099.589,65	395,35
JUMLAH		8.118.408.000,00	7.555.114.589,65	93,06	1.942.798.000,00	5.612.316.589,65	288,88

Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan diakibatkan program pemerintah daerah memberi bantuan sosial barang berupa bibit ikan untuk dilakukan pengembangan budi daya.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp178.028.354.654,56 atau sebesar 55,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp318.278.413.142,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Belanja Modal tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp(86.252.680.434,56) atau sebesar (32,64)% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Modal Tanah	5.284.662.100,00	1.449.980.299,18	27,44	3.027.754.385,00	(1.577.774.085,82)	(52,11)
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.551.699.926,00	54.296.918.498,52	65,77	63.225.717.778,00	(8.928.799.279,48)	(14,12)
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.573.779.719,00	36.218.407.340,13	47,92	49.095.024.269,66	(12.876.616.929,53)	(26,23)
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.635.719.617,00	84.811.150.755,73	55,56	147.255.543.406,46	(62.444.392.650,73)	(42,41)
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.760.061.950,00	1.117.419.129,00	63,49	1.676.995.250,00	(559.576.121,00)	(33,37)
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	472.489.830,00	134.478.632,00	28,46	0,00	134.478.632,00	100,00
JUMLAH		318.278.413.142,00	178.028.354.654,56	55,93	264.281.035.089,12	(86.252.680.434,56)	(32,64)

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah tahun 2024 sebesar Rp1.449.980.299,18 atau sebesar 27,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.284.662.100,00. Dibandingkan dengan tahun 2023 Belanja Modal Tanah mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp(1.577.774.085,82) atau sebesar (52,11)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	700.000.000,00	0,00	0,00	1.653.000.000,00	(1.653.000.000,00)	(100,00)
2.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	170.000.000,00	0,00	0,00	446.000.000,00	(446.000.000,00)	(100,00)
3.	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	10.000.000,00	5.015.439,00	50,15	0,00	5.015.439,00	100,00
4.	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	986.162.100,00	951.943.000,00	96,53	99.944.400,00	851.998.600,00	852,47
5.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	116.137.200,00	(116.137.200,00)	(100,00)
6.	Belanja Modal Tanah untuk Makam	1.550.000.000,00	0,00	0,00	354.831.200,00	(354.831.200,00)	(100,00)
7.	Belanja Modal Lapangan Lainnya	1.868.500.000,00	493.021.860,18	26,39	357.841.585,00	135.180.275,18	37,78
TOTAL		5.284.662.100,00	1.449.980.299,18	27,44	3.027.754.385,00	(1.577.774.085,82)	(52,11)

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	700.000.000,00	0,00	0,00	1.811.827.060,00	(1.811.827.060,00)	(100,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.000.000,00	5.015.439,00	2,79	116.137.200,00	(111.121.761,00)	(95,68)
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.550.000.000,00	0,00	0,00	354.831.200,00	(354.831.200,00)	(100,00)
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.849.662.100,00	1.444.964.860,18	50,71	298.958.925,00	1.146.005.935,18	383,33
5	Dinas Pariwisata	5.000.000,00	0,00	0,00	446.000.000,00	(446.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH		5.284.662.100,00	1.449.980.299,18	27,44	3.027.754.385,00	(1.577.774.085,82)	(52,11)

Rendahnya realisasi Belanja Modal Tanah disebabkan masih terdapat tagihan belanja tanah yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam akun utang belanja di neraca pemerintah daerah.

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp54.296.918.498,52 atau sebesar 65,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp82.551.699.926,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp(8.928.799.279,48) atau sebesar (14,12)%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Excavator	1.300.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	696.700.000,00	(696.700.000,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Electric Generating Set	21.000.000,00	20.900.000,00	99,52	0,00	20.900.000,00	100,00
4	Belanja Modal Pompa	5.000.000,00	4.100.000,00	82,00	5.500.000,00	(1.400.000,00)	(25,45)
5	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	800.000.000,00	796.000.000,00	99,50	0,00	796.000.000,00	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	129.600.000,00	116.633.250,00	89,99	31.325.000,00	85.308.250,00	272,33
7	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	5.250.000,00	0,00	0,00	6.290.000,00	(6.290.000,00)	(100,00)
8	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.021.400.000,00	106.120.000,00	2,64	34.680.000,00	71.440.000,00	206,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.883.200.000,00	2.877.200.000,00	74,09	0,00	2.877.200.000,00	100,00
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	275.800.000,00	(275.800.000,00)	(100,00)
11	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.515.300.000,00	1.471.939.620,00	97,14	624.492.350,00	847.447.270,00	135,70
12	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	750.410.460,00	646.700.000,00	86,18	39.850.000,00	606.850.000,00	1.522,84
13	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.790.021.000,00	1.237.861.983,00	69,15	0,00	1.237.861.983,00	100,00
14	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.280.000.000,00	4.273.997.154,00	99,86	0,00	4.273.997.154,00	100,00
15	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	188.000.000,00	188.000.000,00	100,00	19.990.000,00	168.010.000,00	840,47
16	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	170.000.000,00	0,00	0,00	8.683.118.079,00	(8.683.118.079,00)	(100,00)
17	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	47.489.884,00	(47.489.884,00)	(100,00)
18	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	0,00	0,00	0,00	550.000,00	(550.000,00)	(100,00)
19	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	(29.700.000,00)	(100,00)
20	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	7.490.000,00	(7.490.000,00)	(100,00)
21	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	146.075.000,00	(146.075.000,00)	(100,00)
22	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	61.000.000,00	60.845.649,00	99,75	0,00	60.845.649,00	100,00
23	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.200.000.000,00	1.199.200.778,00	99,93	812.600.000,00	386.600.778,00	47,58
24	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)	(100,00)
25	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	330.281.000,00	110.920.000,00	33,58	123.835.000,00	(12.915.000,00)	(10,43)
27	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.529.020.000,00	345.555.000,00	22,60	1.318.775.918,00	(973.220.918,00)	(73,80)
28	Belanja Modal Mebel	6.257.734.000,00	2.610.663.756,00	41,72	3.526.261.344,00	(915.597.588,00)	(25,97)
29	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2.000.000,00	1.040.000,00	52,00	0,00	1.040.000,00	100,00
30	Belanja Modal Alat Pembersih	71.500.000,00	3.500.000,00	4,90	29.540.000,00	(26.040.000,00)	(88,15)
31	Belanja Modal Alat Pendingin	2.490.231.010,00	1.338.196.087,00	53,74	994.569.634,00	343.626.453,00	34,55
32	Belanja Modal Alat Dapur	123.920.000,00	32.588.000,00	26,30	1.498.000,00	31.090.000,00	2.075,43
33	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.803.660.130,00	1.528.136.892,00	31,81	1.095.129.980,00	433.006.912,00	39,54
34	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	582.800.000,00	578.425.500,00	99,25	47.370.000,00	531.055.500,00	1.121,08
35	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	381.549.800,00	185.770.000,00	48,69	496.305.000,00	(310.535.000,00)	(62,57)
36	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	211.500.000,00	80.350.000,00	37,99	70.893.500,00	9.456.500,00	13,34
37	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	562.951.000,00	363.230.000,00	64,52	469.759.000,00	(106.529.000,00)	(22,68)
38	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	508.500.000,00	239.640.000,00	47,13	150.737.500,00	88.902.500,00	58,98
39	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	45.500.000,00	15.300.000,00	33,63	7.500.000,00	7.800.000,00	104,00
40	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	349.000.000,00	0,00	0,00	233.482.000,00	(233.482.000,00)	(100,00)
41	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	437.150.000,00	107.115.000,00	24,50	128.603.874,00	(21.488.874,00)	(16,71)
42	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	317.900.000,00	66.150.000,00	20,81	295.810.000,00	(229.660.000,00)	(77,64)
43	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.770.670.000,00	2.531.965.290,00	67,15	716.863.000,00	1.815.102.290,00	253,20
44	Belanja Modal Peralatan Cetak	111.940.000,00	111.840.000,00	99,91	12.470.000,00	99.370.000,00	796,87
45	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	50.000.000,00	0,00	0,00	135.797.000,00	(135.797.000,00)	(100,00)
46	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	55.000.000,00	54.850.000,00	99,73	215.750.000,00	(160.900.000,00)	(74,58)
47	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	246.800.000,00	231.636.000,00	93,86	88.435.000,00	143.201.000,00	161,93
48	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	(14.750.000,00)	(100,00)
49	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	165.500.000,00	0,00	0,00	79.400.000,00	(79.400.000,00)	(100,00)
50	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.660.000,00	(10.660.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
51	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.358.126.592,00	5.907.913.156,00	92,92	6.267.126.672,00	(359.213.516,00)	(5,73)
52	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	3.000.000,00	2.998.000,00	99,93	476.872.000,00	(473.874.000,00)	(99,37)
53	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.000.000,00	2.875.000,00	95,83	0,00	2.875.000,00	100,00
54	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	959.518.668,00	921.526.450,00	96,04	0,00	921.526.450,00	100,00
55	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.800.000.000,00	1.781.664.696,00	98,98	0,00	1.781.664.696,00	100,00
56	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.500.000,00	3.242.501,00	92,64	0,00	3.242.501,00	100,00
57	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	3.519.166.940,00	3.383.379.693,00	96,14	0,00	3.383.379.693,00	100,00
58	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.054.491.671,00	(2.054.491.671,00)	(100,00)
59	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.085.212.586,00	999.900.000,00	47,95	16.736.737.776,00	(15.736.837.776,00)	(94,03)
60	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	16.920.000,00	1.800.000,00	10,64	0,00	1.800.000,00	100,00
61	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
62	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	400.025.820,00	179.790.000,00	44,94	7.000.000,00	172.790.000,00	2.468,43
63	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	(10.770.000,00)	(100,00)
64	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga	90.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
66	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	56.750.000,00	6.675.000,00	11,76	0,00	6.675.000,00	100,00
67	Belanja Modal Proteksi Lingkungan	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00	120.000.000,00	100,00
68	Belanja Modal Meteorological Equipment	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
69	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	149.743.440,00	(149.743.440,00)	(100,00)
70	Belanja Modal Komputer Jaringan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Belanja Modal Personal Computer	9.120.903.000,00	5.602.803.501,00	61,43	7.398.468.900,00	(1.795.665.399,00)	(24,27)
72	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.789.152.600,00	1.297.730.780,00	72,53	934.632.007,00	363.098.773,00	38,85
73	Belanja Modal Peralatan Mainframe	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(100,00)
75	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.845.369.620,00	1.057.658.800,00	57,31	1.691.300.772,00	(633.641.972,00)	(37,46)
76	Belanja Modal Peralatan Jaringan	709.000.000,00	694.916.400,00	98,01	43.361.000,00	651.555.400,00	1.502,63
77	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	779.850.000,00	520.893.000,00	66,79	990.617.000,00	(469.724.000,00)	(47,42)
78	Belanja Modal Elektronik/Electric	133.000.000,00	71.806.000,00	53,99	111.646.000,00	(39.840.000,00)	(35,68)
79	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	12.035.000,00	(12.035.000,00)	(100,00)
80	Belanja Modal Elektrik	100.000.000,00	96.940.000,00	96,94	0,00	96.940.000,00	100,00
81	Belanja Modal Suara	57.000.000,00	11.500.000,00	20,18	0,00	11.500.000,00	100,00
82	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	23.900.000,00	(23.900.000,00)	(100,00)
83	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	5.980.000,00	(5.980.000,00)	(100,00)
84	Belanja Modal Heat Generating Equipment	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	0,00	3.200.000.000,00	100,00
85	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	980.000.000,00	455.651.832,52	46,50	150.534.750,00	305.117.082,52	202,69
86	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	230.000.000,00	29.930.000,00	13,01	411.469.164,00	(381.539.164,00)	(92,73)
87	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	0,00	0,00	0,00	95.783.144,00	(95.783.144,00)	(100,00)
88	Belanja Modal Peralatan Permainan	63.561.750,00	33.000.000,00	51,92	14.996.100,00	18.003.900,00	120,06
89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.457.390.950,00	3.426.840.880,00	99,12	3.167.544.299,00	259.296.581,00	8,19
90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00	949.112.850,00	94,91	723.162.020,00	225.950.830,00	31,24
Jumlah		82.551.699.926,00	54.296.918.498,52	65,77	63.225.717.778,00	(8.928.799.279,48)	(14,12)

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.60 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD**

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.100.692.960,00	6.369.060.080,00	63,06	6.692.383.319,00	(323.323.239,00)	(4,83)
2	Dinas Kesehatan	31.133.401.236,00	27.148.074.968,00	87,20	37.986.867.643,00	(10.838.792.675,00)	(28,53)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.240.589.610,00	526.038.600,00	42,40	395.083.882,00	130.954.718,00	33,15
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.172.500.000,00	1.156.275.000,00	98,62	662.570.000,00	493.705.000,00	74,51
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	1.137.920.000,00	472.210.000,00	41,50	252.780.000,00	219.430.000,00	86,81
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	652.100.000,00	614.298.750,00	94,20	101.095.000,00	513.203.750,00	507,65
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	473.660.000,00	309.765.290,00	65,40	536.617.100,00	(226.851.810,00)	(42,27)
8	Dinas Sosial	70.800.000,00	42.400.000,00	59,89	233.803.000,00	(191.403.000,00)	(81,87)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	196.000.000,00	48.900.000,00	24,95	170.300.410,00	(121.400.410,00)	(71,29)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	158.000.000,00	0,00	0,00	176.560.000,00	(176.560.000,00)	(100,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	511.400.000,00	165.602.000,00	32,38	84.015.000,00	81.587.000,00	97,11
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.717.584.000,00	1.021.620.000,00	37,59	112.960.000,00	908.660.000,00	804,41
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	302.000.000,00	-	0,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	(100,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	477.943.000,00	203.284.000,00	42,53	25.800.000,00	177.484.000,00	687,92
15	Dinas Perhubungan	1.731.700.000,00	671.051.832,52	38,75	825.734.678,00	(154.682.845,48)	(18,73)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.752.889.800,00	3.717.159.000,00	64,61	613.590.000,00	3.103.569.000,00	505,81
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.032.700.000,00	1.688.570.000,00	83,07	414.762.626,00	1.273.807.374,00	307,12
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	612.715.000,00	453.853.921,00	74,07	588.736.940,00	(134.883.019,00)	(22,91)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	199.100.000,00	143.384.500,00	72,02	458.092.680,00	(314.708.180,00)	(68,70)
20	Dinas Perikanan	593.000.000,00	578.560.649,00	97,57	465.733.500,00	112.827.149,00	24,23
21	Dinas Pariwisata	410.600.000,00	349.799.994,00	85,19	206.540.000,00	143.259.994,00	69,36
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	336.800.000,00	306.635.000,00	91,04	3.745.206.000,00	(3.438.571.000,00)	(91,81)
23	Sekretariat Daerah	3.415.621.820,00	1.154.569.500,00	33,80	1.906.482.500,00	(751.913.000,00)	(39,44)
24	Sekretariat DPRD	5.267.670.000,00	389.896.539,00	7,40	1.127.615.000,00	(737.718.461,00)	(65,42)
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	989.079.000,00	438.350.000,00	44,32	335.498.000,00	102.852.000,00	30,66
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.407.900.000,00	1.421.561.000,00	59,04	989.686.000,00	431.875.000,00	43,64
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	240.000.000,00	238.450.000,00	99,35	196.220.000,00	42.230.000,00	21,52
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	382.100.000,00	333.000.000,00	87,15	226.530.000,00	106.470.000,00	47,00
29	Inspektorat Daerah	2.085.956.000,00	803.120.000,00	38,50	297.130.000,00	505.990.000,00	170,29
30	Kecamatan Bunguran Timur	916.851.000,00	582.782.875,00	63,56	211.935.000,00	370.847.875,00	174,98
31	Kecamatan Bunguran Barat	406.750.000,00	65.440.000,00	16,09	256.830.000,00	(191.390.000,00)	(74,52)
32	Kecamatan Bunguran Utara	441.000.000,00	273.091.000,00	61,93	173.060.000,00	100.031.000,00	57,80
33	Kecamatan Pulau Laut	169.500.000,00	167.660.000,00	98,91	167.238.000,00	422.000,00	0,25
34	Kecamatan Midai	136.400.000,00	80.900.000,00	59,31	124.420.000,00	(43.520.000,00)	(34,98)
35	Kecamatan Serasan	175.250.000,00	120.247.000,00	68,61	28.300.000,00	91.947.000,00	324,90
36	Kecamatan Subi	198.500.000,00	194.090.000,00	97,78	224.137.500,00	(30.047.500,00)	(13,41)
37	Kecamatan Pulau Tiga	131.560.000,00	69.250.000,00	52,64	39.800.000,00	29.450.000,00	73,99
38	Kecamatan Bunguran Tengah	45.321.500,00	9.900.000,00	21,84	4.960.000,00	4.940.000,00	99,60
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	424.900.000,00	378.452.000,00	89,07	286.917.000,00	91.535.000,00	31,90
40	Kecamatan Bunguran Selatan	163.935.000,00	99.250.000,00	60,54	106.498.000,00	(7.248.000,00)	(6,81)

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
41	Kecamatan Serasan Timur	200.000.000,00	124.500.000,00	62,25	242.302.000,00	(117.802.000,00)	(48,62)
42	Kecamatan Suak Midai	155.500.000,00	101.730.000,00	65,42	103.350.000,00	(1.620.000,00)	(1,57)
43	Kecamatan Bunguran Batubi	106.280.000,00	63.200.000,00	59,47	100.080.000,00	(36.880.000,00)	(36,85)
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	139.930.000,00	24.840.000,00	17,75	644.289.000,00	(619.449.000,00)	(96,14)
45	Kecamatan Pulau Panjang	741.750.000,00	209.565.000,00	28,25	343.308.000,00	(133.743.000,00)	(38,96)
46	Kecamatan Pulau Seluan	357.000.000,00	176.250.000,00	49,37	179.365.000,00	(3.115.000,00)	(1,74)
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	838.850.000,00	790.280.000,00	94,21	112.535.000,00	677.745.000,00	602,25
JUMLAH		82.551.699.926,00	54.296.918.498,52	65,77	63.225.717.778,00	(8.928.799.279,48)	(14,12)

Rendahnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan masih terdapat tagihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam akun utang belanja di neraca pemerintah daerah.

7.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp36.218.407.340,13 atau sebesar 47,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp75.573.779.719,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp(12.876.616.929,53) atau sebesar (26,23)%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.675.087.600,00	6.438.921.080,00	41,08	21.570.473.244,18	(15.131.552.164,18)	(70,15)
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	11.934.350,00	(11.934.350,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.125.456.000,00	4.929.240.192,14	60,66	0,00	4.929.240.192,14	100,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	214.505.820,00	(214.505.820,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	430.000.000,00	32.809.000,00	7,63	59.815.680,00	(27.006.680,00)	(45,15)
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.071.378.831,00	9.285.265.085,00	40,25	13.608.303.466,00	(4.323.038.381,00)	(31,77)
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	215.800.000,00	201.869.926,00	93,54	314.266.696,91	(112.396.770,91)	(35,76)
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	4.868.086.564,00	4.325.683.225,00	88,86	294.174.912,00	4.031.508.313,00	1.370,45
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	8.144.424.000,00	3.426.067.076,00	42,07	6.243.624.922,00	(2.817.557.846,00)	(45,13)
11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.869.859.560,00	1.419.836.339,00	49,47	2.648.992.782,00	(1.229.156.443,00)	(46,40)
12	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.424.040.400,00	1.106.861.120,99	45,66	1.308.739.921,39	(201.878.800,40)	(15,43)
13	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.411.000.000,00	326.125.230,00	23,11	408.786.283,00	(82.661.053,00)	(20,22)
14	Belanja Modal Taman	179.562.764,00	0,00	0,00	198.596.807,18	(198.596.807,18)	(100,00)
15	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	779.000.000,00	638.638.000,00	81,98	298.731.390,00	339.906.610,00	113,78
16	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Kesehatan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00	99.900.000,00	100,00
18	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	626.354.000,00	595.965.149,00	95,15	199.684.400,00	396.280.749,00	198,45
19	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	590.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	151.200.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
22	Belanja Modal Pagar	5.288.530.000,00	3.391.225.917,00	64,12	1.676.403.595,00	1.714.822.322,00	102,29
23	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	(9.990.000,00)	(100,00)
Jumlah		75.573.779.719,00	36.218.407.340,13	47,92	49.095.024.269,66	(12.876.616.929,53)	(26,23)

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.62 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD**

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.419.788.955,00	13.474.029.087,00	42,88	16.953.884.427,00	(3.479.855.340,00)	(20,53)
2	Dinas Kesehatan	8.625.456.000,00	4.929.240.192,14	57,15	268.352.490,00	4.660.887.702,14	1.736,85
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.495.547.600,00	4.321.530.030,00	34,58	7.478.812.638,00	(3.157.282.608,00)	(42,22)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.611.800.000,00	2.226.023.225,00	85,23	1.221.945.761,00	1.004.077.464,00	82,17
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	59.943.196,00	(59.943.196,00)	(100,00)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	13.764.000,00	6,88	0,00	13.764.000,00	100,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	979.000.000,00	638.638.000,00	65,23	0,00	638.638.000,00	100,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	151.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	8.144.424.000,00	3.426.067.076,00	42,07	6.243.624.922,00	(2.817.557.846,00)	(45,13)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.699.000.000,00	1.185.651.242,00	69,79	219.235.194,00	966.416.048,00	440,81
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	590.000.000,00	0,00	0,00	314.266.696,91	(314.266.696,91)	(100,00)
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.508.382.764,00	3.956.418.000,00	87,76	0,00	3.956.418.000,00	100,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	240.000.000,00	0,00	0,00	15.030.366.588,18	(15.030.366.588,18)	(100,00)
15	Dinas Pariwisata	2.424.040.400,00	1.106.861.120,99	45,66	1.077.995.549,39	28.865.571,60	2,68
16	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
17	Sekretariat DPRD	224.000.000,00	0,00	0,00	198.596.807,18	(198.596.807,18)	(100,00)
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	971.140.000,00	940.185.367,00	96,81	0,00	940.185.367,00	100,00
19	Kecamatan Bunguran Timur Laut	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		75.573.779.719,00	36.218.407.340,13	47,92	49.095.024.269,66	(12.876.616.929,53)	(26,23)

Rendahnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan masih terdapat tagihan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam akun utang belanja di neraca pemerintah daerah.

7.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp152.635.719.617,00 dengan realisasi sebesar Rp84.811.150.755,73 atau sebesar 55,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp152.635.719.617,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami penurunan sebesar Rp(62.444.392.650,73) atau sebesar (42,41)%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.63 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	62.361.682.612,00	41.412.166.082,58	66,41	49.459.871.101,08	(8.047.705.018,50)	(16,27)
2	Belanja Modal Jalan Desa	7.660.500.000,00	15.845.250,00	0,21	35.024.833.780,88	(35.008.988.530,88)	(99,95)
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	36.333.130.300,00	19.095.598.294,08	52,56	11.681.601.169,00	7.413.997.125,08	63,47
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	150.000.000,00	11.900.000,00	7,93	2.469.799.522,00	(2.457.899.522,00)	(99,52)
5	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.200.000.000,00	315.732.725,92	26,31	746.524.780,50	(430.792.054,58)	(57,71)
6	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2.141.200.000,00	1.066.527.921,15	49,81	1.464.778.447,00	(398.250.525,85)	(27,19)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
7	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	199.661.600,00	(199.661.600,00)	(100,00)
8	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.220.958.715,00	(1.220.958.715,00)	(100,00)
9	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.933.990,00	(25.933.990,00)	(100,00)
10	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	15.568.000.000,00	9.785.501.050,00	62,86	12.273.348.244,00	(2.487.847.194,00)	(20,27)
11	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	230.000.000,00	229.314.687,00	99,70	0,00	229.314.687,00	100,00
12	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	191.506.408,00	(191.506.408,00)	(100,00)
13	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	372.200.000,00	17.293.800,00	4,65	358.658.338,00	(341.364.538,00)	(95,18)
15	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	4.236.802.290,00	(4.236.802.290,00)	(100,00)
16	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	242.149.440,00	116.394.060,00	48,07	49.940.000,00	66.454.060,00	133,07
17	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	400.000.000,00	299.922.000,00	74,98	0,00	299.922.000,00	100,00
18	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	6.455.557.000,00	4.010.383.194,00	62,12	94.624.830,00	3.915.758.364,00	4.138,19
19	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.073.560.265,00	625.029.045,00	58,22	865.553.691,00	(240.524.646,00)	(27,79)
20	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	817.450.000,00	(817.450.000,00)	(100,00)
21	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	0,00	0,00	1.912.859.324,00	(1.912.859.324,00)	(100,00)
22	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	300.000.000,00	299.900.000,00	99,97	209.337.430,00	90.562.570,00	43,26
23	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	(550.000.000,00)	(100,00)
24	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	589.767.158,00	(589.767.158,00)	(100,00)
25	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	995.000.000,00	983.176.446,00	98,81	3.900.000.000,00	(2.916.823.554,00)	(74,79)
26	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	11.949.630.000,00	4.157.853.642,00	34,79	9.902.528.904,00	(5.744.675.262,00)	(58,01)
27	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	343.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.700.110.000,00	2.368.612.558,00	50,39	6.951.963.583,00	(4.583.351.025,00)	(65,93)
29	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	0,00	0,00	0,00	2.057.240.101,00	(2.057.240.101,00)	(100,00)
Jumlah		152.635.719.617,00	84.811.150.755,73	55,56	147.255.543.406,46	(62.444.392.650,73)	(42,41)

Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.64 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.832.909.705,00	1.003.022.142,00	35,41	2.923.813.270,00	(1.920.791.128,00)	(65,69)
2	Dinas Kesehatan	1.951.130.000,00	1.511.313.305,00	77,46	5.476.324.800,00	(3.965.011.495,00)	(72,40)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.507.782.612,00	56.560.550.793,73	50,27	110.079.178.533,46	(53.518.627.739,73)	(48,62)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	29.972.298.500,00	23.137.648.657,00	77,20	21.363.643.028,00	1.774.005.629,00	8,30
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	377.988.800,00	0,00	0,00	167.804.920,00	(167.804.920,00)	(100,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup	460.000.000,00	299.900.000,00	65,20	209.337.430,00	90.562.570,00	43,26
7	Dinas Perhubungan	4.159.610.000,00	2.298.715.858,00	55,26	6.305.503.154,00	(4.006.787.296,00)	(63,54)
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	199.728.300,00	(199.728.300,00)	(100,00)
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	223.461.600,00	(223.461.600,00)	(100,00)
10	Sekretariat DPRD	224.000.000,00	0,00	0,00	306.748.371,00	(306.748.371,00)	(100,00)
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		152.635.719.617,00	84.811.150.755,73	55,56	147.255.543.406,46	(62.444.392.650,73)	(42,41)

Rendahnya realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi disebabkan masih terdapat tagihan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam akun utang belanja di neraca pemerintah daerah.

7.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp1.760.061.950,00 dengan realisasi sebesar Rp1.117.419.129,00 atau sebesar 63,49%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp(559.576.121,00) atau sebesar (33,37)%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.65 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Buku Umum	41.202.250,00	19.811.600,00	48,08	9.500.000,00	10.311.600,00	108,54
2	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	(32.200.000,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Alat Musik	90.000.000,00	0,00	0,00	349.581.000,00	(349.581.000,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	597.735.000,00	(597.735.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Ikan Budidaya	38.000.000,00	37.760.000,00	99,37	0,00	37.760.000,00	0,00
7	Belanja Modal Software	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	90.000.000,00	(55.000.000,00)	(61,11)
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.045.859.700,00	1.024.847.529,00	97,99	597.979.250,00	426.868.279,00	71,39
Jumlah		1.760.061.950,00	1.117.419.129,00	63,49	1.676.995.250,00	(559.576.121,00)	(33,37)

Adapun realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.66 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.582.061.950,00	1.044.659.129,00	66,03	1.354.964.250,00	(310.305.121,00)	(22,90)
2	Dinas Perikanan	38.000.000,00	37.760.000,00	99,37	0,00	37.760.000,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	80.000.000,00	0,00	0,00	199.831.000,00	(199.831.000,00)	(100,00)
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00	(32.200.000,00)	(100,00)
6	Sekretariat Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	90.000.000,00	(55.000.000,00)	(61,11)
JUMLAH		1.760.061.950,00	1.117.419.129,00	63,49	1.676.995.250,00	(559.576.121,00)	(33,37)

Rendahnya realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disebabkan masih terdapat tagihan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam akun utang belanja di neraca pemerintah daerah.

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Pada tahun 2024 realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp134.478.632,00 atau sebesar 28,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp472.489.830,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi Belanja Modal Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar 100,00%.

Tabel 7.5.67 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	284.389.830,00	73.378.632,00	25,80	0,00	73.378.632,00	100,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	188.100.000,00	61.100.000,00	32,48	0,00	61.100.000,00	100,00
Jumlah		472.489.830,00	134.478.632,00	28,46	0,00	134.478.632,00	100,00

Adapun realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.68 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.100.000,00	41.100.000,00	100,00	0,00	41.100.000,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	109.000.000,00	12.000.000,00	11,01	0,00	12.000.000,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	202.389.830,00	31.378.632,00	15,50	0,00	31.378.632,00	100,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00	100,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	60.000.000,00	30.000.000,00	50,00	0,00	30.000.000,00	100,00
JUMLAH		472.489.830,00	134.478.632,00	28,46	0,00	134.478.632,00	100,00

Rendahnya realisasi Belanja Modal Aset Lainnya disebabkan masih terdapat tagihan Belanja Modal Aset Lainnya yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam akun utang belanja di neraca pemerintah daerah.

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2024 realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp665.131.517,00 atau sebesar 16,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(982.997.824,00) atau sebesar (59,64)% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.648.129.341,00. Penurunan ini terjadi disebabkan tidak banyaknya kondisi darurat yang membebaskan Belanja Tidak Terduga. Adapun rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.69 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak terduga*(dalam rupiah)*

No	Dinas Pelaksana BTT	Peruntukan/ Tujuan Penggunaan BTT	Realisasi	Kategori BTT
1	Dinas Kesehatan	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	14.923.142	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
2	Dinas Kesehatan	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	26.780.492	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
3	Dinas Sosial	Bansos Tidak terencana Bantuan Terdampak Cuaca Ekstrem	46.800.000	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
4	Dinas Kesehatan	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	17.974.842	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
5	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengembalian atas Tunjangan Perumahan yang Telah di Setor ke Kasda an. HC	345.450.000,00	Pengembalian atas tunjangan perumahan
6	Dinas Sosial	Bansos Tidak terencana Bantuan Terdampak Cuaca Ekstrem(perbaikan rumah dan atap rumah)	66.444.000	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
7	Dinas Kesehatan	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	11.717.542	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
8	Dinas Sosial	Bansos Tidak terencana Bantuan Terdampak Cuaca Ekstrem(Perbaikan Pompong dan Bagan)	90.500.000	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
9	Dinas Kesehatan	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	17.701.411	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
10	Dinas Kesehatan	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana (Bantuan Berobat)	26.840.088	Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana
Jumlah			665.131.517,00	

Dari tabel di atas, penggunaan belanja tidak terduga dijabarkan sebagai berikut:

- Pemberian bantuan sosial tidak terencana (bantuan berobat) sebesar Rp115.937.517,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- Pemberian bantuan perbaikan rumah dan atap rumah korban bencana banjir dan angin kencang sebesar Rp88.244.000,00 dan pemberian bantuan sosial tidak terencana bantuan terdampak cuaca ekstrem Rp115.500.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- Pengembalian atas Tunjangan Perumahan yang telah disetor ke Kas Daerah dengan inisial HC sebesar Rp345.450.000,00 yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap (*incrach*) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Sisa pengembalian tunjangan perumahan yang telah disetor ke rekening Kas Umum Daerah yang akan dikembalikan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp1.707.342.000,00 per 31 Desember 2024.

7.5.1.3 Transfer

Transfer	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	119.988.682.400,00	119.624.168.400,00

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar Rp119.988.682.400,00 atau sebesar 97,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.705.130.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.70 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Tranfer Bagi Hasil Pendapatan	5.432.897.000,00	2.716.448.500,00	50,00	4.265.558.000,00	(1.549.109.500,00)	(36,32)
2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	117.272.233.900,00	117.272.233.900,00	100,00	115.358.610.400,00	1.913.623.500,00	1,66
Jumlah		122.705.130.900,00	119.988.682.400,00	97,79	119.624.168.400,00	364.514.000,00	0,30

7.5.1.3.1 Transfer/Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp2.716.448.500,00 atau sebesar 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.432.897.000,00. Transfer bagi hasil pendapatan merupakan bagi hasil atas pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah daerah untuk dibagihasilkan kepada Pemerintah Desa. Rincian Belanja bagi hasil pendapatan sebagai berikut:

Tabel 7.5.71 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.707.760.000,00	2.353.880.000,00	50,00	3.540.423.000,00	(1.186.543.000,00)	(33,51)
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	725.137.000,00	362.568.500,00	50,00	725.135.000,00	(362.566.500,00)	(50,00)
JUMLAH		5.432.897.000,00	2.716.448.500,00	50,00	4.265.558.000,00	(1.549.109.500,00)	(36,32)

Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2024 mengalami penurunan. Ini disebabkan realisasi pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Besar/kecilnya realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah akan berdampak pada Belanja Bagi Hasil yang akan diterima oleh desa. Ini disebabkan terdapat kewajiban sebesar 10% atas pajak dan retribusi daerah untuk Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7.5.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp117.272.233.900,00, atau sebesar 100% dari yang dianggarkan. Belanja Bantuan Keuangan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.72 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	61.508.176.400,00	(61.508.176.400,00)	(100,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	62.904.512.900,00	62.904.512.900,00	100,00	0,00	62.904.512.900,00	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	53.850.434.000,00	(53.850.434.000,00)	(100,00)
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	54.367.721.000,00	54.367.721.000,00	100,00	0,00	54.367.721.000,00	100,00
Jumlah		117.272.233.900,00	117.272.233.900,00	100,00	115.358.610.400,00	1.913.623.500,00	1,66

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp117.272.233.900,00 terdiri dari:

- Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan 10% dari Bantuan Dana Perimbangan selain DAK sebesar Rp62.904.512.900,00. Transfer ADD dibagikan untuk 70 (tujuh puluh) desa yang ada di Kabupaten Natuna.
- Transfer Dana Desa sebesar Rp54.367.721.000,00 merupakan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat langsung ke rekening kas desa. Penetapan alokasi per desa ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah Daerah mencatat belanja bantuan keuangan sebesar pendapatan dana desa yang bersumber dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan.

7.5.1.4 Surplus/Defisit LRA

Surplus/Defisit LRA	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	(159.865.775.002,72)	159.010.716.668,50

Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2024 sebesar Rp(159.865.775.002,72) dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.73 Surplus/Defisit LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan	1.309.442.057.434,61	972.909.236.075,86	74,30	1.333.507.226.175,09	(360.597.990.099,23)	(27,04)
2.	Belanja	1.350.709.585.000,00	1.012.786.328.678,58	74,98	1.054.872.341.106,59	(42.086.012.428,01)	(3,99)
3.	Belanja Transfer	122.705.130.900,00	119.988.682.400,00	97,79	119.624.168.400,00	364.514.000,00	0,30
Surplus (Defisit)		(163.972.658.465,39)	(159.865.775.002,72)	97,50	159.010.716.668,50	(318.876.491.671,22)	(200,54)

7.5.1.5 Pembiayaan

7.5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp163.972.666.701,39 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp163.972.658.465,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.74 Penggunaan SiLPA

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Penggunaan SiLPA	163.972.658.465,39	163.972.666.701,39	100,00	4.961.941.796,89	159.010.724.904,50	3,205

Realisasi Penggunaan SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp163.972.666.701,39 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp163.972.658.465,39. Perbedaan anggaran dan realisasi Penggunaan SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.236,00. Nilai tersebut merupakan selisih antara koreksi pencatatan penambahan saldo awal dana BOS SD Negeri 002 Batubi Jaya Rp52.188,00 dengan koreksi pengurangan saldo awal dana BOS SD Negeri 003 Kadur Rp40.000,00, saldo awal dana BOS SD Negeri 002 Gunung Jambatan Rp980,00, dan saldo awal dana BOS SMP Negeri 1 Bunguran Batubi Rp2.972,00.

7.5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

SiLPA	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	4.106.891.698,67	163.972.658.465,39

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.106.891.698,67 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.75 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.309.442.057.434,61	972.909.236.075,86	74,30	1.333.507.226.175,09	(360.597.990.099,23)	(27,04)
2	Belanja	1.350.709.585.000,00	1.012.786.328.678,58	74,98	1.054.872.341.106,59	(42.086.012.428,01)	(3,99)
3	Transfer	122.705.130.900,00	119.988.682.400,00	97,79	119.624.168.400,00	364.514.000,00	0,3
4	Surplus (Defisit)	(163.972.658.465,39)	(159.865.775.002,72)	97,54	159.010.716.668,50	(318.876.491.671,22)	(200,54)
5	Pembiayaan Netto	163.972.658.465,39	163.972.666.701,39	100,00	4.961.941.796,89	159.010.724.904,50	3.204,61
SiLPA		0,00	4.106.891.698,67	100	163.972.658.465,39	(159.865.766.766,72)	(97,50)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.106.891.698,67, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.76 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Kas
1	Kas di Kas Daerah	305.302.268,40
2	Kas di Bendahara Penerimaan	8.640.688,00
3	Kas di BLUD	72.514.764,79
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	265.175.582,81
5	Kas Lainnya	75.838.251,67
6	Kas Dana BOSP-SD dan SMP	246.730.471,00
7	Kas Dana BOSP-PAUD	8.682.032,00
8	Kas Dana BOSP-Kesetaraan	300.000,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	3.123.707.640,00
Jumlah		4.106.891.698,67

Perbedaan antara Saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.106.891.698,67 dengan saldo kas dan setara kas di Neraca sebesar Rp4.110.100.555,67 yaitu sebesar Rp3.208.857,00 yang merupakan kas lainnya berada pada bendahara pengeluaran atas utang PFK Tahun 2024 yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal 31 Desember 2024.

7.5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2024 adalah sebagai berikut:

7.5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		163.972.658.465,39	4.967.625.796,89

Nilai SAL awal sebesar Rp163.972.658.465,39 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2023. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2024.

7.5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		163.972.666.701,39	4.961.941.796,89

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024 adalah seluruh SAL akhir tahun 2023 ditambah koreksi atas saldo awal pada tahun 2024. Jumlah Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp163.972.666.701,39 yang merupakan realisasi dari SiLPA tahun 2023. Kemudian koreksi pencatatan SAL sebesar Rp8.236,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara koreksi pencatatan penambahan saldo awal dana BOS SD Negeri 002 Batubi Jaya Rp52.188,00 dengan koreksi pengurangan saldo awal dana BOS SD Negeri 003 Kadur Rp40.000,00, saldo awal dana BOS SD Negeri 002 Gunung Jambat Rp980,00, dan saldo awal dana BOS SMP Negeri 1 Bunguran Batubi Rp2.972,00.

7.5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		4.106.891.698,67	163.972.658.465,39

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam laporan realisasi anggaran. Nilai SiLPA pada akhir tahun 2023 yang telah dilakukan koreksi pencatatan adalah sebesar Rp163.972.658.465,39.

Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	8.236,00	(5.684.000,00)

Pada tahun 2024 terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atau koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar Rp8.236,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara koreksi pencatatan penambahan saldo awal dana BOS SD Negeri 002 Batubi Jaya Rp52.188,00 dengan koreksi pengurangan saldo awal dana BOS SD Negeri 003 Kadur

Rp40.000,00, saldo awal dana BOS SD Negeri 002 Gunung Jambat Rp980,00, dan saldo awal dana BOS SMP Negeri 1 Bunguran Batubi Rp2.972,00.

7.5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		4.106.891.698,67	163.972.658.465,39

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan nilai akumulatif SAL akhir pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4.106.891.698,67.

7.5.3 NERACA

7.5.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	78.807.065.983,31	214.859.324.034,80

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp78.807.065.983,31 terdiri dari kas, piutang, penyisihan piutang, persediaan dan beban dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas dan Setara Kas	4.110.100.555,67	164.087.995.928,39
Piutang	101.880.783.239,95	79.891.887.873,71
Penyisihan Piutang	(53.173.918.293,61)	(49.532.956.905,69)
Beban Dibayar Dimuka	765.591.570,63	756.512.500,01
Persediaan	25.224.508.910,67	19.655.884.638,38
Jumlah	78.807.065.983,31	214.859.324.034,80

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	4.110.100.555,67	164.087.995.928,39

Nilai saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.110.100.555,67 merupakan saldo di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Kas Daerah	305.302.268,40	160.269.238.865,20
Kas di Bendahara Penerimaan	8.640.688,00	54.224.500,00
Kas di BLUD	72.514.764,79	2.163.231.053,38
Kas Dana BOS	0,00	134.737.273,00
Kas Dana BOSP	255.712.503,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	265.175.582,81	253.805.728,81
Kas Dana BOK Puskesmas	3.123.707.640,00	0,00
Kas Lainnya	79.047.108,67	1.212.758.508,00
Jumlah	4.110.100.555,67	164.087.995.928,39

Kas dan Bank per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.110.100.555,67 terdiri dari:

7.5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	305.302.268,40	160.269.238.865,20

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar secara pembukuan adalah Rp305.302.268,40, sedangkan kas di rekening bank terdiri dari:

Tabel 7.5.77 Rincian Saldo Rekening Koran Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024
	Bank Riau Kepri Syariah KCP Ranai Natuna	
1	Rekening Kas Umum Daerah (No. Rek. 117-02-00010)	291.529.317,40
2	Rekening Penerimaan Daerah (No. Rek. 117-02-22222)	29.466.357,00
3	Rekening Pengeluaran Daerah (No. Rek. 11-70-23333-3)	0,00
	Jumlah Kas di Kas Daerah	320.995.674,40

Terdapat selisih sebesar Rp15.693.406,00, antar saldo pembukuan kasda dan saldo yang terdapat pada rekening koran yang merupakan kejadian *subsequent event*. *Subsequent event* adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca (tanggal akhir periode pelaporan) yang dapat mempengaruhi saldo tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan (audited) diterbitkan. Kejadian *subsequent event* yang terjadi untuk akun kas di kas daerah merupakan transaksi pembayaran belanja secara buku telah dicatat sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh Bank atas nomor SP2D 15939/SP2D/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 untuk pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap Kecamatan Bunguran Tengah Bulan Desember 2024.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan kebijakan pemanfaatan kas dengan melakukan penempatan deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bulan berikutnya. Penempatan dalam bentuk deposito tersebut dilakukan pada bulan Februari s.d. Nopember 2024 sejumlah Rp140.000.000.000,00 pada Bank Riau Kepri Syariah dan sejumlah Rp10.000.000.000,00 pada Bank Mandiri KCP Natuna. Deposito tersebut telah dicairkan sesuai kebutuhan kas Pemerintah Daerah dari bulan Mei sampai dengan Nopember 2024 dan seluruh dananya sudah dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Sehingga Deposito Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	8.640.688,00	54.224.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.640.688,00. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan saldo pajak dan denda pajak daerah yang belum disetor ke Rekening Umum Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 oleh bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Saldo tersebut terdiri dari Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp6.321.000,00, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp136.500,00, PBBP2 sebesar Rp2.123.128,00 dan Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp60.060,00.

7.5.3.1.3 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di BLUD	72.514.764,79	2.163.231.053,38

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2024 secara pembukuan adalah sebesar Rp72.514.764,79 yang merupakan saldo kas yang berada pada BLUD RSUD Kabupaten Natuna. Sedangkan saldo kas yang dicatat pada rekening koran BLUD Rp143.116.601,43 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.78 Rincian Kas di Rekening Koran BLUD RSUD Kabupaten Natuna

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Kas di Rekening Bank Riau (No.Rek. 11-70-20213-9)	14.899.470,58
Kas di Rekening Bank Mandiri (No.Rek. 1090077332211)	128.217.130,85
Jumlah Kas di BLUD RSUD Natuna	143.116.601,43

Terdapat perbedaan sejumlah Rp70.601.836,64 antara saldo pembukuan dengan saldo di rekening bank yang merupakan kejadian *subsequent event* yaitu peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca (tanggal akhir periode pelaporan) yang dapat mempengaruhi saldo tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan (*audited*) diterbitkan. Perbedaan sejumlah Rp70.601.836,64 dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi pengeluaran yang telah dicatat secara buku tetapi belum dikeluarkan oleh bank sejumlah Rp66.776.836,64 yang terdiri dari Pembayaran Belanja Obat sebesar Rp61.332.012,64, Pembayaran Jasa Pelayanan Medis sebesar Rp1.106.348,00, Pajak Daerah sebesar Rp60.811,00, PPh 23 sebesar Rp308.115,00, PPh 21 sebesar Rp1.153.550,00, PPN sebesar Rp2.568.500,00, dan PPh 22 sebesar Rp247.500,00. Masalah tersebut terjadi dikarenakan banyak transaksi yang gagal diteruskan ke penerima oleh aplikasi Kopra Bank Mandiri.
2. Penerimaan ganda yang telah ditransfer oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersumber dari *Global Fund* sebesar Rp3.825.000,00 tanggal 13 Desember 2024. Atas penerimaan tersebut telah dikembalikan ke pihak yang menyetorkan pada tanggal 12 Februari 2025.

7.5.3.1.4 Kas Dana BOS

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana BOS	0,00	134.737.273,00

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Sedangkan Saldo Kas Dana BOS Tahun 2023 Rp134.737.273,00. Saldo Kas Dana BOS Tahun 2024 telah disajikan kedalam Dana BOSP. Penyajian ini disajikan sesuai nomenklatur kode rekening terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7.5.3.1.5 Kas Dana BOSP

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana BOSP	255.712.503,00	0,00

Saldo Kas Dana BOSP Per 31 Desember 2024 sebesar Rp255.712.503,00. Saldo Dana BOSP tahun 2024 terdiri dari saldo Dana BOS SD dan SMP, saldo BOP PAUD, dan saldo BOP Kesetaraan. Pada tahun 2023 Saldo Dana BOS disajikan pada kas dana BOS, sedangkan saldo BOP PAUD, dan saldo BOP Kesetaraan disajikan pada kas lainnya. Pada tahun 2024, semua saldo kas bantuan operasional pendidikan disajikan pada Kas Dana BOSP. Perhitungan Saldo Dana BOSP sebagai berikut:

Tabel 7.5.79 Perhitungan Posisi Kas Dana BOSP Pada Dinas Pendidikan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi	Koreksi Saldo Awal		Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo 31 Desember 2024
				Penambahan	Pengurangan			
1	Dana BOS SD & SMP	0,00	134.737.273,00	52.188,00	43.952,00	15.873.441.810,00	15.761.456.848,00	246.730.471,00
2	Dana BOP PAUD	0,00	3.555.714,00	0,00	0,00	2.264.801.090,00	2.259.674.772,00	8.682.032,00
3	Dana BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	310.110.000,00	309.810.000,00	300.000,00
JUMLAH		0,00	138.292.987,00	52.188,00	43.952,00	18.448.352.900,00	18.330.941.620,00	255.712.503,00

Koreksi penambahan Saldo Awal Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp52.188,00 merupakan koreksi Saldo Awal SD Negeri 002 Batubi Jaya. Sedangkan koreksi pengurangan sebesar Rp43.952,00 terdiri dari pengurangan saldo awal dana BOS SD Negeri 003 Kadur sebesar Rp40.000,00, saldo awal dana BOS SD Negeri 002 Gunung Jambat sebesar Rp980,00, dan saldo awal dana BOS SMP Negeri 1 Bunguran Batubi sebesar Rp2.972,00. Mutasi dari kas lainnya sebesar Rp3.555.714,00 merupakan mutasi kas dana BOP PAUD yang tahun 2023 dicatat pada kas lainnya.

Dana BOS yang disajikan dalam Kas Dana BOS adalah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berstatus sekolah negeri.

Tabel 7.5.80 Perhitungan Posisi Kas Dana BOS SD dan SMP

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal		Saldo Akhir Setelah koreksi	Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo akhir		
			Penambahan	Pengurangan				Saldo Akhir	Saldo Bank	Saldo Tunai
1	Dana BOS SD	29.032.235,00	52.188,00	40.980,00	29.043.443,00	10.432.411.800,00	10.362.195.489,00	99.259.754,00	270.386,00	98.989.368,00
2	Dana BOS SMP	105.705.038,00	0,00	2.972,00	105.702.066,00	4.492.897.934,00	4.451.129.283,00	147.470.717,00	92.674.835,00	54.795.882,00
Jumlah		134.737.273,00	52.188,00	43.982,00	134.745.509,00	14.925.309.734,00	14.813.324.772,00	246.730.471,00	92.945.221,00	153.785.250,00

Rincian Saldo Dana BOS tingkat SD dan SMP sebagai berikut:

Tabel 7.5.81 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SD

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo di Bank	Saldo Tunai	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2024
1	11002363	SD NEGERI 001 SABANG BARAT	Midai	0,00	0,00	0,00
2	11001175	SD NEGERI 002 AIR PUTIH	Midai	0,00	243,00	243,00
3	11001185	SD NEGERI 003 SABANG BARAT	Midai	0,00	0,00	0,00
4	11001196	SD NEGERI 004 GUNUNG SEBELAT	Midai	0,00	0,00	0,00
5	11001161	SD NEGERI 001 SEDANAU	Bunguran Barat	0,00	700.000,00	700.000,00
6	11001173	SD NEGERI 002 SEDANAU	Bunguran Barat	0,00	119.900,00	119.900,00
7	11001314	SD NEGERI 003 SEDANAU	Bunguran Barat	0,00	1.903.700,00	1.903.700,00
8	11001332	SD NEGERI 004 PIAN TENGAH	Bunguran Barat	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00
9	11001341	SD NEGERI 005 SEDANAU	Bunguran Barat	0,00	21.800,00	21.800,00
10	11001347	SD NEGERI 006 SEDANAU	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
11	11001353	SD NEGERI 007 SELAUT	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
12	11001359	SD NEGERI 008 BINJAI	Bunguran Barat	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
13	11001375	SD NEGERI 009 MEKAR JAYA	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
14	11001380	SD NEGERI 010 SEDANAU	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
15	11001160	SD NEGERI 001 RANAI	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
16	11001172	SD NEGERI 002 RANAI	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo di Bank	Saldo Tunai	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2024
17	11001190	SD NEGERI 003 SUNGAI ULU	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
18	11001308	SD NEGERI 004 RANAI	Bunguran Timur	0,00	3.384.250,00	3.384.250,00
19	11001326	SD NEGERI 005 SEPEMPANG	Bunguran Timur	750,00	441.250,00	442.000,00
20	11001350	SD NEGERI 006 BANDARSYAH	Bunguran Timur	0,00	53.137.690,00	53.137.690,00
21	11001357	SD NEGERI 007 RANAI DARAT	Bunguran Timur	0,00	19.318.670,00	19.318.670,00
22	11001368	SD NEGERI 008 BATU GAJAH	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
23	11001378	SD NEGERI 009 BANDARSYAH	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
24	11001383	SD NEGERI 010 BATU GAJAH	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
25	11002764	SD NEGERI 011 RANAI	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
26	69964075	SD NEGERI 012 RANAI	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
27	70041098	SD NEGERI 013 RANAI	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
28	11002364	SD NEGERI 001 SERASAN	Serasan	0,00	0,00	0,00
29	11001165	SD NEGERI 002 SERASAN	Serasan	0,00	0,00	0,00
30	11001191	SD NEGERI 003 TANJUNG BALAU	Serasan	0,00	800.000,00	800.000,00
31	11001197	SD NEGERI 004 JERMALIK	Serasan	0,00	0,00	0,00
32	11001311	SD NEGERI 005 PANGKALAN	Serasan	0,00	0,00	0,00
33	11001316	SD NEGERI 006 BATU BERIAN	Serasan	0,00	2.742.000,00	2.742.000,00
34	11001328	SD NEGERI 007 HILIR	Serasan	0,00	0,00	0,00
35	11001162	SD NEGERI 001 SUBI	Subi	0,00	0,00	0,00
36	11002509	SD NEGERI 002 MELIAH	Subi	0,00	0,00	0,00
37	11001181	SD NEGERI 003 SUBI BESAR	Subi	0,00	0,00	0,00
38	11001186	SD NEGERI 001 PULAU PANJANG	Pulau Panjang	0,00	0,00	0,00
39	11001198	SD NEGERI 002 KERDAU	Pulau Panjang	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00
40	11002358	SD NEGERI 001 KELARIK AIR MALI	Bunguran Utara	0,00	30.000,00	30.000,00
41	11001168	SD NEGERI 002 KELARIK	Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00
42	11001178	SD NEGERI 003 KELARIK UTARA	Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00
43	11001302	SD NEGERI 004 TELUK BUTON	Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00
44	11001189	SD NEGERI 001 KELARIK BARAT / SELUAN	Pulau Seluan	0,00	0,00	0,00
45	11002448	SD NEGERI 001 AIR PAYANG	Pulau Laut	0,00	0,00	0,00
46	11001174	SD NEGERI 002 TANJUNG PALA	Pulau Laut	0,00	0,00	0,00
47	11001177	SD NEGERI 003 KADUR	Pulau Laut	0,00	0,00	0,00
48	11001192	SD NEGERI 001 TANJUNG BATANG	Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00
49	11001300	SD NEGERI 002 SEDEDAP	Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00
50	11001304	SD NEGERI 003 SABANG MAWANG	Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00
51	11001327	SD NEGERI 004 SERANTAS	Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00
52	11001182	SD NEGERI 001 TANJUNG	Bunguran Timur Laut	0,00	2.649.001,00	2.649.001,00
53	11001312	SD NEGERI 002 KELANGA	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
54	11001319	SD NEGERI 003 PENGADAH	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
55	11001335	SD NEGERI 004 CERUK	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
56	11001372	SD NEGERI 005 LIMAU MANIS	Bunguran Timur Laut	0,00	336.000,00	336.000,00
57	11001381	SD NEGERI 006 SELEMAM	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
58	11001382	SD NEGERI 007 SEBADAI HULU	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
59	11001360	SD NEGERI 001 HARAPAN JAYA	Bunguran Tengah	0,00	0,00	0,00
60	11001365	SD NEGERI 002 TAPAU	Bunguran Tengah	216,00	184,00	400,00
61	11001370	SD NEGERI 003 AIR LENGIT	Bunguran Tengah	0,00	100,00	100,00
62	11001195	SD NEGERI 001 CEMAGA	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
63	11001330	SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
64	11001345	SD NEGERI 003 CEMAGA UTARA	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
65	11001346	SD NEGERI 004 CEMAGA SELATAN	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
66	11001376	SD NEGERI 005 CEMAGA SELATAN	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
67	11001384	SD NEGERI 006 CEMAGA SELATAN	Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00
68	11001176	SD NEGERI 001 ARUNG AYAM	Serasan Timur	0,00	0,00	0,00
69	11001303	SD NEGERI 002 AIR NUSA	Serasan Timur	0,00	0,00	0,00
70	11001325	SD NEGERI 003 PAYAK	Serasan Timur	0,00	0,00	0,00

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo di Bank	Saldo Tunai	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2024
71	69893603	SD NEGERI 004 AIR RINGAU	Serasan Timur	0,00	0,00	0,00
72	11001338	SD NEGERI 001 SEDANAU TIMUR	Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00
73	11001366	SD NEGERI 002 BATUBI JAYA	Bunguran Batubi	0,00	600.000,00	600.000,00
74	11001369	SD NEGERI 003 GUNUNG PUTRI	Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00
75	11001371	SD NEGERI 004 SEDARAT BARU	Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00
76	11001374	SD NEGERI 005 BATUBI JAYA	Bunguran Batubi	0,00	4.000,00	4.000,00
77	11001183	SD NEGERI 001 PULAU TIGA	Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00
78	11001321	SD NEGERI 002 SELADING	Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00
79	11001358	SD NEGERI 003 SETUMUK	Pulau Tiga Barat	0,00	480.000,00	480.000,00
80	11001167	SD NEGERI 001 BATU BELANAK	Suak Midai	0,00	0,00	0,00
81	11001305	SD NEGERI 002 GUNUNG JAMBAT	Suak Midai	0,00	0,00	0,00
Jumlah				966,00	99.258.788,00	99.259.754,00

Rincian Saldo Dana BOS tingkat SMP Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.82 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SMP

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo di Bank	Saldo Tunai	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2024
1	11000324	SMP NEGERI 1 MIDAI	Midai	0,00	0,00	0,00
2	11000318	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	1.136.212,00	650.300,00	1.786.512,00
3	11002503	SMP NEGERI 2 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
4	69980325	SMP NEGERI 3 BUNGURAN BARAT	Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00
5	11000317	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	91.538.623,00	37.476.327,00	129.014.950,00
6	11002054	SMP NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
7	11002498	SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR	Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00
8	11000325	SMP NEGERI 1 SERASAN	Serasan	0,00	0,00	0,00
9	69978814	SMP NEGERI 2 SERASAN	Serasan	0,00	0,00	0,00
10	69978813	SMP NEGERI 3 SERASAN	Serasan	0,00	0,00	0,00
11	11002057	SMP NEGERI 1 PULAU PANJANG	Pulau Panjang	0,00	0,00	0,00
12	11001399	SMP NEGERI 1 SUBI	Subi	0,00	15.102.755,00	15.102.755,00
13	11001396	SMP NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00
14	69978868	SMP NEGERI 2 BUNGURAN UTARA	Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00
15	11002508	SMP NEGERI 1 PULAU SELUAN	Pulau Seluan	0,00	0,00	0,00
16	11001398	SMP NEGERI 1 PULAU LAUT	Pulau Laut	0,00	0,00	0,00
17	11001405	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA	Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00
18	11001403	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
19	11002055	SMP NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR LAUT	Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00
20	11000329	SMP NEGERI 1 BUNGURAN TENGAH	Bunguran Tengah	0,00	201.000,00	201.000,00
21	11001404	SMP NEGERI 1 BUNGURAN SELATAN	Bunguran Selatan	0,00	565.500,00	565.500,00
22	69978815	SMP NEGERI 2 BUNGURAN SELATAN	Bunguran Selatan	0,00	300.000,00	300.000,00
23	11002053	SMP NEGERI 1 SERASAN TIMUR	Serasan Timur	0,00	0,00	0,00
24	11000328	SMP NEGERI 1 BUNGURAN BATUBI	Bunguran Batubi	0,00	500.000,00	500.000,00
25	11001402	SMP NEGERI 1 PULAU TIGA BARAT	Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00
Jumlah				92.674.835,00	54.795.882,00	147.470.717,00

Selama tahun anggaran 2024 dana BOP PAUD langsung ditransfer oleh Pemerintah pusat ke rekening sekolah. Belanja BOP PAUD diterima oleh sekolah Negeri dan sekolah swasta. Untuk sekolah negeri sisa kas yang dicatat sebagai bagian dari Kas Dana BOSP, sedangkan untuk sekolah swasta belanja dicatat sebagai Belanja Hibah sebesar pendapatan yang diterima oleh setiap sekolah. Rincian Saldo dana BOP PAUD per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.83 Rincian Kas BOP PAUD per Sekolah

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Jumlah
1	TK NEGERI 001 BUNGURAN BARAT	69870157	Kec. Bunguran Barat	0,00
2	TK NEGERI 002 BUNGURAN BARAT	11002724	Kec. Bunguran Barat	0,00
3	TK NEGERI BUNGURAN BATUBI	11002726	Kec. Bunguran Batubi	1.376.000,00
4	TK NEGERI BUNGURAN SELATAN	69870178	Kec. Bunguran Selatan	0,00
5	TK NEGERI BUNGURAN TENGAH	11002758	Kec. Bunguran Tengah	1.273.800,00
6	SKB NATUNA	P9970341	Kec. Bunguran Timur	0,00
7	TK NEGERI 001 PEMBINA BUNGURAN TIMUR	11002738	Kec. Bunguran Timur	2.717.118,00
8	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR	69934196	Kec. Bunguran Timur	1.919.164,00
9	TK NEGERI 003 BUNGURAN TIMUR	11003237	Kec. Bunguran Timur	110.000,00
10	TK NEGERI 004 BUNGURAN TIMUR	11003229	Kec. Bunguran Timur	0,00
11	TK NEGERI 004 BUNGURAN TIMUR LAUT (BHAKTI LESTARI)	69870174	Kec. Bunguran Timur Laut	660.000,00
12	TK NEGERI 001 BUNGURAN TIMUR LAUT	11002757	Kec. Bunguran Timur Laut	0,00
13	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR LAUT	69870173	Kec. Bunguran Timur Laut	625.950,00
14	TK AL-BANNA (TKN 003 BUNGURAN TIMUR LAUT)	69870172	Kec. Bunguran Timur Laut	0,00
15	TK NEGERI 002 BUNGURAN UTARA (HARAPAN BANGSA)	11002746	Kec. Bunguran Utara	0,00
16	TK NEGERI BUNGURAN UTARA	11003233	Kec. Bunguran Utara	0,00
17	TK NEGERI MIDAI	11002451	Kec. Midai	0,00
18	TK NEGERI PULAU LAUT	11002750	Kec. Pulau Laut	0,00
19	TK NEGERI PULAU TIGA BARAT	11002752	Kec. Pulau Tiga Barat	0,00
20	TK NEGERI SERASAN	11002731	Kec. Serasan	0,00
21	TK NEGERI SERASAN TIMUR	11002760	Kec. Serasan Timur	0,00
22	TK NEGERI 002 SUBI (HARAPAN BUNDA)	11002749	Kec. Subi	0,00
23	TK NEGERI SUBI	11002747	Kec. Subi	0,00
Jumlah				8.682.032,00

Selama tahun 2024 BOP PAUD yang diterima oleh 87 sekolah swasta sejumlah Rp1.370.436.690,00.

Saldo BOP Kesetaraan per 31 Desember 2024 sejumlah Rp300.000,00. Perhitungan saldo BOP Kesetaraan sebagai berikut:

Tabel 7.5.84 Perhitungan Saldo Kas BOP Kesetaraan

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Per 31 Desember 2024
1	SKB NATUNA	P9970341	Bunguran Timur	0,00	310.110.000,00	309.810.000,00	300.000,00

7.5.3.1.6 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	265.175.582,81	253.805.728,81

Saldo Kas Dana Kapitasi Pada FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp265.175.582,81. Saldo pada Bendahara Dana Kapitasi FKTP Puskesmas dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.85 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1	Puskesmas Ranai	2.346,00
2	Puskesmas Tanjung	67.155.650,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	3.280.487,00

No.	SKPD	Jumlah
4	Puskesmas Bunguran Selatan	13.895.763,00
5	Puskesmas Kelarik	20.979.673,00
6	Puskesmas Sedanau	38.502.394,57
7	Puskesmas Pulau Tiga	49.020.316,00
8	Puskesmas Pulau Laut	693.188,00
9	Puskesmas Midai	44.153.609,00
10	Puskesmas Serasan	10.725,03
11	Puskesmas Serasan Timur	6.756.973,00
12	Puskesmas Subi	3.848.529,00
13	Puskesmas Batubi Jaya	16.765.092,21
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	36.571,00
15	Puskesmas Suak Midai	74.266,00
Jumlah		265.175.582,81

7.5.3.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	3.123.707.640,00	0,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas merupakan saldo kas dari pengelolaan DAK Non Fisik BOK Puskesmas Tahun 2024 yang ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Puskesmas. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.123.707.640,00. Pada Tahun 2023, Saldo Dana BOK Puskesmas disajikan pada kas lainnya sejumlah Rp1.093.865.331,00. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.86 Saldo Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Puskesmas Ranai	380.260.112,00
2	Puskesmas Tanjung	98.798.093,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	160.983.052,00
4	Puskesmas Bunguran Selatan	151.291.285,00
5	Puskesmas Kelarik	322.112.079,00
6	Puskesmas Sedanau	211.872.289,00
7	Puskesmas Pulau Tiga	182.633.433,00
8	Puskesmas Pulau Laut	165.617.524,00
9	Puskesmas Midai	293.110.874,00
10	Puskesmas Serasan	319.301.265,00
11	Puskesmas Serasan Timur	217.638.510,00
12	Puskesmas Subi	162.535.702,00
13	Puskesmas Batubi Jaya	237.724.659,00
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	219.828.763,00
Jumlah		3.123.707.640,00

7.5.3.1.8 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	79.047.108,67	1.212.758.508,00

Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.047.108,67. Saldo Kas Lainnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.87 Daftar Saldo Kas Lainnya*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Kas Piutang Dana Bergulir	75.792.465,00
2	Saldo Jasa Giro Rekening Bendahara Penerimaan yang belum dipindahkan ke rekening Kasda	45.786,67
3	Saldo kas transitoris di Bendahara Pengeluaran atas Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara	3.208.857,00
Jumlah		79.047.108,67

Saldo Kas Piutang Dana Bergulir Rp75.792.465,00 merupakan Saldo Pengembalian dari Piutang Dana Bergulir yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Rincian Saldo Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2024 Sebagai berikut:

Tabel 7.5.88 Daftar Saldo Kas Lainnya Dana Bergulir*(dalam rupiah)*

No.	Jenis Dana Bergulir	Nama Rekening	Nomor Rekening	Jumlah
1	UKM	Peng. Pokok Dana Bergulir Kab. Natuna 2007	11-70-20087-1	75.792.465,00
2	Perikanan	Dana Kredit Pengelolaan yg belum disalurkan	2-135-301-000 00117	0.00
Jumlah				75.792.465,00

Saldo Jasa Giro Rekening Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp45.786,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.89 Daftar Saldo Kas Lainnya Jasa Giro yang Belum Dipindahkan ke Rekening Kasda*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Bank	Nomor Rekening	Jumlah Jasa Giro
1	Jasa Giro Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bank Riau Kepri Syariah Cab. Ranai	1170200001	131,00
2	Jasa Giro Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Bank Riau Kepri Syariah Cab. Ranai	1170202256	45.230,00
3	Jasa Giro Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Bank Mandiri KCP Natuna	1090022121099	425,67
Jumlah				45.786,67

Tabel 7.5.90 Daftar Saldo Kas Lainnya Atas Utang PFK yang Belum Disetor ke Kas Negara*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Jumlah
1	Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna	459.724,00
2	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna	456.800,00
3	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pulau Laut Kab. Natuna	50.450,00
4	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Serasan Timur Kab. Natuna	486.297,00
5	Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Natuna	1.755.586,00
Jumlah		3.208.857,00

Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang daerah merupakan salah satu komponen penting dalam neraca yang akan menambah aset lancar yang merupakan hak pemerintah daerah untuk menagih dan mencatatnya.

Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	101.880.783.239,95	79.891.887.873,71

Piutang tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Tabel 7.5.91 Saldo Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2023
1	Piutang Pajak Daerah	33.514.494.193,17	22.755.123.774,81
2	Piutang Retribusi Daerah	8.541.811.987,19	0,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	36.620.423.646,90	38.915.470.599,90
4	Piutang Transfer Antar Daerah	17.546.888.639,00	18.221.293.499,00
5	Piutang Lainnya	5.657.164.773,69	0,00
Jumlah		101.880.783.239,95	79.891.887.873,71

7.5.3.1.9 Piutang Pajak

Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	33.514.494.193,17	22.755.123.774,81

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.514.494.193,17 merupakan nilai piutang pajak yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Saldo Piutang Pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.92 Daftar Mutasi Saldo Piutang Pajak Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Penambahan 2024		Pengurangan 2024		Saldo per 31 Desember 2024
			Ketetapan baru (Piutang 2024)	Koreksi Pencatatan	Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Pajak Restoran	44.142.363,64	0,00	0,00	44.142.363,64	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Reklame	46.222.000,00	137.077.750,00	0,00	137.651.750,00	0,00	45.648.000,00
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	9.098.125.000,00	0,00	0,00	9.098.125.000,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	22.539.971.269,00	3.862.815.115,00	37.231,00	1.302.208.052,00	851.919.807,00	24.248.695.756,00
5	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	124.788.142,17	392.453.646,00	0,00	395.216.351,00	0,00	122.025.437,17
Jumlah		22.755.123.774,81	4.392.346.511,00	9.098.162.231,00	1.879.218.516,64	851.919.807,00	33.514.494.193,17

- 1) Piutang Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.
- 2) Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.648.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.93 Rincian Piutang Pajak Reklame

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo per 31 Des 2023	Ketetapan baru (Piutang 2024)	Pembayaran 2024	Saldo per 31 Des 2024
2015	17.832.000,00	0,00	0,00	17.832.000,00
2016	7.172.000,00	0,00	0,00	7.172.000,00
2017	2.908.000,00	0,00	0,00	2.908.000,00
2018	3.738.000,00	0,00	0,00	3.738.000,00
2019	7.364.000,00	0,00	0,00	7.364.000,00
2020	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00
2021	2.736.000,00	0,00	0,00	2.736.000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00
2024	0,00	137.077.750,00	136.244.750,00	833.000,00
Jumlah	46.222.000,00	137.077.750,00	137.651.750,00	45.648.000,00

- 3) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.098.125.000,00, merupakan piutang yang berasal dari kekurangan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2024.
- 4) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.248.695.756,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.94 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan**

(dalam rupiah)

Tahun pajak	Saldo per 31 Des 2023	Penambahan Ketetapan TA 2024			Pengurangan				Saldo per 31 Des 2024
		Ketetapan Tahun 2024	Koreksi Pencatatan	Pembetulan	Pembayaran 2024	Relaksasi	Pembetulan	Koreksi Pencatatan	
2010	754.215.004,00	0,00	0,00	2,00	6.000.327	17.454.440	829.341,00	0,00	729.930.898,00
2011	763.296.663,00	0,00	0,00	0,00	6.732.097	18.340.518	904.640,00	0,00	737.319.408,00
2012	783.122.261,00	0,00	0,00	0,00	7.186.079	19.215.096	863.048,00	1,00	755.858.037,00
2013	839.932.989,00	0,00	0,00	0,00	7.372.932	19.236.731	904.640,00	2,00	812.418.684,00
2014	817.890.203,00	0,00	0,00	2,00	8.389.943	20.082.512	890.016,00	0,00	788.527.734,00
2015	857.959.116,00	0,00	0,00	0,00	8.415.334	21.024.418	890.016,00	0,00	827.629.348,00
2016	849.627.575,00	0,00	0,00	0,00	9.065.758	22.808.126	814.443,00	1,00	816.939.247,00
2017	1.663.153.086,00	0,00	0,00	0,00	21.541.894	63.784.587	8.777.703,00	0,00	1.569.048.902,00
2018	1.926.669.733,00	0,00	0,00	0,00	27.223.965	74.724.383	8.816.308,00	0,00	1.815.905.077,00
2019	2.141.074.578,00	0,00	0,00	0,00	31.367.978	77.919.149	7.896.859,00	0,00	2.023.890.592,00
2020	2.477.956.302,00	0,00	0,00	0,00	38.126.583	96.585.521	7.935.464,00	1,00	2.335.308.733,00
2021	2.712.867.027,00	0,00	0,00	0,00	63.902.638	98.816.530	7.935.464,00	0,00	2.542.212.395,00
2022	2.897.979.684,00	0,00	10.000,00	0,00	72.394.876	103.482.228	7.935.464,00	0,00	2.714.177.116,00
2023	3.054.227.048,00	0,00	27.227,00	0,00	126.416.092	134.910.273	8.141.884,00	0,00	2.784.786.026,00
2024	0,00	3.862.815.115	0,00	0,00	868.071.556	0,00	0,00	0,00	2.994.743.559,00
Jumlah	22.539.971.269,00	3.862.815.115	37.227,00	4,00	1.302.208.052,00	788.384.512,00	63.535.290,00	5,00	24.248.695.756,00

Terdapat selisih antara pembayaran 2024 dengan realisasi PBB-P2 dalam laporan realisasi anggaran sejumlah Rp237.179,38 yang merupakan kelebihan pembayaran PBB-P2 selama tahun 2024 yang dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan. Kemudian terdapat kebijakan relaksasi pembayaran PBB-P2 selama tahun 2024 yang mempengaruhi dari pengurangan piutang PBB-P2 tahun sebelumnya sebesar Rp788.384.512,00 dan terdapat pembetulan dari ketetapan yang telah terbit tahun sebelumnya yang mempengaruhi penambahan sebesar Rp4,00 dan pengurangan sebesar Rp63.535.290,00. Terdapat koreksi pencatatan pada posisi penambahan sebesar Rp37.227,00 dan pengurangan sebesar Rp5,00 merupakan koreksi atas pembetulan transaksi tahun-tahun sebelumnya yang telah dicatat oleh aplikasi *Income Point* PBB-P2 tetapi belum dilakukan koreksi dan pengungkapan pada Laporan Keuangan.

- 5) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp122.025.437,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.95 Rincian Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(dalam rupiah)

Tahun	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan Ketetapan baru (Piutang 2024)	Pengurangan Pembayaran 2024	Saldo Akhir per 31 Desember 2024
2017	308.939,38	0,00	0,00	308.939,38
2018	43.374.811,76	0,00	2.730.575,00	40.644.236,76
2019	40.371.095,97	0,00	0,00	40.371.095,97
2020	31.667.364,18	0,00	29.070,00	31.638.294,18
2021	8.964.710,88	0,00	3.060,00	8.961.650,88
2022	101.220,00	0,00	0,00	101.220,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	392.453.646,00	392.453.646,00	0,00
Jumlah	124.788.142,17	392.453.646,00	395.216.351,00	122.025.437,17

7.5.3.1.10 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(14.895.001.833,94)	(13.102.889.881,93)

Penyisihan Piutang Pajak yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang Pajak yang tidak tertagih dikecualikan untuk piutang yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.96 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Pajak
(dalam rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar < 1 THN	Kurang Lancar < 1 S.D 3THN	Diragukan 3 S.D 5 THN	Macet > 5 THN	
1	Piutang Pajak Reklame	833.000,00	0,00	5.801.000,00	39.014.000,00	45.648.000,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	4.165,00	0,00	2.900.500,00	39.014.000,00	41.918.665,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	828.835,00	0,00	2.900.500,00	0,00	3.729.335,00
2	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.098.125.000,00	0,00	0,00	0,00	9.098.125.000,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	45.490.625,00	0,00	0,00	0,00	45.490.625,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	9.052.634.375,00	0,00	0,00	0,00	9.052.634.375,00
3	Piutang PBB-P2	2.994.743.559,00	5.498.963.142,00	4.877.521.128,00	10.877.467.927,00	24.248.695.756,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	14.973.717,80	1.374.740.785,50	2.438.760.564,00	10.877.467.927,00	14.705.942.994,30
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	2.979.769.841,21	4.124.222.356,50	2.438.760.564,00	0,00	9.542.752.761,71
4	Piutang BPHTB	0,00	101.220,00	40.599.945,06	81.324.272,11	122.025.437,17
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	25.305,00	20.299.972,53	81.324.272,11	101.649.549,64
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	75.915,00	20.299.972,53	0,00	20.375.887,53
	JUMLAH NRV	12.033.233.051,21	4.124.298.271,50	2.461.961.036,53	0,00	18.619.492.359,24
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	60.468.507,80	1.374.766.090,50	2.461.961.036,53	10.997.806.199,11	14.895.001.833,94

7.5.3.1.11 Piutang Retribusi Daerah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Retribusi Daerah	(Rp)	(Rp)
	8.541.811.987,19	0,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.541.811.987,19, terdiri dari:

Tabel 7.5.97 Rincian Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2023	Penambahan 2024		Pengurangan 2024		Saldo per 31 Desember 2024
			Reklasifikasi dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Ketetapan baru (Piutang 2024)	Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	2.111.682.121,00	8.498.580.554,00	2.061.154.353,00	14.384.417,00	8.534.723.905,00
2	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
3	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	0,00	4.538.082,19	0,00	0,00	4.538.082,19
Jumlah		0,00	2.111.682.121,00	8.505.668.636,19	2.061.154.353,00	14.384.417,00	8.541.811.987,19

- 1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.534.723.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.98 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Penambahan 2024		Pengurangan 2024		Saldo per 31 Desember 2024
		Reklasifikasi dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Ketetapan baru (Piutang 2024)	Koreksi Pencatatan	Pembayaran	
Piutang BPJS Kesehatan	0,00	2.032.831.338,00	8.490.484.164,00	14.384.417,00	2.018.446.921,00	8.490.484.164,00
Piutang BPJS Ketenagakerjaan	0,00	6.493.647,00	520.928,00	0,00	6.493.647,00	520.928,00
PT. Jasa Raharja	0,00	36.213.785,00	7.575.462,00	0,00	36.213.785,00	7.575.462,00
Piutang Perusda	0,00	31.649.078,00	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00
Piutang TNI AL	0,00	4.494.273,00	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00
Jumlah	0,00	2.111.682.121,00	8.498.580.554,00	14.384.417,00	2.061.154.353,00	8.534.723.905,00

Koreksi Pencatatan Piutang BLUD sebesar Rp14.387.317,00 merupakan koreksi piutang BPJS kesehatan yang tidak diakui berdasarkan hasil verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

- 2) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan piutang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro sampai dengan 31 Desember 2024 Rp2.550.000,00. Piutang tersebut merupakan piutang atas retribusi tempat khusus parkir pada objek retribusi pasar ranai yang uangnya sudah dipungut oleh juru pungut tetapi belum disetor ke rekening bendahara penerimaan.
- 3) Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.538.082,19 merupakan Piutang Sewa ATM Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Sewa BMD Nomor 1050/RSUD-NATUNA/X/2024 dan R01.Br/NTN/582/2024 yang belum disetor ke Kas BLUD.

7.5.3.1.12 Penyisihan Piutang Retribusi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyisihan Piutang Retribusi	(Rp)	(Rp)
	(1,908,255,312.77)	0,00

Penyisihan Piutang Retribusi yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan Piutang Retribusi tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.99 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Retribusi
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Umur Piutang Retribusi Daerah				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		0-1 BULAN	<1 S.D 3 BULAN	3 S.D 12 BULAN	> 12 BULAN	
1	Piutang BPJS Kesehatan	2.282.207.443,00	4.994.531.606,00	1.213.745.115,00	0,00	8.490.484.164,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	11.411.037,22	1.248.632.901,50	606.872.557,50	0,00	1.866.916.496,22
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	2.270.796.405,79	3.745.898.704,50	606.872.557,50	0,00	6.623.567.667,79
2	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	0,00	0,00	520.928,00	0,00	520.928,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	260.464,00	0,00	260.464,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	260.464,00	0,00	260.464,00
3	Piutang Jasa Raharja	0,00	0,00	7.575.462,00	0,00	7.575.462,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	3.787.731,00	0,00	3.787.731,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	3.787.731,00	0,00	3.787.731,00
4	Piutang Perusda	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00	31.649.078,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00	31.649.078,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang TNI AL	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	2.537.250,00	0,00	0,00	0,00	2.537.250,00
7	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	4.538.082,19	0,00	0,00	4.538.082,19
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	1.134.520,55	0,00	0,00	1.134.520,55
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	3.403.561,64	0,00	0,00	3.403.561,64
	JUMLAH NRV	2.273.333.655,79	3.749.302.266,14	610.920.752,50	0,00	6.633.556.674,43
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	11.423.787,22	1.249.767.422,05	610.920.752,50	36.143.351,00	1.908.255.312,77

7.5.3.1.13 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	36,620,423,646.90	38.915.470.599,90

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp36,620,423,646.90, terdiri dari:

Tabel 7.5.100 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

Piutang Lain-lain	Saldo per 31 Des 2023	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan			Saldo per 31 Des 2024
			Pembayaran Tahun 2024	Koreksi Pencatatan	Reklasifikasi ke Piutang Retribusi Daerah	
Piutang Hasil Sewa BMD	408.800.000,00	0,00	81.680.000,00	1.400.000,00	0,00	325.720.000,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS)	11.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation)	258.664.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.111.682.121,00	0,00	0,00	0,00	2.111.682.121,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	36.124.823.728,90	0,00	94.284.832,00	0,00	0,00	36.030.538.896,90
Jumlah	38.915.470.599,90	0,00	181.964.832,00	1.400.000,00	2.111.682.121,00	36.620.423.646,90

- 1) Piutang Hasil Sewa BMD merupakan piutang pendapatan sewa atas 58 Unit Rumah Dinas Pemda yang belum dipungut tahun 2022 sebesar Rp78.900.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp246,820,000.00. Terdapat koreksi pencatatan sebesar Rp1.400.000,00 merupakan koreksi pencatatan piutang sewa tahun 2023 atas nama Harzaki yang tidak menempati rumah dinas karena pindah tugas sejak September 2023.
- 2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS) merupakan piutang yang terjadi akibat terlambatnya penyampaian SK pensiun oleh pensiunan PNS, sehingga menyebabkan gaji pensiunan PNS tersebut masih terbayarkan diatas tanggal SK pensiun. Pengembalian atas piutang tersebut dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) selaku pengelola dana pensiunan PNS dengan memotong uang pensiunan bulanan PNS. Jumlah piutang dana pensiun per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.101 Rincian Piutang Dana Pensiun PNS

(dalam rupiah)

No	Nama	Nomor Ketetapan	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Drs. CHAIDIR CHAR, M.Si	047/KEU/SKPP/X/2017	5.500.000,00
Jumlah			5.500.000,00

- 3) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang Sky Aviation) merupakan piutang yang timbul dikarenakan masih terdapat belanja subsidi penerbangan yang diberikan kepada PT. Sky Aviation yang belum dipertanggungjawabkan. Sampai dengan tahun 2024 masih belum terdapat pelunasan dan jumlahnya masih sebesar Rp258.664.750,00. Atas Piutang tersebut telah dilakukan pengalihan penagihan ke KPKNL Wilayah Kepri berdasarkan Surat Bupati Natuna Nomor 900/EKON/70 tanggal 2 Maret 2015 perihal penyerahan pengurusan piutang sisa dana subsidi penerbangan. Sampai saat ini proses penagihan masih dilakukan oleh KPKNL Wilayah Kepri.
- 4) Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.111.682.121,00 merupakan piutang yang berasal dari RSUD selaku BLUD yang sudah di reklasifikasi ke Piutang Retribusi Daerah sehingga saldo per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp0,00.

- 5) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang yang timbul dari pengelolaan dana bergulir yang dihentikan pelaksanaan programnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 278 Tahun 2021 tentang Penghentian Program Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dan Dinas Perikanan. Program dana bergulir yang dihentikan dan dialihkan pencatatannya ke piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.102 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Pengurangan		Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
			Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM	28.919.793.868,90	92.484.832,00	0,00	28.827.309.036,90
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	3.983.829.775,00	0,00	0,00	3.983.829.775,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	3.221.200.085,00	1.800.000,00	0,00	3.219.400.085,00
Jumlah		36.124.823.728,90	94.284.832,00	0,00	36.030.538.896,90

Sebagian Piutang dana bergulir Koperasi dan UMKM telah diserahkan penagihannya ke KPKNL Wilayah Kepri. Atas pengalihan penagihan tersebut, pada tahun 2024 KPKNL Wilayah Kepri berhasil menagih sebesar Rp16.692.367,00 yang telah diterima oleh Kas Daerah. Sedangkan pengembalian dana bergulir melalui Bank Riau Kepri Syariah Rp77.592.465,00 yang dananya masih terdapat pada rekening dana bergulir yang telah dicatat bagian dari Kas Lainnya.

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM per wilayah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.103 Rincian Piutang Pengelolaan Dana Bergulir
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro**

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Saldo Per 31 Desember 2023	Pembayaran 2024		Saldo Per 31 Desember 2024
			Melalui BRKS	Melalui KPKNL	
1	Bunguran Timur	10.626.298.447,00	72.392.465,00	0,00	10.553.905.982,00
2	Bunguran Timur Laut	1.495.518.181,00	2.400.000,00	0,00	1.493.118.181,00
3	Bunguran Tengah	305.039.259,00	0,00	0,00	305.039.259,00
4	Bunguran Utara	1.254.867.403,00	0,00	0,00	1.254.867.403,00
5	Bunguran Barat	5.613.727.854,00	1.000.000,00	6.000.000,00	5.606.727.854,00
6	Pulau Tiga	3.407.776.970,00	0,00	0,00	3.407.776.970,00
7	Serasan	1.914.233.600,00	0,00	0,00	1.914.233.600,00
8	Subi	519.260.512,00	0,00	0,00	519.260.512,00
9	Midai	870.236.463,00	0,00	0,00	870.236.463,00
10	Pulau Laut	676.466.558,90	0,00	0,00	676.466.558,90
11	Koperasi	2.181.418.621,00	0,00	10.692.367,00	2.170.726.254,00
12	Bunguran Selatan	54.950.000,00	0,00	0,00	54.950.000,00
Jumlah		28.919.793.868,90	75.792.465,00	16.692.367,00	28.827.309.036,90

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002 dan 2003 per wilayah sebagai berikut:

Tabel 7.5.104 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002 dan 2003

(dalam rupiah)

No	Rekapan Penerima Dana Bergulir	Saldo Per 31 Desember 2023	Pembayaran Tahun 2024	Saldo Per 31 Desember 2024
A	Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002			
1	Bunguran Timur	863.403.755,00	0,00	863.403.755,00
2	Bunguran Barat	1.654.740.775,00	0,00	1.654.740.775,00
3	Serasan	678.000.020,00	0,00	678.000.020,00
4	Midai	444.074.110,00	0,00	444.074.110,00
5	Subi	197.500.000,00	0,00	197.500.000,00
6	Bunguran Utara	46.111.115,00	0,00	46.111.115,00
7	Pulau Laut	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	Jumlah	3.983.829.775,00	0,00	3.983.829.775,00
B	Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003			
1	Bunguran Timur	997.772.275,00	1.800.000,00	995.972.275,00
2	Bunguran Barat	718.703.715,00	0,00	718.703.715,00
3	Serasan	668.851.860,00	0,00	668.851.860,00
4	Midai	361.798.155,00	0,00	361.798.155,00
5	Subi	57.592.595,00	0,00	57.592.595,00
6	Bunguran Utara	219.629.630,00	0,00	219.629.630,00
7	Pulau Laut	196.851.855,00	0,00	196.851.855,00
	Jumlah	3.221.200.085,00	1.800.000,00	3.219.400.085,00
	Jumlah A + B	7.205.029.860,00	1.800.000,00	7.203.229.860,00

7.5.3.1.14 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>(36.370.661.146,90)</u>	<u>(36,430,067,023.76)</u>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.105 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Lain-Lain PAD yang sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		<1 THN	<1 S.D 3 THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
1	Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	325.720.000,00	0,00	0,00	325.720.000,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	81.430.000,00	0,00	0,00	81.430.000,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	244.290.000,00	0,00	0,00	244.290.000,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	5.472.500,00	0,00	0,00	0,00	5.472.500,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation)	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH NRV	5.472.500,00	244.290.000,00	0,00	0,00	249.762.500,00
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	27.500,00	81.430.000,00	0,00	258.664.750,00	340.122.250,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.106 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		< 1 THN	< 1 S.D 3THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	28.827.309.036,90	28.827.309.036,90
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	28.827.309.036,90	28.827.309.036,90
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	0,00	0,00	0,00	3.983.829.775,00	3.983.829.775,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	3.983.829.775,00	3.983.829.775,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	0,00	0,00	0,00	3.219.400.085,00	3.219.400.085,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	3.219.400.085,00	3.219.400.085,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH NRV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH		0,00	0,00	0,00	36.030.538.896,90	36.030.538.896,90

7.5.3.1.15 Piutang Transfer Antar Daerah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Transfer Antar Daerah	(Rp)	(Rp)
	17.546.888.639,00	18.221.293.499,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.546.888.639,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.107 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

Piutang bagi hasil pajak	Saldo per 31 Des 2023	Penambahan	Pembayaran tahun 2024	Saldo per 31 Des 2024
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.747.009.196,00	4.894.244.469,00	3.747.009.196,00	4.894.244.469,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.505.629.784,00	4.791.027.327,00	2.505.629.784,00	4.791.027.327,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.953.945.732,00	7.844.014.610,00	11.953.945.732,00	7.844.014.610,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	14.708.787,00	17.602.233,00	14.708.787,00	17.602.233,00
Jumlah	18.221.293.499,00	17.546.888.639,00	18.221.293.499,00	17.546.888.639,00

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 merupakan kurang bayar bagi hasil dari Pemerintah Provinsi pada Tahun 2024 berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 430 Tahun 2025 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

7.5.3.1.16 Piutang Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Lainnya	(Rp)	(Rp)
	5.657.164.773,69	0,00

Piutang lainnya yang disajikan pada Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan dibayarkan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disajikan sebesar Rp5.657.164.773,69. Rincian Bagian Lancar dari tuntutan ganti kerugian daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.108 Rekapitulasi Bagian Lancar Piutang Tuntutan Kerugian Daerah

(dalam rupiah)

No	Nama Unit Kerja	Jumlah
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.830.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12.874.448,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.484.832,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	87.002.200,00
5	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	15.442.500,00
6	Bagian Administrasi Dan Pembangunan	37.400.000,00
7	Bagian Perekonomian	6.375.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.550.000,00
9	Dinas Kesehatan	32.807.874,81
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	8.013.108,00
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.178.702,00
12	Dinas Pariwisata	14.853.600,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.824.138,00
14	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	910.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.727.712,00
16	Dinas Pemuda Dan Olahraga	7.035.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.150.896,12
18	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	31.886.548,00
19	Dinas Perhubungan	19.067.065,80
20	Dinas Perikanan	15.440.180,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	104.081.446,00
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.977.456,00
23	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	85.584.724,82
24	Dinas Sosial	305.000,00
25	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.325.000,00
26	Inspektorat Daerah	8.686.056,14
27	Kecamatan Bunguran Barat	3.300.000,00
28	Kecamatan Bunguran Batubi	188.299.480,00
29	Kecamatan Bunguran Selatan	5.785.000,00
30	Kecamatan Bunguran Tengah	825.000,00
31	Kecamatan Bunguran Timur	30.956.700,00
32	Kecamatan Bunguran Timur Laut	26.535.000,00
33	Kecamatan Bunguran Utara	200.381.200,00
34	Kecamatan Midai	141.326.600,00
35	Kecamatan Pulau Laut	135.283.750,00
36	Kecamatan Pulau Panjang	95.021.000,00
37	Kecamatan Pulau Seluan	237.614.228,00
38	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1.650.000,00
39	Kecamatan Serasan	118.730.880,00
40	Kecamatan Serasan Timur	445.265.400,00
41	Kecamatan Suak Midai	61.691.500,00
42	Kecamatan Subi	138.376.504,00
43	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	3.650.000,00
44	Sekretariat Daerah	27.737.707,00
45	Sekretariat DPRD	3.254.921.337,00
Jumlah		5.657.164.773,69

7.5.3.1.17 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	765.591.570,63	756.512.500,01

Pada akhir tahun 2024 terdapat saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp765.591.570,63 yang dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	756.512.500,01
Penambahan tahun 2024	Rp	765.591.570,63

Jumlah	Rp 1.522.104.070,64
Pengurangan tahun 2024	Rp 756.512.500,01
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 765.591.570,63

Jumlah tersebut merupakan Beban Dibayar Dimuka yang terdiri dari:

Tabel 7.5.109 Rincian Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2024
1	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	142.791.666,67	140.681.676,81	142.791.666,67	140.681.676,81
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	37.916.666,67	52.322.920,88	37.916.666,67	52.322.920,88
3	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan I	89.916.666,67	0,00	89.916.666,67	0,00
4	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Asrama	300.037.500,00	314.699.016,40	300.037.500,00	314.699.016,40
5	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	185.850.000,00	244.181.967,21	185.850.000,00	244.181.967,21
6	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	0,00	13.705.989,33	0,00	13.705.989,33
Jumlah		756.512.500,01	765.591.570,63	756.512.500,01	765.591.570,63

Saldo akhir Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp140.681.676,81 berada di beberapa SKPD dengan rincian:

Tabel 7.5.110 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Kantor

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.015.300,55
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.387.738,42
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.615.803,81
4	Dinas Perhubungan	13.661.202,18
5	Sekretariat Daerah	53.200.000,00
6	Kecamatan Bunguran Timur	17.404.371,58
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	7.397.260,27
Jumlah		140.681.676,81

Saldo akhir Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gudang sebesar Rp52.322.920,88 berada di beberapa SKPD dengan rincian:

Tabel 7.5.111 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gudang

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.189.041,10
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.622.950,82
3	Sekretariat Daerah	38.825.136,61
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.685.792,35
Jumlah		52.322.920,88

Saldo akhir Beban Sewa Asrama sebesar Rp314.699.016,40 merupakan beban sewa yang berasal dari sewa Asrama Mahasiswa Natuna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saldo akhir Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebesar Rp244.181.967,21 beban sewa yang berasal dari sewa rumah dokter pada Dinas Kesehatan Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp57.843.169,40 dan beban sewa yang berasal dari sewa rumah singgah bertempat di Batam yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat Kabupaten Natuna yang mendapat rujukan berobat ke Batam dan keperluan sosial lainnya yang tercatat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp186.338.797,81.

Saldo akhir Beban Sewa Lisensi dan *Franchise* sebesar Rp13.705.989,33 merupakan beban sewa yang berasal dari sewa lisensi *Cpanel* pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8.836.126,31 dan sewa aplikasi *zoom* pada Sekretariat Daerah sebesar Rp4.869.863,02.

7.5.3.1.18 Persediaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Persediaan	(Rp)	(Rp)
	25.224.508.910,67	19.655.884.638,38

Pada tahun 2024, Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Bahan-Bahan Kimia, Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Bahan-Bahan Baku, Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan, Bahan-Isi Tabung Gas, Bahan-Bahan Lainnya, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian, Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Obat-Obatan-Obat, Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya, Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya, Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga, Natura dan Pakan-Natura, Natura dan Pakan-Pakan, Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial, Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Pelatihan Kerja, Pakaian Kerja Bengkel, Pakaian Adat Daerah, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga, Pakaian Paskibraka, Komponen-Komponen Peralatan, Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi, Hadiah yang Bersifat Perlombaan, Penghargaan atas Suatu Prestasi, Beasiswa, Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain, Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain, Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Uang yang Diberikan kepada Posyandu, Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain, Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat dicatat dengan metode periodik dengan pendekatan aset.

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.224.508.910,67 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.112 Nilai Keseluruhan Mutasi Persediaan

(dalam rupiah)

Sumber persediaan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Barang Persediaan APBD	19.655.884.638,38	123.035.874.509,35	117.467.250.237,06	25.224.508.910,67
Jumlah	19.655.884.638,38	123.035.874.509,35	117.467.250.237,06	25.224.508.910,67

Penambahan persediaan sebesar Rp123.035.874.509,35 terdiri dari:

Belanja Persediaan Tahun 2024	Rp	67.340.613.082,00
Utang Belanja Barang	Rp	13.959.823.612,90
Koreksi Saldo Awal	Rp	1.740.000,00
Pendapatan Hibah-LO	Rp	2.230.692.132,59
Reklasifikasi dari Beban Jasa	Rp	16.238.334.117,86
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	183.568.000,00
Reklasifikasi dari Beban Hibah	Rp	18.165.980.716,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	4.633.389.058,00
Ekstrakomptabel		
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	281.103.330,00
Intrakomptabel		
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	75.000,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp	555.460,00
Jumlah	Rp	123.035.874.509,35

Pengurangan persediaan sebesar Rp117.467.250.237,06 terdiri dari:

Menjadi Beban	Rp	114.170.881.747,84
Reklasifikasi ke Beban Jasa	Rp	630.857.100,00
Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	Rp	1.150.000,00
Reklasifikasi ke Beban Hibah	Rp	472.955.808,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	228.522.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	158.718.609,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Tagihan Jangka Panjang-	Rp	1.804.164.972,22
Tuntutan Ganti Kerugian		
Jumlah	Rp	117.467.250.237,06

Penjelasan atas nilai mutasi persediaan di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.113 Daftar Mutasi Persediaan Masuk dan Mutasi Persediaan Keluar

(dalam rupiah)

No.	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan											Pengurangan									
			Belanja	Utang Belanja	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan Hibah-LO	Reklas dari Beban Jasa	Reklas dari Beban Pemeliharaan	Reklas dari Beban Hibah	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomtable	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Intrakomtable	Reklas dari Aset Tetap Lainnya	Surplus dari Kegiatan Non Operasi al Lainnya-LO	Reklas antar Persediaan	Menjadi Beban	Reklas ke Beban Jasa	Reklas Ke Beban Pemeliharaan	Beban Hibah	Reklas Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Reklas Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Aset lainnya-Taqiahan Jangka Panjang (TGR)	Reklas antar Persediaan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	532.000,00	546.764.213,00	178.775.000,00	0,00	0,00	788.803.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.505.626.613,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	9.248.500,00
2	Bahan-Bahan Kimia	198.174.200,00	96.425.800,00	200.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425.000,00
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.396.000,00	6.613.602.143,00	288.283.380,00	0,00	0,00	87.082.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724.035.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.097.000,00	0,00	0,00	44.231.700,00
4	Bahan-Bahan Baku	870.750,00	11.663.100,00	0,00	0,00	0,00	245.790.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020.000,00	286.699.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645.000,00
5	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	49.865.800,00	0,00	0,00	0,00	12.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.278.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.460,00
7	Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	50.425.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	39.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
8	Bahan-Bahan Lainnya	96.519.698,17	2.457.794.146,00	138.657.360,00	0,00	0,00	61.640.000,00	183.568.000,00	0,00	0,00	139.500,00	75.000,00	0,00	5.085.000,00	2.731.653.116,12	0,00	0,00	0,00	14.809.000,00	0,00	144.217.305,00	0,00	52.799.283,05
9	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	60.000,00	1.625.535.535,00	347.267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.017.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.146.000,00	700.000,00	0,00
10	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	12.230.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	34.175.500,00	290.419.500,00	30.881.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016.540,00	0,00	0,00	5.590.000,00	345.422.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510.500,00	0,00	10.161.000,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	253.326.930,00	3.221.535.848,00	595.330.082,00	0,00	0,00	1.785.617.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.786.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.722.850,00	0,00	122.301.320,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	25.357.900,00	1.299.129.458,00	119.058.870,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.840.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.111.700,00	0,00	26.838.310,00
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	138.415.038,75	5.637.659.025,00	1.489.449.530,00	1.740.000,00	84.828.890,00	2.284.577.172,00	0,00	0,00	0,00	188.940.000,00	0,00	0,00	0,00	8.797.913.733,05	490.000,00	0,00	0,00	40.540.000,00	0,00	409.918.000,00	0,00	576.747.922,70
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.122.200,00	993.857.900,00	120.324.500,00	0,00	0,00	60.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.551.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.056.000,00	0,00	5.553.000,00
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	15.892.000,00	3.598.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	140.000,00	405.514.014,00	53.951.000,00	0,00	0,00	12.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.283.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.335.200,00	0,00	7.232.000,00
19	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.515.000,00	537.197.700,00	52.405.384,00	0,00	0,00	493.473.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.791.604,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	25.112.000,00	0,00	20.687.500,00
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.175.000,00	703.260.910,00	323.977.450,00	0,00	0,00	214.968.750,00	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.470.010,00	4.357.100,00	0,00	0,00	84.323.000,00	0,00	0,00	5.590.000,00	3.162.000,00
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	67.911.835,00	614.342.500,00	89.230.000,00	0,00	0,00	10.974.545,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	630.904.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.720.500,00	0,00	38.633.450,00
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Lainnya	6.022.000,00	331.078.308,00	39.980.000,00	0,00	0,00	30.892.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.187.408,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	2.785.000,00
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.250.000,00	284.635.000,00	9.390.000,00	0,00	0,00	293.551.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.926.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.901.000,00	881.237.150,00	75.600.000,00	0,00	0,00	13.581.000,00	0,00	0,00	0,00	985.290,00	0,00	0,00	0,00	284.946.440,00	626.010.000,00	0,00	0,00	41.150.000,00	0,00	22.798.000,00	0,00	400.000,00
25	Obat-Obatan-Obat	13.654.294.958,65	1.855.337.247,00	1.752.563.189,00	0,00	1.852.211.252,50	9.724.716.193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997.000.184,90	22.481.924.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354.198.308,28
26	Obat-Obatan-Obat-Lainnya	300.150.558,00	5.136.664.997,00	4.316.173.907,90	0,00	293.651.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.544.724,17	0,00	0,00	16.470.808,00	0,00	0,00	8.997.000.184,90	356.625.735,83	0,00
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.066.340.319,81	419.532.625,00	220.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743.312.436,00	0,00	48.702.000,00	0,00	0,00	0,00	13.457.692.013,78	0,00	0,00	432.500.000,00	0,00	158.718.609,00	36.916.917,22	0,00	3.412.583.840,81
28	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	126.275.000,00	312.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.668.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.743.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.009.930,00
29	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjangka-Jangka	2.586.311.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.019.400,00
30	Natura dan Pakan-Natura	50.247.450,00	9.745.500,00	4.628.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.816.925,00	1.006.623.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.815.250,00
31	Natura dan Pakan-Pakan	0,00	52.116.000,00	6.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330.000,00
32	Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.400.000,00	1.873.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.842.483.300,00	505.864.200,00	0,00	0,00	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.307.000,00	0,00	0,00
34	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	10.758.312.130,00	585.761.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238.238.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.435.000,00	2.400.000,00	0,00
35	Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	183.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.520.000,00	0,00	0,00
36	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	374.262.873,00	1.800.000,00	0,00	0,00	13.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.842.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan												Pengurangan										Saldo Akhir
			Belanja	Utang Belanja	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan Hibah-LO	Reklas dari Beban Jasa	Reklas dari Beban Pemeliharaan	Reklas dari Beban Hibah	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomtable	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Intrakomtable	Reklas dari Aset Tetap Lainnya	Surplus dari Kegiatan Non Operation al Lainnya-LO	Reklas antar Persediaan	Menjadi Beban	Reklas ke Beban Jasa	Reklas Ke Beban Pemeliharaan	Beban Hibah	Reklas Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Reklas Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Aset lainnya-Tagihan Jangka Panjang (TGR)	Reklas antar Persediaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
37	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	1.211.987.425,00	127.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.876.925,00	0,00		
38	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	5.897.079.378,00	453.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320.303.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.865.000,00	0,00	0,00		
40	Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	22.461.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.461.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	85.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00		
42	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	217.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	435.805.000,00	745.182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.987.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	56.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	229.456.000,00	42.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	Pakaian Kerja Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	Pakaian Adat Daerah	0,00	1.165.589.000,00	195.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	0,00		
50	Pakaian Batik Tradisional	0,00	70.605.860,00	17.232.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.182.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51	Pakaian Olahraga	0,00	603.890.000,00	282.408.000,00	0,00	0,00	26.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	Pakaian Pesakbraka	0,00	821.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	Komponen-Komponen Peralatan	0,00	61.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.760.000,00	0,00	0,00	23.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54	Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kehakatan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat BengkelBermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-AlatUkur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Bara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-AlatPeternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatPenyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.152.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.152.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No.	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan												Pengurangan										Saldo Akhir
			Belanja	Utang Belanja	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan Hibah-LO	Reklas dari Beban Jasa	Reklas dari Beban Pemeliharaan	Reklas dari Beban Hibah	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Intrakomtabel	Reklas dari Aset Tetap Lainnya	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Reklas antar Persediaan	Menjadi Beban	Reklas ke Beban Jasa	Reklas Ke Beban Pemeliharaan	Beban Hibah	Reklas Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Reklas Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Aset lainnya-Tagihan Jangka Panjang (TGR)	Reklas antar Persediaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
70	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.619.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.619.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.376.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.376.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.562.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.562.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.280.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.280.850,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan KursiKerjaRapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan KursiKerjaRapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan KursiKerjaRapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan KursiKerjaRapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
81	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan(Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	7.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.093.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.093.612,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00	0,00		
87	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat KesehatanUmum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Kimia Air Teknik Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No.	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan												Pengurangan										Saldo Akhir
			Belanja	Utang Belanja	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan Hibah-LO	Reklas dari Beban Jasa	Reklas dari Beban Pemeliharaan	Reklas dari Beban Hibah	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Intrakomtabel	Reklas dari Aset Tetap Lainnya	Surplus dari Kegiatan Non Operation al Lainnya-LO	Reklas antar Persediaan	Menjadi Beban	Reklas ke Beban Jasa	Reklas Ke Beban Pemeliharaan	Beban Hibah	Reklas Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Reklas Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Aset lainnya-Tagihan Jangka Panjang (TGR)	Reklas antar Persediaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Laboratorium-AlatLaboratorium Makanan																								
93	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alatlaboratorium Proses Teknologi Tekstil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Energi Surya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium KimiaNuklir- General Laboratory Tool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Matematika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang StudiIPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Atas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Agama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi PKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
108	Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
109	Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110	Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111	Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
112	Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113	Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.972.271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	129.972.271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
115	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	1.215.113.018,00	290.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.993.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No.	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan												Pengurangan								Saldo Akhir
			Belanja	Utang Belanja	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan Hibah-LO	Reklas dari Beban Jasa	Reklas dari Beban Pemeliharaan	Reklas dari Beban Hibah	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Intrakomtabel	Reklas dari Aset Tetap Lainnya	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Reklas antar Persediaan	Menjadi Beban	Reklas ke Beban Jasa	Reklas Ke Beban Pemeliharaan	Beban Hibah	Reklas Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Reklas Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Aset lainnya-Tagihan Jangka Panjang (TGR)	Reklas antar Persediaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
116	Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Beasiswa	0,00	220.200.000,00	118.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	0,00	1.661.400.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	0,00	774.300.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Uang yang Diberikan kepada Populasi	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	1.189.429.148,00	90.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.229.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	512.700.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.700.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		19.655.884.638,38	67.340.613.082,00	13.959.823.612,90	1.740.000,00	2.230.692.132,59	16.238.334.117,86	183.568.000,00	18.165.980.716,00	4.633.389.058,00	281.103.330,00	75.000,00	555.460,00	10.129.212.109,90	114.170.881.747,84	630.857.100,00	1.150.000,00	472.955.808,00	228.522.000,00	158.718.609,00	1.804.164.972,22	10.129.212.109,90	25.224.508.910,67

Koreksi pencatatan yang menambah nilai persediaan sebesar Rp1.740.000,00 merupakan koreksi atas kurang catat Persediaan Blok Karcis Retribusi Penyebrangan Air tahun 2023 pada Dinas Perhubungan. Jumlah persediaan sebesar Rp25.224.508.910,67 per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 7.5.114 Daftar Saldo Persediaan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Jumlah
1.1.12.01.01.0001.	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.248.500,00
1.1.12.01.01.0002.	Bahan-Bahan Kimia	8.425.000,00
1.1.12.01.01.0004.	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.231.700,00
1.1.12.01.01.0005.	Bahan-Bahan Baku	51.645.000,00
1.1.12.01.01.0008.	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	35.000,00
1.1.12.01.01.0010.	Bahan-Isi Tabung Gas	585.000,00
1.1.12.01.01.0011.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	555.460,00
1.1.12.01.01.0012.	Bahan-Bahan Lainnya	52.799.283,05
1.1.12.01.02.0011.	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.161.000,00
1.1.12.01.03.0001.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122.301.320,00
1.1.12.01.03.0002.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.838.310,00
1.1.12.01.03.0003.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	576.747.922,70
1.1.12.01.03.0004.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.553.000,00
1.1.12.01.03.0006.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.232.000,00
1.1.12.01.03.0007.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.687.500,00
1.1.12.01.03.0008.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.162.000,00
1.1.12.01.03.0009.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	38.633.450,00
1.1.12.01.03.0011.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.785.000,00
1.1.12.01.03.0012.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	900.000,00
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.000,00
1.1.12.01.04.0001.	Obat-Obatan-Obat	15.354.198.308,28
1.1.12.01.04.0002.	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	356.625.735,83
1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.412.583.840,81
1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.569.009.930,00
1.1.12.01.06.0001.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	2.442.019.400,00
1.1.12.01.07.0001.	Natura dan Pakan-Natura	98.815.250,00
1.1.12.01.07.0002.	Natura dan Pakan-Pakan	8.330.000,00
Jumlah		25.224.508.910,67

1. Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Saldo Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.248.500,00 berada pada:

Tabel 7.5.115 Daftar Saldo Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.288.500,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.960.000,00
Jumlah		9.248.500,00

2. Bahan-Bahan Kimia

Saldo Bahan-Bahan Kimia per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.425.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.116 Daftar Saldo Bahan-Bahan Kimia*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	525.000,00
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.900.000,00
Jumlah		8.425.000,00

3. Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.231.700,00 berada pada:

Tabel 7.5.117 Daftar Saldo Bahan Bakar dan Pelumas*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.000,00
2.	Dinas Kesehatan	35.650.000,00
3.	Dinas Sosial	1.910.000,00
4.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.828.500,00
5.	Dinas Perikanan	2.488.200,00
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.100.000,00
7.	Kecamatan Serasan Timur	220.000,00
Jumlah		44.231.700,00

4. Bahan-Bahan Baku

Saldo Bahan-Bahan Baku per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.645.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.118 Daftar Saldo Bahan-Bahan Baku*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.760.000,00
2.	Dinas Kesehatan	7.330.000,00
3.	Puskesmas Ranai	1.170.000,00
4.	Puskesmas Bunguran Tengah	2.200.000,00
5.	Puskesmas Bunguran Selatan	4.670.000,00
6.	Puskesmas Pulau Tiga	1.735.000,00
7.	Puskesmas Midai	12.440.000,00
8.	Puskesmas Subi	3.670.000,00
9.	Puskesmas Batubi Jaya	4.010.000,00
10.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	6.660.000,00
Jumlah		51.645.000,00

5. Bahan/Bibit Tanaman

Saldo Bahan/Bibit Tanaman per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.000,00 berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Isi Tabung Gas

Saldo Isi Tabung Gas per 31 Desember 2024 sebesar Rp585.000,00 berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Saldo Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp555.460,00 merupakan hasil pemijahan bibit ikan nila berada di Dinas Perikanan.

8. Bahan-Bahan Lainnya

Saldo Bahan-Bahan Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.799.283,05 berada pada:

Tabel 7.5.119 Daftar Saldo Bahan-Bahan Lainnya

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	507.000,00
2.	Dinas Kesehatan	17.412.664,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	25.815.927,05
4.	Puskesmas Bunguran Selatan	1.249.360,00
5.	Puskesmas Kelarik	75.000,00
6.	Puskesmas Sedanau	225.000,00
7.	Puskesmas Pulau Tiga	1.010.352,00
8.	Puskesmas Pulau Laut	651.840,00
9.	Puskesmas Serasan	135.000,00
10.	Puskesmas Subi	1.200.140,00
11.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	412.500,00
12.	UPT Instalasi Farmasi	825.000,00
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.540.000,00
14.	Dinas Perikanan	310.500,00
15.	Kecamatan Midai	272.000,00
16.	Kecamatan Serasan Timur	157.000,00
Jumlah		52.799.283,05

9. Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya

Saldo Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.161.000,00 berada di Sekretariat Daerah.

10. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp122.301.320,00 berada pada:

Tabel 7.5.120 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44.383.780,00
2.	Dinas Kesehatan	275.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.538.000,00
4.	Puskesmas Ranai	336.900,00
5.	Puskesmas Bunguran Tengah	207.500,00
6.	Puskesmas Bunguran Selatan	1.192.200,00
7.	Puskesmas Midai	63.000,00
8.	Puskesmas Serasan	108.100,00
9.	Puskesmas Serasan Timur	1.834.450,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.644.000,00
10.	Dinas Sosial	210.000,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.066.000,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63.329.050,00

No.	SKPD	Jumlah
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	265.000,00
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga	423.440,00
15.	Dinas Perikanan	2.112.550,00
16.	Kecamatan Bunguran Timur	138.750,00
17.	Kecamatan Midai	79.000,00
18.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	300.000,00
19.	Kecamatan Serasan Timur	664.600,00
20.	Kecamatan Pulau Panjang	130.000,00
Jumlah		122.301.320,00

11. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover per 31 Desember 2024 Sebesar Rp26.838.310,00 berada pada:

Tabel 7.5.121 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	4.830.000,00
2.	Puskesmas Bunguran Tengah	1.170.000,00
3.	Puskesmas Bunguran Selatan	218.000,00
4.	Puskesmas Midai	680.000,00
5.	Puskesmas Serasan	235.500,00
6.	Puskesmas Batubi Jaya	5.073.000,00
7.	Dinas Sosial	310.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	490.000,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.730.000,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	790.000,00
11.	Dinas Perhubungan	240.000,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	922.410,00
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	464.000,00
14.	Dinas Perikanan	2.626.000,00
15.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	438.000,00
16.	Kecamatan Bunguran Timur	266.400,00
17.	Kecamatan Bunguran Utara	300.000,00
18.	Kecamatan Midai	300.000,00
19.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	5.635.000,00
20.	Kecamatan Pulau Panjang	120.000,00
Jumlah		26.838.310,00

12. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak per 31 Desember 2024 sebesar Rp576.747.922,70 berada pada:

Tabel 7.5.122 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	410.000,00
2.	Dinas Kesehatan	210.710.650,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	112.800.350,00
4.	Puskesmas Ranai	3.794.064,00
5.	Puskesmas Tanjung	18.175,45
6.	Puskesmas Bunguran Selatan	12.147.314,00

No.	SKPD	Jumlah
7.	Puskesmas Pulau Tiga	10.395.080,00
8.	Puskesmas Pulau Laut	7.423.781,25
9.	Puskesmas Subi	6.870.500,00
10.	Puskesmas Batubi Jaya	268.130,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.497.500,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118.537.458,00
13.	Dinas Perhubungan	2.178.720,00
14.	Dinas Perikanan	6.950.000,00
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	2.970.000,00
16.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.901.200,00
17.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.225.000,00
18.	Kecamatan Pulau Laut	6.250.000,00
19.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	17.150.000,00
20.	Kecamatan Serasan Timur	250.000,00
21.	Kecamatan Bunguran Batubi	6.000.000,00
Jumlah		576.747.922,70

13. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.553.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.123 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	799.000,00
2.	Puskesmas Bunguran Selatan	1.170.000,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	500.000,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.020.000,00
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga	500.000,00
6.	Dinas Perikanan	1.000.000,00
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	444.000,00
8.	Kecamatan Bunguran Timur	120.000,00
Jumlah		5.553.000,00

14. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.232.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.124 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	460.000,00
2.	Puskesmas Bunguran Selatan	800.000,00
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.000.000,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.192.000,00
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.500.000,00
6.	Kecamatan Serasan Timur	280.000,00
Jumlah		7.232.000,00

15. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.687.500,00 berada pada:

Tabel 7.5.125 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.797.000,00
2.	Puskesmas Ranai	255.000,00
3.	Puskesmas Midai	209.000,00
4.	Puskesmas Serasan	77.000,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.856.000,00
7.	Kecamatan Bunguran Timur	1.493.500,00
Jumlah		20.687.500,00

16. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.162.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.126 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik
(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.062.000,00
2.	Puskesmas Ranai	100.000,00
Jumlah		3.162.000,00

17. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.633.450,00 berada pada:

Tabel 7.5.127 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	220.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	4.545.450,00
3.	Puskesmas Serasan	1.188.000,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.680.000,00
Jumlah		38.633.450,00

18. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.785.000,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

19. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata per 31 Desember 2024 sebesar Rp900.000,00 berada pada:

Tabel 7.5.128 Daftar Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	600.000,00
2.	Dinas Kesehatan	300.000,00
Jumlah		900.000,00

20. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp400.000,00 berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

21. Obat-Obatan-Obat

Saldo Obat-Obatan-Obat per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.354.198.308,28 berada pada:

Tabel 7.5.129 Daftar Obat-Obatan-Obat

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.311.300,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	3.849.394.083,44
3.	Puskesmas Ranai	526.929.780,28
4.	Puskesmas Tanjung	149.425.008,92
5.	Puskesmas Bunguran Tengah	96.845.562,84
6.	Puskesmas Bunguran Selatan	174.438.807,93
7.	Puskesmas Kelarik	205.453.913,88
8.	Puskesmas Sedanau	153.585.122,37
9.	Puskesmas Pulau Tiga	95.763.172,20
10.	Puskesmas Pulau Laut	92.257.767,51
11.	Puskesmas Midai	201.685.505,57
12.	Puskesmas Serasan	150.472.284,32
13.	Puskesmas Serasan Timur	241.251.263,54
14.	Puskesmas Subi	282.052.042,71
15.	Puskesmas Batubi Jaya	114.951.109,00
16.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	115.659.648,79
17.	Puskesmas Suak Midai	44.187.733,56
18.	UPT Instalasi Farmasi	8.855.534.201,42
Jumlah		15.354.198.308,28

22. Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

Saldo Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya per 31 Desember 2024 Sebesar Rp356.625.735,83 berada pada:

Tabel 7.5.130 Daftar Saldo Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90.000,00
2.	Dinas Kesehatan	1.142.829,63
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00
4.	Puskesmas Ranai	5.055.878,00
5.	Puskesmas Tanjung	8.338.523,00
6.	Puskesmas Bunguran Tengah	6.791.780,00

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Jumlah
7.	Puskesmas Bunguran Selatan	4.827.985,00
8.	Puskesmas Kelarik	3.886.956,00
9.	Puskesmas Sedanau	3.053.446,20
10.	Puskesmas Pulau Tiga	3.546.393,00
11.	Puskesmas Pulau Laut	4.482.237,00
12.	Puskesmas Midai	708.704,00
13.	Puskesmas Serasan	4.788.110,00
14.	Puskesmas Serasan Timur	5.300.079,00
15.	Puskesmas Subi	1.012.859,00
16.	Puskesmas Batubi Jaya	6.380.532,00
17.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	3.449.842,00
18.	Puskesmas Suak Midai	198.015,00
19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	208.577.567,00
20.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	84.994.000,00
Jumlah		356.625.735,83

23. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.412.583.840,81 berada pada:

Tabel 7.5.131 Daftar Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.928.572.700,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	971.661.710,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.603.000,00
4.	Dinas Sosial	275.389.525,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.011.456,00
6.	Dinas Pemuda dan Olahraga	129.845.449,81
7.	Dinas Pariwisata	19.500.000,00
Jumlah		3.412.583.840,81

24. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.569.009.930,00 berada pada:

Tabel 7.5.132 Daftar Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.655.810.157,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	556.168.273,00
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga	357.031.500,00
Jumlah		2.569.009.930,00

25. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

Saldo Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.442.019.400,00 berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Persediaan

ini digunakan dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana alam. Saldo akhir persediaan ini belum termasuk dengan persediaan pakaian bekas yang bersumber dari sumbangan masyarakat secara perseorangan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung.

26. Natura dan Pakan-Natura

Saldo Natura dan Pakan-Natura per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.815.250,00 berada pada:

Tabel 7.5.133 Daftar Natura dan Pakan-Natura

(dalam rupiah)

No.	SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	27.600.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	25.360.250,00
3.	Puskesmas Ranai	3.450.000,00
4.	Puskesmas Bunguran Selatan	3.450.000,00
5.	Puskesmas Sedanau	420.000,00
6.	Puskesmas Pulau Tiga	345.000,00
7.	Puskesmas Midai	8.520.000,00
8.	Puskesmas Subi	4.140.000,00
9.	Puskesmas Batubi Jaya	21.390.000,00
10.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	4.140.000,00
Jumlah		98.815.250,00

Persediaan ini merupakan persediaan bahan pokok makanan untuk pasien yang ada di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan.

27. Natura dan Pakan-Pakan

Saldo Natura dan Pakan-Pakan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.330.000,00 berada pada Dinas Perikanan. Saldo Persediaan ini merupakan persediaan pakan ikan yang belum dibagikan ke kelompok pembudidaya.

Persediaan obat diatas tidak termasuk persediaan dalam kondisi rusak dan kadaluarsa/usang. Untuk persediaan dalam keadaan rusak dan kadaluarsa/usang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.134 Daftar Persediaan Rusak, Kadaluarsa/Usang

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Persediaan Kadaluarsa/Rusak						Jumlah
		Bahan Kimia	Obat-Obatan/Alat Kesehatan Habis Pakai	Obat-obatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga	Natura	
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	156.280.000,00	39.470.000,00	0,00	195.750.000,00
2.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	160.375.000,00	0,00	0,00	160.375.000,00
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	7.379.350,00	0,00	0,00	7.379.350,00
4.	Instalasi Farmasi	0,00	16.883.854.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883.854.655,91
5.	Rumah Sakit Umum Daerah	176.000.000,00	280.653.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.653.596,00
6.	Puskesmas Ranai	0,00	237.217.814,60	135.848,00	0,00	0,00	0,00	237.353.662,60
7.	Puskesmas Tanjung	0,00	70.783.966,57	43.000,00	0,00	0,00	216.000,00	71.042.966,57
8.	Puskesmas Bunguran Tengah	0,00	14.360.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360.417,57
9.	Puskesmas Bunguran Selatan	0,00	37.217.603,80	85.872,00	0,00	0,00	0,00	37.303.475,80
10.	Puskesmas Kelarik	0,00	27.265.192,56	0,00	0,00	0,00	2.128.314,00	29.393.506,56
11.	Puskesmas Sedanau	0,00	59.636.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59.636.196,08
12.	Puskesmas Pulau Tiga	0,00	21.728.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.728.353,35
13.	Puskesmas Pulau Laut	0,00	67.880.347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67.880.347,15
14.	Puskesmas Midai	0,00	68.465.019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68.465.019,99

No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Persediaan Kadaluarsa/Rusak						Jumlah
		Bahan Kimia	Obat-Obatan/Alat Kesehatan Habis Pakai	Obat-obatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga	Natura	
15.	Puskesmas Serasan	0,00	17.464.180,66	35.736,00	0,00	0,00	495.726,00	17.995.642,66
16.	Puskesmas Serasan Timur	0,00	27.166.983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166.983,26
17.	Puskesmas Subi	0,00	120.547.485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	120.547.485,94
18.	Puskesmas Batubi Jaya	0,00	15.217.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.217.332,39
19.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	0,00	43.427.377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43.427.377,29
20.	Puskesmas Suak Midai	0,00	3.665.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.255,60
TOTAL		176.000.000,00	17.996.551.778,72	300.456,00	324.034.350,00	39.470.000,00	2.840.040,00	18.539.196.624,72

Total Barang Persediaan kadaluarsa/rusak sejumlah Rp18.539.196.624,72 merupakan obat yang kadaluarsa yang masih menunggu proses pemusnahan.

7.5.3.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam waktu tertentu.

7.5.3.2.1 Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	54.976.756.849,00	57.477.323.037,00

Investasi permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.976.756.849,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.135 Rincian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Investasi Permanen	Saldo per 31 Desember 2023	Penambahan Tahun 2024		Pengurangan Tahun 2024		Saldo per 31 Desember 2024
			Penyertaan Modal 2024	Koreksi Pencatatan	Kerugian Entitas	Koreksi Pencatatan	
1	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Sri Serindit Daerah Kab. Natuna	4.137.359.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137.359.588,00
2	Penyertaan Modal Kepada PT Bank Riau	36.018.100.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	36.038.100.000,00
3	Penyertaan Modal Kepada PT Riau Air Laines	9.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000.000,00
4	Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Nusa	7.821.863.449,00	0,00	0,00	1.823.373.466,00	697.192.722,00	5.301.297.261,00
Jumlah		57.477.323.037,00	0,00	20.000.000,00	1.823.373.466,00	697.192.722,00	54.976.756.849,00

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Natuna pada setiap investasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.136 Metode Penilaian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024	Metode Penilaian
1	PERUMDA SRI SERINDIT	4.137.359.588,00	Metode Ekuitas
2	PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	36.038.100.000,00	Metode Biaya
3	PT. RIAU AIR LINES	9.500.000.000,00	Metode Biaya
4	PERUMDA TIRTA NUSA	5.301.297.261,00	Metode Ekuitas
Jumlah		54.976.756.849,00	

(1) Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit

Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. Pada tahun 2023 Perusahaan Daerah berubah bentuk dan nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna. Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada Perusahaan umum Daerah Sri Serindit adalah 100% dengan penyeteroran modal sebesar dari awal berdiri Rp39.687.472.016,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.137 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Sri Serindit

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2002	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2003	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	4.187.472.016,00
APBD 2006	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	5.000.000.000,00
APBD 2007	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	25.500.000.000,00
APBD 2013	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	3.000.000.000,00
Total			39.687.472.016,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas. Saat Laporan keuangan ini terbit, Pemerintah Kabupaten Natuna belum menerima Laporan Keuangan tahun 2024 Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit. Ini disebabkan karena Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit tahun 2024 vakum dan tidak beroperasi. Nilai yang disajikan sebagai investasi jangka panjang permanen Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna tahun 2023 (*unaudited*). Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.137.359.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.138 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna (Metode Ekuitas) Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2024	
Modal Disetor	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Modal Donasi	4.117.862.437,00	4.117.862.437,00	0,00
Modal Penyertaan	0,00	0,00	0,00
Laba (Rugi) Ditahan	(1.599.976.044,00)	(1.599.976.044,00)	0,00
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(380.526.805,00)	(380.526.805,00)	0,00
Jumlah Ekuitas	4.137.359.588,00	4.137.359.588,00	0,00

(2) PT Bank Riau Kepri Syariah

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dimuatkan dalam Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 22 Mei 2024 yang diterbitkan oleh

notaris Pupung Mulyantini, SH. MH, Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah sebesar Rp36.038.100.000,00. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Investasi Bank Riau Kepri Syariah dicatat sebesar Rp36.018.100.000,00. Terdapat perbedaan pencatatan antara Pemerintah Daerah dengan Hasil Rapat RUPS sebesar Rp20.000.000,00. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan penyertaan modal berupa aset tanah yang sebelumnya dicatat sebesar Rp2.080.000.000,00 Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 menjadi Rp2.100.000.000,00. Rincian penyertaan modal Bank Riau Kepri Syariah sebagai berikut:

Tabel 7.5.139 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah (Rp)
APBD 2003	Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	6.000.000.000,00
APBD 2006	Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	9.000.000.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	3.154.600.000,00
APBD 2017	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
2017	Dividen Saham	PT Bank Riau Kepri Syariah	783.500.000,00
APBD 2018	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
APBD 2019	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri Syariah	5.000.000.000,00
2022	Penyertaan Modal BMD	PT Bank Riau Kepri Syariah	2.100.000.000,00
Total			36.038.100.000,00

Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan dibawah 20%. Nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah Pada Bank Riau Kepri Syariah Sejumlah Rp36.038.100.000,00 hanya sebesar 2,98% dari total nilai penyertaan modal seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sejumlah Rp1.209.260.700.000,00.

(3) PT. Riau Airlines

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT. Riau Airlines adalah sebesar 5,19% dengan nilai penyertaan sebesar Rp9.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.140 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Riau Airlines

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Saham	PT Riau Air Lines	1.500.000.000,00
APBD 2007	Saham	PT Riau Air Lines	8.000.000.000,00
Total			9.500.000.000,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat perubahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT. Riau Airlines. Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan hanya sebesar 5,19% berdasarkan metode tersebut nilai penyertaan diakui sebesar Rp9.500.000.000,00.

(4) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa (PDAM Tirta Nusa) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pendirian PDAM. Pada tahun 2021 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh

Pemerintah Kabupaten Natuna (100%) dengan nilai penyetoran modal sebesar Rp24.444.169.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.141 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Nusa

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2004	Modal Awal	Perumda Tirta Nusa	3.326.337.005,00
APBD 2009	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	617.842.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	Perumda Tirta Nusa	15.000.000.000,00
APBD 2013	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	1.500.000.000,00
APBD 2014	Modal Donasi	Perumda Tirta Nusa	499.990.000,00
APBD 2015	Penyertaan Modal	Perumda Tirta Nusa	3.500.000.000,00
Total			24.444.169.005,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan pemerintah adalah 100%. Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Nusa tahun 2024 penurunan Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp2.520.566.188,00, yang terdiri dari kerugian tahun berjalan sebesar Rp1.823.373.466,00, dan kesalahan pencatatan nilai investasi tahun sebelumnya sebesar Rp697.192.722,00. Kesalahan pencatatan terjadi karena pada saat perhitungan nilai investasi pada tahun 2023 masih menggunakan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa yang belum diaudit oleh KAP. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp5.301.297.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.142 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Nusa (Metode Ekuitas)

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2024	
Modal Disetor	18.326.337.005,00	18.326.337.005,00	0,00
Modal Donasi	6.117.832.000,00	6.117.832.000,00	0,00
Modal Penyertaan	0,00	0,00	0,00
Laba (Rugi) Ditahan	(15.569.483.570,00)	(17.319.498.278,00)	1.750.014.708,00
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(1.052.821.986,00)	(1.823.373.466,00)	770.551.480,00
Jumlah Ekuitas	7.821.863.449,00	5.301.297.261,00	2.520.566.188,00

7.5.3.3 Aset Tetap

Aset tetap yang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah aset-aset yang mempunyai nilai batasan kapitalisasi yang diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yaitu untuk peralatan dan mesin mempunyai nilai minimal Rp1.000.000,00 dan pada gedung dan bangunan Rp10.000.000,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap	2.750.500.050.293,58	2.649.076.492.279,17

Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4.635.211.390.587,72
Penambahan tahun 2024	345.336.622.782,76
Jumlah	4.980.548.013.370,48
Pengurangan tahun 2024	109.933.732.328,31
Aset Tetap per 31 Desember 2024	4.870.614.281.042,17
Penyusutan s/d tahun 2024	(2.120.114.230.748,59)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.750.500.050.293,58

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.143 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

Jenis Aset	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Tanah	372.813.209.086,88	5.086.210.187,86	7.341.521.031,86	370.557.898.242,88
Peralatan dan Mesin	539.283.764.117,26	76.518.543.071,11	43.326.787.425,97	572.475.519.762,40
Gedung dan Bangunan	1.456.015.103.387,75	84.406.203.149,30	18.554.893.934,05	1.521.866.412.603,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.123.237.712.072,71	166.327.601.789,27	18.009.649.677,95	2.271.555.664.184,03
Aset Tetap Lainnya	70.549.121.461,12	1.951.880.729,00	254.611.500,00	72.246.390.690,12
Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.312.480.462,00	10.272.183.856,22	21.672.268.758,48	61.912.395.559,74
Nilai Aset	4.635.211.390.587,72	345.336.622.782,76	109.933.732.328,31	4.870.614.281.042,17
Akumulasi Penyusutan	(1.986.134.898.308,55)	(169.862.357.962,60)	(35.883.025.522,56)	(2.120.114.230.748,59)
Nilai Buku	2.649.076.492.279,17	175.474.264.820,16	74.050.706.805,75	2.750.500.050.293,58

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan klasifikasi data aset pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah. Penyajian atas penyesuaian data pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah dilakukan koreksi pencatatan antar rincian objek aset tetap. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.3.1 Tanah

Perhitungan nilai Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024 adalah sebesar Rp370.557.898.242,88 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	372.813.209.086,88
Penambahan TA. 2024	Rp	5.086.210.187,86
Jumlah	Rp	377.899.419.274,74
Pengurangan TA. 2024	Rp	7.341.521.031,86
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2024	Rp	370.557.898.242,88

Aset Tetap berupa Tanah senilai Rp370.557.898.242,88 tersebut terdiri dari 647 bidang tanah diantaranya 615 bidang tanah yang sudah bersertifikat, 32 bidang tanah yang belum bersertifikat dan masih dalam proses sertifikasi sebanyak 19 bidang tanah.

Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024 senilai Rp370.557.898.242,88 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.144 Rincian Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

Rincian	Saldo Akhir 2024
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	149.597.431.763,30
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	14.199.733.507,58
Tanah untuk Bangunan Industri	109.723.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	117.845.923.370,60
Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	1.878.060.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00
Tanah Persil Lainnya	0,00
Tanah Basah	964.652.600,00
Tanah Kering	6.544.051.000,00
Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00
Tanah Hutan	9.167.161.000,00
Tanah Non Persil Lainnya	0,00
Tanah Lapangan Olahraga	12.124.327.060,00
Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	14.383.246.000,00
Tanah untuk Jalan	12.216.151.500,00
Tanah untuk Bangunan Air	5.870.884.746,00
Tanah untuk Bangunan Jaringan	884.801.800,00
Tanah untuk Makam	2.886.252.469,01
Lapangan Lainnya	9.545.355.926,39
Jumlah	370.557.898.242,88

Aset Tetap berupa Tanah mengalami penambahan sebesar Rp5.086.210.187,86 dan pengurangan sebesar Rp7.341.521.031,86 dari tahun 2023 sebesar Rp372.813.209.086,88 menjadi Rp370.557.898.242,88. Penurunan nilai Aset Tanah tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 7.5.145 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tanah

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO AKHIR 2023	PENAMBAHAN								PENGURANGAN							SALDO AKHIR
			REALISASI TAHUN BERJALAN	UTANG TAHUN 2024	KOREKSI BELUM CATAT	REKLAS DARI					KOREKSI SALDO AWAL	REKLAS KE						
						BEBAN JASA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN & IRIGASI	KDP	REKLASIFIKASI SESAMA TANAH		BEBAN JASA	BEBAN HIBAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	ASET LAIN-LAIN	ATB	REKLASIFIKASI SESAMA TANAH	
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	152.305.248.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99.933.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.597.431.763,30
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	14.199.733.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199.733.507,58
3	Tanah untuk Bangunan Industri	109.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.723.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	119.069.093.283,60	0,00	231.000.000,00	135.525.000,00	149.339.400,00	1.281.780.887,00	0,00	0,00	0,00	17.280.000,00	0,00	0,00	0,00	176.935.200,00	0,00	2.826.600.000,00	117.845.923.370,60
5	Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	1.878.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.060.000,00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.690.000,00
7	Tanah Persil Lainnya	00,00	0,00	116.850.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.850.100,00	0,00
8	Tanah Basah	964.652.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.652.600,00
9	Tanah Kering	6.685.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.875.000,00	6.544.051.000,00
10	Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299.146.500,00
11	Tanah Hutan	9.167.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167.161.000,00
12	Tanah Non Persil Lainnya	00,00	5.015.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tanah Lapangan Olahraga	7.614.164.660,00	951.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.944.400,00	3.458.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124.327.060,00
14	Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.306.000,00
15	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	14.383.246.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383.246.000,00
16	Tanah untuk Jalan	12.099.301.400,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.850.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216.151.500,00
17	Tanah untuk Bangunan Air	5.870.884.746,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870.884.746,00
18	Tanah untuk Bangunan Jaringan	884.801.800,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.801.800,00
19	Tanah untuk Makam	2.685.914.200,01	0,0	149.816.700,00	0,00	0,00	0,00	191.338.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.816.700,00	0,00	2.886.252.469,01
20	Lapangan Lainnya	12.555.155.926,39	493.021.860,18	1.180.701.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000.000,00	1.673.723.692,86	0,00	0,00	489.800.000,00	9.545.355.926,39
JUMLAH		372.813.209.086,88	1.449.980.299,18	1.678.368.632,68	135.525.000,00	149.339.400,00	1.381.714.187,00	191.338.269,00	99.944.400,00	3.575.125.100,00	17.280.000,00	5.015.439,00	5.327.750.000,00	1.673.723.692,86	176.935.200,00	140.816.700,00	3.575.125.100,00	370.557.898.242,88

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp5.086.210.187,86 pada tabel di atas terdiri dari:

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024	Rp 1.449.980.299,18
Utang Tahun 2024	Rp 1.678.368.632,68
Koreksi Ekuitas Aset Tanah Tahun Sebelumnya yang belum tercatat	Rp 135.525.000,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa	Rp 149.339.400,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp 1.381.714.187,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 191.338.269,00
Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 99.944.400,00
Jumlah	Rp 5.086.210.187,86

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.449.980.299,18 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.015.439,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.444.964.860,18. Pemerintah Kabupaten Natuna juga mencatat utang tahun 2024 sebesar Rp1.678.368.632,68 yang terdiri dari utang belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp 231.000.000,00, utang belanja modal tanah persil lainnya sebesar Rp116.850.100,00, utang belanja modal tanah untuk makam sebesar Rp149.816.700,00 dan utang belanja modal lapangan lainnya sebesar Rp1.180.701.832,68. pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna juga mempunyai koreksi atas Tanah tahun sebelumnya yang belum tercatat sebesar Rp135.525.000,00. kemudian penambahan reklasifikasi dari Beban Jasa sebesar Rp149.339.400 yaitu Beban Jasa Konsultansi Lainnya berupa Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan pada pengadaan tanah pengembangan dan pembangunan SDN 002 Sededap Kec. Pulau Tiga sebesar Rp49.805.700,00, SDN 004 Pian Tengah sebesar Rp49.772.400,00 dan SDN 004 Ranai sebesar Rp49.761.300,00. Aset Tetap Tanah juga mengalami penambahan dari reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.381.714.187,00, penambahan dari Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp191.338.269,00 serta penambahan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp99.944.400,00 berupa dokumen jasa penilai atas penilaian tanah yang dilakukan oleh KJPP.

Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar Rp7.341.521.031,86 terdiri dari:

Koreksi Ekuitas Saldo Awal	Rp 17.280.000,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	Rp 5.015.439,00
Reklasifikasi ke Beban Hibah	Rp 5.327.750.000,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp 1.673.723.692,86
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp 176.935.200,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp 140.816.700,00
Jumlah	Rp 7.341.521.031,86

Pengurangan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna terdiri dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp17.280.000,00 atas koreksi tanah Pustu Desa Sededap Kecamatan Rp240.000,00 dan Rp17.040.000,00 koreksi pencatatan atas tanah posyandu Bunda Pertiwi di Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur. Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp5.015.439,00 merupakan biaya PNBP atas pertimbangan teknis pertanahan sebagai Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

persyaratan permohonan dokumen lingkungan tanjung pasar sekitar landasan bandara Raden Sadjad yang asetnya bukan milik Pemerintah Daerah sehingga tidak bisa diatribusikan secara langsung ke aset tetapnya. Beban Hibah merupakan hibah Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Daerah sebesar Rp5.327.750.000,00 yang terdiri dari Hibah Tanah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.807.750.000,00 yang terdiri dari Hibah BMKG Rp1.335.875.000,00, Hibah Kementerian agama Rp1.097.625.000,00, dan PGRI Rp374.250.000,00, serta Hibah Tanah kepada Badan dan Lembaga sebesar Rp2.520.000.000,00 ke BRIN. Kemudian terdapat reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.673.723.692,86 yang merupakan kesalahan penganggaran fasilitas olah raga berupa Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen yang dianggarkan ke belanja modal tanah. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp176.935.200,00 merupakan hibah aset tetap ke KORAMIL dan Polsek Kecamatan Pulau laut yang belum ada SK penghapusan pada Dinas Kesehatan. Reklasifikasi ke aset tidak berwujud sebesar Rp140.816.700,00 merupakan reklasifikasi aset tetap tanah berupa dokumen penilaian (KJPP) ke Aset Tidak Berwujud-Kajian. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tanah merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Tanah sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Berikut adalah Aset Tetap Tanah yang berada pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Natuna sampai dengan 31 Desember 2024:

Tabel 7.5.146 Rincian Aset Tanah per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Debet
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.875.845.626,00
2	Dinas Kesehatan	6.258.633.725,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.646.745.646,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	173.556.550.337,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.466.795.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	208.050.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.540.070.385,13
8	Dinas Lingkungan Hidup	8.514.159.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.357.491.850,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	69.993.800,00
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.547.522.400,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.902.988.700,00
13	Dinas Perikanan	480.971.000,00
14	Dinas Pariwisata	10.340.968.300,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5.005.908.564,00
16	Sekretariat Daerah	37.642.016.264,13
17	Sekretariat DPRD	6.576.147.000,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.134.711.534,00
19	Kecamatan Bunguran Timur	3.695.245.000,00
20	Kecamatan Bunguran Barat	372.463.000,00
21	Kecamatan Bunguran Utara	341.400.000,00
22	Kecamatan Pulau Laut	168.000.000,00
23	Kecamatan Midai	131.400.000,00
24	Kecamatan Serasan	110.220.000,00
25	Kecamatan Subi	280.200.000,00
26	Kecamatan Pulau Tiga	558.207.000,00
27	Kecamatan Bunguran Tengah	131.670.807,62
28	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.281.348.304,00
29	Kecamatan Serasan Timur	226.650.000,00
30	Kecamatan Bunguran Batubi	135.525.000,00
Jumlah		370.557.898.242,88

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

7.5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp572.475.519.762,40 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	539.283.764.117,26
Penambahan Tahun 2024	Rp	76.518.543.071,11
Jumlah	Rp	615.802.307.188,37
Pengurangan Tahun 2024	Rp	43.326.787.425,97
Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	Rp	572.475.519.762,40

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

[illegible]

No.	Uraian	Saldo Awal	PENAMBAHAN														PENGURANGAN										PIUTANG LAINNYA-TGR	Antar Sub RO	SALDO AKHIR
			Realisasi Belanja	Utang 2024	Koreksi pencatatan aset tetap tahun sebelumnya	Pendapatan Hibah 2024	Reklasifikasi dari							Penghapusan	Reklasifikasi ke														
							Beban Jasa	Beban Pemeliharaan	Persediaan	Gedung dan Bangunan	Jalan,Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Lain-Lain		Antar Sub RO	Beban Jasa	Beban pemeliharaan	Persediaan	Ekstrakompabel	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset tetap lainnya	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Aset lain-lain Ekstrakompabel					
69	Kursi Kerja Pejabat	6.105.847.326,65	363.230.000,00	113.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.470.000,00	48.405.972,65	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.027.600,00	373.601.893,00	0,00	60.241.000,00	6.251.459.861,00			
70	Kursi Rapat Pejabat	398.181.475,00	239.640.000,00	256.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530.000,00	440.131.475,00			
71	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	82.085.000,00	15.300.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	89.585.000,00			
72	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	573.842.560,00	0,00	309.518.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.718.500,00	633.642.560,00			
73	Lemari dan Arasp Pejabat	3.681.548.065,00	107.115.000,00	295.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.621.870,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.895.000,00	3.232.286.020,00			
74	Peralatan Studio Audio	1.718.607.325,00	66.150.000,00	249.195.000,00	0,00	0,00	0,00	7.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.148.000,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	40.590.017,00	19.360.000,00	0,00	122.115.000,00	2.032.369.309,00			
75	Peralatan Studio Video dan Film	4.370.945.622,00	2.531.955.290,00	1.178.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.972.260,00	17.998.200,00	14.960.000,00	985.290,00	12.380.000,00	0,00	0,00	0,00	47.101.600,00	311.521.372,00	0,00	428.670.000,00	7.474.966.710,00			
76	Peralatan Studio Gambar	30.288.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.288.550,00	0,00			
77	Peralatan Cetak	151.061.000,00	111.840.000,00	0,00	0,00	0,00	16.134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.034.800,00	151.061.000,00			
78	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4.821.031.500,00	0,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.755.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.595.000,00	0,00	4.918.736.500,00	0,00			
79	Alat Studio Lainnya	8.000.000,00	54.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.850.000,00	0,00			
80	Alat Komunikasi Telephone	865.098.994,00	231.636.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.349.020,00	16.148.000,00	0,00	0,00	6.516.200,00	0,00	0,00	0,00	18.920.000,00	6.710.000,00	0,00	1.202.789.814,00	0,00			
81	Alat Komunikasi Radio SSB	206.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.045.000,00	0,00			
82	Alat Komunikasi Radio VHF	199.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.145.000,00	0,00			
83	Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	119.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800.000,00	0,00			
84	Alat Komunikasi Sosial	188.522.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	220.502.636,00	0,00			
85	Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00			
86	Alat Komunikasi Khusus	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00			
87	Alat Komunikasi Lainnya	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00			
88	Peralatan Pemancar VHF-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00			
89	Peralatan Pemancar SHF	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00			
90	Peralatan Antena UHF	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00			
91	Peralatan Antena SHF/Parabola	3.500.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.000.750,00			
92	Switcher Antena	5.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.000,00	0,00			
93	Program Input Equipment	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00			
94	Peralatan Antena Penerima VHF	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00			
95	Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	1.739.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.380,00	0,00			
96	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00			
97	Sumber Tenaga	5.006.863.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926.283.720,00	0,00			
98	Peralatan Pemancar Lainnya	15.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774.000,00	0,00			
99	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	43.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.136.000,00	0,00		
100	Alat Kedokteran Umum	85.985.847.817,50	6.857.026.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.585.823,00	0,00	0,00	2.093.040,00	70.093.612,00	126.136.000,00	0,00	0,00	37.607.540,46	8.092.290.443,86	0,00	2.397.523.515,00	83.680.875.595,18			
101	Alat Kedokteran Gigi	2.181.626.373,04	2.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.075.035,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	2.447.701.408,04			
102	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	391.977.149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.977.149,97	0,00			
103	Alat Kedokteran Bedah	5.497.526.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.186.960,00	0,00	0,00	0,0,												

No.	Uraian	Saldo Awal	Realisasi Belanja	Utang 2024	Koreksi pencatatan aset tetap tahun sebelumnya	Pendapatan Hibah 2024	PENAMBAHAN												PENGURANGAN												PIUTANG LAINNYA-TOR	Antar Sub RO	SALDO AKHIR
							Reklasifikasi dari						Penghapusan	Reklasifikasi ke																			
							Beban Jasa	Beban Pemeliharaan	Persediaan	Gedung dan Bangunan	Jalan,jarijan dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya		Aset Lain-Lain	Antar Sub RO	Beban Jasa	Beban pemeliharaan	Persediaan	Ekstrakomptabel	Jalan, Jaringan dan irigasi	Aset tetap lainnya	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Aset lain-lain Ekstrakomptabel									
137	Alat Laboratorium Imunologi	812.953.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.053.185,00					
138	Alat Laboratorium Hematologi	181.419.091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.419.091,79				
139	Alat Laboratorium Film	11.815.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815.440,00				
140	Alat Laboratorium Makanan	157.270.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.270.824,00				
141	Alat Laboratorium Farmasi	27.662.532,00	1.800.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.662.532,00				
142	Alat Laboratorium Fisika	479.385.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.645,00	0,00	0,00	477.967.870,00				
143	Alat Laboratorium Pembuatan Polis	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.645,00	0,00	0,00	4.300.000,00				
144	Alat Laboratorium Metrologi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00				
145	Alat Laboraturon Proses Pengolahan Pangan	2.663.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.700,00				
146	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tegal	57.444.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.444.100,00				
147	Alat Laboratorum Proses Teknologi Kult. Karet dan Plastik	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.050.000,00			
148	Alat Laboratorium Pertanian	213.594.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	327.444.149,21				
149	Alat Laboraturum Elektronika dan Daya	15.088.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088.150,00				
150	Alat Laboratorium Energi Surya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
151	Alat Laboratorium Oseanografi	25.450.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450.980,00				
152	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.778.480,00	0,00	0,00	18.028.480,00			
153	Alat Laboratorium Biologi Perairan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00				
154	Alat Laboratorium Biologi	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00				
155	Alat Laboratorium Geofisika	49.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00				
156	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	62.700.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700.430,00				
157	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	1.380.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.681,00				
158	Laboratorium Hematologi dan Urinalisa	2.928.463.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.463.699,00				
159	Alat Laboratorium Lain	610.769.112,00	179.790.000,00	199.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	980.209.112,00			
160	General Laboratory Tool	128.535.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.885.300,00			
161	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi Bahasa Indonesia	102.270.000,00	3.426.840.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.217.280,00	105.270.000,00				
162	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi Matematika	4.454.838.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458.338.037,00			
163	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi IPA Dasar	705.871.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.371.280,00			
164	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi IPA Lanjutan	134.089.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.239.000,00	0,00	0,00	0,00	6.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.142.274,00			
165	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi IPA Menengah	337.715.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746.000,00	337.775.864,00			
166	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi IPA Atas	31.897.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.395.490,00			
167	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi IPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00			
168	Alat PeragaPratik Sekolah Bidang Studi Agama	156.057.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.057.820,00			
169	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi Keterampilan	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00				
170	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi Kesehatan	698.538.949,00	0,00	89.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.575.500,00	0,00	0,00	0,00	65.062.500,00	0,00	89.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.051.949,00			
171	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi Olahraga	1.300.000,00	0,00	89.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800.000,00	1.300.000,00				
172	Alat Peraga Pratik Sekolah Bidang Studi PKN	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00			
173	Alat Peraga PAUD/TK	24.923.800,00	6.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675.000,00	24.923.800,00				
174	Alat Peraga Pratik Sekolah Lainnya	2.375.898.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.378.398.196,00			
175	Recorder Display	129.081.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

No.	Uraian	Saldo Awal	PENAMBAHAN										PENGURANGAN										PUTANG LAINNYA-TA-TOR	Antar Sub RO	SALDO AKHIR		
			Realisasi Belanja	Utang 2024	Koreksi pencatatan aset tetap tahun sebelumnya	Pendapatan Hibah 2024	Reklasifikasi dari							Penghapusan	Reklasifikasi ke												
							Beban Jasa	Beban Pemeliharaan	Persediaan	Gedung dan Bangunan	Jalan,irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Lain-Lain		Antar Sub RO	Beban Jasa	Beban pemeliharaan	Persediaan	Ekstrakomtabel	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset tetap lainnya	Aset Tidak Berwujud				Aset Lain-lain	Aset lain-lain Ekstrakomtabel
201	Elektronik/Electric	0,00	71.806.000,00	60.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.936.000,00	0,00	
202	Sumur Pemboran	9.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469.800,00	
203	Sumur Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
204	Elektrik	0,00	96.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.940.000,00	
205	Statis	0,00	11.500.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800.000,00	
206	Batu Penanaman	23.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.850.000,00	
207	Sesepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.688.000,00	
208	Alat Pelindung Lainnya	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	
209	Alat Pendong	96.112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.112.500,00	
210	Alat Pendukung Pencarian	225.200.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200.000,00	
211	Alat Peraga Pelatihan	129.039.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.039.550,00	
212	Alat Peraga Percontohan	113.798.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.798.260,00	
213	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	233.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.882.000,00	
214	Heat Generating Equipment	1.949.125.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149.125.000,00	
215	Rambu Tidak Bersuar	6.873.968.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.408.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842.377.293,88	
216	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	150.534.750,00	455.651.832,52	512.757.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.408.882,52	
217	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	1.617.743.054,00	29.930.000,00	192.066.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.809.798,00	
218	Peralatan Olahraga Atletik	103.208.320,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.208.320,00	
219	Peralatan Permainan	828.078.000,00	33.000.000,00	29.920.000,00	0,00	0,00	102.692.500,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	99.861.921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.972.271,48	0,00	57.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.960.150,00	
220	Peralatan Senam	46.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.675.340,00	
221	Peralatan Olahraga Lainnya	170.529.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017.648,00	0,00	0,00	0,00	1.017.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.729.540,00	
JUMLAH		539.283.764.117,26	54.296.918.496,52	20.100.928.672,59	660.616.000,00	103.000.000,00	425.706.100,00	8.225.100,00	228.522.000,00	171.017.700,00	305.700.000,00	200.749.000,00	17.160.000,00	35.730.945.390,11	5.184.265.936,65	16.153.921,00	39.826.053,00	281.103.330,00	4.649.240.058,00	2.121.336.778,00	187.892.600,00	120.000.000,00	6.676.432.380,46	24.041.209.973,86	9.326.395,00	35.730.945.390,11	572.475.519.762,40

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 terdiri dari:

Belanja Modal Tahun 2024	Rp	54.296.918.498,52
Utang Tahun 2024	Rp	20.100.928.672,59
Koreksi pencatatan Aset Tetap Tahun sebelumnya – Tidak Mempengaruhi Ekuitas	Rp	660.616.000,00
Pendapatan Hibah Tahun 2024	Rp	103.000.000,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa	Rp	425.706.100,00
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	8.225.100,00
Reklasifikasi dari Persediaan	Rp	228.522.000,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	171.017.700,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	305.700.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	190.749.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	Rp	17.160.000,00
Jumlah	Rp	76.518.543.071,11

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin selama tahun 2024 selain dari realisasi belanja juga terdapat penambahan dari utang belanja modal tahun 2024 sebesar Rp20.100.928.672,59 dan koreksi pencatatan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang belum tercatat tahun sebelumnya sebesar Rp660.616.000,00 yang berada di Dinas Kesehatan berupa 2 unit ambulance pengadaan tahun 2013 pada Puskesmas Pulau Tiga dan Puskesmas Batubi Jaya yang tidak mempunyai nilai buku sehingga tidak mempengaruhi ekuitas. Selain itu terdapat pendapatan hibah tahun anggaran 2024 sebesar Rp103.000.000,00 yang terdiri dari hibah yang berasal dari *corporate social responsibility* (CSR) PT. Palapa Ring Barat sebesar Rp30.000.000,00 dan hibah dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp73.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Reklasifikasi dari Beban Jasa sebesar Rp425.706.100,00 berasal dari Dana BOS tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Reklasifikasi dari beban pemeliharaan sebesar Rp8.225.100,00 pada Sekretariat DPRD, reklasifikasi dari Persediaan sebesar Rp228.522.000,00, reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp171.017.700,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, kemudian reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp305.700.000,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp200.749.000,00 dan reklasifikasi dari aset lain-lain yang rusak berat setelah dilakukan perbaikan dan dapat digunakan dalam proses operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp17.160.000,00 pada Dinas Kesehatan. Reklasifikasi antar sub rincian objek Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 terdiri dari:

Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	5.184.265.936,65
Reklasifikasi ke Beban Jasa	Rp	16.153.921,00
Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	Rp	39.826.053,00
Reklasifikasi ke Persediaan	Rp	281.103.330,00
Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	Rp	4.649.240.058,00
Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	2.121.336.778,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	Rp	187.892.600,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	120.000.000,00
Reklasifikasi ke Aset lain-lain	Rp	6.676.432.380,46
Reklasifikasi ke Aset lain-lain Ekstrakomptabel	Rp	24.041.209.973,86
Reklasifikasi -TGR		9.326.395,00
Jumlah	Rp	43.326.787.425,97

Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp5.184.265.936,65 merupakan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna berupa Kendaraan Dinas Operasional dengan cara dilelang dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset lain-lain dengan status kondisi aset rusak berat serta penghapusan Barang Milik Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin hasil inventarisasi. Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp16.153.921,00 berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp1.193.921,00 yang di peruntukan penggunaan daya multi guna Listrik pada kegiatan Hari Pramuka, kemudian sebesar Rp7.460.000,00 di Dinas Kesehatan dan sebesar Rp7.500.000,00 di Sekretariat Daerah dipergunakan untuk Sewa *Zoom Meeting*. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp39.826.053,00 berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp16.500.000,00 yang digunakan untuk Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, sebesar Rp19.803.013,00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan untuk Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor, kemudian sebesar Rp1.787.000,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan digunakan untuk Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.736.040,00 untuk Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya. Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp281.103.330,00, reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp4.648.220.058,00, reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.121.336.778,00 pada Dinas Kesehatan, kemudian reklasifikasi ke aset tetap lainnya sebesar Rp187.892.600,00, reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp120.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Sebesar Rp30.717.642.354,32 di Reklasifikasi ke aset lain-lain, dan yang terdampak musibah kebakaran sebesar Rp6.285.920.725,00. Di antaranya gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.633.466.005,00 dan Dinas Lingkungan Hidup Sebesar Rp1.652.454.720,00 berupa aset Alat Angkutan Sebesar Rp946.335.000,00, Alat Pertanian Sebesar Rp105.060.000,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp3.579.115.106,00, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Sebesar Rp290.801.600,00, Komputer Sebesar Rp1.356.635.040,00, Alat Besar Sebesar Rp2.750.000,00, dan Alat Laboratorium Sebesar Rp5.223.979,00. Kemudian sisanya sebesar Rp24.431.721.629,32 berada di beberapa Dinas antara lain sebagai berikut :

1	Dinas Kesehatan	Rp	14.386.114.118,99
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	626.766.907,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	4.315.653.330,00
4	Dinas Sosial	Rp	1.675.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	68.621.200,00
6	Dinas Perikanan	Rp	501.603.775,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	148.928.000,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	555.306.587,33

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp	67.011.550,00
10	Kecamatan Midai	Rp	562.209.500,00
11	Kecamatan Subi	Rp	2.898.420.761,00
12	Kecamatan Serasan Timur	Rp	61.557.400,00
13	Kecamatan Suak Midai	Rp	225.853.500,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	12.000.000,00

Adapun aset yang di Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain dari dinas diatas adalah berupa aset sebagai berikut :

1	Alat Besar	Rp	58.350.000,00
2	Alat Angkutan	Rp	5.260.620.393,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	877.532.425,00
4	Alat Pertanaian	Rp	168.538.100,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	5.002.125.580,67
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	297.308.589,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	11.113.155.585,32
8	Alat Labaratorium	Rp	110.488.480,00
9	Komputer	Rp	1.543.602.476,33

Selanjutnya Piutang Lainnya-TGR sebesar Rp9.326.395,00 berasal dari Kecamatan Pulau Seluan. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 572.475.519.762,40 yang berada pada:

Tabel 7.5.148 Rincian Peralatan dan Mesin Per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.468.216.022,00
2	Dinas Kesehatan	249.563.226.376,48
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.211.001.731,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.020.532.300,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	3.066.128.940,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.587.635.824,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.768.063.080,00
8	Dinas Sosial	1.531.154.165,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.972.680.810,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.927.388.360,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.073.715.982,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.765.759.043,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.345.257.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.743.586.910,00
15	Dinas Perhubungan	22.856.153.443,88
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.219.060.080,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.747.964.148,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.970.326.505,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.966.561.255,74
20	Dinas Perikanan	9.551.545.962,07
21	Dinas Pariwisata	5.042.928.261,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	8.634.483.995,75
23	Sekretariat Daerah	69.024.375.924,50
24	Sekretariat DPRD	17.104.167.105,31
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.442.327.302,67
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.210.000.133,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.189.732.448,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.498.195.600,00
29	Inspektorat Daerah	2.524.051.559,00
30	Kecamatan Bunguran Timur	2.612.141.799,00
31	Kecamatan Bunguran Barat	1.466.149.206,00
32	Kecamatan Bunguran Utara	1.092.773.650,00
33	Kecamatan Pulau Laut	2.912.506.031,00
34	Kecamatan Midai	2.934.387.236,00
35	Kecamatan Serasan	1.569.498.565,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	SKPD	Jumlah
36	Kecamatan Subi	2.011.434.409,00
37	Kecamatan Pulau Tiga	1.178.360.468,00
38	Kecamatan Bunguran Tengah	603.209.548,00
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1.441.930.571,00
40	Kecamatan Bunguran Selatan	805.201.184,00
41	Kecamatan Serasan Timur	974.032.124,00
42	Kecamatan Suak Midai	371.536.000,00
43	Kecamatan Bunguran Batubi	783.090.000,00
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1.273.234.500,00
45	Kecamatan Pulau Panjang	923.963.800,00
46	Kecamatan Pulau Seluan	527.535.105,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.968.314.799,00
Jumlah		572.475.519.762,40

Jumlah Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp572.475.519.762,40 termasuk aset yang masa manfaatnya telah habis dan mempunyai nilai buku Nol (0) sebanyak 22.882 unit aset yang masih digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 yang masa manfaatnya telah habis dan mempunyai nilai buku Nol (0) berada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.149 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Nilai Buku Nol (0) Masih digunakan Dalam Operasional Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d. Tahun 2024	Nilai Buku	Jumlah Aset
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44.490.126.156,00	44.490.126.156,00	0,00	6.549
2	Dinas Kesehatan	109.798.845.788,58	109.798.845.788,58	0,00	6.418
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.274.430.017,00	2.274.430.017,00	0,00	195
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.286.195.800,00	1.286.195.800,00	0,00	42
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	1.650.973.415,00	1.650.973.415,00	0,00	98
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.892.305.814,00	3.892.305.814,00	0,00	47
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	612.165.980,00	612.165.980,00	0,00	62
8	Dinas Sosial	413.697.165,00	413.697.165,00	0,00	32
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.241.967.500,00	3.241.967.500,00	0,00	511
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.927.388.360,00	4.927.388.360,00	0,00	424
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.610.295.052,10	6.610.295.052,10	0,00	622
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.576.017.113,00	3.576.017.113,00	0,00	114
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	968.697.500,00	968.697.500,00	0,00	95
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.410.982.910,00	1.410.982.910,00	0,00	183
15	Dinas Perhubungan	16.928.860.978,21	16.928.860.978,21	0,00	465
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.275.693.980,00	3.275.693.980,00	0,00	44
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.435.384.508,00	1.435.384.508,00	0,00	243
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	737.229.720,00	737.229.720,00	0,00	62
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.062.498.464,00	3.062.498.464,00	0,00	280
20	Dinas Perikanan	8.036.369.674,07	8.036.369.674,07	0,00	577
21	Dinas Pariwisata	3.138.832.020,00	3.138.832.020,00	0,00	295
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	3.069.114.749,75	3.069.114.749,75	0,00	347
23	Sekretariat Daerah	29.254.012.069,00	29.254.012.069,00	0,00	2.317
24	Sekretariat DPRD	6.957.413.433,00	6.957.413.433,00	0,00	676
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.500.879.302,67	2.500.879.302,67	0,00	361
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.177.376.133,00	4.177.376.133,00	0,00	455
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.482.895.898,00	1.482.895.898,00	0,00	176

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

No.	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d. Tahun 2024	Nilai Buku	Jumlah Aset
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	833.815.600,00	833.815.600,00	0,00	112
29	Inspektorat Daerah	926.219.059,00	926.219.059,00	0,00	69
30	Kecamatan Bunguran Timur	1.454.365.924,00	1.454.365.924,00	0,00	190
31	Kecamatan Bunguran Barat	645.094.206,00	645.094.206,00	0,00	53
32	Kecamatan Bunguran Utara	529.937.050,00	529.937.050,00	0,00	54
33	Kecamatan Pulau Laut	454.085.531,00	454.085.531,00	0,00	92
34	Kecamatan Midai	274.396.600,00	274.396.600,00	0,00	29
35	Kecamatan Serasan	1.083.846.565,00	1.083.846.565,00	0,00	58
36	Kecamatan Subi	918.270.850,00	918.270.850,00	0,00	11
37	Kecamatan Pulau Tiga	1.003.990.468,00	1.003.990.468,00	0,00	75
38	Kecamatan Bunguran Tengah	486.649.318,00	486.649.318,00	0,00	45
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	456.116.571,00	456.116.571,00	0,00	57
40	Kecamatan Bunguran Selatan	574.908.184,00	574.908.184,00	0,00	88
41	Kecamatan Serasan Timur	559.531.124,00	559.531.124,00	0,00	34
42	Kecamatan Suak Midai	69.837.000,00	69.837.000,00	0,00	16
43	Kecamatan Bunguran Batubi	557.610.000,00	557.610.000,00	0,00	58
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	217.276.500,00	217.276.500,00	0,00	41
45	Kecamatan Pulau Panjang	13.531.000,00	13.531.000,00	0,00	1
46	Kecamatan Pulau Seluan	27.166.500,00	27.166.500,00	0,00	6
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	983.464.799,00	983.464.799,00	0,00	103
TOTAL		281.280.762.349,38	281.280.762.349,38	0,00	22.882

7.5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.521.866.412.603,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.456.015.103.387,75
Penambahan tahun 2024	Rp	84.406.203.149,30
Jumlah	Rp	1.540.421.306.537,05
Pengurangan tahun 2024	Rp	18.554.893.934,05
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.521.866.412.603,00

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.150 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SALDO AKHIR 2023	PENAMBAHAN										JUMLAH	PENGURANGAN										JUMLAH	SALDO AKHIR
			REALISASI TAHUN BERJALAN	UTANG TAHUN 2024	KOREKSI TAHUN SEBELUMNYA	PENDAPATAN HIBAH	BEBAN PEMELIHARAAN	PERSEDIAAN	TANAH	JALAN, JARINGAN DAN JARINGAN	KDP	REKLASIFIKASI SESAMA ASET		KOREKSI TAHUN SEBELUMNYA	BEBAN PEMELIHARAAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	KDP	ASET LAIN-LAIN	ASET LAINNYA-TAGIHAN JANGKA PANJANG-TGR	REKLASIFIKASI SESAMA ASET			
1	Bangunan Gedung Kantor	184.263.841.666,50	6.438.921.080,00	8.076.856.042,40	0,00	0,00	241.157.807,00	0,00	0,00	1.031.363.019,00	0,00	1.893.052.516,09	201.945.192.130,99	0,00	38.950.000,00	1.617.716.800,00	0,00	0,00	8.272.628.403,40	3.546.233.459,00	8.150.896,12	812.196.216,00	14.295.875.774,52	187.649.316.356,47	
2	Bangunan Gudang	16.685.186.864,00	0,00	223.263.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.478.740,00	17.133.929.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.907.000,00	0,00	0,00	839.907.000,00	16.294.022.001,07		
3	Bangunan Gedung Instalasi	58.586.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.586.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.586.740,08		
4	Bangunan Gedung Laboratorium	7.767.382.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.583.621,00	9.290.965.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.965.894,31		
5	Bangunan Kesehatan	123.234.780.269,27	4.929.240.192,14	2.107.606.178,00	16.046.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.575.149,00	0,00	518.654.930,19	132.091.903.568,60	0,00	0,00	228.064.087,00	0,00	0,00	377.710.000,00	0,00	335.789.156,00	941.563.243,00	131.150.340.325,60		
6	Bangunan Gedung Tempat ibadah	161.391.371.723,16	0,00	0,00	8.840.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.421.050,00	161.799.633.644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.638.757,00	75.638.757,00	161.723.994.887,16		
7	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	59.072.731.722,00	32.809.000,00	395.955.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.690.077,00	59.671.186.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.671.186.599,00		
8	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	305.464.833.485,78	9.285.265.085,00	13.160.049.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.432.089,00	328.714.878.841,68	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	615.086.713,00	0,00	0,00	3.765.301.413,00	4.590.388.126,00	324.124.490.715,68	
9	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	36.068.731.840,66	201.869.926,00	12.210.000,00	0,00	1.137.263.978,32	0,00	158.718.609,00	1.673.723.692,86	0,00	88.236.355,00	105.436.233,00	39.446.190.634,84	530.608.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.608.630,00	38.915.582.004,84		
10	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar	13.775.458.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775.458.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775.458.273,00		
11	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	2.682.454.355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.454.355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.454.355,29		
12	Bangunan Gedung Perpustakaan	9.796.339.465,00	4.325.683.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.226.946,00	14.583.249.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531.644,07	0,00	21.531.644,07	14.561.717.991,93		
13	Bangunan Gedung Museum	31.378.632.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.378.632.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.378.632.437,60		
14	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	13.423.575.975,08	3.426.067.076,00	3.970.768.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820.411.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.825.734,00	0,00	0,00	2.196.426.523,09	2.510.252.257,09	18.310.159.593,99	
15	Bangunan Industri	3.410.867.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.867.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.867.335,00		
16	Bangunan Peternakan/Perikanan	3.982.755.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.755.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.401.181,00	0,00	485.401.181,00	3.497.354.623,00		
17	Bangunan Fasilitas Umum	135.674.685.455,40	1.106.861.120,99	1.083.734.700,00	35.150.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192.537.008,00	0,00	3.699.062.031,62	145.792.030.915,01	0,00	0,00	99.933.300,00	0,00	941.315.802,80	199.755.600,00	113.450.000,00	5.438.754,66	631.308.373,19	1.991.201.830,65	143.800.829.084,36	
18	Bangunan Parkir	435.413.712,23	326.125.230,00	1.056.471.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.010.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.123.501,62	877.123.501,62	940.887.367,23		
19	Taman	23.964.669.604,00	0,00	169.730.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134.399.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134.399.704,00		
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	55.535.899.531,48	2.058.474.339,00	1.211.307.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.321.381,00	0,00	764.522.833,00	63.449.526.032,48	285.480.100,00	0,00	0,00	171.017.700,00	0,00	228.814.059,00	0,00	1.500.000,00	2.402.330.228,00	3.089.142.087,00	60.360.383.945,48	
21	Rumah Negara Golongan I	76.602.342.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.602.342.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.602.342.792,00		
22	Rumah Negara Golongan II	38.678.896.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.595.071,00	40.134.491.575,10	174.774.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.774.070,00	39.959.717.505,10	
23	Rumah Negara Golongan III	4.384.982.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.982.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.982.798,00		
24	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	10.151.941.211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.941.211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.941.211,62		
25	Ksrama	59.971.814.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.289.099,00	60.341.103.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.341.103.159,00		
26	Flat/Rumah Susun	0,00	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00		
27	Bangunan Menara Perambuan lainnya	0,00	0,00	587.696.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.696.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.696.650,00	587.696.650,00	0,00		
28	Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.383.146,00	0,00	199.427.784,00	997.810.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.810.930,00		
29	Bangunan Gedung Tempat Tinggal lainnya	11.151.361.108,20	595.965.149,00	29.309.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776.635.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.274.699,00	625.274.699,00	11.151.361.108,20		
30	Fugu	376.232.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.232.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.232.863,00		
31	Bangunan Peninggalan	2.842.398.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.398.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.398.207,00		
32	Candi/Tugu Peninggalan/Prasasti lainnya	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00		
33	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	6.806.673.121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.673.121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.673.121,59		
34	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	16.839.896.801,01	0,00	196.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036.440.801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.744.000,00	196.744.000,00	16.839.896.801,01		
35	Fugu/Tanda Batas Administrasi	2.512.773.632,00	0,00	144.266.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.204.770,00	3.427.244.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.244.443,00		
36	Pagar	36.602.273.486,39	3.391.225.917,00	1.864.208.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.757.600,00	42.072.465.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	172.801.104,00	174.401.104,00	41.988.063.928,39		
37	Fugu/Tanda Batas Lainnya	935.518.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.518.270,00	0,00	0,0										

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp84.406.203.149,30 terdiri dari:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	36.218.407.340,13
Utang Tahun 2024	Rp	33.516.178.323,99
Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	60.038.320,00
Pendapatan Hibah	Rp	1.137.263.978,32
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	241.157.807,00
Reklasifikasi dari Persediaan	Rp	158.718.609,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	Rp	1.673.723.692,86
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	11.312.478.723,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	88.236.355,00
Jumlah	Rp	84.406.203.149,30

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar Rp36.218.407.340,13 terdiri dari:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	13.474.029.087,00
Dinas Kesehatan	Rp	4.929.240.192,14
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	4.321.530.030,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	2.226.023.225,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	13.764.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	638.638.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	3.426.067.076,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	1.185.651.242,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	3.956.418.000,00
Dinas Pariwisata	Rp	1.106.861.120,99
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp	940.185.367,00

Utang Tahun 2024 Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.516.178.323,99, terdiri dari:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	16.470.889.082,90
Dinas Kesehatan	Rp	2.383.587.822,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	6.836.140.827,40
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	369.629.007,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	185.732.414,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	99.345.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	196.744.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	144.266.041,00
Dinas Perhubungan	Rp	3.970.768.800,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	506.303.006,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	587.696.650,00
Dinas Pariwisata	Rp	1.083.734.700,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	239.059.092,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

Sekretariat DPRD	Rp	223.263.397,07
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp	29.807.760,00
Kecamatan Bunguran Timur Laut	Rp	189.210.724,62

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 selain dari realisasi belanja modal dan penambahan utang belanja juga terdapat Koreksi Pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp60.038.320,00 merupakan koreksi pencatatan (bangunan gedung tempat ibadah, toilet, parkir & bangunan fasilitas umum) atas DED daya tarik wisata/geosite gunung ranai yang belum tercatat di tahun 2023 pada Dinas Pariwisata. Pendapatan Hibah sebesar Rp1.137.263.978,32 berasal dari Hibah Medco E&P Natuna Ltd ke Pemerintah Daerah Natuna berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan Tribun Timur Sri Serindit Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 SKK Migas dan KKKS Wilayah Operasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Pemuda dan Olahraga. reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp241.157.807,00 merupakan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang telah di kapitalisasi pada pekerjaan gedung kantor BBIP pada Bagunan Gedung Kormap sebesar Rp69.637.000,00 dan pekerjaan Pembangunan Kolam Induk BBIP Kabupaten Natuna sebesar Rp171.520.807,00 di Dinas Perikanan. Reklasifikasi dari Persediaan sebesar Rp158.718.609,00 berasal dari persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga berupa pagar lapangan volly Kecamatan Pulau Tiga Barat. Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.673.723.692,86 berupa fasilitas olah raga terbuka akibat kesalahan penganggaran pada belanja modal tanah. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp11.312.478.723,00 disebabkan kesalahan penganggaran kode rekening belanja dengan rincian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.708.349.787,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp333.987.591,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp198.282.956,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp3.949.218.081,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp4.122.640.308,00 yang dianggarkan pada belanja jalan, jaringan dan irigasi. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp88.236.355,00 berupa bangunan gedung tempat olahraga.

Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.328.893.934,05 terdiri dari:

Koreksi Tahun Sebelumnya	Rp	990.862.800,00
Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	Rp	38.950.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	Rp	1.381.714.187,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	171.017.700,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	941.315.802,80
Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	9.630.110.509,40
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	5.362.701.640,00
Reklasifikasi ke Aset lainnya Tagihan Jangka Panjang / TGR	Rp	38.221.294,85
Jumlah	Rp	18.554.893.934,05

Pengurangan dari koreksi tahun sebelumnya sebesar Rp990.862.800,00 yaitu kelebihan catat aset rumah negara golongan II yang Rp174.774.070,00 sudah tercatat di Sekretariat Daerah, dan Rp816.088.730,00 berupa aset fasilitas lapangan olahraga yang

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

telah diserahkan tahun sebelumnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp38.950.000,00 berupa Partisi Ruangan yang dianggarkan pada belanja modal gedung dan bangunan yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap. Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp2.155.714.187,00, reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp171.017.700,00, reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp941.315.802,80, reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.630.110.509,40, reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp5.362.701.640,00.

Reklasifikasi ke Aset lainnya Tagihan Jangka Panjang (TGR) sebesar Rp38.221.294,85 berasal dari kelebihan pembayaran atas laporan audit inspektorat objek pemeriksaan Peluasan Area Parkir Pelabuhan Feri Binjai Kec. Bunguran Barat sebesar Rp5.288.754,66 pada Dinas Perhubungan, Kelebihan pembayaran hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau audit LKPD untuk objek kekurangan volume pekerjaan aset tetap gedung bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp3.250.000,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp8.150.896,12 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp21.531.644,07.

Selanjutnya reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.521.866.412.603,00 yang berada pada:

Tabel 7.5.151 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	454.143.031.549,56
2	Dinas Kesehatan	167.825.979.356,14
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.558.873.748,69
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	271.568.292.113,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.943.196,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.471.437.219,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.659.547.060,09
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.830.241.811,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	20.527.051.397,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.944.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.163.066.041,00
12	Dinas Perhubungan	62.512.438.435,37
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.412.993.109,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.306.238.545,88
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	33.504.141.273,16
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.042.645.655,93
17	Dinas Perikanan	10.351.603.829,00
18	Dinas Pariwisata	9.896.448.145,12
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	27.849.241.778,07
20	Sekretariat Daerah	93.236.745.263,00
21	Sekretariat DPRD	37.192.319.702,19
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.907.072.179,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	SKPD	Jumlah
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.504.402.127,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.450.000,00
25	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.328.075.000,00
26	Inspektorat Daerah	7.028.650.112,00
27	Kecamatan Bunguran Timur	2.815.681.650,00
28	Kecamatan Bunguran Barat	9.411.232.054,00
29	Kecamatan Bunguran Utara	3.736.164.000,00
30	Kecamatan Pulau Laut	1.526.625.000,00
31	Kecamatan Midai	5.759.111.150,00
32	Kecamatan Serasan	4.550.921.000,00
33	Kecamatan Subi	3.541.525.000,00
34	Kecamatan Pulau Tiga	5.129.866.511,60
35	Kecamatan Bunguran Tengah	2.013.281.454,58
36	Kecamatan Bunguran Timur Laut	4.503.860.724,62
37	Kecamatan Bunguran Selatan	1.275.870.000,00
38	Kecamatan Serasan Timur	5.070.304.981,00
39	Kecamatan Suak Midai	3.432.671.130,00
40	Kecamatan Bunguran Batubi	4.437.210.000,00
41	Kecamatan Pulau Tiga Barat	3.638.215.301,00
Jumlah		1.521.866.412.603,00

7.5.3.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024 adalah sebesar Rp2.271.555.664.184,03 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.123.237.712.072,71
Penambahan Tahun 2024	Rp	166.327.601.789,27
Jumlah	Rp	2.289.565.313.861,98
Pengurangan Tahun 2024	Rp	18.009.649.677,95
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	2.271.555.664.184,03

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.152 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam Rp/tdr)																							
URAIAN		SALDO AWAL	REALISASI TAHUN BERJALAN	UTANG TAHUN 2024	KOREKSI TAHUN SEBELUMNYA	SEBAN BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	KONSTRUKSI DALAM PENERJAJAN	ASET TAK BERWUJUD	REKLASIFIKASI SESAMA JALAN, JARINGAN DAN IRIKASI	JUMLAH	SEBAN BARANG DAN JASA	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	KONSTRUKSI DALAM PENERJAJAN	ASET LAIN-LAIN	PIUTANG LAINNYA-TGR	ASET LAINNYA-TAGIHAN JANGKA PANJANG-TGR	REKLASIFIKASI SESAMA JALAN, JARINGAN DAN IRIKASI	JUMLAH	SALDO AKHIR
1	Jalan Provinsi	3.879.368.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.368.668,00	
2	Jalan Kabupaten	1.027.232.157.366,19	41.412.166.082,58	18.933.256.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.311.905.402,00	0,00	15.417.279.240,20	97.074.607.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	288.696.071,82	0,00	0,00	191.786.546,53	0,00	480.482.618,35	1.123.826.281.806,31
3	Jalan Desa	384.777.723.289,27	15.845.250,00	405.751.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.596.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.199.320.123,27	
4	Jalan Khusus	1.511.245.884,00	0,00	11.850.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.212.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.113.539,76	
5	Jalan Lainnya	23.272.75.250,00	19.095.598.294,08	16.270.049.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	321.153.600,00	33.300.000,00	0,00	35.720.101.257,67	199.342.000,00	0,00	0,00	0,00	56.240.925,00	0,00	13.169.459,36	0,00	15.417.279.240,20	15.686.031.624,58	43.406.344.883,11
6	Jembatan pada Jalan Nasional	3.679.273.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.273.815,00	
7	Jembatan pada Jalan Kabupaten	26.712.627.699,46	11.900.000,00	137.312.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.212.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.212.227,00	149.212.227,00	26.712.627.699,46	
8	Jembatan pada Jalan Desa	4.123.248.831,50	315.732.725,92	852.197.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.930.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.318.610,00	71.318.610,00	5.219.880.484,82	
9	Jembatan Penyeberangan	194.214.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.214.755,00	
10	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	136.265.145.800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.624.000,00	746.052.155,00	920.676.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	137.185.071.955,35
11	Jembatan Lainnya	96.557.171.655,95	1.066.527.921,15	1.046.069.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.318.610,00	2.183.915.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.052.155,00	746.052.155,00	97.995.581.146,21	
12	Bangunan Pengambilan Irigasi	131.401.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.401.800,00	
13	Bangunan Pembawa Irigasi	26.614.601.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.614.601.371,00	
14	Bangunan Pembawa Irigasi	159.661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.661.500,00	
15	Bangunan Sawah Irigasi	2.680.886.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.886.187,00	
16	Saluran Pembuang Pasang Surut	198.575.377,00	9.785.501.050,00	5.511.351.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296.852.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960.250,00	0,00	0,00	0,00	15.284.892.099,00	15.296.852.349,00	198.575.377,00
17	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	221.340.000,00	229.314.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.314.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.314.687,00	221.340.000,00
18	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	697.867.745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.867.745,26	
19	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	509.702.616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.702.616,29	
20	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai/Pantai	75.442.837.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304.553.259,00	7.304.553.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.104,24	0,00	0,00	2.787.104,24	82.744.603.970,76
21	Bangunan Pengaman Pengaman Sungai/Pantai	28.586.645.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.586.645.695,08	
22	Bangunan Petirangkap Pengaman Sungai	29.999.641.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.212.227,00	149.212.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.148.673.711,00	
23	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Pengembang Bencana Alam Lainnya	0,00	17.293.800,00	353.518.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.812.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.812.527,00	0,00
24	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	3.569.664.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.664.560,00	
25	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	11.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484.000,00	
26	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	
27	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	6.456.458.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456.458.990,00	
28	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500.000,00	0,00
29	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.000,00	
30	Bangunan Petangkap Air Bersih/Air Baku	5.265.064.961,00	116.394.060,00	125.299.020,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.790.950,00	344.484.030,00	0,00	0,00	3.000.000,00	241.693.080,00	0,00	393.809.520,00	0,00	0,00	0,00	638.502.600,00	4.971.046.391,00
31	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	299.922.000,00	99.790.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.712.950,00	399.712.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.712.950,00	399.712.950,00	0,00	399.712.950,00
32	Bangunan Pembawa Air Kotor	859.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.999.000,00	
33	Bangunan Pembuang Air Kotor	11.438.048.808,00	4.010.383.194,00	2.422.448.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.031.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438.048.808,00	
34	Bangunan Pengaman Air Kotor	149.570.865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.570.865,21	
35	Bangunan Petirangkap Air Kotor	3.478.626.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.626.716,00	
36	Bangunan Air Kotor Lainnya	45.489.845.330,24	625.029.045,00	445.945.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783.532.260,00	15.834.506.932,00	0,00	0,00	0,00	1.070.974.672,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.274.672,00	60.251.077.590,24
37	Instalasi Air Permukiman	2.131.784.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.784.724,00	
38	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	102.665.349.232,00	0,00	0,00	0,00	3.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.922.000,00	303.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500.000,00	0,00	3.118.000,00	58.618.000,00	102.909.771.232,00	0,00	102.909.771.232,00
39	Instalasi Air Buangan Domestik	2.537.583.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.286.000,00	0,00	0,00	855.286.000,00	1.682.297.500,00	0,00	1.682.297.500,00
40	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	114.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.606.000,00	
41	Bangunan Pengampun Sampah	409.260.000,00	299.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.900.000,00	299.900.000,00	0,00	0,00	299.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.900.000,00	409.260.000,00
42	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	5.537.565.870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.200.778,00	0,00	0,00	1.995.200.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.940.000,00	0,00	0,00	2.084.940.000,00	5.447.826.648,34	0,00	5.447.826.648,34
43	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	298.298.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.298.994,00	
44	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	4.465.479.920,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	779.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.800.000,00	3.686.479.920,00
45	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	14.180.442.554,00	983.176.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.176.446,00	983.176.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163.619.000,00	
46	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	59.369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAH							REKLASIFIKASI SESAMA JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	JUMLAH	PENGURANG					PIUTANG LAINNYA-TGR	ASET LAINNYA- TACIHAN JANGKA PANJANG-TGR	REKLASIFIKASI SESAMA JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	JUMLAH	SALDO AKHIR		
			REALISASI TAHUN BERJALAN	UTANG TAHUN 2024	KOREKSI TAHUN SEBELUMNYA	BEBAN BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN			ASET TIDAK BERWUJUD	BEBAN BARANG DAN JASA	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN						KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	ASET LAIN- LAIN
58	Jaringan Listrik Lainnya	3.202.900.104,72	2.368.612.558,00	2.142.424.450,00	0,00	99.450.450,00	126.136.000,00	0,00	0,00	0,00	4.736.623.458,00	20.000.000,00	0,00	0,00	4.192.537.008,00	0,00	565.074.500,00	0,00	0,00	4.777.611.508,00	3.161.912.054,72		
59	Jaringan Telepon di atas Tanah	94.435.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.435.594,00		
60	Jaringan Telepon Lainnya	87.563.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.563.448,28		
61	Jaringan Pipa Distribusi	25.319.577.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.825.635,00	326.825.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.646.403.426,00		
JUMLAH		2.123.237.712.072,71	84.811.150.755,73	56.813.749.847,78	11.850.752,96	108.368.450,00	2.121.336.776,00	941.315.802,80	21.345.205.402,00	174.624.000,00	39.181.604.336,20	205.509.206.125,47	557.961.069,00	191.338.269,00	305.700.000,00	11.312.478.723,00	371.791.226,82	5.059.587.280,00	19.006.563,60	191.786.546,53	39.181.604.336,20	57.191.294.014,15	2.271.555.664.184,03

Penambahan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah sebesar Rp166.327.601.789,27 yang terdiri dari:

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	84.811.150.755,73
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	56.813.749.847,78
Koreksi Aset Tetap Tahun Sebelumnya Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	11.850.752,96
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	99.450.450,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa	Rp	8.918.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	2.121.336.778,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	941.315.802,80
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	21.345.205.402,00
Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	Rp	174.624.000,00
Jumlah	Rp	166.327.601.789,27

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar Rp84.811.150.755,73 berasal dari beberapa SKPD antara lain sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.003.022.142,00
Dinas Kesehatan	Rp	1.511.313.305,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	56.560.550.793,73
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	23.137.648.657,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	299.900.000,00
Dinas Perhubungan	Rp	2.298.715.858,00
Jumlah	Rp	84.811.150.755,73

Kemudian, Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp56.813.749.847,78 tercatat di beberapa SKPD terdiri dari:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.819.885.047,00
Dinas Kesehatan	Rp	424.272.732,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	45.463.545.392,86
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	6.695.839.522,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	376.958.724,00
Dinas Perhubungan	Rp	1.823.924.450,00
Sekretariat DPRD	Rp	209.323.979,92
Jumlah	Rp	56.813.749.847,78

Terdapat penambahan aset jalan, jaringan dan irigasi selain dari belanja modal dan penambahan utang belanja. Penambahan tersebut berupa Koreksi Aset Tetap tahun sebelumnya Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp11.850.752,96 berasal dari Dinas Pariwisata yang merupakan DID daya Tarik Wisata Geosite Gunung Ranai. Reklasifikasi dari Beban Jasa sebesar Rp8.918.000,00 merupakan reklasifikasi belanja dana BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp99.450.450,00 pada Dinas Perikanan berupa pergantian instalasi listrik. Reklasifikasi

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp2.121.336.778,00 berupa instalasi pengelolaan sampah/limbah medis dan instalasi listrik rumah/gedung yang dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin pada dinas kesehatan. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp941.315.802,80 pembangunan jalan lingkungan yang dianggarkan pada dinas pariwisata yang dianggarkan pada belanja modal gedung dan bangunan. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp21.345.205.402,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa aset KDP jalan Kabupaten sebesar Rp21.311.905.402,00 dan sisanya sebesar Rp33.000.000,00 di Dinas Pariwisata.

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp18.009.649.677,95 terdiri dari:

Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	Rp	557.961.069,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	Rp	191.338.269,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	305.700.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	11.312.478.723,00
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	371.791.226,82
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	5.059.587.280,00
Piutang Lainnya - TGR	Rp	19.006.563,60
Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang - TGR	Rp	191.786.546,53
Jumlah	Rp	18.009.649.677,95

Jumlah reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp557.961.069,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp318.638.500,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp219.322.569,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp20.000.000,00. Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp191.338.269,00 berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang di peruntukan tanah untuk makam. Sedangkan reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp305.700.000,00 berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.800.000,00 dan dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp299.900.000,00.

Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.312.478.723,00 berasal dari beberapa SKPD antara lain sebagai berikut :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	2.708.349.787,00
Dinas Kesehatan	Rp	333.987.591,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	198.282.956,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	3.949.218.081,00
Dinas Perhubungan	Rp	4.122.640.308,00
Jumlah	Rp	11.312.478.723,00

Selanjutnya reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp371.791.226,82 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa aset Jalan Kabupaten sebesar Rp288.696.071,82, Jalan Lainnya sebesar Rp56.240.925,00, Saluran Pembuang Pasang Surut sebesar Rp11.960.250,00 dan Sebesar Rp14.893.980,00 untuk aset Jaringan Air Minum Lainnya. Sedangkan reklasifikasi

ke Aset lain-lain sebesar Rp5.059.587.280,00 terdiri dari beberapa SKPD antara lain sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	615.014.500,00
Dinas Kesehatan	Rp	4.143.775.000,00
Dinas Perikanan	Rp	300.797.780,00
Jumlah	Rp	5.059.587.280,00

Kemudian Aset Lainnya-Tagihan Jangka Panjang-TGR sebesar Rp191.786.546,53 merupakan kekurangan volume hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas audit LKPD Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Atas Kekurangan Volume Aset Tetap Jalan Kabupaten, dan Rp19.006.563,60, Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebesar Rp400.000,00 dan Bangunan Air Kotor Lainnya sebesar Rp2.300.000,00, dan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp16.306.563,60 berupa aset Jalan Lainnya sebesar Rp13.169.459,36, Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal sebesar Rp750.000,00 dan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebesar Rp2.387.104,24.

Reklasifikasi Antar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.271.555.664.184,03 yang berada pada:

Tabel 7.5.153 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

(dalam rupiah)		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.083.928.191,24
2	Dinas Kesehatan	16.237.829.972,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.939.671.512.402,59
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	212.203.090.014,70
5	Dinas Sosial	1.253.831,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	321.047.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.560.200,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.779.060.045,36
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.129.348.384,00
10	Dinas Perhubungan	54.301.879.918,82
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	614.312.120,00
12	Dinas Perikanan	11.727.139.015,00
13	Dinas Pariwisata	12.171.374.488,85
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	274.739.439,00
15	Sekretariat Daerah	1.185.361.100,00
16	Sekretariat DPRD	1.128.708.845,13
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	35.174.000,00
18	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	10.584.269.000,00
19	Kecamatan Bunguran Timur	2.161.272.200,00
20	Kecamatan Midai	185.000.000,00
21	Kecamatan Serasan	389.159.000,00
22	Kecamatan Pulau Tiga	330.645.016,00
Jumlah		2.271.555.664.184,03

7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar Rp72.246.390.690,12 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023

Penambahan Tahun 2024

Jumlah

Pengurangan Tahun 2024

Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

Rp 70.549.121.461,12

Rp 1.941.880.729,00

Rp 72.501.002.190,12

Rp 244.611.500,00

Rp 72.246.390.690,12

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.154 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2023	Penambahan					Pengurangan							Saldo Akhir 2024
			Realisasi Belanja	Utang 2024	Reklasifikasi Dari Beban Barang Dan Jasa	Reklasifikasi Dari Peralatan Dan Mesin	Reklasifikasi Sesama Aset Tetap Lainnya	Reklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa	Reklasifikasi Ke Persediaan	Reklasifikasi Ke Peralatan Dan Mesin	Reklasifikasi Ke Aset Tak Berwujud	Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lain	Penghapusan	Reklasifikasi Sesama Aset Tetap Lainnya	
1	Buku Umum	36.326.630.490,32	19.811.600,00	9.115.000,00	15.780.300,00	0,00	470.101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.636.800,00	36.839.702.090,32
2	Buku Filsafat	16.562.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.258,00
3	Buku Agama	146.125.588,00	0,00	0,00	4.661.800,00	0,00	120.600.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.388.367,00
4	Buku Ilmu Sosial	268.091.932,00	0,00	0,00	955.100,00	0,00	14.284.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.100,00	282.376.232,00
5	Buku Ilmu Bahasa	292.005.580,00	1.024.847.529,00	0,00	3.443.700,00	40.572.600,00	2.251.850,00	2.860.000,00	75.000,00	107.949.000,00	0,00	0,00	0,00	824.902.179,00	427.335.080,00
6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	44.162.802,00	0,00	0,00	6.140.300,00	0,00	124.023.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	174.121.702,00
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	484.837.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.007.897,00
8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.074.964.559,00	0,00	0,00	2.312.800,00	29.920.000,00	49.813.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.650,00	1.154.072.509,00
9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	36.670.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.751.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.422.334,00
10	Buku Laporan	5.340.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.275,00
11	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	48.683.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.683.755,00
12	Audio Visual	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bentuk Mikro (Microform)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
14	Bahan Kartografi	30.031.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.031.360,00
15	Karya Grafika (Graphic Material)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
16	Alat Musik	2.673.707.500,00	0,00	80.000.000,00	1.720.000,00	117.400.000,00	536.280.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.876.000,00	3.316.231.500,00
17	Lukisan	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939.500,00	0,00	0,00	7.650.500,00
18	Alat Peraga Kesenian	602.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.495.000,00
19	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	509.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.640.000,00	0,00
20	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	160.764.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.764.778,00
21	Barang Kerajinan	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076.000,00
22	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	11.222.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222.469,80
23	Ternak Potong	89.727.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.727.273,00
24	Ikan Budidaya	8.750.000,00	37.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888.000,00	0,00	0,00	41.622.000,00
25	Tanaman	5.409.993.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409.993.625,00
26	Tanaman Koleksi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
27	Aset Tetap Dalam Renovasi	22.790.513.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790.513.685,00
28	Aset Tetap Lainnya	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		70.549.121.461,12	1.117.419.129,00	598.755.000,00	37.814.000,00	187.892.600,00	1.353.153.229,00	2.860.000,00	75.000,00	190.749.000,00	35.000.000,00	11.039.500,00	4.888.000,00	1.353.153.229,00	72.246.390.690,12

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar Rp1.951.880.729,00 terdiri dari:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Utang Tahun 2024

Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa

Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

Jumlah

Rp 1.117.419.129,00

Rp 598.755.000,00

Rp 37.814.000,00

Rp 187.892.600,00

Rp 1.941.880.729,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

Realisasi Belanja Modal pengadaan Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024 sebesar Rp1.117.419.129,00 termasuk didalamnya bersumber dari Belanja BOS dan BOP Aset Tetap Lainnya yang berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.044.659.129,00, kemudian pada Dinas Perikanan sebesar Rp37.760.000,00 dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp35.000.000,00.

Penambahan dari utang tahun 2024 sebesar Rp598.755.000,00. Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp37.814.000,00 yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa BOSDA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp187.892.600,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp254.611.500,00 terdiri dari:

Reklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa	Rp	2.860.000,00
Reklasifikasi Ke Persediaan	Rp	75.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	190.749.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	35.000.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	11.039.500,00
Penghapusan	Rp	4.888.000,00
Jumlah	Rp	244.611.500,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp244.611.500,00 berasal dari reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.860.000,00.

Kemudian reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Persediaan sebesar Rp75.000,00 merupakan belanja BOS yang tidak sesuai dengan kode rekening penatausahaan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp190.749.000,00. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp35.000.000,00 merupakan kesalahan penatausahaan kode rekening atas realisasi Belanja Modal pada Sekretariat Daerah. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset lain-lain sebesar Rp11.039.500,00 dan Penghapusan Aset tetap Lainnya sebesar Rp4.888.000,00 merupakan nilai aset Ikan Budidaya berupa induk ikan lele dan nila yang sudah mati pada Dinas Perikanan. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Lainnya merupakan perbaikan pencatatan antar sub rincian objek Aset Tetap Lainnya sesuai dengan *output* dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan aset tetap.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp72.246.390.690,12 berada pada :

Tabel 7.5.155 Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.956.404.577,12
2	Dinas Kesehatan	72.137.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.560.539.885,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	35.750.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	644.499.898,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

No.	SKPD	Jumlah
6	Dinas Lingkungan Hidup	4.862.836.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.759.312.630,00
8	Dinas Perikanan	238.992.000,00
9	Dinas Pariwisata	1.485.000,00
10	Sekretariat Daerah	59.565.000,00
11	Sekretariat DPRD	49.999.000,00
12	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.869.500,00
Jumlah		72.246.390.690,12

7.5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.912.395.559,74 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	73.312.480.462,00
Penambahan tahun 2024	Rp	10.272.183.856,22
Jumlah	Rp	83.584.664.318,22
Pengurangan tahun 2024	Rp	21.672.268.758,48
Nilai Aset Tetap Tahun 2024	Rp	61.912.395.559,74

Jumlah Aset tersebut merupakan rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Natuna terdiri dari:

Tabel 7.5.156 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL	PENAMBAH			REKLASIFIKASI SESAMA KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	JUMLAH	KOREKSI TAHUN SEBELUMNYA	PENGURANG				REKLASIFIKASI SESAMA KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	JUMLAH	SALDO AKHIR
				BEBAN BARANG DAN JASA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI				TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	ASET LAINNYA-TAGIHAN JANGKA PANJANG-TGR			
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	42.417.065.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00	0,00	21.702.085.951,00	21.735.385.951,00	20.681.680.031,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	99.944.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.944.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.944.400,00	0,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	130.728.068,00	0,00	0,00	8.272.628.403,40	0,00	24.661.654.635,00	32.934.283.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131.922.901,48	0,00	131.922.901,48	32.933.068.204,92
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.477.823.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.823.662,00
12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	615.086.713,00	0,00	0,00	615.086.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.086.713,00
13	Konstruksi Dalam Pengerjaan	106.894.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959.700,00	0,00	88.236.355,00	0,00	0,00	0,00	95.196.055,00	11.698.845,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL	PENAMBAH			REKLASIFIKASI SESAMA KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	JUMLAH	KOREKSI TAHUN SEBELUMNYA	PENGURANG				REKLASIFIKASI SESAMA KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	JUMLAH	SALDO AKHIR
				BEBAN BARANG DAN JASA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET LAINNYA- TAGIHAN JANGKA PANJANG-TGR			
	Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga															
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan Bandara	0,00	0,00	0,00	313.825.734,00	0,00	0,00	313.825.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.825.734,00
17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	404.459.000,00	0,00	0,00	228.814.059,00	0,00	0,00	228.814.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.273.059,00
18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	0,00	27.712.710,00	242.569.410,00	199.755.600,00	0,00	0,00	470.037.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.037.720,00
19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas- Pagar	21.589.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589.825,00
21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan- Jalan Nasional	4.082.278.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.278.108,00	4.082.278.108,00	0,00
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan- Jalan Kabupaten	22.133.056.852,00	0,00	0,00	0,00	288.696.071,82	0,00	288.696.071,82	0,00	0,00	0,00	21.311.905.402,00	0,00	642.278.848,82	21.954.184.250,82	467.568.673,00
23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan- Jalan Desa	1.143.415.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.130.142,82	1.686.130.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.545.352,82
24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan- Jalan Lainnya	1.037.036.862,00	0,00	0,00	0,00	56.240.925,00	0,00	56.240.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.277.787,00	1.093.277.787,00	0,00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan- Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.218.400,00	170.218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.218.400,00
26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan- Jembatan Lainnya	71.318.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.318.610,00
27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	155.993.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.993.056,00	155.993.056,00	0,00
29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaliran Pasang Suntai-Saluran Pembuang Pasang Suntai	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960.250,00	0,00	11.960.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960.250,00	11.960.250,00	0,00
30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Peninggian Bencana Alam- Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.399.750,00	226.399.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.399.750,00
31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	17.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017.000,00
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.223.980,00	972.223.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.223.980,00
33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Lainnya	13.858.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858.927,00	13.858.927,00	0,00
34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893.980,00	0,00	14.893.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893.980,00	14.893.980,00	0,00
JUMLAH		73.312.480.462,00	27.712.710,00	242.569.410,00	9.630.110.509,40	371.791.226,82	27.716.626.907,82	37.988.810.764,04	6.959.709,00	99.944.400,00	88.236.355,00	21.345.206.402,00	131.922.901,48	27.716.626.907,82	49.388.896.666,30	61.912.395.559,74

Penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp10.272.183.856,22 antara lain :

Koreksi Saldo Awal	Rp	27.712.710,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp	242.569.410,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	9.630.110.509,40
Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	371.791.226,82
Jumlah	Rp	10.272.183.856,22

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

Koreksi Saldo Awal sebesar Rp27.712.710,00 merupakan Pencatatan *Detail Engineering Design* yang tidak tercatat tahun 2023 di Dinas Pariwisata. Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp242.569.410,00 merupakan Jasa Konsultansi dan reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp371.791.226,82 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.630.110.509,40 terdiri dari beberapa SKPD antara lain sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	843.900.772,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	8.173.283.403,40
Dinas Perhubungan	Rp	313.825.734,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	99.345.000,00
Dinas Pariwisata	Rp	199.755.600,00
Jumlah	Rp	9.630.110.509,40

Pengurangan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp21.672.268.758,48 dengan rincian sebagai berikut :

Koreksi Tahun Sebelumnya	Rp	6.959.700,00
Reklasifikasi Ke Aset Tetap Tanah Dokumen penilaian dari KJPP	Rp	99.944.400,00
Reklasifikasi Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	88.236.355,00
Reklasifikasi Ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	21.345.205.402,00
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya-Tagihan Jangka Panjang (TGR)	Rp	131.922.901,48
Jumlah	Rp	21.672.268.758,48

Koreksi Pengurangan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp195.140.455,00 berasal dari di Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Koreksi Tahun Sebelumnya yang asetnya sudah di hibahkan sebesar Rp6.959.700,00 dan reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp99.944.400,00 merupakan penilaian atas perolehan aset tetap tanah lapangan olahraga oleh KJPP dan telah dikapitalisasi ke aset induknya pada Dinas Pemuda dan Olahraga. reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp88.236.355,00 yang diperuntukkan untuk tempat olahraga. Selanjutnya reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp21.345.205.402,00 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp21.311.905.402,00 sisanya sebesar Rp33.300.000,00 berada di Dinas Pariwisata. Kemudian reklasifikasi ke aset lainnya tagihan jangka panjang (TGR) sebesar Rp131.922.901,48 berasal dari koreksi TGR Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp61.912.395.559,74 terdiri dari:

Tabel 7.5.157 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

(dalam rupiah)		
NO.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.265.376.772,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.291.411.042,74

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

NO.	SKPD	Jumlah
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99.345.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.589.825,00
5	Dinas Perhubungan	491.325.734,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.698.845,00
7	Dinas Pariwisata	227.468.310,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	20.504.180.031,00
JUMLAH		61.912.395.559,74

Dari total Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp61.912.395.559,74, sebesar Rp60.612.795.591,22 dilanjutkan penyelesaian pekerjaannya ditahun ini dan tahun berikutnya menunggu kemampuan Keuangan Daerah, dan ada beberapa pekerjaan yang masih menunggu penyelesaian di tahun berjalan. Secara rinci diungkapkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.158 Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Tanah	Tanah Untuk Bangunan Gedung Pendidikan	Pematangan Lahan SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut	114.485.400,00	31 Desember 2024	17.2/SPK-PR/DISDIKBUD-UP2/X/2024	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Tanah	Tanah Untuk Bangunan Gedung Pendidikan	Pematangan Lahan TK Negeri 2 Bunguran Barat	169.322.085,00	31 Desember 2024	74/SPK/02.12/REN/DISDIKBUD/XI/2024	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Tanah	Tanah Untuk Bangunan Gedung Pendidikan	Pematangan Lahan TK Negeri 1 Bunguran Timur Laut	161.484.748,00	31 Desember 2024	20.2/SPK-PR/DISDIKBUD-UP2/X/2024	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Tanah	Tanah Untuk Bangunan Gedung Pendidikan	Pematangan Lahan SMP Negeri 2 Bunguran Utara	169.794.480,00	31 Desember 2024	75/SPK/02.12/REN/DISDIKBUD/XI/2024	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Pembangunan	Perencanaan Pembangunan Panggung Seni SMPN.001 Kecamatan Bunguran Timur Laut	6.875.000,00	31 Desember 2020	10/SPK/16.09-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Pembangunan Majelis Guru SDN 003 Desa Setumuk	30.041.000,00	31 Desember 2020	02/SPK/16.04-03/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Panggung Kesenian/Atraksi	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan WC SDN 002 Tanjung Pala Kec. Pulau Laut Pada Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Natuna	2.387.000,00	31 Desember 2019	05/SPK/16.09-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bagunan Gudang Lainnya	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Pagar SD 004 Plan Tengah Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	10.483.000,00	31 Desember 2021	01/SPK/15.01-03/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
9	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Dinding Penahan Tanah/Batu Miring	Perencanaan Pembangunan Batu Miring SMPN 1 Serasan	4.807.000,00	31 Desember 2020	02/SPK/16.11-04/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Revitalisasi Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Bunguran Tengah	33.891.000,00	31 Desember 2020	13/SPK/16.09-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Pembangunan UGB TK Negeri 002 Kec. Bunguran Timur Laut (1 Ruang Guru + 2 Ruang Kelas + WC + UKS + Ruang Dapur).	49.736.500,00	31 Desember 2020	42/SPK/16.09-42/Ren/DISDIK/PORA/2019	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Pembangunan Ruang Majelis Guru TK N Alamat RT.007 RW.002 Desa Batubi Jaya	21.087.000,00	31 Desember 2020	01/SPK/16.83-01/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
13	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Tempat Ibadah Lainnya	Pembayaran 100% Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah SMPN 1 Serasan Timur Pada Kegiatan Pembangunan Ruang Ibadah Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	14.938.000,00	31 Desember 2020	01/SPK/16.09-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
14	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Panggung Kesenian/Atraksi	Perencanaan Pembangunan Panggung Seni Mts. Miftahunnajah Desa Mekar Jaya	10.301.500,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Tempat Ibadah Lainnya	Perencanaan Pembangunan Musholla SDN 003 Kecamatan Midai	37.038.100,00	31 Desember 2020	12/SPK/16.09-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Tanah Bangunan Rumah Peningin	Pematangan Lahan SDN 006 Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Bulan Agustus	228.814.059,00	30 August 2024	01/SPK/16.01-02/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
17	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Revitalisasi Pagar SMPN1 Kelarik	15.323.000,00	31 Desember 2020	03/SPK/16.08-03/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
18	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pagar TK Negeri Kec. Bung Utara	7.784.700,00	31 Desember 2020	01/SPK/16.08-03/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
19	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Plafon Sekolah TK Negeri 002 Kelurahan Sedanau Kec. Bunguran Barat	2.640.000,00	31 Desember 2020	08/SPK/01.06-21/Ren/DISDIK/2021	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
20	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Halaman Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Paving Block Halaman SDN 006 Desa Selemam Pada Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan	11.489.500,00	31 Desember 2020	01/SPK/16.04-03/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
21	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 009 Bandarsyah	10.307.000,00	31 Desember 2020	01/SPK/15.45-01/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
22	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Pembangunan Majelis Guru SMPN 2 Bunguran Utara	37.125.000,00	31 Desember 2020	01/SPK/16.01-02/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Perencanaan Revitalisasi Pembangunan Ruang Kelas Baru Bertingkat (RKB) SMPN 1 Suak Midai Kec. Midai Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	86.715.200,00	31 Desember 2020	07/SPK/15.09-12/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Nama OPD	Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan
24	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN Kec. Serasan Timur	11.489.500,00	31 Desember 2020	01/SPK/15.04-02/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
25	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Instalasi Listrik	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik Mts Baki Natuna Pulau Tiga Barat	5.758.500,00	31 Desember 2020	02/SPK/16.13-02/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
26	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan REVITALISASI DRAINASE SD NEGRI 001 TANJUNG KEC.BUNGURAN TIMUT LAUT	5.500.000,00	31 Desember 2020	04/SPK/16.19-44/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
27	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Instalasi Listrik	Belanja Jasa Perencanaan Pengadaanc Mts Pulau Tiga Kec. Pulau Tiga Pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapannya Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.	5.758.500,00	31 Desember 2020	01/SPK/16.13-02/Ren/DISDIK/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
28	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Halam Gedung Kantor	Semenisasi Halaman Kantor Camat Bunguran Utara	13.728.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
29	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan+Pengawasan Gedung LAM Kabupaten Natuna	1.564.740.373,40	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
30	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Batu Hitam	99.394.950,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
31	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Pulau Tiga Barat Kapitalisasi Fisik Nilai 1.484.795.882	1.544.611.562,00	30 Desember 2022	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
32	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	JED Pembangunan TPST Dan TPS 3R Kelurahan Sedanu Kecamatan Bunguran Barat	79.545.930,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
33	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bagunan Gudang Lainnya	Sapura Kecamatan Bunguran Selatan	8.888.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
34	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bagunan Gudang Lainnya	Pembangunan Teras Kantor Camat B. Tengah Bagian Timur	9.394.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
35	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Halaman Gedung Kantor	Seminisasi Hal Kantor Desa Pengadah	13.717.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
36	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Konstruksi Dalam Pengerjaan (48,02%)	3.303.160.376,00	31 Desember 2016	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
37	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Pembayaran Termyn 33,516% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kab. Natuna (Tahun Jamak) (1 Paket)	21.111.264.952,00	31 Desember 2015	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
38	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	JED Pembangunan TPST Kecamatan Midai	69.641.400,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
39	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Pembayaran Termyn 100% Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pada Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Alap Kantor, Desa Terarak, Kecamatan Subi, + Pengawasan	23.905.848,00	30 Desember 2022	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
40	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Dinding Penahan Tanah/Batu Miring	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Parit Batas Wilayah Air Tawak Hilir RT 05 RW 01 Dengan Air Keruh RT 01 RW 01 Kel. Ranai Barat	9.883.500,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
41	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pada Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Kecamatan Pulau Panjang	99.850.000,00	10 Desember 2023	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
42	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	JED Pembangunan Gedung Kantor UKPBJ Kabupaten Natuna	99.400.500,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
43	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	JED Pembangunan TPST Kecamatan Serasan	79.529.280,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
44	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Dinding Penahan Tanah/Batu Miring	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Dan Penimbunan Kantor Desa Sungai Ulu	13.706.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
45	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Menuju Pemukiman Tanjung Sulai Desa Sepemang	13.717.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
46	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Halaman Pakir	Perencanaan Pembangunan Tangga Naik Dan Tempat Parkir Halaman Depan Kantor Camat Bung. Tengah (1 Paket)	10.484.100,00	31 Desember 2020	12/BA-STHP/PERC-PKSPPI/XII/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
47	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Pembayaran Uang Muka 30% Belanja Modal Bangunan Modal Bangunan Gedung Kantor Pada Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pulau Seluan.	3.069.705.531,99	31 Desember 2024	-	-	Penyelesaian Tahun 2025	Kontrak Masih di elusuri
48	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Tempat Parkir	Lanjutan Parkir Depan PDAM Desa Ceruk	13.706.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
49	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Gedung Bhayangkari	99.765.690,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
50	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Di Kawasan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Kabupaten Natuna	13.852.800,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
51	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Pembangunan Pagar	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Camat Bunguran Selatan (1 Paket)	10.484.100,00	31 Desember 2020	13/BA-STHP/PERC-PKSPPI/XII/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
52	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	JED Revitalisasi Kantor Desa Kampung Hilir Kecamatan Serasan	59.773.500,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
53	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Astaka	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Astaka Knock Down Di Kecamatan Pulau Tiga	55.847.000,00	09 Desember 2019	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
54	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Kantor Camat Pulau Panjang	3.048.579.956,53	31 Desember 2024	-	-	Penyelesaian Tahun 2025	Kontrak Masih di elusuri
55	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	Instalasi Pengaman Lainnya	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya Pada Pekerjaan Perencanaan Relokasi Air Mancur Di Gedung Daerah.	13.858.927,00	30 Desember 2022	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
56	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Simpang Limau Manis Ceruk (1 Paket)	99.858.000,00	18 November 2020	97/BA-PERC/PP/HP/PHOTMIX/XI/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
57	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix (AC-WC) Jl. Imam H Ismail - Puak	99.715.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Nama OPD	Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan
58	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Batu Bayan Tengah Desa Cemaga Kec. Bunguran Selatan	12.966.800,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
59	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	DED Rekonstruksi Jalan Lingkar Pulau Sedanau	99.611.400,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
60	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pelebaran Pembangunan Jalan Payak RT.004 Ke RT.006 RW 002 Dusun II Desa Payak.	79.841.190,00	31 Desember 2023	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
61	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Hotmix Jalan Empu Karya Bunguran Tengah	89.473.271,82	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
62	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Jl. Temadu Kel. Ranai Darat Kec. Bunguran Timur	57.013.000,00	31 Desember 2015	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
63	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Poros Tengah - Gunung Putri Kec. Bunguran Batubi (1 Paket)	49.960.000,00	31 Desember 2017	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
64	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Jalan Kelarik-Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara/Lanjutan, Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.800.000,00	31 Desember 2016	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
65	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Jalan Sengiap - Pulau Kambing Kec. Bunguran Timur Laut	49.950.000,00	31 Desember 2017	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
66	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Simpang Limau Manis-Zeruk Kec. Bunguran Timur Laut	49.930.000,00	31 Desember 2018	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
67	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembayara Termyn 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Perencanaan Peningkatan Jalan Hotmix Air Kumbik Ranai Darat Kec. Bunguran Timur (1 Paket).	49.900.000,00	31 Desember 2015	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
68	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembayaran Termyn 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Perencanaan Pembangunan Dan Pengerasan Jalan Bukit Leman Ke SP 3 Kec. Bunguran Tengah (1 Paket).	46.400.000,00	31 Desember 2015	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
69	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Riview Perencanaan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Serantas-Teluk Melam Kec. Pulau Tiga (1 Paket)	49.960.000,00	31 Desember 2017	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
70	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Jl. Imam Ismail - Ji. Agus Salim Fulk	49.950.000,00	31 Desember 2018	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
71	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembukaan Jalan Sual Depan Kantor Lurah Ke RSUD Kec. Bung. Timur	49.258.000,00	31 Desember 2015	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
72	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Lajutan Jalan Kantor Camat Menuju Setungkuk	49.961.500,00	31 Desember 2023	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
73	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Pembukaan Jalan Dua Jalur Batu Hitam-Batu Kapal (Tahap II).	467.568.673,00	30 Desember 2022	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
74	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Dibayarkan Belanja Modal Jalan Kabupaten Perencanaan Rehabilitasi Jalan Air Buluh-SMA Cemaga Kec. Bunguran Selatan Pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Kepada ADRIGRA KARYA	25.530.000,00	31 Desember 2023	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
75	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix (AC-BC) Ceruk-Selemam.	50.649.300,00	30 Desember 2022	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
76	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jembatan Lainnya	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jembatan Lainnya Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pelantar Rakyat Air Raya Kel. Serasan Kec. Serasan	71.318.610,00	31 Desember 2023	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
77	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Belanja Jasa Kontrukasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Puak-Kompi C Kec. Bunguran Timur	49.960.000,00	31 Desember 2018	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
78	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembukaan Jalan TPA - Air Lengit (TMMD) (1 Paket)	49.665.000,00	04 November 2020	103/BA-PERC/PP/PHP/PEMB. JAL AN TANAH/XXI/2020	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
79	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Setungkuk Kecamatan Bunguran Batubi.	70.613.400,00	31 Desember 2021	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
80	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan UPL/UKL Kegiatan Peningkatan Jalan Beton	99.880.000,00	23 October 2019	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
81	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Samping Rumah Hamidi RT. 009 RW. 005 Desa Air Ringau Kec. Serasan Timur	13.090.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
82	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Lingkungan	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pantai Ria Sedanau	18.381.600,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
83	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan Beton Bertulang Jalan Tegul Pelawan RT.002/RW.009 Sual Kecamatan Bunguran Timur	13.711.500,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
84	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Air Ringau Kec. Serasan Timur	15.477.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
85	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Pembukaan Dan Pengerasan Jalan Perani Ke Sekukup.	31.923.600,00	31 Desember 2023	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
86	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Pangkalan Kec. Serasan	15.560.600,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
87	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan 2 Jalur Sungai Jlu-Ranai (SP. LANTAMAL)	99.715.000,00	31 Desember 2021	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
88	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	Perencanaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Di Kabupaten Natuna	14.893.980,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
89	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan Ruas Jalan Simpang Sungai Hulu - Harapan Jaya.	49.506.000,00	30 Desember 2022	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
90	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Hotmix Jalan Masuk Kantor Camat Harapan Jaya.	49.759.080,00	31 Desember 2023	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
91	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Binjai - Tanjung Bayan Kec. Bunguran Barat	59.785.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Nama OPD	Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan
92	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	Perencanaan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Trans Batubi - Sebangkar SP 1 Kec, Bunguran Batubi	99.709.500,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
93	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	DED Rekonstruksi Jalan Pelantar Sudirman Sedanau Kec. Bunguran Barat	99.611.400,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
94	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Rabat Beton Tukung RT 012/RW 006 Kp, Tukung Sungai Baru Dusun III Desa Arung Ayam	8.234.732,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
95	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Penimbunan Jalan Lingkar RT.06/ RW.03 Desa Tapau	15.950.700,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
96	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Jin, Cendrawasih RT, 014 Desa Batubi Jaya Kec, Bunguran Batubi	13.206.600,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
97	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Kelarik-Trans Batubi	99.715.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
98	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Dibayarkan Belanja Modal Jalan Desa Review Design Perencanaan Pembangunan Jalan Seminte - Segeram Kec. Bunguran Barat Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Kepada BRAWIJAYA TEKNIK KONSULTAN	48.285.000,00	31 Desember 2023	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
99	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Jin, Kihajar Dewantara RT, 011 Desa Batubi Jaya Kec, Bunguran Batubi	15.103.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Pada Pekerjaan Perencanaan SPAM Sebayar Dan SPAM Sedanau.	793.650.000,00	30 Desember 2022	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
101	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Gang Rajawali, Desa Pengadah	7.950.375,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
102	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Lingkar Kecamatan Subi	23.963.500,00	31 Desember 2021	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
103	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Review Design Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Review Design Perencanaan Lanjutan Peningkatan J	57.664.500,00	31 Desember 2023	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
104	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Sedarat Baru Kec, Bunguran Batubi	13.871.000,00	12 June 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
105	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Air Mati - Pelabuhan Kelarik	99.715.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
106	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan LANJUTAN DRAINASE BELAKANG RUMAH BASUNI ARNI	11.960.250,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
107	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Irigasi Tehnis	Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jaringan irigasi D.I Payak Kec. Serasan Timur	47.850.000,00	17 July 2019	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
108	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Jin, Kantil RT, 004 Desa Batubi Jaya	15.389.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
109	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Kabupaten Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Menuju Perikanan Pulau 3	83.026.454,00	30 Desember 2022	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
110	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Tanjung Balau Kec, Serasan	14.751.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
111	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembangunan Jalan Lapis Hotmix Komplek Gor Indoor Kec, Bunguran Timur	49.830.000,00	21 November 2019	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
112	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Air Sekati Desa Hilir Kec, Serasan	14.960.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
113	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Peningkatan Jalan Beton Bertulang Lingkar Sabang Mawang	99.880.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
114	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Beton Bertulang Dari MTS Ke Sebadai Hilir RT. 02 Desa Kelanga	35.975.500,00	25 November 2019	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
115	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan Jalan Beton Kristanto Bandarsyah	9.581.000,00	31 Desember 2021	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
116	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Pembayaran Termyn 100% Belanja Modal Jalan Lainnya Pada Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Beton Bertulang, Jl. Tpk Lot, Kecamatan Bunguran Utara	69.889.000,00	30 Desember 2022	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
117	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Intalasi Air Bersih / Air Baku Liannya	Pembayaran Termyn 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan SPAM Di Pulau Tiga (Selat ampai)	163.680.000,00	17 October 2019	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
118	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Pembangunan Dan Pengerasan Jalan Keramat Ceruk	74.855.000,00	31 Desember 2020	100/BA-STHP/PERC/Pening. Beton/XII/2020	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
119	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Desa	Perencanaan Lanjutan Semenisasi Batu Jalan Dari Pertigaan Padang Kurak Sual Menuju Ke Sual	13.958.250,00	31 Desember 2024	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
120	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Pembangunan Drainase	Perencanaan Pembangunan Parit Jalan Lorong Makde Sari Rt. 03 Rw. 01 Air Kolek Kec, Bunguran Timur	13.728.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
121	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Batubi-Kelarik	99.605.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
122	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jalan Kabupaten	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Kelarik Hulu - Segeram	99.770.000,00	21 November 2019	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
123	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Pembangunan Drainase	Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Pulau Panjang Kec, Subi	15.229.500,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
124	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Pembangunan Drainase	Perencanaan Perbaikan Parit Belakang Rumah No. 01/01 / RW/01 Rantai Darat Kelurahan Rantai Darat Kecamatan Bunguran Timur	6.985.000,00	31 Desember 2021	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri
125	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Jembatan	Perencanaan Peningkatan Jembatan Sei Semala Kec, Bunguran Batubi	99.605.000,00	31 Desember 2020	-	-	Dilanjutkan menuggu Kemampuan Keuangan Daerah	Kontrak Masih di elusuri

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Nama OPD	Jenis KDP	Rincian	Uraian	Nilai	Tahun Perolehan	Nomor Kontrak/Perikatan	Tanggal	Status Kelanjutan	Keterangan
126	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pagar	Perencanaan Pembangunan Pagar BPP Pulau Jait	21.589.825,00	31 Desember 2022	05/SPK/DKPP-DAK-PEREN-BPP-PULAU LAUT/IV/2022	-	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
127	Dinas Perhubungan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Ban Dara Permanen	Perencanaan Perbaikan Pelabuhan Selaut Kecamatan Bunguran Barat	95.150.310,00	12 Desember 2024	15/SPK/PRC/Perb-Pibn.Selaut/DISHUB/2.12.03/XI/2024	6 Nov 2024	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
128	Dinas Perhubungan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Ban Dara Permanen	Perencanaan Revitalisasi Pelabuhan Tanjung Batu Pulau Laut	69.734.577,00	12 Desember 2024	14/SPK/PRC/REV.TANJUNGBATU/DISHUB/2.12.0003/DISHUB/XI/2024	6 Nov 2024	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
129	Dinas Perhubungan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Ban Dara Permanen	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Desa Teluk Buton	79.398.300,00	12 Desember 2024	14/SPK/PRC/PEL.TELUK BUTON/DISHUB/2.12.0002/DISHUB/X/2024	15 Oct 2024	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
130	Dinas Perhubungan	Gedung Dan Bangunan	Gedung Terminal	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Terminal Pelabuhan Kelarik	69.542.547,00	12 Desember 2024	16/SPK/PRC/Rehab-Pibn.Kelarik/DISHUB/2.12.03/XI/2024	6 Nov 2024	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
131	Dinas Perhubungan	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Ban Dara Permanen	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Besar Selat Lampa, Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga	177.500.000,00	31 Desember 2019	07/SP/PDP-PRC-PEMB PLBH SBSL/DISHUB/IX/2019	26 Sep 2019	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
132	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	GEDUNG DAN BANGUNAN	Bangunan Gedung Kantor	PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG UPTD PPA, BATU HITAM.	99.345.000,00	25 November 2024	600.1.15.2/SPK/PERC-PPPA/01/XI/2024	24 Nov 2024	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
133	Dinas Pariwisata	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Jmum Lain	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ded Pengembangan Kawasan Wisata Batu Kapal (Geopark) Hutang Desember	99.877.800,00	31 Desember 2024	500.13.2.2/02/P.DED-UP.3/VII/2024	26 Jul 2024	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
134	Dinas Pariwisata	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Jmum Lain	Pembangunan Pondok Informasi Koreksi Pencatatan 2023	2.289.577,00	31 January 2024	02/SPK/PSK-DISPAR/XI/2022	15 Nov 2022	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
135	Dinas Pariwisata	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Jmum Lain	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Batu Kapal (Geopark)	99.877.800,00	31 Desember 2024	500.13.2.2/02/RMBK-UP.3/V/2024	20 May 2024	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
136	Dinas Pariwisata	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Jmum Lain	Pembangunan Home Stay 2 Unit Koreksi Pencatatan 2023	16.878.680,00	31 January 2024	02/SPK/PSK-DISPAR/XI/2022	15 Nov 2022	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
137	Dinas Pariwisata	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Jmum Lain	Pembangunan Outlet / Kios Koreksi Pencatatan 2023	4.620.883,00	31 January 2024	02/SPK/PSK-DISPAR/XI/2022	15 Nov 2022	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
138	Dinas Pariwisata	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Fasilitas Jmum Lain	Pembangunan Selfie Point 2 Unit Koreksi Pencatatan 2023	3.923.570,00	25 January 2024	02/SPK/PSK-DISPAR/XI/2022	15 Nov 2022	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
139	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	Gedung Dan Bangunan	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Konstruksi Dalam Pengerjaan (48,034%), Pemberhentian	2.499.807.168,00	31 Desember 2016	644/PU-CK/KTR-INDUK/FISIK/165/IX/2014	4 Sep 2014	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
140	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro	Gedung Dan Bangunan	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Pembayaran Termyn 35,69% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan lainnya Pada Pembangunan Pasar Modern (1 Paket)	18.004.372.863,00	31 Desember 2015	644/PU-CK/KTR-INDUK/FISIK/165/IX/2014	4 Sep 2014	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
141	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kelurahan Ranai Kota	11.698.845,00	31 March 2024	01/SPMK-PLBK/DISPOR/II/2024	23 Feb 2024	Dilanjutkan menunggu Kemampuan Keuangan Daerah	
JUMLAH					61.912.395.559,74					

Secara garis besar, Konstruksi yang dicatat oleh Pemerintah akan dilaksanakan penyelesaian pekerjaannya, tetapi memperhatikan kemampuan fiskal kemampuan keuangan daerah, penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap dan melihat prioritas pembangunan daerah.

7.5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah total nilai penyusutan aset tetap sejak aset tersebut pertama kali digunakan hingga periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan perhitungan per bulan. Akumulasi mulai dihitung sejak barang telah diserahkan dari penyedia ke Pemerintah Daerah. Saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.120.114.230.748,59 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.986.134.898.308,55
Penambahan Tahun 2024	Rp	169.862.357.962,60
Jumlah	Rp	2.155.997.256.271,15
Pengurangan Tahun 2024	Rp	35.883.025.522,56
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.120.114.230.748,59

Jumlah tersebut merupakan rincian Akumulasi Penyusutan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel 7.5.159 Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SALDO AKHIR 2023	PENAMBAHAN							PENGURANGAN						SALDO AKHIR 2024
			Koreksi Kurang Catat Saldo Awal	Koreksi Kurang Catat Aset	Reklasifikasi Dari Persediaan	Reklasifikasi Dari ATB	Reklasifikasi Dari Aset Lain-Lain	Reklasifikasi antar sesama Akm. Penyusutan	Beban Penyusutan	Koreksi Lebih Catat Saldo Awal	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap	Penghapusan	Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lain	Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lain Ekstrakomptabel	Reklas ke sesama Akm. Penyusutan	
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	1.787.629.932,64	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.602.112,10	0,04	0,00	0,00	1.604.166,66	58.350.000,00	0,00	1.861.277.878,07
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	97.289.936.210,93	3.740.486,35	660.616.000,00	0,00	0,00	17.160.000,00	2.493.657,24	8.595.363.102,69	0,66	1.023.809,52	3.843.137.850,00	1.814.447.736,68	3.070.162.000,00	0,02	97.840.538.060,33
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.656.213.977,87	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	187.504.961,00	0,09	0,00	0,00	683.242.676,67	125.005.625,00	0,01	3.035.470.637,16
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	5.059.662.096,79	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.364.560,71	0,02	0,00	0,00	0,00	273.598.100,00	0,00	4.865.428.557,50
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	82.642.237.729,60	423.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015.000,11	9.623.289.917,43	2,67	1.678.746,33	358.613.705,99	867.306.883,34	6.798.624.886,67	12.508.657,49	84.237.233.101,91
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.701.336.151,81	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1.629.272.153,04	0,13	0,00	36.019.133,33	79.345.390,77	448.081.372,00	0,04	14.767.162.408,80
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	110.840.522.808,32	12.474.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410.207.474,24	2,18	0,00	0,00	118.114.394,69	10.935.227.652,86	0,00	116.209.862.627,45
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	16.899.536.801,76	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1.018.690.184,23	0,32	0,00	0,00	26.955.833,33	69.502.459,00	0,00	17.821.768.694,02
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	44.601.003.332,42	933.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736.556.500,65	1,68	1.666.666,34	885.850.068,16	182.986.036,48	2.262.657.878,33	0,14	50.005.332.308,51
11	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.541.666,67	329.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.763,34
12	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	93.151.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151.856,00
13	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	98.717.083,33	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	70.458.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.175.666,66
14	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	312.750.623,75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.702.781,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.453.404,77
15	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.760.270.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.235.119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.505.952,38
16	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	6.492.195.425,96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	480.506.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	6.972.702.337,03
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	536.164.456,42	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.308.431,45	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.472.887,84
18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	258.941.858.381,09	4.615.987.344,19	0,00	264.531,03	292.968.489,64	0,00	5.730.015,06	27.919.707.838,10	713.216,40	29.293.971,37	0,00	1.424.425.172,43	0,00	5.730.015,06	290.316.354.223,85
19	Akumulasi Penyusutan Monumen	548.549.561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.172.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.722.183,36
20	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	10.075.267.036,46	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.159.248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666.426.284,56
21	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	6.053.551.988,65	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.011.553,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883.563.541,69
22	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.176.506.189.939,14	7.276.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	71.619.111.675,56	2.610.762,68	1.598.221,23	0,00	50.567.708,33	0,00	0,01	1.248.077.800.922,73
23	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	104.442.817.341,47	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	9.965.165.251,56	0,04	24.583,33	0,00	84.780.433,50	0,00	0,07	114.323.177.576,40
24	Akumulasi Penyusutan Instalasi	36.942.547.143,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4.573.304.307,31	0,51	0,00	0,00	1.185.567.139,84	0,00	0,05	40.330.284.310,58
25	Akumulasi Penyusutan Jaringan	6.849.265.928,72	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1.233.963.867,76	0,08	0,00	0,00	160.241.232,81	0,00	0,02	7.922.988.563,65
JUMLAH		1.986.134.898.308,55	4.641.163.757,89	660.616.000,00	264.531,03	292.968.489,64	17.160.000,00	18.238.672,92	164.250.185.184,04	3.323.987,57	35.285.998,12	5.123.620.757,48	6.679.584.805,53	24.041.209.973,86	18.238.672,92	2.120.114.230.748,59

Penambahan Akumulasi Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp169.862.357.962,60 terdiri dari:

1. Penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2024	Rp	164.250.185.184,04
2. Kekurangan Pencatatan Akumulasi Peralatan dan Mesin	Rp	17.900.412,86
3. Kekurangan Pencatatan Akumulasi Gedung dan Bangunan	Rp	4.615.987.344,30
4. Kekurangan Pencatatan Akumulasi Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	7.276.000,73
5. Koreksi kurang catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya.	Rp	660.616.000,00
6. Penambahan dari Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	17.160.000,00
7. Penambahan dari Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	264.531,03
8. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan akibat adanya Aset yang direklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud Tahun 2023	Rp	292.968.489,64
Jumlah Penambahan	Rp	169.862.357.962,60

Pengurangan Akumulasi Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp35.883.025.522,56 terdiri dari:

1. Kelebihan Pencatatan Akumulasi Peralatan dan Mesin	Rp	7,84
2. Kelebihan Pencatatan Akumulasi Gedung dan Bangunan	Rp	713.216,42
3. Kelebihan Pencatatan Akumulasi Jalan Irigasi dan jaringan	Rp	2.610.763,31
4. Koreksi lebih catat Aset Tetap Peralatan Mesin	Rp	4.369.222,19
5. Koreksi lebih catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	29.293.971,37
6. Koreksi lebih catat Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	1.622.804,56
7. Penghapusan Aset Tetap	Rp	5.123.620.757,48
8. Pencatatan Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Rp	6.679.584.805,53
9. Pencatatan Aset Tetap ke Aset Lain-Lain Ekstrakomptabel	Rp	24.041.209.973,86
Jumlah Pengurangan	Rp	35.883.025.522,56

Aset Ekstrakomptabel

Aset-aset yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi aset tetap dan aset yang tidak diyakini keberadaanya sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disajikan sebagai Aset Ekstrakomptabel. Aset Ekstrakomptabel tetap disajikan dalam dokumen penatusahaan Barang Milik Daerah tetapi tidak disajikan di Neraca Pemerintah. Aset Ekstrakomptabel untuk Peralatan dan Mesin adalah dengan nilai dibawah Rp1.000.000,00, sedangkan untuk Gedung dan Bangunan dengan nilai dibawah Rp10.000.000,00.

Nilai Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp125.828.185.799,18 sebagai berikut:

Tabel 7.5.160 Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Nama SKPD	Saldo Awal 2024	Penambah			Pengurang			Saldo Akhir 2024
		Penambahan 2023	Mutasi Pengguna	Koreksi Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Pengguna	Penghapusan	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.835.821.481,00	2.635.024.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.470.845.541,00
Dinas Kesehatan	6.933.560.718,95	105.234.518,00	0,00	0,00	9.268.229,00	0,00	0,00	7.029.527.007,95
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.218.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	156.798.580,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	58.548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.548.700,00
Satuan Polisi Pamong Praja	100.573.366,69	33.890.000,00	0,00	0,00	45.325.500,00	0,00	0,00	89.137.866,69
Dinas Pemadam Kebakaran	135.030.800,00	24.815.050,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.320.850,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.624.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.624.200,00
Dinas Sosial	30.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.920.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	377.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.076.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	131.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.945.500,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	303.230.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.230.666,01
Dinas Lingkungan Hidup	31.646.900,00	20.197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.844.100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.654.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654.800,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.735.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.735.726,00
Dinas Perhubungan	114.444.000,00	29.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.374.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	76.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.894.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.200.701,00	21.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.140.701,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	37.594.535,00	2.950.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.544.535,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	234.770.217,00	1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.000,00	229.820.217,00
Dinas Perikanan	557.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.351.000,00
Dinas Pariwisata	130.073.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.073.200,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	471.885.664,00	31.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.998.664,00
Sekretariat Daerah	35.796.420.807,50	310.140.000,00	0,00	151.200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.257.760.807,50
Sekretariat DPRD	1.054.368.158,00	307.081.576,00	0,00	0,00	106.503.772,97	0,00	0,00	1.254.945.961,03
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	110.925.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.925.100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	104.340.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	101.865.866,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.297.000,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	12.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726.000,00
Inspektorat	32.928.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.928.050,00
Kecamatan Bunguran Timur	205.006.000,00	80.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.107.000,00
Kecamatan Bunguran Barat	53.444.750,00	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844.750,00	150.600.000,00
Kecamatan Bunguran Utara	207.336.960,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.336.960,00
Kecamatan Pulau Laut	295.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.496.500,00
Kecamatan Midai	127.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.134.500,00	0,00
Kecamatan Serasan	61.604.500,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.604.500,00
Kecamatan Subi	28.889.100,00	21.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.759.100,00
Kecamatan Pulau Tiga	220.053.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.053.250,00
Kecamatan Bunguran Tengah	40.934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.934.500,00
Kecamatan Bunguran Timur Laut	347.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.322.500,00	96.240.000,00
Kecamatan Bunguran Selatan	60.124.450,00	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.374.450,00
Kecamatan Serasan Timur	66.564.500,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.034.500,00	70.030.000,00
Kecamatan Suak Midai	47.975.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	49.935.000,00
Kecamatan Bunguran Batubi	56.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.720.000,00
Kecamatan Pulau Tiga Barat	110.413.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.213.000,00
Kecamatan Pulau Panjang	0,00	166.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.740.000,00
Kecamatan Pulau Seluan	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	53.306.900,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.286.900,00
JUMLAH	122.058.379.147,15	4.192.122.404,00	2.475.000,00	169.160.000,00	161.097.501,97	2.475.000,00	430.378.250,00	125.828.185.799,18

Nilai Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp7.112.927.630,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.161 Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	331.539.043,00	0,00	0,00	331.539.043,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.647.735,00	0,00	0,00	21.647.735,00
3	Dinas Kesehatan	191.806.400,00	0,00	0,00	191.806.400,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6.468.000,00	0,00	0,00	6.468.000,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.990.750,00	0,00	0,00	9.990.750,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.975.000,00	0,00	0,00	18.975.000,00
7	Dinas Perhubungan	5.612.714.222,07	0,00	0,00	5.612.714.222,07
8	Dinas Perikanan	87.649.880,00	0,00	0,00	87.649.880,00
9	Dinas Pariwisata	13.475.000,00	0,00	0,00	13.475.000,00

10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	251.795.500,00	0,00	0,00	251.795.500,00
11	Sekretariat Daerah	316.300.200,00	0,00	0,00	316.300.200,00
12	Sekretariat DPRD	220.315.900,00	0,00	0,00	220.315.900,00
13	Kecamatan Bunguran Timur Laut	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
14	Kecamatan Bunguran Selatan	23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
Total		7.112.927.630,07	0,00	0,00	7.112.927.630,07

7.5.3.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	44.060.032.229,88	43.834.912.844,05

Saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024 sebesar Rp44.060.032.229,88 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	51.476.505.648,31
Penambahan Tahun 2024	Rp	98.109.032.893,87
Jumlah	Rp	149.585.538.542,18
Pengurangan Tahun 2024	Rp	85.867.228.643,66
Saldo Aset Lainnya	Rp	63.718.309.898,52
Akumulasi per 31 Desember 2024	Rp	(19.658.277.668,64)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	44.060.032.229,88

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.060.032.229,88. Aset Lainnya pada tahun 2024 bertambah sebesar Rp98.109.032.893,87 dan berkurang sebesar Rp85.867.228.643,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.162 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo per31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo per31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	9.212.904.922,02	7.357.356.847,92	8.263.972.478,88	8.306.289.291,06
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	11.446.963.024,00	896.706.832,00	218.002.632,00	12.125.667.224,00
Aset Lain-Lain	15.684.101.702,29	83.761.805.213,95	62.252.717.532,78	37.193.189.383,46
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	15.132.536.000,00	6.093.164.000,00	15.132.536.000,00	6.093.164.000,00
Saldo Aset Lainnya	51.476.505.648,31	98.109.032.893,87	85.867.228.643,66	63.718.309.898,52
Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	0,00	(10.901.976.486,24)	0,00	(10.901.976.486,24)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.641.592.804,26)	(1.289.332.378,14)	(174.624.000,00)	(8.756.301.182,40)
Jumlah	43.834.912.844,05	85.917.724.029,49	85.692.604.643,66	44.060.032.229,88

Penambahan dan pengurangan nilai Aset Lainnya disajikan sesuai dengan klasifikasi pada Berita Acara Rekonsiliasi Aset.

7.5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	8.306.289.291,06	9.212.904.922,02

Tagihan Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Natuna di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.163 Rincian Tagihan Jangka Panjang

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir
		Penambahan 2024	Koreksi Pencatatan	Koreksi Pencatatan	Pelunasan	
Tuntutan Perbendaharaan	2.195.695.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.695.936,00
Tuntutan Ganti Rugi	7.017.208.986,02	7.116.350.290,43	241.006.557,49	0,00	8.263.972.478,88	6.110.593.355,06
Jumlah	9.212.904.922,02	7.116.350.290,43	241.006.557,49	0,00	8.263.972.478,88	8.306.289.291,06

Selama tahun 2024 terdapat penambahan Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp7.116.350.290,43 yang terdiri dari Rp5.288.754,66 temuan Inspektorat atas pekerjaan konstruksi, dan Rp 7.111.061.535,77 temuan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024 oleh BPK Perwakilan Kepulauan Riau. Kemudian terjadi koreksi pencatatan penambahan TGR koreksi sebesar Rp241.006.557,49 yang terdiri dari koreksi penambahan TGR sebesar Rp52.006.557,49 dan penyelesaian temuan tahun 2005 yang baru diselesaikan pada tahun 2024 sebesar Rp189.000.000,00.

Pengurangan Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp8.263.972.478,88, terdiri dari reklasifikasi dari TGR ke piutang lainnya – bagian lancar TGR Rp 5.657.164.773,69, dan pelunasan kerugian daerah berjumlah Rp2.606.807.705,19. Rincian pembayaran selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.164 Daftar Pembayaran Tagihan Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No	Nama Penanggung TGR	Pembayaran selama 2024
1	AH	189.000.000,00
2	AG	1.010.000,00
3	AS	9.726.250,00
4	AMA	1.900.000,00
5	AMB	6.400.000,00
6	AZ	404.928.333,00
7	KBP	15.034.782,00
8	SY	214.160.000,00
9	CV. AJP	27.141.698,09
10	CV. CA	24.482.900,00
11	CV. KA	71.199.884,08
12	CV. KS-BP	582.929,15
13	CV. SK	117.899.302,95
14	CV. TK	32.337.555,48
15	CV. TR	392.659.545,41
16	CV. TBCP	89.099.901,32
17	DA	32.998.500,00
18	DD	2.650.000,00
19	DK	29.345.110,00
20	MM DLH	29.381.300,00
21	DLH	2.795.000,00
22	HDP	26.501.500,00
23	PDP	32.560.000,00
24	ERL	46.033.550,00
25	PGP	475.000,00
26	EHM	13.837.684,46
27	EYN	2.100.000,00
28	FB	500.000,00
29	HD	20.652.450,00
30	YD	5.000.000,00
31	INTB	45.909.910,00
32	IL	1.900.000,00
33	IR	200.000,00

No	Nama Penanggung TGR	Pembayaran selama 2024
34	JF	1.900.000,00
35	JL	1.900.000,00
36	JS	1.650.000,00
37	KAF	6.400.000,00
38	MR	920.000,00
39	MV	2.650.000,00
40	MS	27.497.000,00
41	NN	1.200.000,00
42	MH	1.900.000,00
43	PT. ATK	31.354.400,00
44	PT. BSP	68.407.018,98
45	PT. E	59.102.410,50
46	PT. IK	5.488.333,33
47	PT. JSP	53.140.194,10
48	PT. KS-AF	16.346.856,34
49	PT. VPC	14.665.200,00
50	RAS	6.400.000,00
51	RHA	6.724.700,00
52	SKR	17.297.298,00
53	PDR	33.129.200,00
54	PDSET	82.280.000,00
55	PDDP	200.712.600,00
56	SN	1.900.000,00
57	SH	19.999.408,00
58	SP	6.400.000,00
59	CA	780.000,00
60	TA	6.400.000,00
61	TI	650.000,00
62	WZ	39.210.000,00
Jumlah		2.606.807.705,19

7.5.3.4.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	12.125.667.224,00	11.446.963.024,00

Perhitungan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	11.446.963.024,00
Jumlah Penambahan	Rp	896.706.832,00
Jumlah Pengurangan	Rp	218.002.632,00
Saldo Akhir	Rp	12.125.667.224,00

Adapun Peningkatan nilai Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.165 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tidak Terwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo awal	Penambahan					Pengurangan			Saldo akhir
			Realisasi tahun berjalan	Utang tahun 2024	Beban barang dan jasa	Peralatan dan mesin	Aset Tetap Tanah	Aset tetap lainnya	Beban barang dan jasa	Jalan, jaringan, dan irigasi	
1	Lisensi dan Franchise	0,00	73.378.632,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.378.632,00	0,00	200.000.000,00
2	Software	1.068.034.151,00	61.100.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	1.261.134.151,00
3	Kajian	10.378.928.873,00	0,00	0,00	199.411.500,00	120.000.000,00	140.816.700,00	0,00	0,00	174.624.000,00	10.664.533.073,00
JUMLAH		11.446.963.024,00	134.478.632,00	267.000.000,00	199.411.500,00	120.000.000,00	140.816.700,00	35.000.000,00	43.378.632,00	174.624.000,00	12.125.667.224,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp896.706.832,00 adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	134.478.632,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	267.000.000,00
Reklasifikasi Dari Beban Barang dan Jasa	Rp	199.411.500,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	120.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	Rp	140.816.700,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	35.000.000,00
Jumlah	Rp	896.706.832,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp896.706.832,00 terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp134.478.632,00 berupa Lisensi dan *Franchise* sebesar Rp73.378.632,00 dan *Software* sebesar Rp61.100.000,00, sedangkan utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp267.000.000,00. Kemudian reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp199.411.500,00 berupa Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp120.000.000,00 merupakan dokumen amdal TPA sebayar berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, Reklasifikasi aset tetap tanah Rp140.816.700,00 yang merupakan dokumen jasa penilaian perolehan tanah oleh KJPP, dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.000.000,00 berupa aplikasi SISMONKAB berasal dari Sekretariat Daerah.

Pengurangan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp218.002.632,00 adalah sebagai berikut:

Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp	43.378.632,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	174.624.000,00
Jumlah	Rp	218.002.632,00

Pengurangan Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp218.002.632,00 terdiri dari reklasifikasi Beban Barang dan Jasa berupa Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebesar Rp12.000.000,00, Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software* sebesar Rp1.250.540,00 dan Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise* sebesar Rp30.128.093,00, dan reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal sebesar Rp174.624.000,00 berasal dari Dinas Pariwisata.

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp12.125.667.224,00 berdasarkan SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.166 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Debet
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	329.575.000,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	930.423.000,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.405.849.920,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.691.509.560,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	320.347.500,00
1.05.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	330.952.218,00
2.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	1.305.855.000,00
2.15.01.	Dinas Perhubungan	817.410.000,00
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	170.000.000,00
2.19.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	734.575.875,00
2.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.900.000,00
3.26.01.	Dinas Pariwisata	856.602.500,00
3.31.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	479.080.000,00

Kode	SKPD	Debet
4.01.03.	Sekretariat Daerah	185.466.651,00
5.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	418.120.000,00
Jumlah		12.125.667.224,00

7.5.3.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	37.193.189.383,46	15.684.101.702,29

Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh pemerintah karena kondisinya yang rusak berat, hilang, atau sebab lain yang mengakibatkan aset tetap tersebut tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional dan merupakan aset yang dicadangkan untuk dilakukan penghapusan menunggu dokumen keputusan penghapusan terbit. Aset lain-lain yang dicatat oleh Pemerintah Daerah sebesar nilai buku aset lain-lain. Aset rusak berat, hilang, atau sebab lain yang mengakibatkan aset tetap tersebut tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional yang nilai bukunya 0 (nol) dicatat secara terpisah dan tidak disajikan di neraca sebagai bagian dari aset lain-lain. Perhitungan Aset Lain-lain sebagai berikut:

Saldo Awal	15.684.101.702,29
Koreksi karena Perubahan BAS	4.222.391.680,71
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.362.701.640,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.059.587.280,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	11.039.500,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap tanah	176.935.200,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	<u>6.676.432.380,46</u>
Jumlah	37.193.189.383,46

Penambahan sebesar Rp4.222.391.680,71 karena adanya pemutakhiran kode rekening berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penambahan dari reklasifikasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp176.935.200,00 pada Dinas Kesehatan, merupakan aset tetap tanah yang telah dihibahkan berdasarkan SK Bupati Natuna No. 134 Tahun 2024 menunggu proses penghapusan sehingga dicatat di Aset Lain-lain. Penambahan dari reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang rusak berat sebesar Rp6.676.432.380,46, penambahan dari reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.362.701.640,00 termasuk aset tetap gedung dan bangunan yang akan dihibahkan namun belum ada Berita Acara Serah Terima sehingga dicatat di Aset Lain-lain yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp472.097.459,00 berdasarkan SK Nomor 284 Tahun 2024 tentang hibah barang milik daerah berupa gedung dan bangunan pos lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Natuna. Penambahan dari reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp5.059.587.280,00 dan penambahan dari reklasifikasi aset tetap lainnya sebesar Rp11.039.500,00. Atas penambahan tersebut maka saldo akhir aset lain-lain per 31 Desember 2024 Rp37.193.189.383,46.

Tabel 7.5.167 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan						Saldo Akhir
			Koreksi karena Perubahan BAS	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.496.100,00	0,00	0,00	1.732.118.500,00	3.914.043.000,00	615.014.500,00	0,00	6.272.672.100,00
2.	Dinas Kesehatan	49.350.400,00	0,00	176.935.200,00	733.420.403,46	377.710.000,00	4.143.775.000,00	11.039.500,00	5.492.230.503,46
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	441.503.700,00	0,00	0,00	5.100.000,00	472.097.459,00	0,00	0,00	918.701.159,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.717.113.811,23	1.788.812.261,77	0,00	867.397.984,00	0,00	0,00	0,00	8.373.324.057,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	29.871.633,33	13.362.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.234.000,00
7.	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.808.333,33	45.741.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.550.000,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	49.896.000,00	0,00	0,00	331.046.600,00	0,00	0,00	0,00	380.942.600,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dinas Perhubungan	408.170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.170.800,00
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	113.450.000,00	0,00	0,00	113.450.000,00
16.	Dinas Perikanan	1.095.457.437,74	287.659.062,26	0,00	75.809.000,00	485.401.181,00	300.797.780,00	0,00	2.245.124.461,00
17.	Dinas Pariwisata	205.370.344,44	27.834.655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.205.000,00
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	6.031.083,33	175.013.916,67	0,00	59.053.000,00	0,00	0,00	0,00	240.098.000,00
19.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.151.854.160,56	1.625.243.649,44	0,00	14.490.000,00	0,00	0,00	0,00	7.791.587.810,00
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.378.643.515,00	154.358.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.002.000,00
25.	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Kecamatan Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Kecamatan Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Kecamatan Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Kecamatan Pulau Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Kecamatan Midai	0,00	0,00	0,00	408.952.500,00	0,00	0,00	0,00	408.952.500,00
31.	Kecamatan Serasan	47.401.383,33	81.738.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.140.000,00
32.	Kecamatan Subi	0,00	0,00	0,00	2.361.294.393,00	0,00	0,00	0,00	2.361.294.393,00
33.	Kecamatan Pulau Tiga	67.133.000,00	22.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.760.000,00
34.	Kecamatan Bunguran Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kecamatan Bunguran Selatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan						Saldo Akhir
			Koreksi karena Perubahan BAS	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	
37.	Kecamatan Serasan Timur	0.00	0.00	0.00	8,950,000.00	0.00	0.00	0.00	8,950,000.00
38.	Kecamatan Suak Midai	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		15,684,101,702.29	4,222,391,680.71	176,935,200.00	6,676,432,380.46	5,362,701,640.00	5,059,587,280.00	11,039,500.00	37,193,189,383.46

Aset rusak berat, hilang, atau sebab lain yang mengakibatkan aset tetap tersebut tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional yang nilai bukunya 0 (nol) dicatat secara terpisah dan tidak disajikan di neraca sebagai bagian dari aset lain-lain disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.168 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Lain-Lain Nilai Buku 0 (Nol)
(dalam rupiah)

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan Koreksi Saldo Awal	Pengurangan		Jumlah
				PENGHAPUSAN SK 420 TAHUN 2024	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,727,049,305.00	227,654,000.00	27,062,000.00	0.00	3,927,641,305.00
2.	Dinas Kesehatan	32,403,224,490.53	0.00	114,690,000.00	17,160,000.00	32,271,374,490.53
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	621,666,907.00	0.00	0.00	0.00	621,666,907.00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4,070,734,346.00	0.00	0.00	0.00	4,070,734,346.00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	353,820,000.00	0.00	325,000,000.00	0.00	28,820,000.00
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dinas Sosial	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	405,048,000.00	0.00	0.00	0.00	405,048,000.00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16,508,825.00	0.00	0.00	0.00	16,508,825.00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	46,398,000.00	0.00	0.00	0.00	46,398,000.00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	1,348,408,120.00	0.00	0.00	0.00	1,348,408,120.00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13,365,000.00	0.00	0.00	0.00	13,365,000.00
13.	Dinas Perhubungan	9,558,635,167.00	0.00	0.00	0.00	9,558,635,167.00
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37,821,200.00	0.00	0.00	0.00	37,821,200.00
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Dinas Perikanan	1,010,218,341.67	0.00	94,232,000.00	0.00	915,986,341.67
17.	Dinas Pariwisata	549,028,425.00	0.00	0.00	0.00	549,028,425.00
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	225,872,500.25	0.00	0.00	0.00	225,872,500.25
19.	Sekretariat Daerah	2,780,799,200.00	0.00	0.00	0.00	2,780,799,200.00
20.	Sekretariat DPRD	232,407,750.00	0.00	34,760,000.00	0.00	197,647,750.00
21.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	555,306,587.33	0.00	0.00	0.00	555,306,587.33
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	159,937,050.00	0.00	68,595,500.00	0.00	91,341,550.00
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
24.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Inspektorat Daerah	33,270,700.00	0.00	0.00	0.00	33,270,700.00
26.	Kecamatan Bunguran Timur	125,598,000.00	0.00	0.00	0.00	125,598,000.00
27.	Kecamatan Bunguran Barat	67,799,000.00	0.00	0.00	0.00	67,799,000.00
28.	Kecamatan Bunguran Utara	527,744,800.00	0.00	99,000,000.00	0.00	428,744,800.00
29.	Kecamatan Pulau Laut	821,838,200.00	0.00	442,937,000.00	0.00	378,901,200.00
30.	Kecamatan Midai	242,478,500.00	0.00	0.00	0.00	242,478,500.00
31.	Kecamatan Serasan	838,637,250.00	0.00	0.00	0.00	838,637,250.00
32.	Kecamatan Subi	568,525,868.00	0.00	0.00	0.00	568,525,868.00
33.	Kecamatan Pulau Tiga	31,399,500.00	0.00	0.00	0.00	31,399,500.00
34.	Kecamatan Bunguran Tengah	47,564,000.00	0.00	0.00	0.00	47,564,000.00
35.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	31,399,500.00	0.00	0.00	0.00	31,399,500.00
36.	Kecamatan Bunguran Selatan	44,141,500.00	0.00	31,399,500.00	0.00	12,742,000.00
37.	Kecamatan Serasan Timur	321,698,600.00	0.00	0.00	0.00	321,698,600.00
38.	Kecamatan Suak Midai	177,853,500.00	0.00	0.00	0.00	177,853,500.00
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22,190,400.00	0.00	0.00	0.00	22,190,400.00
Total		62,025,063,532.78	227,654,000.00	1,242,676,000.00	17,160,000.00	60,992,881,532.78

Penambahan Aset Lain-lain nilai buku 0 (nol) pada tahun 2024 yang berasal dari kurang catat saldo awal Aset Lain-lain berdasarkan SK Bupati Natuna Nomor 204 Tahun 2023 sebesar Rp227.654.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan pengurangan berasal dari Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp17.160.000,00, dan Penghapusan berdasarkan SK No. 420 Tahun 2024 Tentang

Penghapusan Barang Rusak Berat Milik Pemerintah Daerah Berupa Aset Lain-lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Rp1.242.676.000,00.

7.5.3.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.756.301.182,40. Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) Tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	7.641.592.804,26
Penambahan		
Penambahan Beban Amortisasi Tahun 2024	Rp	1.288.782.378,13
Koreksi Pencatatan Saldo Tahun sebelumnya	Rp	550.000,01
Jumlah Penambahan	Rp	1.289.332.378,14
Pengurangan		
Reklasifikasi aset tak berwujud ke aset tetap jalan, jaringan dan irigasi	Rp	174.624.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	174.624.000,00
Saldo Akhir	Rp	8.756.301.182,40

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.756.301.182,40 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.169 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(223.757.916,67)
2	Dinas Kesehatan	(835.039.666,66)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.706.358.554,33)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(648.468.970,00)
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(320.347.500,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(71.706.313,90)
7	Dinas Lingkungan Hidup	(1.189.855.000,00)
8	Dinas Perhubungan	(817.410.000,00)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(5.666.666,67)
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	(599.903.631,25)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(124.916.666,67)
12	Dinas Pariwisata	(506.589.525,00)
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	(320.985.333,33)
14	Sekretariat Daerah	(44.444.437,91)
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(340.851.000,01)
Jumlah		(8.756.301.182,40)

7.5.3.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Pada tahun 2023 saldo akumulasi penyusutan tidak disajikan dalam neraca pemerintah daerah, ini disebabkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah tidak terdapat Kode Rekening Akumulasi Aset Lain-lain, sehingga saldo awal akumulasi aset lain-lain adalah 0 (nol).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.901.976.486,24. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	0,00
Penambahan		
Koreksi Pencatatan Saldo Tahun sebelumnya	Rp	4.222.391.680,71
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	3.774.003.118,62
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	1.424.425.172,43
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	1.481.156.514,48
Jumlah Penambahan	Rp	10.901.976.486,24
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Saldo Akhir	Rp	10.901.976.486,24

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya antara lain dari koreksi pencatatan saldo awal sebesar Rp4.222.391.680,71 karena adanya pemutakhiran kode rekening berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang pada tahun sebelumnya tidak ada sehingga pencatatan pada Neraca sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya dicatat sebesar nilai buku.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.901.976.486,24 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.170 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.806.233.900,22
2.	Dinas Kesehatan	1.902.362.000,18
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.597.676,64
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.566.542.988,60
5.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13.362.366,67
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.741.666,67
7.	Dinas Lingkungan Hidup	259.740.900,00
8.	Dinas Perhubungan	0,00
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.875.000,00
10.	Dinas Pemuda dan Olahraga	25.148.083,33
11.	Dinas Perikanan	534.811.855,82
12.	Dinas Pariwisata	27.834.655,56
13.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	208.803.266,67
14.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.638.224.274,44
15.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	154.358.485,00
16.	Kecamatan Midai	315.651.874,99
17.	Kecamatan Serasan	81.738.616,67
18.	Kecamatan Subi	1.202.634.374,78
19.	Kecamatan Pulau Tiga	22.627.000,00
20.	Kecamatan Bunguran Selatan	0,00
21.	Kecamatan Serasan Timur	7.625.000,00
22.	Kecamatan Suak Midai	27.062.500,00
JUMLAH		10.901.976.486,24

7.5.3.4.6 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	6.093.164.000,00	15.132.536.000,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Tata cara pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility*. Rincian TDF sebagai berikut:

Tabel 7.5.171 Rincian *Treasury Deposit Facility* (TDF)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Saldo Awal	Penambahan TDF Tahun 2024	Pencairan TDF 2024	Saldo Per 31 Desember 2024
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.057.788.000,00	217.153.000,00	8.057.788.000,00	217.153.000,00
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	2.091.084.000,00	0,00	2.091.084.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	17.361.000,00	0,00	17.361.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.671.201.000,00	5.799.833.000,00	4.671.201.000,00	5.799.833.000,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	64.021.000,00	0,00	64.021.000,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	295.102.000,00	1.000,00	295.102.000,00	1.000,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	12.153.000,00	0,00	12.153.000,00
Jumlah		15.132.536.000,00	6.093.164.000,00	15.132.536.000,00	6.093.164.000,00

Penambahan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Kabupaten Natuna Tahun 2024 berdasarkan penetapan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.

7.5.3.5 Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	187.228.674.485,12	2.053.727.104,58

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp187.228.674.485,12 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023	Rp	2.053.727.104,58
Penambahan Kewajiban	Rp	187.228.674.485,12

Jumlah	Rp	189.282.401.589,70
Pengurangan Kewajiban	Rp	2.053.727.104,58
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	187.228.674.485,12

Saldo Kewajiban sebesar Rp187.228.674.485,12 merupakan Pendapatan diterima dimuka dan utang Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

7.5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang pembayarannya diharapkan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp187.228.674.485,12 dengan perhitungan:

Tabel 7.5.172 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Penambahan Kewajiban		Pengurangan Kewajiban		Saldo Akhir per 31 Desember 2024
			Penambahan	Koreksi Pencatatan	Pelunasan	Koreksi Pencatatan	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	3.208.857,00	0,00	0,00	0,00	3.208.857,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	37.033.333,34	111.136.861,32	0,00	37.033.333,34	0,00	111.136.861,32
3	Utang Belanja	2.016.693.771,24	187.005.272.345,80	109.056.421,00	1.946.480.253,24	70.213.518,00	187.114.328.766,80
	Jumlah	2.053.727.104,58	187.119.618.064,12	109.056.421,00	1.983.513.586,58	70.213.518,00	187.228.674.485,12

7.5.3.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	3.208.857,00	0,00

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024 adalah sebesar Rp3.208.857,00 yang merupakan Utang PPN Pusat, Utang PPh 21 dan Utang PPh 23 pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024. Adapun Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.173 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Asuransi Kesehatan	0,00	18.729.617.790,00	18.729.617.790,00	0,00
2	Iuran Wajib Pegawai	0,00	13.737.144.364,00	13.737.144.364,00	0,00
3	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	371.253.343,00	371.253.343,00	0,00
4	Jaminan Kematian	0,00	1.113.758.673,00	1.113.758.673,00	0,00
5	PPN	0,00	20.052.160.747,00	20.049.895.341,00	2.265.406,00
6	PPh 21	0,00	13.764.105.233,00	13.764.075.233,00	30.000,00
7	PPh 22	0,00	967.584.610,00	967.584.610,00	0,00
8	PPh 23	0,00	202.342.629,00	201.429.178,00	913.451,00
9	PPh 4 (2)/PPh 25	0,00	2.332.245.275,00	2.332.245.275,00	0,00
	Jumlah	0,00	71.270.212.664,00	71.267.003.807,00	3.208.857,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 berada pada:

Tabel 7.5.174 Daftar Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) SKPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Utang PPh 21	Utang PPh 23	Utang PPN Pusat	Jumlah Utang PFK
1	Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna	0,00	77.201,00	382.523,00	459.724,00
2	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna	0,00	456.800,00	0,00	456.800,00
3	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pulau Laut Kab. Natuna	0,00	50.450,00	0,00	50.450,00
4	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Serasan Timur Kab. Natuna	0,00	189.000,00	297.297,00	486.297,00
5	Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Natuna	30.000,00	140.000,00	1.585.586,00	1.755.586,00
Jumlah		30.000,00	913.451,00	2.265.406,00	3.208.857,00

7.5.3.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	111.136.861,32	37.033.333,34

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp111.136.861,32 merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Natuna namun secara akuntansi akrual belum merupakan hak Pemerintah Kabupaten Natuna yang merupakan Sewa ruangan ATM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.175 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	No. Surat Perjanjian	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Selesai Sewa	Biaya Sewa	Pencatatan Pendapatan LO Tahun Berjalan	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1041/RSUD-NATUNA/IX/2024	01/10/2024	01/10/2027	60.600.000,00	5.031.569,34	55.568.430,66
2	Sekretariat Daerah	000.2.3.2/276/UM-SET/IX/2024	01/10/2024	01/10/2027	60.600.000,00	5.031.569,34	55.568.430,66
Jumlah					121.200.000,00	10.063.138,68	111.136.861,32

7.5.3.5.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	187.114.328.766,80	2.016.693.771,24

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar Rp187.114.328.766,80 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja Pegawai	Rp	18.052.064.021,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp	45.870.723.999,89
Utang Belanja Hibah	Rp	9.734.488.173,00
Utang Belanja Modal Tanah	Rp	1.678.368.632,68
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	20.095.077.672,59
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	33.516.178.323,99
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	56.813.749.847,78
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	598.755.000,00
Utang Belanja Tidak Terduga	Rp	487.923.095,87

Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Rp	267.000.000,00
Jumlah	Rp	187.114.328.766,80

Adapun saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024 sebesar Rp187.114.328.766,80 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.176 Mutasi Perhitungan Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal (Per 31 Des 2023)	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir
			Koreksi Pencatatan Utang Tahun sebelumnya	Penambahan 2024	Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Utang Belanja Pegawai	1.119.800.975,00	0,00	18.052.064.021,00	1.082.408.307,00	37.392.668,00	18.052.064.021,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	896.892.796,24	0,00	45.870.723.999,89	864.071.946,24	32.820.850,00	45.870.723.999,89
3	Utang Belanja Hibah	0,00	0,00	9.734.488.173,00	0,00	0,00	9.734.488.173,00
4	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	1.678.368.632,68	0,00	0,00	1.678.368.632,68
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	20.095.077.672,59	0,00	0,00	20.095.077.672,59
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	33.516.178.323,99	0,00	0,00	33.516.178.323,99
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	109.056.421,00	56.704.693.426,78	0,00	0,00	56.813.749.847,78
8	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	598.755.000,00	0,00	0,00	598.755.000,00
9	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	487.923.095,87	0,00	0,00	487.923.095,87
10	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	267.000.000,00	0,00	0,00	267.000.000,00
Jumlah		2.016.693.771,24	109.056.421,00	187.005.272.345,80	1.946.480.253,24	70.213.518,00	187.114.328.766,80

Saldo awal utang belanja Rp1.119.800.975,00. Atas utang tersebut dilakukan pembayaran utang belanja pegawai Rp1.082.408.307,00 dan Rp37.392.668,00 dilakukan koreksi pencatatan atas kelebihan pencatatan utang belanja pegawai RSUD ASN berdasarkan hasil verifikasi BPJS Kesehatan yang dilakukan pembayaran pada bulan Mei dan Juni 2024. Sedangkan utang belanja barang dan jasa Rp896.892.796,24 dibayarkan sebesar Rp864.071.946,24 pada bulan Mei untuk pegawai Non ASN dan Rp32.820.850,00 dilakukan koreksi pencatatan sebesar Rp32.820.850,00 berdasarkan hasil verifikasi BPJS Kesehatan untuk jasa pelayanan medis pegawai non ASN.

Pada Tahun 2024 terjadi penambahan utang secara signifikan yang menjadi bagian tagihan atas belanja Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024 yang belum terbayarkan senilai Rp187.114.328.766,80. Penyebab timbulnya kewajiban yang sangat signifikan tersebut karena tidak tercapainya realisasi target pendapatan sesuai yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2024 yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Penyusunan anggaran pendapatan daerah yang tidak menggunakan dasar yang tepat dan sesuai alokasi penetapan. Hal tersebut terjadi diantaranya pada penyusunan anggaran pendapatan Pajak MBLB, Transfer DBH oleh pemerintah pusat, dan Transfer DBH oleh pemerintah provinsi yang ditetapkan terlampaui tinggi karena menggunakan asumsi realisasi pendapatan tahun sebelumnya;
- 2) Manajemen kas yang belum mempertimbangkan ketersediaan dana pada saat menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas kegiatan belanja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran berkegiatan terlebih dahulu hanya dengan menggunakan dasar DPA tanpa melakukan koordinasi lebih lanjut

dengan BUD untuk memastikan ketersediaan dana pada Kas Daerah melalui penerbitan SPD.

Pembayaran Utang Belanja akan dilaksanakan secara selektif dengan melihat keterjadian transaksi sehingga untuk perhitungan saldo Utang Belanja tahun anggaran berikutnya apabila ditemukan Utang Belanja pada Pemerintah Kabupaten Natuna yang secara substansi tidak sesuai dengan keterjadian transaksinya, maka akan dilakukan koreksi kurang atas utang tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Rincian utang belanja Per SKPD sebesar Rp187.114.328.766,80 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.177 Daftar Utang Belanja Per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.899.106.108,90
2	Dinas Kesehatan	26.228.619.503,25
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.636.076.049,13
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.453.863.955,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	2.115.656.269,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	735.406.067,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	608.383.984,00
8	Dinas Sosial	217.381.400,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	678.949.899,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.056.204.467,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.631.934.577,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.361.670.840,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	341.395.081,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.638.034.540,00
15	Dinas Perhubungan	7.789.396.150,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.824.474.687,84
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.073.016.835,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.791.336.985,68
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	537.331.631,00
20	Dinas Perikanan	583.723.903,00
21	Dinas Pariwisata	1.994.098.580,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	1.711.695.249,00
23	Sekretariat Daerah	4.322.689.804,00
24	Sekretariat DPRD	8.910.455.676,58
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	612.349.206,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.835.352.117,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	750.440.023,00
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	356.515.607,00
29	Inspektorat Daerah	1.942.660.475,00
30	Kecamatan Bunguran Timur	673.624.962,00
31	Kecamatan Bunguran Barat	764.083.813,00
32	Kecamatan Bunguran Utara	105.622.682,00
33	Kecamatan Pulau Laut	121.080.510,00
34	Kecamatan Midai	153.977.662,00
35	Kecamatan Serasan	344.095.533,00
36	Kecamatan Subi	244.128.059,00
37	Kecamatan Pulau Tiga	244.682.256,00
38	Kecamatan Bunguran Tengah	177.474.832,00
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	637.078.181,42
40	Kecamatan Bunguran Selatan	168.959.558,00

No	SKPD	Jumlah
41	Kecamatan Serasan Timur	78.103.218,00
42	Kecamatan Suak Midai	92.285.499,00
43	Kecamatan Bunguran Batubi	390.724.135,00
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	405.000.883,00
45	Kecamatan Pulau Panjang	648.173.739,00
46	Kecamatan Pulau Seluan	291.454.640,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	935.558.934,00
Jumlah		187.114.328.766,80

Sesuai rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, utang belanja akan diselesaikan pembayarannya secara keseluruhan pada tahun 2025. Jadwal pembayaran utang belanja di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.178 Skedul Pembayaran Utang Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Utang	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Sisa Utang
		Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	
Utang Belanja Modal Aset Lainnya	267.000.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		267.000.000,00	Kurang Bayar DBH 2023 & 2024	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	45.860.803.999,89	0,00		0,00		4.262.270.133,00	Kurang Bayar DBH Provinsi & DBH PPH 21	0,00		1.199.598.423,00	DBH PBB Migas	3.027.666.038,00	DBH Bagi Hasil Provinsi	5.787.734.175,00	DBH Pajak Provinsi & Pajak Mineral Bukan Logam	0,00		223.430.490,00	Pajak Mineral Bukan Logam	1.653.595.733,80	DBH Minyak Bumi, dan Pajak Mineral Bukan Logam	0,00		29.706.509.007,09	Kurang Bayar DBH 2023 & 2024	0,00
Utang Belanja Hibah	9.734.488.173,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.734.488.173,00	Kurang Bayar DBH 2023 & 2024	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	608.755.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		608.755.000,00	Kurang Bayar DBH 2023 & 2024	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.516.178.323,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.367.176.541,05	Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Dividen)	0,00		2.367.456.909,00		0,00		27.781.544.873,94	Kurang Bayar DBH 2023 & 2024	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Irigasi	56.813.749.847,78	0,00		7.624.315.377,61	TDP DBH	0,00		0,00		19.544.395.387,59	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Dividen), Pajak Mineral Bukan Logam & DBH PPH 21	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.645.039.182,58	Kurang Bayar DBH 2023 & 2024	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.095.077.672,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.944.154.722,00	Pajak Mineral Bukan Logam	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.150.922.950,59	Kurang Bayar DBH 2023 & 2024	0,00
Utang Belanja Modal Tanah	1.678.368.632,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.678.368.632,68	Kurang Bayar DBH 2023 & 2024	0,00
Utang Belanja Pegawai	18.051.064.021,00	0,00		0,00		14.964.792.749,00	Kurang Bayar DBH Provinsi & DBH PPH 21	228.730.148,00	Kurang Bayar DBH Provinsi	2.858.541.124,00	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Dividen), Pajak Mineral Bukan Logam & DBH PPH 21	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Utang Belanja Tidak Terutang	487.923.095,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		487.923.095,87	Kurang Bayar DBH 2023 & 2024	0,00
Jumlah	187.114.408.766,80			7.624.315.377,61		19.227.062.882,00		228.730.148,00		23.602.534.834,59		7.971.820.760,00		5.787.734.175,00		3.367.176.541,05		223.430.490,00		4.021.052.642,80				115.060.550.915,75		0,00

7.5.3.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas	(Rp)	(Rp)
	2.741.115.230.870,65	2.963.194.325.090,44

Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.741.115.230.870,65 dengan perhitungan:

Ekuitas Awal (Saldo Akhir Tahun 2023)	Rp	2.963.194.325.090,44
Penambahan Selama Tahun 2024	Rp	927.575.573.279,15
Jumlah	Rp	3.890.769.898.369,59
Pengurangan Selama Tahun 2024	Rp	1.149.654.667.498,94
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.741.115.230.870,65

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	927.480.702.987,15	1.284.550.003.188,82

Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp927.480.702.987,15 atau menurun sebesar 27,80% dibanding tahun 2023. Rincian Pendapatan-LO tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.179 Rincian Pendapatan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	82.908.917.614,24	96.521.016.902,31	(14,10)
2	Pendapatan Transfer – LO	833.573.927.023,00	1.161.415.344.811,00	(28,23)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	10.997.858.349,91	26.613.641.475,51	(58,68)
Jumlah		927.480.702.987,15	1.284.550.003.188,82	(27,80)

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp82.908.917.614,24 mengalami penurunan sebesar (14,10)% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan sebagai berikut:

Tabel 7.5.180 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Daerah-LO	38.619.009.516,74	57.512.536.963,64	(32,85)
2	Retribusi Daerah-LO	32.778.155.802,21	986.362.910,00	3.223,13
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.387.416.960,00	6.927.016.847,00	(22,23)
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	6.124.335.335,29	31.095.100.181,67	(80,30)
Jumlah		82.908.917.614,24	96.521.016.902,31	(14,10)

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp38.619.009.516,74, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.181 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Hotel-LO	812.018.382,00	722.504.512,00	12,39
2	Pajak Restoran-LO	2.646.281.145,36	2.803.839.088,64	(5,62)
3	Pajak Hiburan-LO	44.439.700,00	17.566.200,00	152,98
4	Pajak Reklame-LO	137.077.750,00	142.088.250,00	(3,53)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	6.887.728.615,00	6.308.949.822,00	9,17
6	Pajak Parkir-LO	0,00	2.550.000,00	(100,00)
7	Pajak Air Tanah-LO	200.000,00	3.000.000,00	(93,33)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	23.835.757.984,00	39.128.097.806,00	(39,08)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	3.863.052.294,38	4.002.438.512,00	(3,48)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	392.453.646,00	4.381.502.773,00	(91,04)
Jumlah		38.619.009.516,74	57.512.536.963,64	(32,85)

Penurunan Pendapatan Pajak ini dikarenakan menurunnya Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Natuna mengalami penurunan sebesar (32,85)% dari tahun sebelumnya. Penjelasan masing-masing Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO tahun 2024 sebesar Rp812.018.382,00 mengalami kenaikan sebesar 12,39% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp722.504.512,00. Hal ini disebabkan karena meningkat kunjungan ke Kabupaten Natuna, seperti adanya kegiatan Operasional Perangkat Daerah serta *event* pariwisata tahun 2024

b) Pajak Restoran-LO

Pajak Restoran-LO tahun 2024 sebesar Rp2.646.281.145,36 mengalami penurunan sebesar (5,62)% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.803.839.088,64. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak Restoran untuk menerapkan pajak terhadap konsumsi makan minum di restoran.

c) Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO tahun 2024 sebesar Rp44.439.700,00 mengalami kenaikan sebesar 152,98% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp17.566.200,00. Hal ini disebabkan karena intensifikasi penagihan dan pengawasan pajak hiburan, serta mengedukasi wajib pajak untuk membayar pajak yang terdiri dari:

Tabel 7.5.182 Rincian Pajak Hiburan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	41.784.700,00	15.870.200,00	163,29
2	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	1.500.000,00	645.000,00	132,56
3	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	1.155.000,00	1.051.000,00	9,90
Jumlah		44.439.700,00	17.566.200,00	152,98

d) Pajak Reklame-LO

Pajak Reklame-LO tahun 2024 sebesar Rp137.077.750,00 mengalami penurunan sebesar (3,53)% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp142.088.250,00. Faktor penyebab menurunnya pendapatan pajak reklame kurangnya promosi usaha yang dilakukan oleh pemilik usaha dan kurang insentifnya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.183 Rincian Pajak Reklame-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	102.033.000,00	112.246.000,00	(9,10)
2	Pajak Reklame Kain-LO	31.884.250,00	25.626.000,00	24,42
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	1.277.500,00	1.916.250,00	(33,33)
4	Pajak Reklame Berjalan-LO	1.883.000,00	2.300.000,00	(18,13)
Jumlah		137.077.750,00	142.088.250,00	(3,53)

e) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2024 sebesar Rp6.887.728.615,00 mengalami kenaikan sebesar 9,17% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.308.949.822,00. Faktor penyebab meningkatnya pendapatan pajak penerangan jalan karena meningkatnya konsumsi energi listrik oleh masyarakat dan sektor usaha dan non usaha di Kabupaten Natuna.

f) Pajak Parkir-LO

Tidak terdapat Pajak Parkir yang diterima Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (100,00)% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.550.000,00. Hal ini disebabkan karena pemindahan pasar rakyat ranai sejak bulan Oktober tahun 2023 direlokasikan ke tempat yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, tepatnya di Jalan Datuk Kaya Wan Mohammad Benteng (Belakang Kantor BRKS), sehingga potensinya beralih ke Retribusi Daerah menjadi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Perda Nomor 15 Tahun 2023).

g) Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah-LO tahun 2024 sebesar Rp200.000,00 mengalami penurunan sebesar (93,33)% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.000.000,00. Salah satu faktor penyebab menurunnya pajak air tanah dikarenakan potensi pajak yang relatif kecil, serta masih bersifat konsumsi pribadi maupun rumah tangga.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2024 sebesar Rp23.835.757.984,00 mengalami penurunan sebesar (39,08)% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp39.128.097.806,00 Hal ini disebabkan karena faktor ketidakstabilan harga pasir kuarsa, serta faktor alam (cuaca) yang mempengaruhi proses penjualan pasir kuarsa sehingga berdampak terhadap penerimaan Pajak Daerah. terdiri dari:

Tabel 7.5.184 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	40.750.580,00	31.199.440,00	30,61
2	Pajak Pasir Kuarsa-LO	23.378.300.000,00	38.729.347.500,00	(39,64)
3	Pajak Tanah Liat-LO	38.375.538,00	22.684.200,00	69,17
4	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	378.331.866,00	344.866.666,00	9,70
Jumlah		23.835.757.984,00	39.128.097.806,00	(39,08)

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO tahun 2024 sebesar Rp3.863.052.294,38 mengalami penurunan sebesar (3,48)% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.002.438.512,00. Faktor penyebab menurunnya pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena belum optimalnya penagihan pajak daerah disebabkan letak geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau dan jarak tempuh relatif lama dan jauh.

j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Tabel 7.5.185 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	317.925.875,00	446.970.100,00	(28,87)
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	74.527.771,00	3.934.532.673,00	(98,11)
Jumlah		392.453.646,00	4.381.502.773,00	(91,04)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tahun 2024 sebesar Rp392.453.646,00 mengalami penurunan sebesar (91,04)% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.381.502.773,00. Faktor penyebab menurunnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena masih rendahnya tingkat transaksi properti di kalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat relatif rendah dalam mengurus legalitas atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

Terdapat perbedaan antara Pajak daerah – LO dan Pajak Daerah LRA sebagai berikut:

	LO	LRA	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	38.619.009.516,74	27.007.756.522,38	11.611.252.994,36

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.611.252.994,36 merupakan selisih antara pendapatan Pajak Daerah LO yang berasal dari penambahan piutang dikurangi dengan pelunasan piutang tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun berjalan. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.186 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan Piutang PBB-P2 Tahun 2024	2.994.743.559,00
2	Penambahan Piutang Pajak Reklame Tahun 2024	833.000,00
3	Penambahan Piutang Pajak MBLB-Pajak Pasir Kuarsa Tahun 2024	9.098.125.000,00
4	Jumlah penambahan (1 s.d 3)	12.093.701.559,00
5	Pelunasan Piutang PBB-P2 pada Tahun Berjalan	434.136.496,00
6	Pelunasan Piutang Pajak Reklame pada Tahun Berjalan	1.407.000,00
7	Pelunasan Piutang BPHTB pada Tahun Berjalan	2.762.705,00
8	Pelunasan Piutang Pajak Restoran pada Tahun Berjalan	44.142.363,64
9	Jumlah Pengurangan (4 s.d 8)	482.448.564,64
10	Jumlah (3-9)	11.611.252.994,36

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp32.778.155.802,21 meningkat sebesar 3.223,13% dari tahun sebelumnya Rp986.362.910,00. Terjadi kenaikan secara signifikan diantaranya dikarenakan reklasifikasi Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Bangunan Gedung Kantor pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, koreksi TGR atas Pengelolaan Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, dan reklasifikasi pendapatan BLUD atas kesalahan penganggaran ke retribusi pelayanan kesehatan di RSUD. Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.187 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	32.566.455.313,67	826.874.200,00	3.838,50
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	94.736.387,54	39.265.000,00	141,27
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	116.964.101,00	120.223.710,00	(2,71)
Jumlah		32.778.155.802,21	986.362.910,00	3.223,13

Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum-LO

Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2024 sebesar Rp32.566.455.313,67 terjadi kenaikan signifikan 3.838,50% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 7.5.188 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	32.183.829.639,67	667.300.700,00	4.722,99
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	126.439.500,00	129.583.500,00	(2,43)
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	238.786.174,00	0,00	100,00
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	17.400.000,00	17.600.000,00	(1,14)
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	12.390.000,00	(100,00)
Jumlah		32.566.455.313,67	826.874.200,00	3.838,50

b) Retribusi Jasa Usaha-LO

Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2024 sebesar Rp94.736.387,54 mengalami kenaikan sebesar 141,27% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 7.5.189 Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	7.260.000,00	3.265.000,00	122,36
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	23.500.000,00	0,00	100,00
3	Retribusi Penyeberangan di Air-LO	33.264.000,00	36.000.000,00	(7,60)
4	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	30.712.387,54	0,00	100,00
Jumlah		94.736.387,54	39.265.000,00	141,27

c) Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2024 sebesar Rp116.964.101,00 mengalami penurunan (2,71)% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.190 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	120.223.710,00	(100,00)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	116.964.101,00	0,00	100,00
Jumlah		116.964.101,00	120.223.710,00	(2,71)

Terdapat perbedaan antara Retribusi – LO dan Retribusi LRA sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Daerah	32.778.155.802,21	1.657.755.749,00	31.120.400.053,21

Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah -LRA Tahun 2024 adalah sebesar Rp31.120.400.053,21 merupakan selisih antara pendapatan Retribusi Daerah LO yang berasal dari penambahan piutang dikurangi dengan pelunasan piutang tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun berjalan. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.191 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan dari Pendapatan diterima dimuka	37.033.333,34
3	Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	8.498.580.554,00
4	Penambahan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Sewa Ruang ATM	4.538.082,19
5	Reklasifikasi dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO ke Pendapatan Retribusi Pelayanan di RSUD	24.524.388.624,00
6	Reklasifikasi dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO ke Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa ATM di RSUD)	63.244.500,00
7	TGR atas pengelolaan Retribusi Kios pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	101.756.174,00
8	Penambahan dari Reklasifikasi Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO (Sewa ATM di Sekretariat Daerah)	60.600.000,00
9	Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Tahun 2024	2.550.000,00
10	Jumlah Penambahan (2 s.d 9)	33.292.691.267,53
11	Pengurangan	
12	Pelunasan Piutang BLUD Tahun 2024	2.061.154.353,00
13	Reklasifikasi ke Pendapatan Diterima Dimuka	111.136.861,32
14	Jumlah Pengurangan	2.172.291.214,32
15	Jumlah Selisih (10-14)	31.120.400.053,21

7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar tahun 2024 sebesar Rp5.387.416.960,00 merupakan dividen hasil dari investasi jangka panjang permanen pada Bank Riau Kepri Syariah, terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar (2,71)% dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO Tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.927.016.847,00.

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA, ini dikarenakan tidak adanya transaksi yang mempengaruhi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

7.5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp6.124.335.335,29 terdiri dari:

Tabel 7.5.192 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.079.316.280,00	0,00	100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	45.399.500,00	371.750.000,00	(87,79)
3	Jasa Giro-LO	1.431.168.107,26	877.434.099,73	63,11
4	Pendapatan Bunga-LO	1.306.195.871,41	60.092.972,00	2.073,63
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	356.279.625,60	287.764.500,18	23,81
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.668.043.384,00	68.899.701,31	2.320,97
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	52.648.954,00	74.142.763,00	(28,99)
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	153.538.290,00	57.061.217,46	169,08
9	Pendapatan dari BLUD-LO	31.745.323,02	22.626.890.252,99	(99,86)
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	6.671.064.675,00	(100,00)
Jumlah		6.124.335.335,29	31.095.100.181,67	(80,30)

Rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp1.079.316.280,00, merupakan hasil dari Penjualan Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp45.399.500,00, yang berasal dari Pengelolaan *Coolstorage*. Terjadi penurunan sebesar (87,79)% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp371.750.000,00. Penurunan tersebut dikarenakan atas Pendapatan Sewa ATM telah dilakukan reklasifikasi ke Pendapatan Retribusi Daerah – LO atas pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan pada PP Nomor 35 Tahun 2023.

c) Jasa Giro-LO

Penerimaan Jasa Giro-LO tahun 2024 sebesar Rp1.431.168.107,26 mengalami kenaikan sebesar 63,11% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp877.434.099,73 terdiri dari:

Tabel 7.5.193 Rincian Penerimaan Jasa Giro-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	988.144.586,00	443.499.768,73	122,81
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	67.892.950,67	58.378.313,00	16,30
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	357.662.472,59	0,00	100,00
4	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	0,00	375.556.018,00	(100,00)
5	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	17.468.098,00	0,00	100,00
Jumlah		1.431.168.107,26	877.434.099,73	63,11

d) Pendapatan Bunga-LO

Penerimaan Pendapatan Bunga-LO tahun 2024 sebesar Rp1.306.195.871,41 yang berasal dari hasil deposito, mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 2.073,63% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp60.092.972,00.

e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp356.279.625,60, terjadi kenaikan sebesar 23,81% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp287.764.500,18.

f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp1.668.043.384,00 terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 2.320,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp68.899.701,31.

g) Pendapatan Denda Pajak-LO

Pendapatan Denda Pajak-LO sebesar Rp52.648.954,00 mengalami penurunan (28,99)% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Denda Pajak-LO terdiri dari:

Tabel 7.5.194 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	462.607,00	1.107.863,00	(58,24)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	5.334.636,00	5.312.385,00	0,42
3	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	69.131,00	228.040,00	(69,68)
4	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	7.200,00	0,00	100,00
5	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	400,00	1.500,00	(73,33)
6	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	83.210,00	562.960,00	(85,22)
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO	26.325,00	0,00	100,00
8	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00	81.000,00	(100,00)
9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	0,00	110.000,00	(100,00)
10	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO	6.700,00	0,00	100,00
11	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	49.935,00	103.786,00	(51,89)
12	Pendapatan Denda PBBP2-LO	45.934.395,00	65.494.641,00	(29,87)
13	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO	0,00	43.523,00	(100,00)
14	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	674.415,00	1.097.065,00	(38,53)
Jumlah		52.648.954,00	74.142.763,00	(28,99)

h) Pendapatan Dari Pengembalian-LO

Pendapatan Dari Pengembalian-LO sebesar Rp153.538.290,00 terjadi kenaikan sebesar 169,08% terdiri dari:

Tabel 7.5.195 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	40.497.162,00	(100,00)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	14,00	6.839.200,00	(100,00)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	5.236.777,00	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	138.808.812,00	7.990.000,00	1.637,28
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	4.851,00	1.484.345,00	(99,67)
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-LO	9.487.836,00	0,00	100,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	0,00	250.510,46	(100,00)
Jumlah		153.538.290,00	57.061.217,46	169,08

i) Pendapatan BLUD-LO

Pendapatan BLUD-LO tahun 2024 sebesar Rp31.745.323,02 yang terdiri dari Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO terjadi penurunan sebesar (99,86)%, dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp22.626.890.252,99. Penurunan Pendapatan BLUD – LO dikarenakan atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dan Hasil Kerja sama dengan Pihak Lain telah dilakukan reklasifikasi ke Pendapatan Retribusi Daerah – LO sesuai dengan ketentuan pada PP Nomor 35 Tahun 2023.

Terdapat perbedaan antara Lain-lain PAD yang Sah – LO dan Lain-lain PAD yang Sah LRA sebagai berikut:

Lain-lain PAD yang Sah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	6.124.335.335,29	33.673.979.722,48	(27.549.644.387,19)

Selisih sebesar Rp(27.549.644.387,19) antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.196 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pelunasan TGR BLUD	43.966.498,00
2	Pelunasan Piutang Hasil Sewa Pemanfaatan BMD-Rumah Dinas	81.680.000,00
3	Pelunasan Piutang Dana Bergulir - Pelunasan TA 2024	16.974.880,00
4	Pelunasan Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.000.000,00
5	Pelunasan TGR	2.562.841.207,19
6	Reklasifikasi ke Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa ATM)	60.600.000,00
7	Reklasifikasi ke Piutang Retribusi Pelayanan di RSUD karena kesalahan penganggaran	24.524.388.624,00
8	Reklasifikasi ke Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa ATM di RSUD)	63.244.500,00
9	Pendapatan pengembalian dana bergulir UMKM yang masih berada pada rekening Dana Bergulir	75.792.465,00
10	Mutasi kas Dana Bergulir tahun Sebelumnya dari Kas lainnya ke Kasda	114.156.213,00
Jumlah		27.549.644.387,19

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp833.573.927.023,00 mengalami penurunan sebesar (28,23)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.161.415.344.811,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.197 Rincian Pendapatan Transfer-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	769.508.147.239,00	1.076.300.810.771,00	(28,50)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	64.065.779.784,00	85.114.534.040,00	(24,73)
Jumlah		833.573.927.023,00	1.161.415.344.811,00	(28,23)

Rincian masing-masing jenis Penerimaan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan-LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO pada tahun 2024 sebesar Rp763.808.298.239,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.198 Rincian Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	78.131.692.910,00	136.695.312.925,00	(42,84)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	124.947.917.000,00	328.084.003.000,00	(61,92)
3	Dana Alokasi Umum	427.577.646.211,00	407.458.406.092,00	4,94
4	Dana Alokasi Khusus	133.151.042.118,00	173.388.774.754,00	(23,21)
Jumlah		763.808.298.239,00	1.045.626.496.771,00	(26,95)

7.5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2024 sebesar Rp78.131.692.910,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.199 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DBH PBB-LO	65.848.881.000,00	121.602.216.000,00	(45,85)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	11.573.260.000,00	14.034.318.000,00	(17,54)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN-LO	699.229.000,00	1.051.489.000,00	(33,50)
4	DBH CHT-LO	10.322.910,00	7.289.925,00	41,61
Jumlah		78.131.692.910,00	136.695.312.925,00	(42,84)

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (42.84)% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp136.695.312.925,00

7.5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2024 sebesar Rp124.947.917.000,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.200 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	32.167.733.000,00	170.994.975.000,00	(81,19)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	85.076.819.000,00	147.655.556.000,00	(42,38)
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	78.599.000,00	0,00	100,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	339.946.000,00	1.193.704.000,00	(71,52)
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	24.372.000,00	19.774.000,00	23,25
6	DBH SDA Perikanan-LO	7.260.448.000,00	8.219.994.000,00	(11,67)
Jumlah		124.947.917.000,00	328.084.003.000,00	(61,92)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (61,92)% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp328.084.003.000,00.

7.5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

Dana Alokasi Umum-LO tahun 2024 sebesar Rp427.577.646.211,00 mengalami kenaikan sebesar 4,94% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp407.458.406.092,00. Rincian Dana Alokasi Umum-LO dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.201 Rincian Dana Alokasi Umum-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Dana Alokasi Umum – <i>Block Grant</i>	328.763.204.000,00	286.970.881.092,00	14,56
2	Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	6.265.809.211,00	27.938.892.000,00	(77,57)
3	Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	28.514.202.000,00	14.282.271.000,00	99,65
5	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	26.444.493.000,00	36.106.780.000,00	(26,76)
6	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	36.189.938.000,00	40.759.582.000,00	(11,21)
Jumlah		427.577.646.211,00	407.458.406.092,00	4,94

7.5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2024 sebesar Rp133.151.042.118,00 dengan rincian :

Tabel 7.5.202 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	73.848.309.559,00	115.479.222.997,00	(36,05)
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	59.302.732.559,00	57.909.551.757,00	2,41
Jumlah		133.151.042.118,00	173.388.774.754,00	(23,21)

Dibanding dengan tahun 2023 terdapat penurunan dari Dana Alokasi Khusus-LO sebesar (23,21)%. Dana Alokasi Khusus-LO terdiri dari dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dari:

Tabel 7.5.203 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	563.797.250,00	658.914.850,00	(14,44)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	3.143.237.709,00	3.911.575.277,00	(19,64)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.344.098.943,00	8.926.183.112,00	(73,74)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	3.956.418.000,00	0,00	100,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	33.477.108.239,00	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	18.058.916.261,00	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	4.733.322.465,00	0,00	100,00
8	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	1.047.276.321,00	849.786.122,00	23,24
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	30.202.110.858,00	41.259.806.211,00	(26,80)
10	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	1.477.790.000,00	0,00	100,00
11	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO	2.243.749.999,00	7.540.430.050,00	(70,24)
12	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan-LO	0,00	796.502.875,00	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO	1.657.542.093,00	0,00	100,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	20.108.717.354,00	0,00	100,00
15	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan-LO	2.370.248.567,00	0,00	100,00
Jumlah		73.848.309.559,00	115.479.222.997,00	(36,05)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO terdiri dari:

Tabel 7.5.204 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	15.188.441.810,00	15.390.204.810,00	(1,31)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	685.000.000,00	955.000.000,00	(28,27)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	20.685.055.000,00	20.579.997.200,00	0,51
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.717.500.000,00	1.171.750.000,00	46,58
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.558.896.000,00	1.387.495.000,00	12,35
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.264.801.090,00	2.276.470.400,00	(0,51)
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	310.110.000,00	344.590.000,00	(10,01)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	6.757.304.900,00	(100,00)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.642.453.189,00	2.489.993.800,00	6,12
10	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	4.270.152.492,00	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	996.911.300,00	997.034.200,00	(0,01)
12	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	0,00	1.289.558.955,00	(100,00)
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	459.438.750,00	0,00	100,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	413.866.900,00	0,00	100,00
15	DAK Non Fisik Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	1.305.722.481,00	0,00	100,00
16	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	314.365.080,00	0,00	100,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	2.373.230.890,00	0,00	100,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	8.386.940.069,00	0,00	100,00
Jumlah		59.302.732.559,00	57.909.551.757,00	2,41

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	763.808.298.239,00	772.847.670.239,00	(9.039.372.000,00)

Selisih sebesar Rp(9.039.372.000,00) antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.205 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan TDF Berdasarkan KMK 44 Tahun 2024	6.093.164.000,00
3	Jumlah Penambahan (2)	6.093.164.000,00
4	Pengurangan	
5	Penyaluran TDF TA 2023 yang dilakukan di tahun 2024	15.132.536.000,00
6	Jumlah Pengurangan (6)	15.132.536.000,00
7	Jumlah Selisih (3-6)	(9.039.372.000,00)

7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO merupakan Dana transfer dari Pemerintah Pusat selain Dana Perimbangan yang merupakan Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

7.5.4.1.2.2.1 Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal atas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024 sebesar Rp5.699.849.000,00, mengalami penurunan sebesar (81,42)% .

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	5.699.849.000,00	60.067.570.000,00	(54.367.721.000,00)

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA sebesar Rp(54.367.721.000,00) merupakan Pendapatan atas Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yang langsung disalurkan ke desa di Tahun 2024.

7.5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2024 sebesar Rp64.065.779.784,00, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.206 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	63.505.779.784,00	84.114.534.040,00	(24,50)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	560.000.000,00	1.000.000.000,00	(44,00)
Jumlah		64.065.779.784,00	85.114.534.040,00	(24,73)

7.5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 sebesar Rp63.505.779.784,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.207 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer Pemerintah Provinsi-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	13.436.883.493,00	12.119.445.031,00	10,87
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	11.601.112.575,00	9.722.911.586,00	19,32
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	27.751.232.254,00	52.067.056.464,00	(46,70)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	50.854.038,00	40.802.017,00	24,64
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	10.665.697.424,00	10.164.318.942,00	4,93
Jumlah		63.505.779.784,00	84.114.534.040,00	(24,50)

7.5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan-LO

Bantuan Keuangan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 sebesar Rp560.000.000,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp(440.000.000,00) atau sebesar (44,00)%.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	64.065.779.784,00	64.740.184.644,00	(674.404.860,00)

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp(674.404.860,00). Selisih tersebut merupakan pengurangan antara piutang transfer 2023 yang telah dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp18.221.293.499,00 dengan penambahan piutang transfer tahun 2024 sebesar Rp17.546.888.639,00.

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp10.997.858.349,91 merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.208 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah-LO	4.106.956.110,91	26.554.891.130,51	(84,53)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	6.890.902.239,00	58.750.345,00	11.629,13
Jumlah		10.997.858.349,91	26.613.641.475,51	(58,68)

Rincian masing-masing jenis penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebagai berikut :

7.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2024 sebesar Rp4.106.956.110,91 terdiri dari:

Tabel 7.5.209 Rincian Pendapatan Hibah-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	102.757.200,00	14.178.631.340,51	(99,28)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2.200.934.932,59	11.244.679.700,00	(80,43)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	876.343.000,00	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1.803.263.978,32	255.237.090,00	606,51
Jumlah		4.106.956.110,91	26.554.891.130,51	(84,53)

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO tahun 2024 sebesar Rp102.757.200,00, mengalami penurunan sebesar (99,28)% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada tahun 2024 sebesar Rp2.200.934.932,59 mengalami penurunan sebesar (80,43)% dari tahun sebelumnya.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO pada tahun 2024 sebesar Rp1.803.263.978,32 terjadi kenaikan cukup signifikan sebesar 606,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena besarnya CSR dari MEDCO E&P NATUNA Ltd ke Pemerintah Kabupaten Natuna berupa Bangunan Gedung Tempat Olahraga. Berikut Rincian Pendapatan Hibah-LO pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 7.5.210 Rincian Pendapatan Hibah-LO Per SKPD*(dalam rupiah)*

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO				
No	Perangkat Daerah	Sumber Hibah	Barang Hibah	Nilai
1	Badan Penanggulangan Bencana daerah	Kementerian Dalam Negeri	Alat Pendukung Pencarian	73.000.000,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Bahan Cetak	20.364.000,00
3	Dinas Kesehatan	kementerian Kesehatan	Bahan Cetak	8.260.250,00
4	Dinas Kesehatan	kementerian Kesehatan	Obat-Obatan Lainnya	1.132.950,00
Jumlah				102.757.200,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO				
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kepri	Bahan Cetak	56.204.640,00
2	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov. Kepri	Obat-obatan	1.852.211.252,59
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PPKB	BKKBN Perwakilan Prov. Kepri	Obat-Obatan Lainnya	292.519.040,00

Jumlah				2.200.934.932,59
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO				
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	MEDCO E&P NATUNA Ltd	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.137.263.978,32
2	Badan Penanggulangan Bencana daerah	PT. Palapa Ring Barat	Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pemerintah Pusat /Kementrian Keuangan	Kas di Daerah	636.000.000,00
Jumlah				1.803.263.978,32

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Hibah – LO dan Pendapatan Hibah LRA sebagai berikut:

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah	4.106.956.110,91	636.000.000,00	3.470.956.110,91

Selisih sebesar Rp3.470.956.110,91 antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA merupakan pendapatan hibah Aset Tetap dan Barang Pakai Habis yang tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.211 Selisih Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2.200.934.932,59
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1.167.263.978,32
4	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	102.757.200,00
5	Jumlah Penambahan (2-4)	3.470.956.110,91
6	Jumlah Perbedaan	3.470.956.110,91

7.5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2024 sebesar Rp6.890.902.239,00. Dibanding dengan tahun 2023, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO naik sebesar 11.629,13%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.212 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	58.750.345,00	(100,00)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	6.890.902.239,00	0,00	100,00
Jumlah		6.890.902.239,00	58.750.345,00	11.629,13

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 terjadi penurunan sebesar (100,00)% dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp58.750.345,00. Hal ini dikarenakan adanya koreksi Pencatatan atau

Reklasifikasi ke Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta-LO.

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO tahun 2024 sebesar Rp6.890.902.239,00, terjadi kenaikan sebesar 3.30% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.671.064.675,00. Namun untuk Tahun 2023 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tercatat di rekening 7.1.04.18. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO. Hal ini berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tidak terdapat perbedaan antara Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LRA sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	6.890.902.239,00	6.890.902.239,00	0,00

7.5.4.2 Beban-LO

Beban-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.140.191.320.781,91	1.027.480.322.038,23

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024 sebesar Rp1.140.191.320.781,91 terjadi kenaikan sebesar 10,97% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.027.480.322.038,23. Rincian beban tahun 2024 merupakan pengakuan Beban Operasi tahun 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.213 Rincian Beban Operasi

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	498.272.803.594,62	419.978.177.052,00	18,64
2	Beban Persediaan	114.170.881.747,84	77.765.528.464,37	46,81
3	Beban Jasa	166.269.241.261,46	182.734.357.478,93	(9,01)
4	Beban Pemeliharaan	17.795.426.792,81	20.929.670.768,73	(14,98)
5	Beban Perjalanan Dinas	66.343.024.923,00	56.199.331.406,00	18,05
6	Beban Hibah	34.575.910.749,00	38.648.139.444,31	(10,54)
7	Beban Bantuan Sosial	7.874.796.106,65	2.363.988.714,00	233,11
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	165.532.926.064,52	160.883.967.926,59	2,89
9	Beban Transfer	65.620.961.400,00	65.773.734.400,00	(0,23)
10	Beban Penyisihan Piutang	3.735.348.142,01	2.203.426.383,30	69,52
Jumlah		1.140.191.320.781,91	1.027.480.322.038,23	10,97

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp498.272.803.594,62 mengalami kenaikan sebesar 18,64% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.214 Rincian Beban Pegawai*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	248.414.682.205,00	202.615.634.536,00	22,60
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	195.299.301.386,00	168.392.953.248,00	15,98
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.717.128.647,62	40.971.662.750,00	11,58
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.509.937.692,00	6.248.915.722,00	20,18
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	402.771.664,00	890.238.796,00	(54,76)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	554.000.000,00	510.480.000,00	8,53
7	Beban Pegawai BLUD	374.982.000,00	348.292.000,00	7,66
Jumlah		498.272.803.594,62	419.978.177.052,00	18,64

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp498.272.803.594,62 terdiri dari:

a) **Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2024 sebesar Rp248.414.682.205,00 naik 22,60% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.215 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	179.907.585.238,00	148.629.890.480,00	21,04
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	16.441.792.144,00	13.732.202.435,00	19,73
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.239.283.000,00	5.218.111.000,00	0,41
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	9.223.353.000,00	8.822.061.000,00	4,55
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.298.160.000,00	3.390.812.000,00	26,76
6	Beban Tunjangan Beras ASN	10.380.557.399,00	9.426.605.598,00	10,12
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.219.260.193,00	48.143.343,00	14.895,34
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.757.547,00	2.273.562,00	21,29
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.221.070.308,00	12.114.894.348,00	17,39
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	370.216.183,00	307.195.610,00	20,51
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.110.647.193,00	922.050.844,00	20,45
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	1.394.316,00	(100,00)
Jumlah		248.414.682.205,00	202.615.634.536,00	22,60

b) **Beban Tambahan Penghasilan ASN**

Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2024 sebesar Rp195.299.301.386,00 mengalami kenaikan sebesar 15,98% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.216 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	61.102.064.705,00	52.586.770.128,00	16,19
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	5.173.151.706,00	4.574.099.165,00	13,10
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.613.837.884,00	5.191.024.732,00	27,41
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.136.157.685,00	2.671.170.575,00	17,41
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	119.274.089.406,00	103.369.888.648,00	15,39
Jumlah		195.299.301.386,00	168.392.953.248,00	15,98

c) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2024 sebesar Rp45.717.128.647,62 mengalami kenaikan 11,58% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.217 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	20.500.000,00	0,00	100,00
2	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	21.625.233.036,00	19.740.229.600,00	9,55
3	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.568.127.600,00	1.417.151.000,00	10,65
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.711.000.000,00	1.199.500.000,00	42,64
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.179.161.045,62	3.010.989.322,00	38,80
6	Beban Honorarium	15.625.398.343,00	14.588.587.828,00	7,11
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	987.708.623,00	1.015.205.000,00	(2,71)
Jumlah		45.717.128.647,62	40.971.662.750,00	11,58

d) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2024 sebesar Rp7.509.937.692,00 mengalami kenaikan sebesar 20,18% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.218 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	449.820.000,00	451.290.000,00	(0,33)
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	58.514.000,00	60.039.700,00	(2,54)
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	75.475.800,00	64.221.840,00	17,52
4	Beban Uang Paket DPRD	38.535.000,00	38.682.000,00	(0,38)
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	652.238.998,00	654.370.500,00	(0,33)
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	51.734.550,00	62.026.650,00	(16,59)
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	5.572.350,00	5.481.000,00	1,67
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00	1.524.600.000,00	65,29
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	420.000.000,00	378.000.000,00	11,11
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	57.464.526,00	66.599.596,00	(13,72)
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	135.297.468,00	143.879.436,00	(5,96)
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.875.500.000,00	2.781.000.000,00	3,40
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	169.785.000,00	18.725.000,00	806,73
Jumlah		7.509.937.692,00	6.248.915.722,00	20,18

e) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO tahun 2024 sebesar Rp402.771.664,00 terjadi penurunan (54,76)% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.219 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.531.680,00	7.531.680,00	0,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	210.149,00	213.034,00	(1,35)
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000,00	1.000,00	0,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.503.680,00	5.503.680,00	0,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	228.551.875,00	716.016.122,00	(68,08)
Jumlah		402.771.664,00	890.238.796,00	(54,76)

f) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp554.000.000,00 terjadi kenaikan sebesar 8,53% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.220 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	180.600.000,00	110.880.000,00	62,88
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	373.400.000,00	399.600.000,00	(6,56)
Jumlah		554.000.000,00	510.480.000,00	8,53

g) Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD tahun 2024 sebesar Rp374.982.000,00 terjadi kenaikan sebesar 7,66% dari tahun sebelumnya sebesar Rp348.292.000,00.

Terdapat perbedaan antara Beban Pegawai – LO dan Belanja Pegawai LRA sebagai berikut:

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pegawai-			
Belanja Pegawai	498.272.803.594,62	480.835.325.471,00	17.437.478.123,62

Selisih antara Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA tahun 2024 sebesar Rp17.437.478.123,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.221 Selisih Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA

No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Utang Belanja Pegawai	18.052.064.021,00
3	Jumlah Penambahan (2)	18.052.064.021,00
4	Pengurangan	
5	Pelunasan Utang Tahun 2023 melalui Belanja Tahun Berjalan	383.896.087,00
6	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Tuntutan Ganti Kerugian)	230.689.810,38
7	Jumlah Pengurangan(4-6)	614.585.897,38
8	Jumlah Perbedaan (3-7)	17.437.478.123,62

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

Pengakuan Beban Persediaan pada tahun 2024 sebesar Rp114.170.881.747,84 terjadi kenaikan 46,81% dari tahun sebelumnya Rp77.765.528.464,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.222 Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.505.626.613,00	192.502.000,00	682,14
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	521.045.000,00	268.463.280,07	94,08
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.724.035.323,00	6.322.518.151,00	6,35
4	Beban Bahan-Bahan Baku	286.699.420,00	10.488.225,00	2.633,54
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	62.278.800,00	170.305.685,00	(63,43)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	91.857.000,00	37.110.000,00	147,53
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	435.300,00	(100,00)
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.731.653.116,12	6.249.232.278,10	(56,29)
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.898.017.035,00	1.898.324.756,00	(0,02)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	1.215.000,00	0,00	100,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	12.310.000,00	62.800.000,00	(80,40)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	345.422.010,00	230.571.253,00	49,81
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.455.786.257,00	4.900.948.672,00	11,32
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.247.840.218,00	560.671.500,00	122,56
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.797.913.733,05	6.604.252.189,75	33,22
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.127.551.600,00	892.059.900,00	26,40
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	19.490.800,00	13.990.045,00	39,32
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	427.283.814,00	11.000.000,00	3.784,40
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.047.791.604,00	1.900.000,00	55.046,93
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.155.470.010,00	703.893.644,00	64,15
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	630.904.930,00	940.897.330,00	(32,95)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	350.187.408,00	116.707.000,00	200,06
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	587.926.800,00	75.075.000,00	683,12
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	284.946.440,00	1.195.282.470,00	(76,16)
25	Beban Obat-Obatan-Obat	22.481.924.717,72	7.708.797.690,68	191,64
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	676.544.724,17	2.239.699.633,70	(69,79)
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.457.692.013,78	484.177.750,00	2.679,49
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.292.743.350,00	2.831.773.391,07	(54,35)
29	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	144.291.900,00	3.574.739.127,00	(95,96)
30	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.006.623.225,00	786.173.528,00	28,04
31	Beban Natura dan Pakan-Pakan	49.857.000,00	0,00	100,00
32	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	8.448.000,00	39.901.000,00	(78,83)
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.335.184.500,00	5.400.434.308,00	(1,21)
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.238.238.220,00	12.368.649.710,00	(9,14)
35	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	100,00
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	389.842.873,00	43.469.000,00	796,83
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	403.580.500,00	506.029.000,00	(20,25)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	4.100.000,00	(100,00)
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.320.303.378,00	4.652.342.800,00	35,85
40	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	22.461.405,00	0,00	100,00
41	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	83.974.000,00	65.850.000,00	27,52
42	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	94.000.000,00	14.250.000,00	559,65
43	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	217.606.000,00	205.150.000,00	6,07
44	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.180.987.800,00	819.458.500,00	44,12
45	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	56.800.000,00	49.400.000,00	14,98
46	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	550.000,00	9.600.000,00	(94,27)
47	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	271.816.000,00	208.815.740,00	30,17
48	Beban Pakaian Kerja Bengkel	0,00	32.890.000,00	(100,00)
49	Beban Pakaian Adat Daerah	1.358.469.000,00	368.704.800,00	268,44
50	Beban Pakaian Batik Tradisional	88.182.860,00	191.788.000,00	(54,02)
51	Beban Pakaian Olahraga	912.708.000,00	348.420.000,00	161,96
52	Beban Pakaian Paskibraka	821.728.000,00	421.352.000,00	95,02
53	Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	9.000.000,00	(100,00)
54	Beban Komponen-Komponen Peralatan	37.760.000,00	15.000.000,00	151,73
55	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	1.880.000,00	(100,00)
56	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan KebakaranHutan	11.150.050,00	0,00	100,00
57	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat TakBermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	6.223.000,00	0,00	100,00
58	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat BengkelBermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	1.250.000,00	0,00	100,00
59	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat BengkelBermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	3.387.000,00	0,00	100,00
60	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Bengkel Listrik	250.000,00	0,00	100,00
61	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	1.850.000,00	0,00	100,00
62	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Bengkel Kerja	819.000,00	0,00	100,00
63	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel TakBermesin-Peralatan Tukang Besi	245.000,00	0,00	100,00
64	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-AlatUkur/Pembanding	1.986.000,00	0,00	100,00
65	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-AlatTimbangan/Biara	500.000,00	0,00	100,00
66	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat PengolahanTanah dan Tanaman	954.800,00	0,00	100,00
67	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-AlatPemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	300.000,00	0,00	100,00
68	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-AlatPernakan	2.100.000,00	0,00	100,00
69	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.834.080,00	0,00	100,00
70	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatPenyimpan Perlengkapan Kantor	11.430.000,00	0,00	100,00
71	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya	120.152.576,00	0,00	100,00
72	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Mebel	2.592.619.810,00	0,00	100,00
73	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pengukur Waktu	18.765.760,00	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
74	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pembersih	300.000,00	0,00	100,00
75	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin	164.376.120,00	0,00	100,00
76	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur	34.562.250,00	0,00	100,00
77	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	792.280.850,00	0,00	100,00
78	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pemadam Kebakaran	16.215.000,00	0,00	100,00
79	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	82.000.000,00	0,00	100,00
80	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	354.490.000,00	0,00	100,00
81	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	7.800.000,00	0,00	100,00
82	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	8.750.000,00	0,00	100,00
83	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Audio	10.750.000,00	0,00	100,00
84	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Video dan Film	6.680.000,00	0,00	100,00
85	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	255.000,00	0,00	100,00
86	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatKomunikasi-Alat Komunikasi Telephone	11.266.200,00	0,00	100,00
87	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	200.000,00	0,00	100,00
88	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	70.093.612,00	0,00	100,00
89	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.875.000,00	0,00	100,00
90	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.003.000,00	0,00	100,00
91	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat KesehatanUmum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.388.290,00	0,00	100,00
92	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	567.500,00	0,00	100,00
93	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	198.000,00	0,00	100,00
94	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Makanan	1.250.000,00	0,00	100,00
95	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Fisika	40.000,00	0,00	100,00
96	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Proses Teknologi Tekstil	300.000,00	0,00	100,00
97	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	930.000,00	0,00	100,00
98	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Energi Surya	480.000,00	0,00	100,00
99	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium KimiaNuklir-General Laboratory Tool	5.250.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
100	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	875.000,00	0,00	100,00
101	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	400.000,00	0,00	100,00
102	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	6.186.000,00	0,00	100,00
103	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	780.000,00	0,00	100,00
104	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	820.000,00	0,00	100,00
105	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	65.062.500,00	0,00	100,00
106	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	5.430.000,00	0,00	100,00
107	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	200.000,00	0,00	100,00
108	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	650.000,00	0,00	100,00
109	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan MiniComputer	330.000,00	0,00	100,00
110	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanPersonal Computer	22.465.000,00	0,00	100,00
111	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanJaringan	7.348.650,00	0,00	100,00
112	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-AlatPelindung Lainnya	2.442.000,00	0,00	100,00
113	Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	29.930.000,00	0,00	100,00
114	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-PeralatanOlahraga Atletik	4.362.090,52	0,00	100,00
115	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-PeralatanPermainan	129.972.271,48	0,00	100,00
116	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-PeralatanOlahraga Lainnya	1.017.648,00	0,00	100,00
117	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.505.993.018,00	711.486.187,00	111,67
118	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.000.000,00	0,00	100,00
119	Beban Beasiswa	339.100.000,00	440.400.000,00	(23,00)
120	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	300.000.000,00	(100,00)
121	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.677.600.000,00	0,00	100,00
122	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	783.300.000,00	0,00	100,00
123	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	35.000.000,00	0,00	100,00
124	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	135.000.000,00	0,00	100,00
125	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.280.229.148,00	1.396.367.620,00	(8,32)
126	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	512.700.126,00	56.000.000,00	815,54
Jumlah		114.170.881.747,84	77.765.528.464,37	46,81

Terdapat perbedaan antara Beban Persediaan – LO dan Belanja Persediaan LRA sebagai berikut:

Beban Persediaan-Belanja Persediaan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	114.170.881.747,84	67.340.613.082,00	46.830.268.665,84

Selisih antara Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan Tahun 2024 adalah senilai Rp46.830.268.665,84 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.223 Selisih Beban Persediaan LO dan Belanja yang menjadi Persediaan LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Persediaan	1.740.000,00
3	Penambahan dari timbulnya Utang	13.959.823.612,90
4	Pendapatan Hibah LO	2.230.692.132,59
5	Reklasifikasi dari Beban Hibah	18.165.980.716,00
6	Reklasifikasi dari Jasa	16.238.334.117,86
7	Penambahan dari Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	4.633.389.058,00
8	Penambahan dari Peralatan dan Mesin Intrakomtabel	281.103.330,00
9	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	75.000,00
10	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	555.460,00
11	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	183.568.000,00
12	Jumlah Penambahan (2-11)	55.695.261.427,35
13	Pengurangan	
14	Reklasifikasi ke Beban Jasa	630.857.100,00
15	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	1.150.000,00
16	Reklasifikasi ke Beban Hibah	472.955.808,00
17	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	228.522.000,00
18	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	158.718.609,00
19	Selisih antara Persediaan Awal tahun yang menjadi Beban dengan Saldo Akhir Persediaan Tahun 2024	5.568.624.272,29
20	Reklasifikasi ke Piutang Lainnya (Bagian Lancar TGR)	1.559.067.972,22
21	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Temuan Pemeriksaan)	245.097.000,00
22	Jumlah Pengurangan (13-21)	8.864.992.761,51
23	Jumlah Perbedaan (12-22)	46.830.268.665,84

7.5.4.2.3 Beban Jasa

Pengakuan Beban Jasa pada tahun 2024 sebesar Rp166.269.241.261,46 terjadi penurunan sebesar (9,01)% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp182.734.357.478,93, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.224 Rincian Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	8.400.000,00	(100,00)
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.419.166.637,00	4.550.690.000,00	(2,89)
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.694.610.000,00	3.421.451.000,00	7,98
4	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.400.000,00	0,00	100,00
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.672.600.000,00	1.787.900.000,00	(6,45)
6	Beban Honorarium Rohaniwan	3.800.000,00	4.000.000,00	(5,00)
7	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	11.600.000,00	7.800.000,00	48,72
8	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	16.400.000,00	6.100.000,00	168,85
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	110.700.000,00	157.400.000,00	(29,67)
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	596.400.000,00	601.840.000,00	(0,90)
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	4.115.583.000,00	7.614.400.000,00	(45,95)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	12.799.653.152,00	19.345.899.233,00	(33,84)
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	43.945.000,00	(100,00)
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.176.100.000,00	1.122.000.000,00	4,82
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	50.000.000,00	0,00	100,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	494.500.000,00	424.800.000,00	16,41
17	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	1.795.000,00	(100,00)
18	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	25.100.000,00	0,00	100,00
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	462.880.000,00	182.450.000,00	153,70
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	28.811.786.267,00	36.683.072.328,00	(21,46)
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000,00	29.900.000,00	(59,87)
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.625.900.000,00	13.591.900.000,00	37,04
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.274.176.250,00	1.406.512.600,00	(9,41)
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.052.650.000,00	2.607.573.960,00	17,07
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	654.850.000,00	497.700.000,00	31,58
26	Beban Jasa Tenaga Supir	921.600.000,00	865.300.000,00	6,51
27	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	108.000.000,00	184.853.100,00	(41,58)
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	140.100.000,00	97.500.000,00	43,69
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	140.520.000,00	13.300.000,00	956,54
30	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.411.300.000,00	1.357.950.000,00	3,93
31	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	250.908.374,00	139.990.880,00	79,23
32	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	38.825.800,00	0,00	100,00
33	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	13.000.000,00	16.000.000,00	(18,75)
34	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	502.782.000,00	304.918.945,00	64,89
35	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.788.805.000,00	1.430.825.000,00	25,02
36	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	17.600.000,00	(100,00)
37	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	38.020.000,00	44.626.000,00	(14,80)
38	Beban Jasa Kalibrasi	159.379.000,00	172.683.000,00	(7,70)
39	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.116.900.000,00	1.089.900.000,00	2,48
40	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.080.000,00	0,00	100,00
41	Beban Jasa Pengukuran Tanah	13.089.112,00	22.000.000,00	(40,50)
42	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	11.220.520.000,00	9.847.582.090,00	13,94
43	Beban Jasa Operator Kapal	874.800.000,00	899.600.000,00	(2,76)
44	Beban Tagihan Telepon	143.063.560,00	129.237.645,00	10,70
45	Beban Tagihan Air	758.902.850,00	696.292.996,00	8,99
46	Beban Tagihan Listrik	7.060.709.157,00	5.763.181.694,00	22,51
47	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	47.140.000,00	301.665.000,00	(84,37)
48	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.796.656.481,00	3.278.950.079,00	15,79
49	Beban Paket/Pengiriman	682.686.060,00	439.282.800,00	55,41
50	Beban Penambahan Daya	2.043.921,00	6.455.400,00	(68,34)
51	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00	60.000.000,00	(100,00)
52	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	519.386.763,00	434.738.991,00	19,47
53	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.331.626.435,57	404.995.107,00	228,80
54	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.274.789.296,00	0,00	100,00
55	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.283.655.700,00	11.754.966.000,00	4,50
56	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	919.802.800,00	967.050.000,00	(4,89)
57	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.130.723.793,00	3.490.604.304,00	(38,96)
58	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	161.260.829,76	218.888.288,24	(26,33)
59	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	154.358.851,00	217.944.513,00	(29,18)
60	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	49.460.000,00	0,00	100,00
61	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	104.000.000,00	0,00	100,00
62	Beban Sewa Mesin Proses	0,00	1.000.000,00	(100,00)
63	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	49.400.000,00	48.220.000,00	2,45
64	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	4.500.000,00	(100,00)
65	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	194.895.000,00	0,00	100,00
66	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	305.910.000,00	212.750.000,00	43,79
67	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	25.550.000,00	4.550.000,00	461,54

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
68	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.100.000,00	11.320.000,00	(81,45)
69	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	208.675.000,00	140.440.000,00	48,59
70	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
71	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	54.000.000,00	76.500.000,00	(29,41)
72	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.169.024.000,00	1.342.144.264,00	(12,90)
73	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.500.000,00	16.400.000,00	(90,85)
74	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain	22.000.000,00	18.150.000,00	21,21
75	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	2.260.000,00	0,00	100,00
76	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	950.623.070,00	(100,00)
77	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	170.750.000,00	214.280.000,00	(20,31)
78	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	85.140.000,00	72.100.000,00	18,09
79	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	144.000.000,00	15.500.000,00	829,03
80	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	53.203.411,00	9.207.075,00	477,85
81	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	173.050.000,00	(100,00)
82	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus	0,00	9.293.771,00	(100,00)
83	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	1.975.000,00	(100,00)
84	Beban Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	16.879.000,00	(100,00)
85	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	180.000,00	0,00	100,00
86	Beban Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00	0,00	100,00
87	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	41.870.500,00	(100,00)
88	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	1.292.376,00	(100,00)
89	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	656.289.989,86	407.561.666,66	61,03
90	Beban Sewa Bangunan Gudang	261.593.745,79	276.000.000,00	(5,22)
91	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	325.340.000,00	251.118.833,33	29,56
92	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	3.000.000,00	(100,00)
93	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	7.500.000,00	(100,00)
94	Beban Sewa Bangunan Terbuka	5.000.000,00	7.000.000,00	(28,57)
95	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	93.300.000,00	(100,00)
96	Beban Sewa Bangunan Parkir	7.500.000,00	0,00	100,00
97	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	3.168.000,00	(100,00)
98	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	89.916.666,67	171.758.333,33	(47,65)
99	Beban Sewa Asrama	517.578.483,60	216.912.500,00	138,61
100	Beban Sewa Hotel	468.327.000,00	402.832.409,00	16,26
101	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	3.000.000,00	13.000.000,00	(76,92)
102	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	360.689.032,79	172.033.333,33	109,66
103	Beban Sewa Audio Visual	44.500.000,00	0,00	100,00
104	Beban Sewa Alat Musik	110.300.000,00	25.000.000,00	341,20
105	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	65.000.000,00	(100,00)
106	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	31.382.102,67	0,00	100,00
107	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.250.540,00	0,00	100,00
108	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	364.761.096,00	(100,00)
109	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	34.706.370,00	0,00	100,00
110	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	50.000.000,00	0,00	100,00
111	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	205.522.050,00	0,00	100,00
112	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	100,00
113	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	99.900.000,00	(100,00)
114	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	171.197.400,00	20.000.000,00	755,99

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
115	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	100,00
116	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	100,00
117	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	1.828.256.487,00	(100,00)
118	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	24.947.250,00	0,00	100,00
119	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	221.109.780,00	54.913.920,00	302,65
120	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	0,00	89.665.800,00	(100,00)
121	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	114.492.750,00	0,00	100,00
122	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	991.982.358,00	1.077.870.650,00	(7,97)
123	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	228.081.000,00	(100,00)
124	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	0,00	239.398.650,00	(100,00)
125	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	626.010.000,00	0,00	100,00
126	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	150.000.000,00	0,00	100,00
127	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	199.403.000,00	169.957.650,00	17,33
128	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	100,00
129	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	135.000.000,00	(100,00)
130	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.339.128.000,00	728.507.820,00	83,82
131	Beban Sosialisasi	175.779.807,00	140.245.000,00	25,34
132	Beban Bimbingan Teknis	874.120.307,00	149.450.000,00	484,89
133	Beban Diklat Kepemimpinan	5.500.000,00	357.747.500,00	(98,46)
134	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir	9.000.000,00	0,00	100,00
135	Beban Barang dan Jasa BOS	5.602.707.561,00	11.551.090.990,00	0,00
136	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	29.500.000,00	0,00	100,00
137	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	34.600.000,00	0,00	100,00
138	Beban Barang dan Jasa BLUD	17.786.028.566,75	21.233.869.831,04	(16,24)
Jumlah		166.269.241.261,46	182.734.357.478,93	(9,01)

Terdapat perbedaan antara Beban Jasa – LO dan Belanja Jasa LRA sebagai berikut:

Beban Jasa- Belanja Jasa	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	166.269.241.261,46	166.204.766.278,61	64.474.982,85

Selisih antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa Tahun 2024 adalah senilai Rp64.474.982,85 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.225 Selisih Beban Jasa LO dan Belanja yang menjadi Jasa LRA
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklasifikasi dari Beban dibayar dimuka	756.512.500,01
3	Reklasifikasi dari Persediaan	630.857.100,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	5.015.439,00
5	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	16.153.921,00

No.	Uraian	Jumlah
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya-ATB	43.378.632,00
7	Penambahan Beban Jasa dari timbulnya Utang	18.582.498.110,00
8	Jumlah Penambahan (2-7)	20.034.415.702,01
9	Pengurangan	
10	Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka	765.591.570,63
11	Reklasifikasi ke Persediaan	16.238.334.117,86
12	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	37.788.000,00
13	Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas	9.260.000,00
14	Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	149.339.400,00
15	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	425.706.100,00
16	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi	8.918.000,00
17	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	37.814.000,00
18	Reklasifikasi ke KDP	242.569.410,00
19	Reklasifikasi ke Aset Lainnya-ATB	199.411.500,00
20	Pelunasan Utang Tahun 2023	1.561.402.916,24
21	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Tuntutan Ganti Kerugian)	293.805.704,43
22	Jumlah Pengurangan (10-21)	19.969.940.719,16
23	Jumlah Perbedaan (8-22)	64.474.982,85

Sebagai informasi, angka Realisasi Belanja Jasa (LRA) senilai yang dibandingkan dengan Beban LO diatas merupakan jumlah dari Belanja Jasa senilai Rp129.608.413.532,00, Belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp11.086.786.363,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP senilai Rp79.600.000,00, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD 25.429.966.383,61 sehingga jumlah keseluruhan Angka Belanja Jasa (LRA) yang dibandingkan dengan Beban LO diatas menjadi senilai Rp166.204.766.278,61. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat akun tersendiri untuk menyajikan beban yang dihasilkan dari Belanja Barang dan Jasa dari BOS, BOSP, dan BLUD.

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Pengakuan Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 sebesar Rp17.795.426.792,81 terjadi penurunan 14,98% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp20.929.670.768,73, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.226 Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	0,00	38.300.000,00	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	219.322.569,00	0,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	10.500.000,00	0,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	43.736.292,00	57.048.185,00	(23,33)
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.300.000,00	0,00	100,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	13.496.000,00	0,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.213.754.451,00	1.214.151.862,00	(0,03)
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	677.994.600,00	316.494.000,00	114,22
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	56.512.342,00	11.075.000,00	410,27
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.532.800,00	0,00	100,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	18.530.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
12	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	24.900.000,00	(100,00)
13	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	12.545.000,00	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	902.342.407,00	636.485.300,00	41,77
15	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10.140.000,00	0,00	100,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	2.130.000,00	(100,00)
17	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	12.000.000,00	10.090.000,00	18,93
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	26.685.000,00	23.965.000,00	11,35
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	151.352.000,00	353.062.000,00	(57,13)
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.752.856.860,00	1.231.876.406,00	42,29
21	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.500.000,00	0,00	100,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.652.000,00	29.774.050,00	(87,73)
23	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	352.572.740,00	356.784.500,00	(1,18)
24	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	11.648.000,00	(100,00)
25	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	110.583.206,00	47.186.100,00	134,36
26	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	0,00	35.800.614,00	(100,00)
27	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00	0,00	100,00
28	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	667.617.375,00	1.952.310.510,00	(65,80)
29	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	40.793.000,00	0,00	100,00
30	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	15.921.000,00	0,00	100,00
31	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	101.886.530,00	23.945.000,00	325,50
32	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	89.145.000,00	94.603.000,00	(5,77)
33	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	199.916.000,00	32.705.124,00	511,27
34	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	60.924.000,00	62.110.000,00	(1,91)
35	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	53.165.450,00	46.000.000,00	15,58
36	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	4.500.000,00	0,00	100,00
37	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	995.104.780,20	656.662.843,00	51,54
38	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	48.980.000,00	111.866.355,00	(56,22)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
39	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1.400.000,00	0,00	100,00
40	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	6.725.000,00	(100,00)
41	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.860.310.611,42	3.475.943.261,06	11,06
42	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	423.868.000,00	0,00	100,00
43	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	982.692.875,00	2.524.674.713,66	(61,08)
44	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	932.269.517,00	2.146.544.182,50	(56,57)
45	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	754.362.723,00	(100,00)
46	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	265.196.222,00	316.672.583,00	(16,26)
47	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	49.906.647,00	(100,00)
48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	92.037.489,00	248.455.600,43	(62,96)
49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	20.000.000,00	0,00	100,00
50	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	14.850.000,00	0,00	100,00
51	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	45.234.134,00	0,00	100,00
52	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	100.661.700,00	15.850.000,00	535,09
53	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.000.000,00	0,00	100,00
54	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	48.020.000,00	(100,00)
55	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.670.000,00	7.100.000,00	(48,31)
56	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	377.928.268,84	0,00	100,00
57	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	504.425.174,35	855.668.032,00	(41,05)
58	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	0,00	962.745.000,00	(100,00)
59	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	133.714.647,00	239.367.726,00	(44,14)
60	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	28.980.000,00	9.918.520,00	192,18
61	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	64.992.000,00	39.840.000,00	63,13
62	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	28.800.000,00	16.050.000,00	79,44
63	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	650.880.858,00	198.680.304,00	227,60
64	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	-200.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
65	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	0,00	409.690.804,08	(100,00)
66	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	318.638.500,00	0,00	100,00
67	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	197.785.345,00	(100,00)
68	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	287.107.105,00	(100,00)
69	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	170.172.000,00	0,00	100,00
70	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	439.490.000,00	197.932.400,00	122,04
71	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	3.157.000,00	0,00	100,00
72	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	2.625.000,00	(100,00)
73	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	38.000.000,00	0,00	100,00
74	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	326.543.594,00	511.199.973,00	(36,12)
75	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	7.367.000,00	(100,00)
76	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	10.497.800,00	0,00	100,00
77	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	900.000,00	0,00	100,00
78	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	0,00	5.920.000,00	(100,00)
Jumlah		17.795.426.792,81	20.929.670.768,73	(14,98)

Terdapat perbedaan antara Beban Pemeliharaan – LO dan Belanja Pemeliharaan LRA sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan-Belanja Pemeliharaan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	17.795.426.792,81	10.603.214.368,76	7.192.212.424,05

Selisih antara Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 adalah senilai Rp7.192.212.424,05 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.227 Selisih Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Beban Pemeliharaan dari timbulnya Utang	7.077.034.286,99
3	Reklasifikasi dari Persediaan	1.150.000,00
4	Reklasifikasi dari Beban Jasa	37.788.000,00
5	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	39.826.053,00
6	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	38.950.000,00

No.	Uraian	Jumlah
7	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	557.961.069,00
8	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	2.860.000,00
9	Jumlah Penambahan (2-8)	7.755.569.408,99
10	Pengurangan	
11	Reklasifikasi ke Persediaan	183.568.000,00
12	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	8.225.100,00
13	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	241.157.807,00
14	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.450.450,00
15	Reklasifikasi ke Piutang Lainnya (Bagian Lancar TGR)	30.955.627,94
16	Jumlah Pengurangan (11-15)	563.356.984,94
17	Jumlah Perbedaan (9-16)	7.192.212.424,05

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Pengakuan Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 sebesar Rp66.343.024.923,00 terjadi kenaikan sebesar 18,05% dari tahun sebelumnya sebesar Rp56.199.331.406,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.228 Rincian Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	39.587.618.310,00	42.658.273.989,00	(7,20)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.391.626.613,00	12.775.877.417,00	98,75
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.295.030.000,00	706.560.000,00	83,29
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68.750.000,00	58.620.000,00	17,28
Jumlah		66.343.024.923,00	56.199.331.406,00	18,05

Terdapat perbedaan antara Beban Perjalanan Dinas – LO dan Belanja Perjalanan Dinas LRA sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	66.343.024.923,00	64.347.111.233,00	1.995.913.690,00

Selisih antara Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 adalah senilai Rp1.995.913.690,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.229 Selisih Beban Perjalanan Dinas LO dan Belanja Perjalanan Dinas LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penambahan	
2.	Penambahan dari timbulnya utang	6.251.367.990,00
3.	Reklasifikasi dari Beban Jasa	9.260.000,00
4.	Jumlah Penambahan (2-3)	6.260.627.990,00
5.	Pengurangan	
6.	Reklasifikasi ke Tagihan Jangka Panjang (Tuntutan Ganti Kerugian)	4.264.714.300,00
7.	Jumlah Pengurangan (6)	4.264.714.300,00
8.	Jumlah Perbedaan (4-7)	1.995.913.690,00

7.5.4.2.6 Beban Hibah

Pengakuan Beban Hibah tahun 2024 sebesar Rp34.575.910.749,00 terjadi penurunan sebesar (10,54)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp38.648.139.444,31, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.230 Rincian Beban Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	18.570.000.000,00	9.400.000.000,00	97,55
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.217.250.000,00	2.850.329.256,00	12,87
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.257.396.199,79	(100,00)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.375.000.000,00	(100,00)
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.726.931.782,00	6.354.101.619,00	(9,87)
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.625.218.394,00	1.384.316.400,00	234,12
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	16.470.808,00	13.079.109.142,52	(99,87)
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	943.139.500,00	515.878.000,00	82,82
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	494.100.000,00	412.360.000,00	19,82
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	454.032.076,00	496.215.984,00	(8,50)
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	528.768.189,00	523.432.843,00	1,02
Jumlah		34.575.910.749,00	38.648.139.444,31	(10,54)

Terdapat perbedaan antara Beban Hibah – LO dan Belanja Hibah LRA sebagai berikut:

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Hibah	34.575.910.749,00	37.206.697.484,00	(2.630.786.735,00)

Selisih antara Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah LRA senilai Rp(2.630.786.735,00) dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.231` Selisih Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklasifikasi dari Tanah	5.327.750.000,00
3	Penambahan Beban Hibah yang berasal dari Utang Tahun 2024	9.734.488.173,00
4	Reklasifikasi dari Persediaan	472.955.808,00
5	Jumlah Penambahan (2-4)	15.535.193.981,00
6	Pengurangan	
7	Reklasifikasi ke Persediaan	18.165.980.716,00
8	Jumlah Pengurangan (7)	18.165.980.716,00
9	Jumlah Perbedaan (5-7)	(2.630.786.735,00)

7.5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Pengakuan Beban Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp7.874.796.106,65 mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 233,11% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.363.988.714,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.232 Rincian Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	775.270.517,00	1.054.840.714,00	(26,50)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	556.100.000,00	80.388.000,00	591,77
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.154.400.000,00	40.838.000,00	2.726,78
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.389.025.589,65	1.187.922.000,00	353,65
Jumlah		7.874.796.106,65	2.363.988.714,00	233,11

Terdapat perbedaan antara Beban Bantuan Sosial – LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	7.874.796.106,65	7.555.114.589,65	319.681.517,00

Selisih antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp319.681.517,00 merupakan pelaksanaan Bantuan Sosial tidak terencana yang berasal dari Belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.233 Selisih Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD Pelaksana	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	115.937.517,00
2	Dinas Sosial	203.744.000,00
Jumlah		319.681.517,00

7.5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp165.532.926.064,52 mengalami kenaikan sebesar 2,89% dari tahun sebelumnya sebesar Rp160.883.967.926,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.234 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.447.219.599,11	39.912.329.859,18	18,88
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.407.001.789,65	28.109.241.768,72	4,62
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	87.389.922.297,63	91.393.132.550,86	(4,38)
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.288.782.378,13	1.469.263.747,83	(12,28)
Jumlah		165.532.926.064,52	160.883.967.926,59	2,89

Terdapat perbedaan antara Beban Penyusutan LO dan LRA sebagai berikut:

Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Penyusutan	165.532.926.064,52	0,00	165.532.926.064,52

Selisih antara Beban Penyusutan LO dengan LRA adalah sebesar Rp165.532.926.064,52. Ini disebabkan karena Beban Penyusutan adalah akun LO yang merupakan Belanja Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

7.5.4.2.9 Beban Transfer

Pengakuan Beban Transfer tahun 2024 sebesar Rp65.620.961.400,00 mengalami penurunan (0,23)% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.235 Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.353.880.000,00	3.540.423.000,00	(33,51)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	362.568.500,00	725.135.000,00	(50,00)
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	8.536.791.900,00	61.508.176.400,00	(86,12)
4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	54.367.721.000,00	0,00	100,00
Jumlah		65.620.961.400,00	65.773.734.400,00	(0,23)

Terdapat perbedaan antara Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA sebagai berikut:

Beban Transfer dan Belanja Transfer	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	65.620.961.400,00	119.988.682.400,00	(54.367.721.000,00)

Selisih antara Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA sebesar Rp(54.367.721.000,00) merupakan pengurangan beban Transfer Dana Desa yang dicatat sebagai utang dan pelunasan utang pada saat disalurkan ke rekening desa sebesar Rp(54.367.721.000,00).

7.5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 sebesar Rp3.735.348.142,01 terjadi kenaikan sebesar 69,52% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.203.426.383,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.236 Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Pajak Reklame	4.363.130,00	2.441.045,00	78,74
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan-Logam dan Batuan	45.490.625,00	0,00	100,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.722.578.111,31	2.172.310.600,97	(20,70)
4	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.680.085,70	28.674.737,33	(31,37)
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	1.860.658.919,45	0,00	100,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
6	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.147.270,55	0,00	100,00
7	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	81.430.000,00	0,00	100,00
Jumlah		3.735.348.142,01	2.203.426.383,30	69,52

Terdapat perbedaan antara Beban Penyisihan Piutang LO dan LRA sebagai berikut:

	LO	LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	3.735.348.142,01	0,00	3.735.348.142,01

Selisih antara Beban Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp3.735.348.142,01, disebabkan karena Beban Penyisihan Piutang yang merupakan akun dari LO dan bukan merupakan akun LRA.

7.5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi

Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp(212.710.617.794,76) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.237 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan - LO	927.480.702.987,15	1.284.550.003.188,82	(27,80)
2	Beban	1.140.191.320.781,91	1.027.480.322.038,23	10,97
SURPLUS/DEFISIT		(212.710.617.794,76)	257.069.681.150,59	(182,74)

7.5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2024 Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(1.795.553.840,17) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.238 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	94.284.832,00	-	100,00
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	585.460,00	-	100,00
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	(67.050.666,17)	(4.566.955.057,95)	(98,53)
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(1.823.373.466,00)	(1.433.348.791,00)	27,21
Jumlah		(1.795.553.840,17)	(6.000.303.848,95)	(70,08)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp(1.795.553.840,17) mengalami penurunan sebesar (70,08)% dibanding tahun 2023 sebesar Rp(6.000.303.848,95).

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp(67.050.666,17) terjadi atas penghapusan Aset Tetap dengan kondisi rusak berat dan Pelunasan Dana Bergulir pada tahun 2024 yang dilakukan oleh KPKNL setelah dipotong biaya yang disetor ke Kas Negara.

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(1.823.373.466,00) adalah pencatatan kerugian yang terjadi atas Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar biasa per 31 Desember 2024 adalah Rp833.373.095,87. Rincian Pos Luar Biasa terdiri dari:

Tabel 7.5.239 Rincian Pos Luar Biasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pengembalian Kelebihan Penerimaan Tahun Sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>incrach</i>)	345.450.000,00
2	Perbaikan Sarana Prasarana Jalan/Jembatan Keadaan Darurat	469.612.060,87
3	Bantuan Sosial Tidak terencana-Bantuan Berobat Masyarakat Miskin	18.311.035,00
Jumlah		833.373.095,87

Terdapat perbedaan antara Beban Luar Biasa LO dan LRA sebagai berikut:

Beban Luar Biasa	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	833.373.095,87	665.131.517,00	168.241.578,87

Selisih antara Beban Luar Biasa dengan Belanja Tidak Terduga LRA senilai Rp168.241.578,87 terdiri dari :

Tabel 7.5.240 Selisih Beban Luar Biasa-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Beban Luar Biasa dari Utang Belanja	487.923.095,87
3	Jumlah Penambahan	487.923.095,87
4	Pengurangan	
5	Reklasifikasi Ke Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	319.681.517,00
6	Jumlah Pengurangan	319.681.517,00
Jumlah		168.241.578,87

7.5.4.6 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(215.342.139.720,80)	251.069.377.301,64

Defisit-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp(215.342.139.720,80) terjadi penurunan sebesar (185,77)% dibanding tahun 2023 Surplus-LO sebesar Rp251.069.377.301,64, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.241 Rincian Surplus/Defisit-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Surplus/Defisit Dari Operasi	(212.708.320.284,76)	(257.069.681.150,59)	(182,74)

2	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(1.795.553.840,17)	(6.000.303.849,00)	(70,08)
3	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	(833.373.095,87)	0,00	100,00
Jumlah		(215.337.247.220,80)	251.069.377.301,59	(185,77)

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	971.829.919.795,86	1.333.507.226.175,09
Arus Kas Keluar	954.746.656.424,02	910.215.474.417,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	17.083.263.371,84	423.291.751.757,62

Pada tahun 2024, terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp17.083.263.371,84 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp971.829.919.795,86 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp954.746.656.424,02. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.242 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	27.007.756.522,38	54.850.557.254,00
Penerimaan Retribusi Daerah	26.305.988.873,00	1.049.361.910,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.387.416.960,00	6.927.016.847,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	7.946.430.318,48	35.154.229.487,09
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	88.080.772.910,00	132.068.098.913,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	124.038.209.000,00	332.799.575.408,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	427.577.646.211,00	407.458.406.092,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	133.151.042.118,00	173.388.774.754,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.699.849.000,00	30.674.314.000,00
Penerimaan Dana Desa	54.367.721.000,00	53.850.434.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.180.184.644,00	102.965.767.156,00
Penerimaan Hibah	636.000.000,00	1.254.000.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	560.000.000,00	1.000.000.000,00
Penerimaan Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.890.902.239,00	66.690.354,00
Jumlah Arus Kas Masuk	971.829.919.795,86	1.333.507.226.175,09
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	480.835.325.471,00	418.913.978.804,00
Pembayaran Barang	308.495.704.962,37	330.784.746.050,54
Pembayaran Hibah	37.206.697.484,00	37.301.653.821,93
Pembayaran Bantuan Sosial	7.555.114.589,65	1.942.798.000,00
Pembayaran Tak Terduga	665.131.517,00	1.648.129.341,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.353.880.000,00	3.540.423.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	362.568.500,00	725.135.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	117.272.233.900,00	115.358.610.400,00
Jumlah Arus Kas Keluar	954.746.656.424,02	910.215.474.417,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	17.083.263.371,84	423.291.751.757,62

Terdapat perbedaan antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA. Selisih dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan LRA	Rp972.909.236.075,86
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	<u>Rp971.829.919.795,86</u>
Selisih	Rp1.079.316.280,00

Selisih tersebut merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin yang masuk dalam arus kas masuk aktivitas investasi sebesar Rp1.079.316.280,00.

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan Aset Tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas Arus Kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	1.079.316.280,00	0,00
Arus Kas Keluar	178.028.354.654,56	264.281.035.089,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(176.949.038.374,56)	(264.281.035.089,12)

Penurunan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(176.949.038.374,56) merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp1.079.316.280,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp178.028.354.654,56. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.243 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.079.316.280,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.079.316.280,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	1.449.980.299,18	3.027.754.385,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	54.296.918.498,52	63.225.717.778,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	36.218.407.340,13	49.095.024.269,66
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	84.811.150.755,73	147.255.543.406,46
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.117.419.129,00	1.676.995.250,00
Belanja Modal Aset Lainnya	134.478.632,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	178.028.354.654,56	264.281.035.089,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(176.949.038.374,56)	(264.281.035.089,12)

Hasil Penjualan Peralatan dan mesin sebesar Rp1.079.316.280,00 merupakan penjualan atas aset Peralatan dan Mesin rusak berat dan tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah dengan harga perolehan Rp4.905.963.850,00 melalui lelang oleh KPKNL Kepulauan Riau. Pada saat dilakukan penjualan aset tersebut mempunyai nilai buku sebesar Rp0,00.

Tidak ada perbedaan antara Belanja Modal LRA dengan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi.

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	71.270.212.664,00	78.777.385.383,00
Arus Kas Keluar	71.267.003.807,00	78.777.462.515,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	3.208.857,00	(77.132,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp3.208.857,00 Rincian aliran Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.244 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.270.212.664,00	78.777.385.383,00
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	71.270.212.664,00	78.777.385.383,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.267.003.807,00	78.777.462.515,00
Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	71.267.003.807,00	78.777.462.515,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	3.208.857,00	(77.132,00)

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.245 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Asuransi Kesehatan	0,00	18.729.617.790,00	18.729.617.790,00	0,00
2	Iuran Wajib Pegawai	0,00	13.737.144.364,00	13.737.144.364,00	0,00
3	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	371.253.343,00	371.253.343,00	0,00
4	Jaminan Kematian	0,00	1.113.758.673,00	1.113.758.673,00	0,00
5	PPN	0,00	20.052.160.747,00	20.049.895.341,00	2.265.406,00
6	PPh 21	0,00	13.764.105.233,00	13.764.075.233,00	30.000,00
7	PPh 22	0,00	967.584.610,00	967.584.610,00	0,00
8	PPh 23	0,00	202.342.629,00	201.429.178,00	913.451,00
9	PPh 4 (2)/PPh 25	0,00	2.332.245.275,00	2.332.245.275,00	0,00
	Jumlah	0,00	71.270.212.664,00	71.267.003.807,00	3.208.857,00

7.5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Kas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(159.862.566.145,72)	159.010.639.536,50

Kenaikan Kas selama periode tahun 2024 sebesar Rp(159.862.566.145,72) menunjukkan adanya Defisit realisasi APBD tahun 2024 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih kecil dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan Kenaikan Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.246 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Kas

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	17.083.263.371,84	423.291.751.757,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(176.949.038.374,56)	(264.281.035.089,12)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	3.208.857,00	(77.132,00)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(159.862.566.145,72)	159.010.639.536,50

7.5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	163.972.666.701,39	4.962.018.928,89

Saldo Awal Kas sebesar Rp163.972.666.701,39 yang merupakan jumlah saldo kas/setara kas Pemerintah Natuna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.247 Perhitungan Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Kas di BUD	160.269.238.865,20
2	Saldo Akhir Kas di BLUD	2.163.231.053,38
3	Saldo Kas Bendahara Penerimaan	54.224.500,00
4	Saldo Kas Dana BOS	134.745.509,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	253.805.728,81
6	Kas Lainnya	1.097.421.045,00
Jumlah Kas Akhir		163.972.666.701,39

Terdapat perbedaan saldo awal Kas sebesar Rp8.236,00 dengan Saldo akhir tahun 2023. Nilai tersebut merupakan selisih antara koreksi pencatatan penambahan saldo awal dana BOS SD Negeri 002 Batubi Jaya Rp52.188,00 dengan koreksi pengurangan saldo awal dana BOS SD Negeri 003 Kadur Rp40.000,00, saldo awal dana BOS SD Negeri 002 Gunung Jambat Rp980,00, dan saldo awal dana BOS SMP Negeri 1 Bunguran Batubi Rp2.972,00.

7.5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	4.110.100.555,67	163.972.658.465,39

Saldo Kas Akhir sebesar Rp4.110.100.555,67 yang merupakan jumlah saldo kas/setara kas Pemerintah Natuna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.248 Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Kas di BUD	305.302.268,40
2	Saldo Akhir Kas di BLUD	72.514.764,79
3	Saldo Kas Bendahara Penerimaan	8.640.688,00
4	Saldo Kas Dana BOS	255.712.503,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	265.175.582,81
6	Kas Dana BOK Puskesmas	3.123.707.640,00
7	Kas Lainnya	79.047.108,67
Jumlah Kas Akhir		4.110.100.555,67

Tidak terdapat selisih perbedaan antara saldo kas Laporan Arus Kas dengan Kas dan Setara Kas pada Neraca.

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang memberi informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar Rp2.963.194.325.090,44 yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023.

7.5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO sebesar Rp(215.339.544.730,80) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024.

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selisih sebesar Rp(6.739.549.488,99) merupakan koreksi-koreksi sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian disajikan dalam koreksi ekuitas lainnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.249 Daftar Koreksi Pencatatan Ekuitas Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Koreksi Atas Pencatatan Pengurangan Piutang PBBP2 Akibat Pemberian Relaksasi	373.212.125,13
3	Koreksi Atas Pencatatan Pengurangan Piutang PBBP2 Akibat Pembetulan	27.920.532,08
4	Koreksi Pencatatan Kelebihan Piutang BLUD Hasil Verifikasi BPJS Kesehatan	14.384.417,00
5	Koreksi Pencatatan Kelebihan Piutang Sewa Rumah Dinas	1.400.000,00
6	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Piutang PBB TA Sebelumnya	0,5
7	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	550.000,01
8	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.615.987.344,30
9	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan akibat adanya Aset yang direklasifikasi dari Persediaan Tahun Sebelumnya	264.531,03
10	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan akibat adanya Aset yang direklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud Tahun Sebelumnya	292.968.489,64

No	Uraian	Jumlah
11	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	7.276.000,73
12	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.900.412,86
13	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	961.618.299,53
14	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.959.700,00
15	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Tanah	17.280.000,00
16	Koreksi Saldo Kelebihan Pencatatan Saldo Penyertaan Modal Perumda Tirta Nusa	697.192.722,00
17	Koreksi Piutang PBBP2 atas Relaksasi dan Pembetulan	450.784.509,15
18	Jumlah penambahan (2 s.d 17)	7.485.699.083,96
19	Pengurangan	
20	Koreksi Pencatatan Saldo awal Persediaan Atas Karcis Retribusi Dinas Perhubungan	1.740.000,00
21	Koreksi Pencatatan Kelebihan Utang Belanja Pegawai Tahun Sebelumnya - Utang JP BLUD Hasil Verifikasi BPJS Kesehatan	37.392.668,00
22	Koreksi Pencatatan Kelebihan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Sebelumnya - Utang JP BLUD Hasil Verifikasi BPJS Kesehatan	32.820.850,00
23	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang BLUD Tahun Sebelumnya	71.922,09
24	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Piutang PBB TA Sebelumnya	34.590,86
25	Koreksi Pencatatan TGR Tahun Sebelumnya yang belum Tercatat	241.006.557,49
26	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	174.624.000,00
27	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	713.216,42
28	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	2.610.763,31
29	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,84
30	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	60.038.320,00
31	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.850.752,96
32	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.712.710,00
33	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Tanah	135.525.000,00
34	Koreksi Saldo Awal Dana BOS	8.236,00
35	Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal Tanah Bank Riau berdasarkan Hasil RUPS	20.000.000,00
36	Jumlah pengurangan (20 s.d 35)	746.149.594,97
36	Jumlah Selisih (18 - 36)	6.739.549.488,99

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Natuna untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.741.115.230.870,65.

7.6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Natuna disamping sebagai nama pulau juga sebagai nama salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Natuna. Pulau yang tergabung dalam gugusan Pulau Tujuh ini berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hongkong, Taiwan dan Jepang. Kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara tetangga ini, berada pada posisi 1016'- 7019' Lintang Utara dan 1050 00'- 110000' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bintan
- Sebelah timur : berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat
- Sebelah barat : berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan

Luasnya mencapai 141.901,20 Km² dengan rincian 138.666,0 Km² perairan (lautan) dan 3.235,20 Km² daratan. Ini berarti bahwa wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar berupa lautan. Daratannya pun bukan hanya satu pulau, tetapi berpulau-pulau yang struktur tanahnya berupa padosolik merah kuning, alluvial, organosol, dangley humus.

Kabupaten yang berada di ketinggian 3 - 959 Meter dari permukaan air laut ini ber ibu kota di Ranai. Jarak kota ini dengan kota-kota lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Tanjung Pinang (562 Km), Tanjung Balai Karimun (642 Km), Batam (589 Km), Sedanau (58 Km), Midai (139 Km), Serasan (177 Km), Tarempa (258 Km), Letung (322 Km), Tambelan (344 Km), Kijang (545 Km), Tanjung Uban (561 Km), Moro (618 Km), Tanjung Batu (654 Km), Senayang (593 Km), Dabo (954 Km), dan Daik (626 Km).

Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Natuna mencakup urusan:

1. Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
7. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Ketahanan Pangan dan Pertanian
10. Lingkungan Hidup
11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Perhubungan

14. Komunikasi dan Informatika
15. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepemudaan dan Olahraga
17. Perpustakaan dan Kearsipan
18. Pemadam Kebakaran dan Keselamatan

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna juga melaksanakan urusan pilihan dan urusan lainnya yang mencakup:

- a. Urusan Pilihan
 1. Kelautan dan Perikanan
 2. Pariwisata
 3. Perindustrian
- b. Urusan Pemerintahan
 1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
 3. Perencanaan
 4. Keuangan
 5. Kepegawaian
 6. Pengelolaan Perbatasan
 7. Inspektorat daerah
 8. Kesatuan Bangsa dan Politik
 9. Penanggulangan Bencana
- c. Urusan Kewilayahan
 1. Kecamatan

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Natuna dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna adalah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Pemuda dan Olahraga
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Perikanan
21. Dinas Pariwisata
22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
29. Inspektorat Daerah
30. Kecamatan Bunguran Timur
31. Kecamatan Bunguran Barat
32. Kecamatan Bunguran Utara
33. Kecamatan Pulau Laut
34. Kecamatan Midai
35. Kecamatan Serasan
36. Kecamatan Subi
37. Kecamatan Pulau Tiga
38. Kecamatan Bunguran Tengah
39. Kecamatan Bunguran Timur Laut
40. Kecamatan Bunguran Selatan
41. Kecamatan Serasan Timur
42. Kecamatan Suak Midai
43. Kecamatan Bunguran Batubi
44. Kecamatan Pulau Tiga Barat
45. Kecamatan Pulau Panjang
46. Kecamatan Pulau Seluan
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdapat tambahan pengakuan realisasi pada penyajian beberapa pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024 yang pendapatannya tidak diterima melalui Kasda dan langsung digunakan langsung oleh entitas yang tidak bertindak sebagai BLUD. yaitu:

- a. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana BOK Puskesmas (Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas)
- c. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) yang terdiri dari:
 1. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat SD dan SMP
 2. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOP PAUD (Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini)
 3. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan (Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan)

- a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jumlah Pendapatan/Dana Kapitasi JKN Tahun 2024 dari 15 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Natuna sebesar Rp6.890.902.239,00 dan sudah dikeluarkan/digunakan sebesar Rp6.856.095.999,00 sehingga sisa dana JKN sebesar Rp265.175.582,81 dicatat Kas Dana kapitasi JKN dan diungkapkan secara memadai pada penjelasan pada catatan atas laporan keuangan ini.

Tabel 7.6.1 Daftar Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP	Saldo awal	Pendapatan	Total Belanja	Saldo Akhir 2024
1	Puskesmas Ranai	32.100.992,00	1.868.299.885,00	1.900.398.531,00	2.346,00
2	Puskesmas Bunguran Timur Laut	11.761.945,00	405.800.829,00	350.407.124,00	67.155.650,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	5811325	354.106.358,00	356.637.196,00	3.280.487,00
4	Puskesmas Bunguran Selatan	4.144.364,00	271.990.906,00	262.239.507,00	13.895.763,00
5	Puskesmas Kelarik	17.413.193,00	443.532.007,00	439.965.527,00	20.979.673,00
6	Puskesmas Sedanau	72.202.815,57	680.937.814,00	714.638.235,00	38.502.394,57
7	Puskesmas Pulau Tiga	57.276.752,00	385.667.948,00	393.924.384,00	49.020.316,00
8	Puskesmas Pulau Laut	1015089	253.981.120,00	254.303.021,00	693.188,00
9	Puskesmas Midai	14.306.058,00	540.290.657,00	510.443.106,00	44.153.609,00
10	Puskesmas Serasan	4.223.440,03	588.170.260,00	592.382.975,00	10.725,03
11	Puskesmas Serasan Timur	948.985,00	365.254.215,00	359.446.227,00	6.756.973,00
12	Puskesmas Subi	3.098.037,00	330.503.163,00	329.752.671,00	3.848.529,00
13	Puskesmas Batubi Jaya	23.743.093,21	251.159.889,00	258.137.890,00	16.765.092,21
14	Puskesmas Pulau Tiga Barat	5.759.640,00	127.696.536,00	133.419.605,00	36.571,00
15	Puskesmas Suak Midai	0,00	23.510.652,00	23.436.386,00	74.266,00
Total		253.805.728,81	6.890.902.239,00	6.856.095.999,00	265.175.582,81

- b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

BOK Puskesmas merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang Kesehatan. Total Realisasi Pendapatan dan Belanja BOK Kesehatan per Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 7.6.2 Daftar Pendapatan dan Belanja BOK Puskesmas

(dalam Rupiah)

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal	Total Penerimaan	Realisasi	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Puskesmas Batubi Jaya	53.697.796,00	595.126.204,00	411.099.341,00	237.724.659,00
2	Puskesmas Bunguran Selatan	114.769.199,00	483.579.801,00	447.057.715,00	151.291.285,00
3	Puskesmas Bunguran Tengah	156.513.066,00	395.259.934,00	390.789.948,00	160.983.052,00
4	Puskesmas Kelarik	222.919.883,00	340.781.017,00	241.588.821,00	322.112.079,00
5	Puskesmas Midai	72.893.736,00	513.701.264,00	293.484.126,00	293.110.874,00
6	Puskesmas Pulau Laut	276.844,00	461.240.156,00	295.899.476,00	165.617.524,00
7	Puskesmas Pulau Tiga	87.305.025,00	364.578.975,00	232.055.237,00	219.828.763,00

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal	Total Penerimaan	Realisasi	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
	Barat				
8	Puskesmas Pulau Tiga	43.223.062,00	549.556.938,00	410.146.567,00	182.633.433,00
9	Puskesmas Ranai	74.257.114,00	1.576.901.886,00	1.270.898.888,00	380.260.112,00
10	Puskesmas Sedanau	136.004.230,00	478.515.270,00	402.647.211,00	211.872.289,00
11	Puskesmas Serasan	69.802.174,00	719.302.826,00	469.803.735,00	319.301.265,00
12	Puskesmas Serasan Timur	110.613,00	609.069.387,00	391.541.490,00	217.638.510,00
13	Puskesmas Subi	62.084.328,00	554.979.672,00	454.528.298,00	162.535.702,00
14	Puskesmas Tanjung	8.261,00	744.346.739,00	645.556.907,00	98.798.093,00
Total		1.093.865.331,00	8.386.940.069,00	6.357.097.760,00	3.123.707.640,00

c. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Urusan Pendidikan menengah beralih dari Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, maka untuk Pendapatan dan Belanja BOS Tingkat SLTA sederajat tidak disajikan dan diungkapkan. Yang disajikan dan diungkapkan hanya untuk urusan pendidikan Dasar. Untuk Dana BOSP mengikuti Pendapatan dan Belanja yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024. Untuk pendapatan dicatat pada kode rekening Pendapatan Dana BOSP, sedangkan untuk belanja dicatat pada belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS dan belanja modal BOS, dan belanja lainnya yang relevan.

Total Dana BOSP yang diterima oleh Satuan Pendidikan se-Kabupaten Natuna sebesar Rp18.448.352.900,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp18.330.941.620,00. sehingga Saldo kas Dana BOSP Per 31 Desember 2024 Rp255.712.503,00 disajikan dalam kas dana BOS. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.6.3 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BOSP

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi dari Kas Lainnya	Koreksi Saldo Awal		Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo 31 Desember 2024
				Penambahan	Pengurangan			
1	Dana BOS SD & SMP	134.737.273,00	0,00	52.188,00	43.952,00	15.873.441.810,00	15.761.456.848,00	246.730.471,00
2	Dana BOP PAUD	0,00	3.555.714,00	0,00	0,00	2.264.801.090,00	2.259.674.772,00	8.682.032,00
3	Dana BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	310.110.000,00	309.810.000,00	300.000,00
JUMLAH		134.737.273,00	3.555.714,00	52.188,00	43.952,00	18.448.352.900,00	18.330.941.620,00	255.712.503,00

1. Dana BOS Tingkat SD & SMP

Total Dana BOS Tingkat SD & SMP yang diterima oleh Satuan Pendidikan se-Kabupaten Natuna sebesar Rp15.873.441.810,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp15.762.076.848,00. sehingga Saldo kas Dana BOSP Per 31 Desember 2024 Rp246.110.471,00 disajikan dalam kas dana BOSP. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOS Tingkat SD & SMP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.6.4 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Tingkat SD dan SMP

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal		Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo akhir
			Penambahan	Pengurangan			
1	Dana BOS SD	29.032.235,00	52.188,00	40.980,00	10.432.411.800,00	10.362.195.489,00	99.259.754,00
2	Dana BOS SMP	105.705.038,00	0,00	2972	4.492.897.934,00	4.451.749.283,00	146.850.717,00
3	SD/SMP Swasta	0,00	0,00	0,00	948.132.076,00	948.132.076,00	0,00
Jumlah		134.737.273,00	52.188,00	43.952,00	15.873.441.810,00	15.762.076.848,00	246.110.471,00

2. Dana BOP PAUD

Total Dana BOP PAUD yang diterima oleh Satuan Pendidikan se-Kabupaten Natuna sebesar Rp2.264.801.090,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp2.259.674.772,00. sehingga Saldo kas Dana BOP PAUD Per 31 Desember 2024 Rp8.682.032,00 disajikan dalam kas dana BOSP. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOP PAUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.6.5 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BOP PAUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo akhir
1	Dana BOP PAUD Negeri	3.555.714,00	894.364.400,00	889.238.082,00	8.682.032,00
2	Dana BOP PAUD Swasta	0,00	1.370.436.690,00	1.370.436.690,00	0,00
Jumlah		3.555.714,00	2.264.801.090,00	2.259.674.772,00	8.682.032,00

3. Dana BOP Kesetaraan

Total Dana BOP Kesetaraan yang diterima oleh Satuan Pendidikan se-Kabupaten Natuna sebesar Rp310.110.000,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp309.810.000,00. sehingga Saldo kas Dana BOP kesetaraan Per 31 Desember 2024 Rp300.000,00 disajikan dalam kas dana BOSP. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOP Kesetaraan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.6.6 Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BOP Kesetaraan

(dalam Rupiah)

NO	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Per 31 Desember 2024
1	SKB NATUNA (Tahap 1)	P9970341	Bunguran Timur	0,00	310.110.000,00	309.810.000,00	300.000,00

7.7 Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini atau pun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan keuangan masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangan, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2024 secara umum telah memenuhi target dan sasaran.

Kami berharap dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran selalu kami harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Natuna yang lebih baik.



BUPATI NATUNA
CEN SUI LAN